

ILMU & APLIKASI PENDIDIKAN

BAGIAN 4 PENDIDIKAN LINTAS BIDANG

**Tim Pengembang Ilmu Pendidikan
FIP – UPI**

ILMU DAN APLIKASI PENDIDIKAN

Handbook

Terbitan pertama, cetakan kedua tahun 2007



PT. IMPERIAL BHAKTI UTAMA

ISBN : 978-979-16173-0-7

Telepon : 022-6074612

Fax : 022-6031455

Hak penerbitan ada pada PT. IMTIMA

Tidak diperkenankan menjiplak atau memperbanyak sebagian atau seluruhnya dari isi buku ini dalam bentuk dan cara apapun tanpa seijin tertulis dari penerbit/penyunting

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

1. PENDIDIKAN DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Soedijarto

ABSTRAK

Gerakan pendidikan Nasional yang bertujuan untuk pembangunan negara bangsa di Indonesia hendaknya mengacu kepada "Satu Sistem Pengajaran Nasional" sesuai dengan yang ada dalam pasal 31 dan 32 UUD 1945 yang isinya merupakan hasil refleksi yang mendalam dari para pendiri Republik Indonesia. Wujud pelaksanaan pendidikan nasional yang kini berlangsung, memiliki peranan "crucial" dalam pembangunan masyarakat Indonesia. Namun ternyata, sistem pendidikan nasional yang telah diciptakan oleh para pendiri Republik Indonesia (yang tertuang dalam pasal 31 dan 32 UUD 1945) belum diterjemahkan secara baik dalam UU Sisdiknas no 20 tahun 2003. Sebaiknya perlu pengkajian ulang terutama dengan memperhatikan amandemen ke-IV UUD 1945 oleh MPR-RI yang telah menambahkan tiga ayat kedalam pasal 31 UUD 1945 tersebut. Untuk terselenggaranya pendidikan nasional yang bermutu sesuai dengan visi dan misi pendidikan dalam mengelola pendidikan nasional, perlu memahami amanat dari yang tertulis dan yang terkandung dalam pasal 31 dan pasal 32 UUD 1945. Kesemuanya diawalkan agar Bangsa Indonesia mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan heterogenitas dan disparitas baik dalam budaya, kondisi geografis dan tingkat perkembangan peradaban yang tertuang dalam motto "Bhineka Tunggal Ika"

Pendahuluan

Kalau sistem persekolahan muncul sebagai konsekuensi dari proses industrialisasi dan urbanisasi yang menjadikan pendidikan persekolahan (*school education*) sebagai tiang pembangunan negara peradaban (*civilizational state*), maka pendidikan nasional merupakan suatu gerakan pendidikan yang mengiringi gerakan negara kebangsaan di Eropa, terutama di Jerman (Perhatikan pandangan Yehudi Cohen dalam "*Schools and Civilizational State*", dalam buku *The Social Sciences and The Comparative Study of The Educational Systems* (Fischer Edit), hal 196). Hal ini dikemukakan oleh John Dewey (1964, halaman 93) yang menyatakan:

"under the influence of German thought in particular, education become a civic function and the civic function was identified with the realization of the ideal of the national state."

Selanjutnya Dewey untuk memperjelas alasan mengapa Jerman menempuh kebijakan ini, dia menyatakan :

"The historic situation to which reference is made in the after effects of the Napoleonic conquests especially in Germany, the German states felt (and

subsequent events demonstrate the correctness of the belief) that systematic attention to education was the best means of recovering and maintaining their political integrity and power”.

Sengaja dikutip pengamatan Dewey tentang gerakan pendidikan nasional dalam kaitannya dengan pembangunan negara bangsa (*Nation State*), karena dalam perenungan analitik penulis, digariskannya ketentuan dalam UUD 1945 tentang perlu diselenggarakannya “satu sistem pengajaran nasional” dan “dimajukannya kebudayaan nasional Indonesia” serta tujuan “mencerdaskan kehidupan bangsa” hakekatnya merupakan hasil refleksi yang mendalam dari para pendiri Republik tentang nasib bangsanya dan diilhami oleh gerakan negara kebangsaan yang didukung oleh sistem pendidikan nasional yang berlangsung di Eropa. Tidak lain karena dalam pengamatan perbandingan sejarah, penulis menemukan kesejajaran antara latar belakang sejarah gerakan negara bangsa (*Nation State Movement*) di Eropa dan latar belakang sejarah yang mengilhami para pendiri Republik melakukan gerakan membangun negara bangsa sejak permulaan abad ke-20.

Kiranya perlu dicatat bahwa sampai akhir abad ke-16 Eropa yang terdiri dari kerajaan-kerajaan kecil merupakan wilayah jajahan baik oleh Imperium Islam sampai Cordoba, Otoman Turki sampai Wina, dan Imperium Mongol (Kennedy, 1987). Halnya sama dengan Indonesia yang setelah runtuhnya Majapahit menjadi kerajaan-kerajaan kecil di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali dan Nusa Tenggara, maupun Irian yang merupakan bagian dari Tidore, satu-per-satu dikalahkan dan dikuasai oleh pedagang dari Eropa (Belanda, Inggris dan Portugis). Karena itu para pendiri Republik yang memandang Indonesia sebagai pewaris Imperium Sriwijaya dan Majapahit yakin seperti yakinnya Otto von Bismark (Jerman), Garibaldi (Italia), Napoleon (Perancis), dan King Arthur (Inggris) bahwa dengan disatukannya berbagai kerajaan kecil menjadi satu negara bangsa, Indonesia (Jerman, Italia, Perancis, Inggris) akan menjadi satu negara bangsa yang kokoh yang sukar dikuasai oleh kekuatan asing.

Pertanyaannya adalah (1) “masih relevankah konsep negara bangsa yang pembangunannya memerlukan satu sistem pendidikan nasional di era global abad ke-21 ini ?” kalau masih relevan, pertanyaan ke - (2) adalah “bagaimana wujud rancang bangun sistem pendidikan nasional yang relevan dengan kepentingan membangun negara bangsa yang modern di era globalisasi ini ?” dan pertanyaan ketiga adalah “bagaimanakah implikasi dari penyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional yang relevan terhadap manajemen, pembiayaan, strategi pembelajaran dan persyaratannya baik kurikulum, sarana prasarana, ketenagaan, proses pembelajaran, dan sistem evaluasi dan promosi yang harus dirancang dan dilaksanakan ?”

Berangkat dari pemahaman terhadap latar belakang sejarah dari ditetapkannya dalam UUD 1945 perlunya diselenggarakan satu sistem pendidikan nasional, serta dimajukannya kebudayaan nasional Indonesia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, tulisan tentang Pendidikan Nasional dan Sistem Pendidikan Nasional ini akan

membahas dan menganalisis tiga masalah utama yaitu : (1) makna pendidikan nasional dan pembangunan negara bangsa di era globalisasi; (2) wujud pelaksanaan pendidikan nasional yang selama ini berlangsung dan kaitannya dengan Proses Pembangunan Negara Bangsa; dan (3) mewujudkan terselenggaranya sistem pendidikan yang relevan dengan fungsi konstitusional SISDIKNAS; dan (4) catatan penutup

Makna Pendidikan Nasional Di Era Globalisasi

Di era globalisasi ini yang di negara maju masyarakatnya sudah memasuki era pasca moderen, ditanah air Indonesia ini ada kesan diabaikannya “pendidikan nasional” dan konsep negara kebangsaan. Padahal negara-negara yang sekarang termasuk dalam jajaran negara maju seperti Amerika Serikat, Britania Raya, Perancis, Jerman, dan Jepang adalah negara maju yang kemajuannya didukung oleh sistem pendidikan nasional untuk membangun negara bangsa mereka masing-masing. Tingkah laku dan sikap politik Amerika Serikat yang melakukan berbagai ekspansi politik dan ideologi, hakekatnya merupakan perpanjangan dari persepsi dirinya sebagai negara bangsa dan peranannya dalam percaturan dunia (dalam bahasa Pembukaan UUD 1945 ikut serta menciptakan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, keadilan sosial, dan perdamaian abadi). Sikap Jerman dan Perancis yang hampir selalu berbeda dengan Amerika Serikat hakekatnya tumbuh dari persepsinya terhadap dirinya sebagai negara bangsa. Demikian juga Jepang, Rusia, dan China.

Gerakan nasionalisme etnis yang memporak-porandakan negara Balkan (Yugoslavia) dan negara-negara Asia Tengah dari Uni Soviet tidak melunturkan semangat negara bangsa yang tumbuh sejak akhir abad ke-18 untuk memperkuat jati dirinya sebagai negara bangsa. Dan mereka tetap kokoh karena didukung oleh pendidikan nasional masing-masing yang melahirkan warga negara yang bangga dengan identitasnya sebagai warga negara bangsanya. Konsensus nasional seluruh kekuatan politik di masing-masing negara tidak dapat digoyahkan. Jarang kita membaca dan mendengar ada LSM di Amerika Serikat yang ikut mengajukan pemerintah negaranya ke lembaga internasional karena pelanggaran HAM seperti yang terjadi dalam perang Irak dan Afghanistan. Betapa bersatunya bangsa Italia karena seorang warga negaranya tertembak dalam penyelamatan sandra di Irak. Hal ini tidak terjadi dengan LSM di Indonesia pada saat wartawan/wartawati TV Metro disandera di Irak; yang bertindak adalah lembaga resmi Pemerintah dan tokoh-tokoh nasional. Tetapi sebaliknya LSM kita menjadi pejuang kemanusiaan internasional untuk mengusut berbagai pelanggaran HAM seperti di Timor Timur pasca jajak pendapat yang hakekatnya dapat mencoreng wajah bangsa. Tetapi sebaliknya tidak ada LSM yang merasa tersinggung dengan gejolak pelanggaran perbatasan wilayah negara oleh Malaysia atau tindakan sewenang-wenang tentara Australia terhadap nelayan bangsanya sendiri.

Ilustrasi diatas menunjukkan betapa pemahaman tentang Indonesia sebagai negara bangsa, seperti Jerman, Perancis, Italia, Amerika Serikat, dan Jepang, serta China maupun India belum sepenuhnya dipahami, dan konsekuensinya adalah diabaikannya pendidikan nasional sebagai soko guru pembangunan negara bangsa. Di Indonesia, dalam masyarakat

pendidikan muncul rasa rendah diri masyarakat bangsa Indonesia (mungkin mental *Inlander*). Hal ini dapat ditarik dari kenyataan dari munculnya istilah “pendidikan bertaraf internasional”, “sekolah nasional plus” dan seterusnya. Istilah-istilah tadi menunjukkan betapa tidak dipahaminya makna pendidikan nasional. Bahkan dalam Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional-pun disamping ada ketentuan yang menetapkan perlunya ada standar nasional pendidikan, pada saat yang sama ada ketentuan agar “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional”

Diakui bahwa semua negara bangsa yang kini dominan dalam percaturan global, baik ekonomi, politik, dan IPTEK, sampai sekarang masih tetap berusaha agar pendidikan nasionalnya tidak kalah dalam hal mutu dari pendidikan negara lain. Berbagai pembaharuan yang dilakukan oleh berbagai negara nasional seperti Amerika Serikat bukanlah untuk menjadi bertaraf internasional melainkan menjadikan pendidikan nasional yang mutunya dapat bersaing dengan pendidikan negara lain baik Inggris, Jerman, Perancis, Jepang ataupun Belanda.

Peristiwa ketertinggalan Amerika Serikat dalam teknologi ruang angkasa (Sputnik) pada tahun 1957 yang menjadi pemicu pembaharuan pendidikan di Amerika Serikat, tidak pernah ada istilah menjadikan pendidikan di Amerika Serikat bertaraf internasional. Tetapi hasilnya menjadikan pendidikan Amerika Serikat mampu mendukung percepatan kemajuan Amerika Serikat disegala bidang kehidupan sehingga kini menjadi satu-satunya negara super power baik politik, ekonomi, kekuatan Angkatan Bersenjata, dan IPTEK. Dengan kata lain setiap negara diabad ke-21 ini masih tetap perlu menyelenggarakan pendidikan nasional yang relevan dengan tuntutan pembangunan negara nasional.

Di era globalisasi ini percaturan dunia dalam segala bidang, ekonomi, politik, IPTEK, didominasi oleh negara yang maju dalam segala bidangnya. Baik dalam kaitannya dengan World Trade Union (WTO), atau PBB segala keputusan yang hasilnya mempengaruhi hubungan antar negara dipengaruhi oleh negara-negara nasional yang unggul dalam segala bidang kehidupan dan itu dipengaruhi oleh sistem pendidikan nasional. Dalam kaitan dengan masih tetap pentingnya negara nasional, Anthony D. Smith (1998, halaman 4) dari London School of Economics menyatakan :

“In this unprecedented situation, nations and nationalism are necessary, if impalatable, instruments for controlling the destructive effect of massive social change; they provide the only large-scale and powerful communities and belief system that can secure a minimum social cohesion, order, and meaning in a disruptive and alienating world. More over, they are the only popular forces that can legitimate and make sense of the activities of the most powerful modern agent of social transformations, the rational state. For this reason, nations and nationalism are unlikely to disappear, at least until all areas of the globe have made the painful transition to an affluent and stable modernity.

Pandangan yang diungkapkan Smith diatas, yang sengaja saya kutip secara ekstensif, menunjukkan salah satu argumen tentang masih pentingnya negara nasional, dan dikatakan paling tidak sampai tercapai kemakmuran dan modernisasi yang mantap serta merata secara global. Dipandang dari tingkat kemakmuran masyarakat bangsa Indonesia dan pemerataannya, dan tingkat kemantapan masyarakat Indonesia yang modern yang rasional, yang berorientasi IPTEK, yang berbudaya demokrasi, dan menjunjung tinggi HAM yang masih jauh dari tingkatan yang sepadan dengan kemakmuran dan kemantapan masyarakat moderen yang demokratis. Bahkan kita masih berada pada tahap transisi yang memerlukan transformasi budaya, pentingnya membangun negara nasional yang didukung oleh terselenggaranya satu sistem pendidikan nasional yang relevan, efisien dan efektif tidak dapat ditolak.

Wujud Pelaksanaan Pendidikan Nasional Yang Sekarang Berlangsung Dan Kaitannya Dengan Proses Pembangunan Negara Bangsa

Pada bagian pertama, tulisan ini telah mencoba secara garis besar menganalisis pentingnya peranan pendidikan nasional pada berbagai negara yang kini menjadi negara maju seperti Jerman, Amerika Serikat, dan Jepang dalam pembangunan negara bangsa. Nampaknya mereka, yang menurut hemat saya diikuti oleh para pendiri Republik, diilhami oleh Plato empat abad sebelum Masehi, yang memandang pentingnya pendidikan yang memegang peranan sentral dalam masyarakat, seperti yang dinyatakan dalam "The Republic", menurut tafsir Braumbaugh dan Lawrence (1963, halaman 38) menyatakan :

"since education plays such a central part in society and since it is through education alone that individual ability and social function can be made coincide, society should establish free public schools".

Selanjutnya Braumbaugh dan Lawrence (1963, halaman 38) menambahkan tafsirnya terhadap pandangan Plato dalam kalimat berikut :

"Second, the director of education must be one of the most chosen and respected officer of the state in the "Republic", the two tasks of the most talented and educated guardian class are legislation and education; the teacher and the legislator are the twin gaurdians of society".

Penulis yakin bahwa pendiri Republik, terutama Bung Hatta (Salah seorang pendiri bangsa yang sangat menguasai filsafat Yunani, termasuk Plato) pasti sangat memahami pandangan Plato yang dikutip Braumnbaugh yang mendudukan guru dan anggota parlemen haruslah orang yang paling berbakat dan paling berpendidikan. Karena itu pendiri Republik menetapkan pasal 31 ayat (1) dan (2) dan pasal 32 UUD 1945. Plato selanjutnya menyatakan hanya dua jenis jabatan tersebut yang utamanya memerlukan pendidikan universitas yaitu guru dan anggauta parlemen. Dikaitkan dengan pandangan yang mendasar ini kita menyaksikan dalam sejarah pendidikan Indonesia pada era para pendiri Republik masih duduk dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, pemerintah menyediakan ikatan dinas dan asrama bagi calon guru agar lulusan sekolah menengah

terbaik tertarik masuk pendidikan guru dan berbagai insentif diberikan kepada para dosen agar lulusan terbaik Universitas bersedia menjadi dosen. Dan kita menyaksikan betapa lulusan terbaik dari Universitas Indonesia, ITB, UGM sampai dengan permulaan tahun 1960-an hampir semuanya bertahan dialmamaternya menjadi dosen selanjutnya Guru Besar. Pada era itu juga kita menyaksikan betapa tokoh-tokoh nasional seperti Ki Hajar Dewantoro, Ali Sastroamijoyo, dan Muh. Yamin ditunjuk menjadi Menteri Pendidikan. Dan betapa untuk menjadi Rektor Universitas pada saat itu diangkat dari para tokoh nasional yang pernah menjadi Menteri seperti Prof. Iwa Kusuma Sumantri (UNPAD), Prof. Yohanes (UGM), Prof. Arnold Mononutu (UNHAS), Prof. Sunarjo (UNDIP). Di Amerika Serikat untuk menjadi Guru dipilih diantara 20 % terbaik lulusan SMA yang selanjutnya mengikuti pendidikan Universitas untuk menjadi guru yang profesional, dan untuk menjadi pengajar Universitas adalah lulusan program Doktor yang terbaik.

Sesungguhnya fenomena sejarah dalam pendidikan Indonesia dan praktek yang dilaksanakan dinegara-negara maju menunjukkan betapa esensialnya penyelenggaraan pendidikan nasional bagi kepentingan pembangunan negara bangsa.

Pertanyaan inti yang menjadi fokus bagian ini adalah bagaimana wujud pelaksanaan pendidikan nasional yang kini berlangsung, yang dalam bahasa Plato memiliki peranan “crucial” dalam pembangunan masyarakat suatu bangsa.

Kalau Plato pada empat abad sebelum Masehi memilah peranan setiap jenjang pendidikan seperti pendidikan tingkat Universitas terutama untuk guru dan anggota parlemen, dan sekolah menengah untuk persiapan calon tentara dan pegawai negeri, sesungguhnya dimensi ini, yaitu penetapan fungsi masing-masing jenjang pendidikan inilah yang dalam pengamatan saya merupakan salah satu dimensi yang membedakan sistem pendidikan suatu negara dari negara lain, di samping penggunaan bahasa nasional sebagai bahasa pengantar. Hal ini didasarkan atas pengamatan penulis bahwa yang membedakan sistem pendidikan Jerman, dari sistem pendidikan Amerika Serikat, dan Amerika Serikat dari Jerman dengan Inggris, dan selanjutnya dengan Singapura, bukanlah terutama pada apa yang diajarkan disekolah melainkan pada struktur penjenjangan pendidikan dan fungsi masing-masing jenjang pendidikan. Karena itu kita menyaksikan di seluruh dunia peserta didik dari SD sampai Sekolah Menengah pasti dituntut untuk mempelajari Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu-ilmu Sosial, disamping bahasa baik bahasa Nasional maupun bahasa asing. Yang berbeda adalah apa dari cabang-cabang ilmu pengetahuan itu yang diajarkan, kapan mulai diajarkan, dan untuk apa diajarkan, disamping bagaimana mengajarkannya. Tidak lain karena cabang-cabang ilmu pengetahuan itu yang sejak dunia memasuki industrialisasi menjadi nilai bersama “*common values*” dalam membangun peradaban dunia yang berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kenyataan sejarah menunjukkan walaupun berbagai bahan pelajaran yang bersumber pada berbagai cabang ilmu pengetahuan yang sifatnya universal, baik matematika, ilmu pengetahuan alam, maupun ilmu pengetahuan sosial, dan ilmu bahasa diajarkan pada semua sekolah didunia, tetapi mengapa dampak pendidikan terhadap kemajuan suatu bangsa berbeda satu dari yang lainnya. Jawabannya menurut pandangan saya terletak pada karakteristik sistem

pendidikan suatu negara yang tercermin pada struktur penjenjangan dan fungsi setiap jenjang, manajemen pendidikan dan peranan sekolah dalam suatu masyarakat negara bangsa.

Dalam hal struktur penjenjangan hampir seluruh negara didunia mengenal tiga penggal pendidikan. Nampaknya mengikuti pola pikiran Plato empat abad sebelum Masehi, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Indonesiapun sejak proklamasi kemerdekaan terutama sejak tahun 1950 pada saat pemerintah negara Republik Indonesia dapat mengatur pendidikan untuk seluruh wilayah Indonesia, mengenal pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Sebelum tahun 1989 yang dimaksud dengan pendidikan dasar adalah sekolah dasar (6 tahun), sedangkan pendidikan menengah meliputi Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan berbagai Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Kejuruan, Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Kejuruan, dan Pendidikan Tinggi, yang meliputi Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, dan Akademi. Dengan diundangkannya Undang-undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan perencanaan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, pendidikan dasar, meliputi sekolah dasar 6 tahun dan sekolah lanjutan tingkat pertama sedangkan pendidikan menengah disebut Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Ini berarti bahwa SLTP bukan lagi bagian dari pendidikan menengah, tetapi hanya kelanjutan dari pendidikan pada sekolah dasar. Tentang hal ini UU No 20 Tahun 2003 walaupun memiliki pengertian yang sama dengan pengertian yang terdapat dalam UU No. 2 tahun 1989 , tetapi yang menarik untuk dipertanyakan adalah mengapa nama Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama kembali disebut Sekolah Menengah Pertama (SMP), padahal jenjang pendidikan ini bukan bagian dari pendidikan menengah, melainkan bagian dari pendidikan dasar dan hanya merupakan kelanjutan dari sekolah dasar.

Pertanyaan selanjutnya adalah “mengapa hampir seluruh negara di dunia mengenal sistem persekolahan dengan menganut tiga jenjang, yaitu pendidikan dasar, menengah, dan tinggi?” Apakah karena pertimbangan karakteristik perkembangan peserta didik? Ataupun merupakan cermin struktur kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan peranan sosial, budaya, ekonomi, dan civic warga negara?

Nampaknya dua jawaban atas pertanyaan pertama semuanya benar. Yaitu sejak Plato yang secara teoretik filosofis merancang dan melaksanakan penjenjangan yang dilaksanakan di “*academianya*” maupun Comenius diabad ke-18 yang menetapkan pentahapan perkembangan manusia dan penjenjangan pendidikan dan didukung oleh para psikolog perkembangan lainnya diabad berikutnya. Dan sampai memasuki abad ke-21 belum ada yang berpendapat lain.

Dalam kaitannya dengan tugas-tugas dan peranan setiap orang dalam masyarakat, nampaknya penjenjangan ini masih relevan. Tidak lain karena dalam masyarakat, kita mengenal : (1) di sektor kehidupan ekonomi dan ketenagakerjaan kita mengenal peranan, jabatan, dan pekerjaan yang secara hirarkis berjenjang : ada jenis-jenis pekerjaan atau peran memerlukan kemampuan profesional dan intelektual yang tinggi seperti dokter, lawyer, guru, dan manajer. Selanjutnya ada pekerjaan-pekerjaan untuk mendukung tugas

kaum profesional seperti semi profesional dan staf pimpinan, disamping pekerjaan-pekerjaan para pelaksana; (2) di wilayah politik kita mengenal para pengambil keputusan pada berbagai tingkatan; para pengembang program; dan para pelaksana serta anggota masyarakat yang memberi dukungan dan masukan; (3) dalam sektor IPTEK kita mengenal ilmuwan peneliti dan pengembang, teknolog yang inventif dan inovatif, dan ilmuwan serta teknolog pendukung; (4) dalam sektor budaya kita mengenal kreator, improvitator, aktor, dan seniman pendukung; dan (5) dalam kehidupan agama kita mengenal ulama dan umaroh.

Dalam kaitannya dengan karakteristik manusia sebagai peserta didik dan anggota masyarakat dewasa, kita mengenal individu manusia yang satu berbeda dari yang lain dalam hal kemampuan dasar, minat dan bakatnya.

Dari dua dimensi yang mempengaruhi perencanaan, pengaturan, dan pelaksanaan pendidikan nasional muncul perbedaan sistem pendidikan nasional suatu negara dari negara lain yang nampaknya berangkat dari perbedaan persepsi tentang bagaimana membangun masyarakat dan bagaimana menyiapkan generasi muda suatu bangsa supaya dapat menjadi anggota masyarakat suatu bangsa yang memiliki rasa percaya diri, produktif, dan konstruktif sesuai dengan kemampuan dan bakatnya sehingga mampu membangun masyarakatnya secara berkesinambungan.

Dari perbedaan dalam dimensi tersebutlah kita dapat memperkirakan mengapa sistem pendidikan di Jerman mulai memilih peserta didik yang berpotensi mampu menjadi mahasiswa sejak memasuki kelas 5 SD dan mengapa di Inggris tidak semua lulusan SMP dapat diterima di *GRAMMAR SCHOOL* sebagai persiapan untuk memasuki universitas, dan mengapa di Amerika Serikat hanya anak *High School* yang memenuhi syarat untuk mengambil dan lulus dalam mata pelajaran Calculus, Geometri, Fisika, dan Bahasa Asing yang dapat diterima menjadi mahasiswa Universitas. Nampaknya negara-negara tersebut, termasuk negeri Belanda yang memiliki sekolah menengah khusus untuk persiapan ke Universitas (VHO) menjadikan pendidikan sekolah sebagai wahana untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai dengan bakat dan kemampuannya dan mengarahkannya sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Sesungguhnya Indonesia secara hukum seharusnya telah melaksanakan fungsi sekolah sebagai yang dianut oleh berbagai negara karena baik UU No 2 tahun 1989 tentang Sisdiknas maupun UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas telah memberikan landasan yang kuat seperti yang tertulis pada pasal 13 ayat (1) berikut UU No.2 Tahun 1989 :

“(1) pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan ketrampilan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah”.

Ini berarti bahwa tidak semua anak yang telah menyelesaikan pendidikan SLTP dapat melanjutkan ke pendidikan menengah. Dengan semangat yang sejajar dengan itu, UU No. 20 tahun 2003 menetapkan ketentuan berikut (pasal 12 ayat (1)

“setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya”; (garis bawah oleh penulis)

Ini berarti pula bahwa memberikan kesempatan kepada peserta didik yang tidak memiliki kemampuan dasar kognitif yang memadai untuk mengikuti pendidikan yang syarat matematikanya tinggi (SMA) hakekatnya bertentangan dengan ketentuan ini. Sesungguhnya pada abad ke-18 Thomas Jefferson sudah mengingatkannya dalam kalimat

“There is nothing more unequal than equal treatment of unequal people”^{*)}

Pertanyaannya adalah seberapa jauh pelaksanaan sistem pendidikan nasional kita telah memperhatikan prinsip-prinsip dasar tersebut? Sejak pergerakan kemerdekaan para pemimpin pergerakan melalui gerakan pendidikan nasional telah menekankan perlunya dilaksanakan pendidikan yang mengabdikan kepada kepentingan nasional sebagai lawan dari pendidikan yang diarahkan untuk mengabdikan kepada kepentingan kaum penjajah. Pertanyaan selanjutnya adalah “sudahkah sistem pendidikan nasional dirancang untuk diabdikan kepada kepentingan nasional?” Pertanyaan ini dapat diteruskan dengan pertanyaan berikutnya lagi yaitu “apa yang dimaksud dengan kepentingan nasional?”

Nampaknya secara umum para penyelenggara negara sejak proklamasi sampai sekarang telah sepakat bahwa pendidikan nasional diabdikan kepada kepentingan nasional. Karena itu sejak UU No.4 tahun 1950 jo UU No. 12 tahun 1954 tentang sistem pendidikan sampai UU No. 2 tahun 1989 dan UU No. 20 tahun 2003, selalu terdapat rumusan tentang tujuan pendidikan nasional dan fungsi pendidikan nasional. Tetapi dalam perjalanan sejarah pendidikan nasional sejak proklamasi melalui era demokrasi parlementer (1950 – 1959), demokrasi terpimpin (1959 – 1966), Orde Baru (1966 – 1998), sampai dengan era reformasi yang mulai sejak pertengahan kedua tahun 1998, belum nampak kesepakatan yang bulat tentang pengertian “kepentingan nasional”. Dilihat dari segi sejarah perubahan kurikulum dari tahun 1947 sampai 2004, berbeda dengan Amerika Serikat yang sejak semula menekankan pentingnya pelajaran Sejarah Amerika Serikat dan UUD Amerika Serikat dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Di Indonesia sampai dengan tahun 1962, dari SD sampai SMA tidak terdapat pelajaran Kewarganegaraan, yang ada hanya pelajaran sejarah. Setelah tahun 1962 dalam periode Demokrasi Terpimpin dimasukkan mata pelajaran kewarganegaraan (Civics) yang berisi ideologi negara MANIPOL USDEK (Manifesto Politik dan UUD 1945). Setelah/dan selama Orde Baru diperkenalkan Sejarah Perjuangan Bangsa dan Pendidikan Moral Pancasila, dan dalam era reformasi kembali ke mata pelajaran kewarganegaraan. Mungkin tidak banyak negara yang perubahan kurikulumnya dalam dimensi yang menjadi salah satu ciri kenasionalan suatu sistem pendidikan demikian fluktuatif seperti Indonesia. Dimensi kedua dari ciri kenasionalan suatu sistem pendidikan yaitu sistem seleksi dan promosi dari satu jenjang ke jenjang berikutnya juga bertendensi tidak bersistem.

Sampai dengan tahun 1960-an pada saat terdapat ketimpangan antara jumlah murid SD, SMP, SLTA dan Perguruan Tinggi seperti dilihat dari tabel I, seleksi untuk meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi demikian ketat, yaitu yang dapat

*) Dikutip oleh Imam Al Mufti, anggota Komisi International Pendidikan UNESCO untuk Abad ke-21.

diterima di SMP/SLTP (negeri) adalah mereka yang lulus ujian masuk SLTP yang diselenggarakan secara nasional, demikian juga memasuki SMA/SLTA adalah yang lulus ujian akhir SMP, dan yang dapat diterima di Perguruan Tinggi adalah mereka yang lulus ujian SMA yang diadakan secara nasional, dikenal dengan istilah “ujian negara” (tanpa ada ujian masuk PT).

Tabel 1

jenjang tahun	SD	SMP/SLTP	SLTA	PT
1950	4.926.370	197.189	38.431	3.700
1955	7.113.456	434.842	103.267	8.600
1960	8.955.098	670.481	204.018	156.000

Sumber: Wardiman Djojonegoro (1995), “Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia”

Sejak tahun 1968, pada saat mulai ditiadakan ujian negara (nasional) dan pada saat perbandingan peserta didik dari SD dengan SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi tidak terlalu mengerucut keatas lihat tabel II, penerimaan murid pada jenjang yang lebih tinggi ditentukan oleh masing-masing lembaga. Tidak ada standard yang baku, tergantung ketersediaan bangku dan jumlah peminat. Pada tingkat SMP, untuk SMP yang “favorit” dia dapat menetapkan nilai hasil belajar dari SD yang tinggi, sebaliknya kalau sebuah SMP perbandingan antar yang mendaftar dan bangku yang tersedia sama akibatnya tidak ada seleksi. Halnya sama dengan SMA maupun Perguruan Tinggi. Kalaupun pada tingkat Universitas kita mengenal Sipenmaru (Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru), UMPTN (Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri), dan SPMB (Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru), tetapi standard untuk menetapkan mereka (lulusan SMA) yang dapat diterima di Universitas Indonesia dan ITB tidak sama dengan yang diterima di Universitas lainnya, bahkan pada Universitas yang sama standard untuk diterima di Fakultas yang satu tidak sama dengan Fakultas yang lain, bahkan antar jurusan dalam satu fakultas.

Tabel II *)

	SD/MI	SLTP	SLTA	Perguruan Tinggi
1989/1990	29.296.714	13.672.438	4.338.386	1.485.894
1990/1991	29.408.778	17.040.266	4.233.089	1.590.593
1991/1992	29.577.704	13.378.762	4.201.879	1.773.459
1992/1993	29.598.495	6.741.940	4.165.400	1.794.056
1993/1994	29.699.586	7.132.537	4.192.163	2.242.682
1994/1995	29.721.459	7.917.084	4.457.163	2.554.804

Sumber: Wardiman Djojonegoro (1995), “Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia”

*) Keduanya tidak menentukan nasibnya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, karena tergantung dari sekolah lanjutan yang akan dimasuki. Khusus untuk memasuki Perguruan Tinggi terutama Universitas Negeri, keduanya sama sekali tidak berpengaruh karena yang menentukan adalah hasil dari Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri.

Pada tahun pengajaran 1984/1985 dalam periode Menteri Prof. Dr. Nugroho Notosusanto (alm) diberlakukan kembali Ujian Nasional dengan nama Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (EBTANAS). Sistem yang dirancang untuk menaikkan mutu pendidikan nasional ini akhirnya kurang berfungsi secara efektif karena dalam pendidikan yang massal tidak dapat diterima bila hanya sebagian kecil peserta didik dari suatu sekolah yang lulus. Karena itu kelulusan seorang peserta didik yang ditentukan tidak oleh hasil ujian akhir tingkat nasional melainkan oleh berbagai elemen disamping hasil EBTANAS, akhirnya para pelajar memperoleh gambaran tentang prestasi belajarnya dalam dua dokumen yang isinya untuk kebanyakan lulusan satu sama lain bertentangan, yaitu nilai hasil belajar pada STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) dan NEM (Nilai Ebtanas Murni) yang pada umumnya berbeda.

Sesungguhnya dengan ditetapkannya pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun sejak tahun 1994 yang diperkuat dengan amandemen UUD 1945 yang melahirkan ayat baru pasal 31 yaitu ayat (2), yang mewajibkan setiap warga negara mengikuti pendidikan dasar dan diperkuat dengan UU No. 2 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, anak lulusan SD seharusnya secara otomatis diterima di SMP, tetapi dalam praktek tetap dilakukan proses seleksi terhadap lulusan SD waktu memasuki SMP. Padahal sesuai dengan ketentuan UUD maupun UU Sisdiknas pendidikan SMP adalah bagian dari pendidikan yang wajib diikuti oleh setiap anak Indonesia. Gejala ini menjadikan makin tidak jelasnya karakteristik khusus sistem pendidikan nasional.

Akhir-akhir ini bahkan ada gagasan untuk memisahkan sekolah bagi anak dari keluarga mampu secara ekonomi, yang dapat mengikuti pendidikan pada jalur mandiri, dan anak-anak dari keluarga yang secara ekonomi dipandang kurang mampu yang ditampung disekolah standard. Berbagai praktek penyelenggaraan pendidikan yang sepintas diulas dan gagasan baru yang sangat diskriminatif secara ekonomi sukar untuk diharapkan dapat memungkinkan terlaksananya fungsi pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional.

Disamping dua dimensi sistem pendidikan nasional yaitu materi pendidikan yang disajikan dan peranan setiap jenjang pendidikan berikut sistem rekrutmennya dimensi lain yang membedakan sistem pendidikan suatu negara dari lainnya adalah manajemen dan pembiayaan pendidikan. Di dunia ini kita mengenal sistem pendidikan nasional yang sentralistik seperti Perancis, Italia dan negara-negara Skandinavia seperti Swedia, Norwegia. Ada yang menganut sistem pengelolaan yang desentralistik seperti Amerika Serikat dan Republik Federal Jerman, serta Australia, dan ada yang merupakan gabungan antara sentralistik dan pemberian otonomi kepada pemerintah setempat seperti Inggris dan Jepang.

Yang menarik dari negara yang menjadi negara kebangsaan yang merdeka, pada abad ke-19, model pengelolaan, baik yang sentralistik maupun desentralistik dan gabungan, nampaknya konsisten. Seperti Perancis menganut sistem pengelolaan yang sentralistik sejak tahun 1896, dimana Rektor Universitas yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan Nasional yang sekaligus berperan sebagai pemimpin tertinggi penyelenggaraan pendidikan

dasar sampai Universitas diwilayahnya. Demikian juga dengan model desentralistik yang ditempuh oleh Amerika Serikat, walaupun pelaksanaannya bervariasi antar negara bagian. Ada negara bagian yang menganut sentralistik dan ada yang desentralistik. Nampaknya masing-masing bangga dengan keunikannya karena sesuai dengan tuntutan pembangunan negara bangsa. Demikian juga dengan pembiayaan pendidikan, kebijaksanaan pembiayaan pendidikan ditanggung pemerintah di Perancis sudah ditempuh sejak akhir abad ke-19, walaupun belum makmur, karena yakin bahwa hanya dengan warga negara yang berpendidikan suatu bangsa akan dapat kokoh dan terus maju.

Dilihat dari segi ini, yaitu administrasi penyelenggaraan pendidikan, kalau kita berangkat dari pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional (pengajaran nasional) dan seterusnya”, sesungguhnya Indonesia dituntut untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan yang sentralistik, tetapi karena demam “demokrasi” yang memandang bahwa sesuatu yang sentralistik dipandang “*undemocratic*”, kebijaksanaan desentralisasi berlaku dan otonomi diberikan kepada pemerintah kabupaten sampai tingkat SD tanpa memperhatikan tingkat perkembangan potensi sumber daya pendidikan suatu wilayah. Sejauh mana kebijaksanaan ini relevan dengan peranan pendidikan nasional dalam proses membangun negara bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia? Nampaknya kita dalam merancang suatu administrasi penyelenggaraan sistem pendidikan nasional tidak sepenuhnya berangkat dari jiwa dan ketentuan tersurat yang terdapat dalam UUD (UUD 1945) dan UU tentang Sistem Pendidikan Nasional tetapi cenderung “*gone with the wind*”. Hal yang sama berlaku pada pembiayaan pendidikan. Padahal dalam hal pembiayaan pendidikan baik UUD 1945 maupun UU No. 20 tahun 2003 menetapkan tanggung jawab pemerintah untuk membiayai pendidikan, seperti dapat dibaca pada pasal 31 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945 yang tertulis sebagai berikut :

Pasal 31 ayat (2)

“setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”

Pasal 31 ayat (4)

“Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.

Dan *pasal 34 ayat (2)* UU SISDIKNAS No. 20 Th. 2003 yang tertulis :

“Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”.¹³⁾

Dari kutipan pasal dan ayat UUD 1945 dan UU No. 20 tahun 2003 bertambah jelaslah adanya perbedaan antara yang tertulis dalam UUD 1945 dan UU Sisdiknas, dan yang dilaksanakan. Karena baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah nampaknya

belum memiliki kemauan politik yang kuat untuk melaksanakan ketentuan UUD 1945 dan UU Sisdiknas.

Dari serangkaian ulasan pada bagian ini dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan nasional sebagai yang dicitakan oleh para pendiri Republik yang tertulis dalam UUD 1945 dan diterjemahkan dalam UU Sisdiknas belum terwujud. Pertanyaannya adalah bagaimana mewujudkan sistem pendidikan nasional yang relevan dengan tuntutan mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional ?

Mewujudkan Sistem Pendidikan Nasional yang Relevan dengan Fungsi Konstitusionalnya

Pada bagian terdahulu kita telah memperoleh gambaran betapa di era globalisasi ini negara-negara di dunia, terutama negara maju dan negara yang baru maju tetap mempertahankan kehidupannya sebagai negara bangsa dalam pergaulannya dengan negara-negara lain di dunia, dan betapa negara maju tersebut tetap mempertahankan keunikan sistem pendidikan nasional masing-masing.

Dalam pada itu kita juga menyaksikan bahwa berbagai ketentuan dalam UUD 1945 dan UU Sisdiknas belum diwujudkan dalam praktek penyelenggaraan pendidikan nasional. Kita juga menyaksikan betapa dinamika peranan badan-badan dunia, seperti PBB, ditentukan oleh keunggulan masing-masing bangsa. Kita juga menyaksikan betapa negara-negara yang kalah perang, seperti Jepang dan Jerman, enam puluh tahun kemudian berpotensi menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Hal ini terjadi karena keunggulan dua negara tersebut sebagai negara bangsa hampir dalam semua dimensi kehidupan modern. Tidak lain karena didukung oleh Sistem Pendidikan Nasionalnya. Gejala ini menunjukkan bahwa di era globalisasi ini *"survival"* dan martabat suatu negara akan ditentukan oleh kemampuan nasional masing-masing negara, terutama dalam kualitas manusianya. Karena yang terakhir inilah yang akan menentukan produktifitas nasional, kemajuan IPTEK, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sistem politik suatu negara. Dan ini diakui oleh UNDP, BAPPENAS, dan BPS (2004, halaman 1), khususnya Indonesia, dalam terbitannya yang berjudul : *"The Economics of Democracy : Financing Human Development in Indonesia"* yang menyatakan :

"Indonesia need to invest more in human development – not just to fulfil its people's basic rights but also to lay the foundations for economic growth and to ensure the longterm survival of its democracy. The investment is substantial but clearly affordable. It has to be based, however, on a widespread national consensus it could be postured"

Sesungguhnya pandangan tiga lembaga tersebut merupakan penguatan dari pandangan Harbison dan Myers (1965, halaman xi), empat puluh tahun sebelumnya. Kedua ahli ekonomi pembangunan ini dalam bukunya *"Manpower and Education"* empat puluh tahun yang lalu menyatakan pandangannya dalam kalimat berikut :

In the final analysis, the wealth of a country is based upon its power to develop and to effectively utilize the innate capacity of its people. The economic development of nations, therefore, is ultimately the result of human effort. It takes skilled human agents to discover and exploit natural resources, to mobilize capital, to develop technology, to produce goods, and carry on trade. Indeed, if a country is unable to develop its human resources, it cannot build anything else, whether it be a modern political system, a sense of national unity, or a prosperous economy.

Bagian ini sengaja dikutip pandangan tentang pentingnya suatu bangsa mengembangkan kemampuan manusia warganegaranya, bila bangsa itu ingin maju secara berkesinambungan. Kiranya para pendiri Republik sadar akan hal ini, jauh sebelum para ahli ekonomi mutakhir menekankan tentang pentingnya pengembangan sumber daya manusia atau dengan kata lain tentang pendidikan nasional. Hal ini terbukti dengan diadakannya upaya “mencerdaskan kehidupan bangsa” dan “memajukan kebudayaan nasional bangsa Indonesia” sebagai tujuan dan misi penyelenggaraan pemerintahan negara. Dan untuk itu pula pendiri Republik melalui UUD 1945 menetapkan “hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan” dan kewajiban “pemerintah untuk menyelenggarakan dan mengusahakan satu sistem pengajaran nasional”.

“Mencerdaskan kehidupan bangsa” dan “memajukan kebudayaan nasional” dalam pemahaman saya adalah fungsi konstitusional dari diselenggarakannya satu sistem pengajaran nasional (berdasarkan amandemen ke-IV UUD 1945 istilah sistem pengajaran nasional dirubah menjadi “sistem pendidikan nasional”).

Walaupun para pendiri Republik menekankan perlunya “Pemerintah” mengusahakan dan mengupayakan “satu sistem pengajaran nasional” untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional, tetapi setelah para pendiri bangsa meninggalkan gelanggang penyelenggaraan pemerintah negara, muncul kecenderungan adanya upaya untuk melepaskan tanggung jawab pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional. Nampaknya untuk mengingatkan kembali para penyelenggara negara baik legislatif maupun eksekutif akan makna pesan tertulis para pendiri Republik, kita patut berbahagia, karena MPR RI melalui amandemen ke-IV UUD 1945 menterjemahkan pesan tersebut melalui ditambahkannya tiga ayat dalam pasal 31 UUD 1945 yaitu :

1. ayat (2) yang tertulis : “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”
2. ayat (4) : “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.”
3. ayat (5) : “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa, untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.”

Berangkat dari penekanan tentang pentingnya mewujudkan penyelenggaraan pendidikan nasional yang mampu menunjang proses mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional, sebelum mengulas pemikiran tentang upaya mewujudkan sistem pendidikan nasional yang relevan, terlebih dahulu perlu dibahas makna “mencerdaskan kehidupan bangsa” dan “memajukan kebudayaan nasional”

Mengapa para pendiri Republik menetapkan “mencerdaskan kehidupan bangsa” dan “memajukan kebudayaan nasional” sebagai salah satu tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan di alam Indonesia merdeka ? Nampaknya belum ada upaya untuk menjawabnya secara sungguh-sungguh. Padahal kalau kita mempelajari berbagai Undang-Undang Dasar dari berbagai negara di dunia, sepanjang yang telah penulis baca, Indonesia adalah satu-satunya negara yang menetapkan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia, sebagai tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara.

Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa pada tahun 1945 tingkat perkembangan masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat abad ke-20, baik ekonomi, politik, dan IPTEK jauh tertinggal dari negara-negara di dunia. Di bidang ekonomi kita adalah produsen bahan mentah dan pasar segala produk industri, di bidang IPTEK, kita adalah konsumen IPTEK produksi negara lain, di bidang politik kita belum berpengalaman menyelenggarakan pemerintahan moderen yang demokratis, baru dalam bentuk cita-cita, di bidang kebudayaan kita lebih banyak ber-Bhineka daripada ber-Tunggal Ika, kecuali bahasa Indonesia. Hal ini terjadi karena pada saat dunia Barat yang kemudian menjadi negara maju memasuki era industrialisasi, Indonesia tenggelam kedalam cengkeraman penjajah, elit Indonesia baru berkenalan dengan IPTEK, pada permulaan abad ke-20, empat ratus tahun tertinggal dari dunia maju dalam IPTEK sebagai modal berpikir, bekerja, dan memecahkan masalah dan memajukan masyarakat. Kini hampir enam puluh tahun setelah Indonesia bertekad mencerdaskan kehidupan bangsa, belum juga mewujudkan. Fenomena berikut merupakan bukti belum cerdasnya kehidupan bangsa :

- (1) ketidakmampuan kita untuk tidak kekurangan air bersih dan bahan makanan di musim kering;
- (2) ketidakmampuan kita untuk mengatasi banjir dan tanah longsor di musim hujan;
- (3) ketidakmampuan kita menemukan obat bagi penyakit yang berulang (secara periodik) mewabah di Indonesia, seperti demam berdarah ;
- (4) ketergantungan kita kepada hasil teknologi negara lain ;
- (5) ketidakmampuan kita untuk menemukan, mengolah, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya alam bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- (6) ketergantungan kita kepada import hasil bumi yang seharusnya menjadi negara pengekspor;
- (7) ketidakmampuan kita menjaga keutuhan negara bangsa Indonesia seperti lepasnya Timor Timur, Sepadan dan Ligitan dan berbagai masalah perbatasan yang kritis; dan
- (8) ketidakmampuan kita mengembangkan strategi yang komprehensif dan terintegrasi dengan dukungan yang kuat dari seluruh rakyat untuk mengatasi krisis multidimensi; merupakan indikator belum cerdasnya kehidupan bangsa.

Bandingkan kondisi kita sekarang dengan cita-cita yang dikemukakan oleh Presiden Sukarno pada 17 Agustus 1957 (halaman 34) dalam Pidato Tahun Ketentuan, yang menyatakan dalam kalimat berikut.

“semula kita mencita-citakan bahwa dialam kebebasan dan kemerdekaan, kita akan dapat mengembangkan segala daya-cipta kita untuk membangun sehebat-hebatnya, membangun satu pemerintah nasional yang kokoh-kuat, membangun satu angkatan perang nasional yang kokoh-kompak, membangun satu industri moderen yang sanggup mempertinggi taraf hidup Rakyat kita, membangun satu pertanian modern guna mempertinggi hasil bumi, membangun satu kebudayaan nasional yang menunjukkan kepribadian bangsa Indonesia”.

Disamping berbagai fenomena yang dipandang sebagai indikator belum cerdasnya kehidupan bangsa Indonesia, diukur dari cita-cita yang dikemukakan oleh Presiden Sukarno empat puluh delapan tahun yang lalu, yaitu terbangunnya industri modern yang dapat meningkatkan taraf hidup rakyat, pertanian modern yang mempertinggi hasil bumi, dan majunya kebudayaan nasional, kita belum mencapai. Realitas yang kita hadapi adalah tergantungnya tenaga kerja Indonesia kepada kesempatan kerja diluar negeri, terus meningkatnya import hasil bumi (beras, gula, kedelai, dan daging), masih rentannya persatuan dan kesatuan nasional, masih rendahnya budaya demokrasi politik, belum adanya persepsi yang sama tentang makna kepentingan nasional, dan menurunnya kualitas budaya, paling tidak dalam arti yang sempit seperti seni pertunjukkan dalam segala bentuknya.

Berbagai fenomena dari tingkat perkembangan kita yang jauh dari cita-cita nasional, tidak lain karena kualitas manusia Indonesia pada umumnya, baik dari segi kemampuan teknis, kemampuan profesional, kemampuan intelektual (penguasaan IPTEK), etos kerja, disiplin, moral, dan kepribadian sebagai manusia modern yang demokratis di abad ke-21 masih jauh dari memadai. Hal ini dapat terjadi karena penyelenggaraan pendidikan nasional sebagai diuraikan dalam bagian terdahulu baik dari segi manajemen, pembiayaan, proses pembelajaran, sistem evaluasi, seleksi dan promosi maupun dari segi materi pendidikan yang merupakan ciri essensial suatu sistem pendidikan yang relevan dengan konstitusional belum terwujud.

Pertanyaannya sekarang adalah “Bagaimana mewujudkan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang benar-benar relevan dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional?”. Untuk itu selanjutnya marilah kita analisis konsekuensi dan implikasi yang harus dirancang dan dilaksanakan untuk mewujudkan terlaksananya fungsi konstitusional dari penyelenggaraan sistem pendidikan nasional.

Dalam ulasan terdahulu kita telah sampai pada suatu pemahaman tentang kehidupan bangsa yang cerdas yang tidak lain adalah suatu bangsa yang mampu menggunakan IPTEK dalam meningkatkan taraf hidup rakyatnya yang maju ekonominya,

yang sehat kehidupan politiknya, yang demokratis, yang menjunjung tinggi HAM, yang berakhlak dan berkepribadian dalam kebudayaan nasionalnya. Kehidupan masyarakat yang demikian adalah masyarakat yang anggotanya cerdas, berdisiplin, beretos kerja yang tinggi, yang berakhlak dan bermoral serta beriman dan bertaqwa. Anggota masyarakat yang cerdas adalah anggota masyarakat yang dapat memecahkan masalah dengan menggunakan pendekatan IPTEK, yang dalam bahasa Harbison dan Myers, mampu menemukan dan memanfaatkan sumber daya alam, mampu mengembangkan teknologi, mampu menghasilkan barang yang bermutu, yang mampu menggerakkan modal, dan mampu berdagang secara moderen.

Dalam perspektif sejarah, kualitas manusia yang demikian adalah manusia baru Indonesia, karena bagi masyarakat Indonesia sebelum kemerdekaan, budaya ilmu pengetahuan dan teknologi adalah budaya yang asing. Karena itu pula mengapa Presiden Sukarno memandang bahwa hakekatnya kita menghadapi berbagai revolusi dalam satu generasi "*a summing up of many revolution in one generation*", termasuk perubahan radikal dari feodal ke demokrasi dan dari tradisional ke modern yang berorientasi IPTEK. Untuk kepentingan perubahan dari tradisional ke modern terutama dalam penguasaan IPTEK yang merupakan persyaratan utama untuk membangun masyarakat yang maju, adil, dan makmur, diperlukan lembaga pendidikan modern yang disebut sekolah. Karena itu pula sejak tahun 1999 melalui TAP MPR RI kita menetapkan sekolah/lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan berbagai kemampuan, nilai dan sikap, khususnya sikap ilmiah, penguasaan IPTEK, etos kerja, disiplin, sikap demokratis, berkepribadian mantap, bermoral, dan memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Berbagai nilai dan sikap tersebut sukar ditumbuhkan di lingkungan keluarga dan masyarakat yang pada umumnya belum menjadikan budaya IPTEK, budaya demokrasi, budaya disiplin pribadi dan disiplin sosial, disiplin nasional dan meritokrasi sebagai bagian dari kebudayaannya. Karena itu, hanya sekolahlah yang memiliki potensi sebagai pusat pembudayaan segala nilai dan sikap serta kemampuan manusia modern. Itu pula sebabnya para pendiri Republik menekankan perlu menyelenggarakan satu sistem pengajaran (persekolahan) nasional. Karena para pendiri Republik menyadari bahwa mereka dapat menjadi cendekiawan pejuang untuk membangun Indonesia yang maju dan demokratis berkat proses pendidikan yang mereka alami di sekolah.

Ini berarti bahwa hanya melalui sekolah, yang berfungsi sebagai pusat pembudayaan, kita dapat mewujudkan sistem pendidikan nasional yang berfungsi mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional. Sampai sekarang walaupun sudah ada ketetapan MPR RI tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2003, sekolah kita belum dapat didayagunakan untuk menjadi pusat pembudayaan. Pada umumnya, sekolah kita sampai sekarang, baru dapat menjadi tempat untuk memperoleh pengetahuan, yang umumnya untuk dihafal bukan untuk digunakan sebagai wahana untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai pribadi, anggota dan pemimpin keluarga, anggota dan pemimpin masyarakat, dan sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia.

Kondisi sekolah seperti ini tidak hanya terdapat di Indonesia, tetapi di hampir terdapat di semua negara berkembang yang tidak mampu membiayai pendidikan. Di negara-negara seperti ini, pendidikan yang diharapkan menjadi pendukung pembangunan bangsa, sebaliknya menjadi beban pembangunan (In'an Al Mufti m: 1999, halaman 193). Karena itu UNESCO (1996, halaman 86-97), melalui Komisi Internasional untuk Pendidikan Abad ke – 21, menyarankan diterapkannya empat pilar belajar, yaitu : (1) *learning to know*; (2) *learning to do*; (3) *learning to live together*; dan (4) *learning to be*. Selanjutnya satu persatu dari empat pilar tersebut akan dicoba diulas, sebelum kita sampai kepada analisis tentang berbagai implikasi bagi terwujudnya pendidikan nasional yang relevan.

Learning To Know

Learning to know adalah suatu proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik menghayati dan akhirnya dapat merasakan dan dapat menerapkan cara memperoleh pengetahuan, suatu proses yang memungkinkan tertanamnya sikap ilmiah, yaitu sikap ingin tahu dan selanjutnya menimbulkan rasa mampu untuk selalu mencari jawab atas masalah yang dihadapi secara ilmiah. Terus majunya IPTEK di dunia Barat, tempat lahirnya ilmu pengetahuan moderen (Alfred North Whitehead), tidak lain karena peserta didik dinegara-negara tersebut dapat menghayati proses pembelajaran sampai tingkatan "*joy of discovery*". Jelas, bahwa untuk dapat menciptakan proses pembelajaran sampai tingkatan "*joy of discovery*", diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, guru yang profesional, sistem evaluasi yang terus menerus, komprehensif dan obyektif, dan suasana sekolah yang demokratis. Sasaran terakhir dari penerapan pilar "*learning to know*" adalah lahirnya suatu generasi yang mampu mendukung perkembangan IPTEK, yang menjadikan IPTEK sebagai bagian dari kebudayaannya. Karena bagi mereka yang telah menjadikan IPTEK sebagai bagian kebudayaan, "*science*" adalah wujud berpikir yang paling canggih, atau dalam kalimat Israel Scheffler :

"Intepreting science as the most refined and effective development to such adaptive thinking, is urged the outensible problem-solving pattern of scientific research as the chief paradigm of intellectual activity, to be favored in all phases of education and culture"(Alferd N. Whitedead)

Learning To Do

Sasaran akhir dari diterapkannya pilar ini adalah lahirnya generasi muda yang dapat bekerja secara cerdas dengan memanfaatkan IPTEK. Hal ini selaras dengan pandangan Whitehead, sembilan puluh tahun yang lalu, yang memandang bahwa tujuan akhir dari upaya pendidikan adalah "*the acquisition of the art of utilizing knowlwedge*" (penguasaan seni menggunakan ilmu pengetahuan)(Israel Scheffler, halaman 112). Ini sangat relevan dalam "*technology knowledge based economy*", suatu masyarakat yang tenaga kerjanya tidak cukup hanya menguasai keterampilan motorik yang mekanistik tetapi dituntut kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan seperti "*controlling*

, *monitoring, maintaining, designing, dan organizing.*” Untuk itu proses pembelajaran yang sifatnya “*learning to do*” ini memerlukan suasana atau situasi pembelajaran yang memungkinkan peserta didik menghadapi masalah untuk dipecahkan dengan menggunakan IPTEK yang secara teori telah dipelajari. Suatu situasi pendidikan yang secara psikologis relevan, yang dalam bahasa Israel Scheffler dinyatakan dalam kalimat berikut :

“Thought according to widely prevalent doctrine is problem oriented. If originates in doubt, conflict, and difficulty. The function is to overcome the obstacles to the smooth flow of human activities. When action is coherent and well adapted to its circumstance human energy is released into overt channel set by habit, and custom. The blocking of conduct either through internal conflict or environment, hinders, turn its energy inward, transforming its into thought”.

Dalam kaitan ini pemahaman tentang pilar kedua “*learning to do*” pada berbagai jenjang pendidikan harus memungkinkan peserta didik dalam proses pembelajarannya sampai pada tingkatan penggunaan berbagai konsep, prinsip, atau hukum untuk memecahkan masalah yang konkret. Ini jelas memerlukan suatu lembaga pendidikan dengan tenaga guru berderajat profesional, sarana dan prasarana yang memadai dan suasana pembelajaran yang penuh tantangan.

Learning to live together

Kemajuan dunia dalam bidang IPTEK dan ekonomi yang mengubah dunia menjadi desa global ternyata tidak menghapus konflik antara manusia yang selalu mewarnai sejarah umat manusia. Yang terjadi akhir-akhir ini bahkan sebaliknya yaitu terjadinya konflik antar manusia yang didasarkan atas prasangka, baik antar ras, antar suku, antar agama dan antar si kaya dan si miskin, dan antar negara. Padahal sejak berakhirnya Perang Dunia ke-II berbagai deklarasi untuk menjadi dasar penyelesaian konflik seperti Deklarasi HAM, piagam PBB, dan kita bangsa Indonesia memiliki landasan pandangan hidup Pancasila yang hakekatnya adalah untuk membangun negara kebangsaan yang demokratis, berkeadilan sosial, ber-Ketuhanan yang Maha Esa, dan menggalang persatuan dan persaudaraan bukan hanya antar warga bangsa melainkan dengan seluruh umat manusia seperti dinyatakan dalam kalimat “ketertiban dunia yang didasarkan kemerdekaan, keadilan sosial dan perdamaian abadi”. Tetapi kenyataan menunjukkan terjadinya berbagai konflik sosial baik horizontal maupun vertikal.

Diakui oleh Komisi Internasional untuk pendidikan abad ke-21 tentang sulitnya menciptakan kerukunan, toleransi dan saling pengertian dan bebas dari prasangka. Dalam pengamatan komisi tersebut sebabnya diuraikan dalam kalimat berikut :

“It is difficult task, since people very naturally tend overvalue their own qualities and those of their group and to harbour prejudices against others. Furthermore, the general climate of competition that is at present

characteristic of economic activity, within and above all between nations, tends to give priority to the competitive spirit and individual success. Such competition now amounts to ruthless economic warfare and to a tension between rich and poor that is dividing nations and the world, and exacerbating historic rivalries” (Jacques Delors et. al., halaman. 92)

Latar belakang kenyataan dalam masyarakat yang digambarkan oleh Komisi diatas menuntut pendidikan tidak hanya membekali generasi muda untuk menguasai IPTEK dan kemampuan bekerja serta memecahkan masalah, melainkan kemampuan untuk hidup bersama dengan orang lain yang berbeda dengan penuh toleransi, pengertian, dan tanpa prasangka. Dalam kaitan ini adalah tugas pendidikan untuk pada saat yang bersamaan setiap peserta didik memperoleh pengetahuan dan memiliki kesadaran bahwa hakekat manusia adalah beragam tetapi dalam keragaman tersebut terdapat persamaan. Pendidikan untuk mencapai tingkat kesadaran akan persamaan antar sesama manusia dan terdapat saling ketergantungan satu sama lain, tidak dapat ditempuh dengan pendidikan dengan pendekatan tradisional melainkan perlu menciptakan situasi kebersamaan dalam waktu yang relatif lama. Dalam hubungan ini, prinsip relevansi sosial dan moral yang disarankan Israel Scheffler sangat memadai. Suatu prinsip yang memerlukan suasana belajar yang secara “*inherently*” mengandung nilai-nilai toleransi saling ketergantungan, kerjasama, dan tenggang rasa. Ini diperlukan proses pembelajaran yang menuntut kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatan “*camping*” yang berlangsung mingguan dengan sasaran bersama yang harus dicapai oleh seluruh peserta merupakan salah satu model yang perlu ditempuh. Model sekolah dengan kelengkapan yang memadai, atau berasrama dan kampus yang merupakan kawasan tersendiri merupakan pendekatan yang ditempuh Inggris dan Amerika Serikat dalam membangun bangsa yang bersatu perlu diupayakan. Kiranya bangsa Indonesia perlu belajar dari negara lain untuk membangun masyarakat yang Pancasila.

Learning to be

Tiga pilar yaitu “*learning to know*”, “*learning to do*”, dan “*learning to live together*” ditujukan bagi lahirnya generasi muda yang mampu mencari informasi dan/atau menemukan ilmu pengetahuan, yang mampu melaksanakan tugas dalam memecahkan masalah secara cerdas, dan mampu bekerjasama, bertenggang rasa, dan toleran terhadap perbedaan. Bila ketiganya berhasil dengan memuaskan akan menimbulkan adanya rasa percaya diri pada masing-masing peserta didik, hasil akhirnya adalah manusia yang mampu mengenal dirinya, dalam bahasa UU No. 2 Th. 1989 adalah manusia yang berkepribadian mantap dan mandiri. Manusia yang utuh yang memiliki kemantapan emosional dan intelektual, yang mengenal dirinya, yang dapat mengendalikan dirinya, yang konsisten dan yang memiliki rasa empati (tepo sliro), atau dalam kamus psikologi disebut memiliki “*Emotional Intelligence*”. Inilah kurang lebih makna “*learning to be*”, yaitu muara akhir dari tiga pilar belajar. Pendidikan yang berlangsung selama ini pada umumnya tidak mampu

membantu peserta didik (pelajar/mahasiswa) mencapai tingkatan kepribadian yang mantap dan mandiri atau manusia yang utuh karena proses pembelajaran pada berbagai pilar tidak pernah sampai kepada tingkatan "*joy of discovery*" pada pilar "*learning to know*", tingkatan *joy of being succesful in achieving objective*, pada "*learning to do*", dan tingkatan *joy of getting together to achieve common goal*.

Adalah keyakinan profesional penulis bahwa hanya dengan menyelenggarakan sistem pendidikan yang mampu menciptakan suasana pembelajaran yang memungkinkan terlaksananya empat proses pembelajaran tersebut, yaitu "*learning to know*", "*learning to do*", "*learning to live together*", dan "*learning to be*", fungsi konstitusional dari diselenggarakannya satu sistem pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional bangsa Indonesia, akan dapat terlaksana.

Berangkat dari keyakinan profesional tentang perlu diterapkannya empat pilar belajar dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional selanjutnya akan dianalisis implikasinya terhadap : (a) kurikulum yang dirancang dan diterapkan; (b) sistem evaluasi dan promosi yang dianut; (c) pendidikan dan pembinaan tenaga kependidikan, terutama guru yang ditempuh; (d) pembiayaan pendidikan ; dan (e) manajemen penyelenggaraan pendidikan nasional.

Sistem Kurikulum.

Yang dimaksud dengan sistem kurikulum dalam tulisan ini adalah : (1) Tujuan Institusional, atau Tujuan Pendidikan dari suatu jenis dan jenjang pendidikan, (2) struktur program kurikulum yaitu berbagai mata pelajaran yang dirancang untuk dipelajari dan perbandingan diantara bobot berbagai mata pelajaran; (3) materi pelajaran dari setiap mata pelajaran, atau yang dalam sistem kurikulum 1975 disebut Garis Besar Program Pengajaran; (4) Strategi pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan; dan (5) media dan sarana pembelajaran yang tersedia.

Pertanyaannya adalah "bagaimana merancang dan melaksanakan suatu sistem kurikulum yang memungkinkan diterapkannya empat pilar belajar secara relevan dan efektif ?" Untuk menjawab pertanyaan ini kita harus benar-benar memahami makna "*learning to know*" sebagai proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik dapat menghayati proses menemukan melalui suatu "*mode of inquiry*" sehingga dapat mencapai tingkatan "*joy of discovery*". Suatu proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik merasakan ilmu pengetahuan yang dipelajarinya sebagai bagian dari dirinya. Proses pembelajaran yang demikian tidak akan dapat berlangsung kalau sistem kurikulum yang dianut demikian kaku dengan target sejumlah pokok materi pelajaran yang harus dirampungkan oleh setiap peserta didik tidak pandang minat, bakat, dan kemampuan masing-masing. Akibat dari sistem kurikulum yang demikian pada pendidikan dasar, peserta didik yang secara klasikal mengikuti pelajaran sukar untuk berkesempatan menghayati proses belajar yang bermakna "*learning to know*".

Kita sadar bahwa para perancang kurikulum akan dapat memilih jenis mata pelajaran yang harus dipelajari peserta didik pada suatu jenis dan jenjang pendidikan, bila ada ketentuan yang jelas tentang fungsi dari jenis dan jenjang pendidikan yang dirancang kurikulumnya. Sayangnya ketentuan ini tidak terdapat dalam UU No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam UU No. 20 Th. 2003 tentang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi hanya tertulis sebagai berikut :

- 1) Pasal 17 ayat (1) tentang pendidikan dasar tertulis :
 - (1) “Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang mendasari jenjang pendidikan menengah”.
- 2) Pasal 18 ayat (1) tentang pendidikan menengah tertulis :
 - (1) “Pendidikan menengah merupakan kelanjutan pendidikan dasar”
- 3) Pasal 19 ayat (1) tentang pendidikan tinggi tertulis :
 - “Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup dan seterusnya

Bandingkan dengan rumusan fungsi masing-masing jenjang tersebut dalam UU No 2 Th 1989 tentang SISDIKNAS yang tertulis sebagai berikut :

- 4) Pasal 13 ayat (1) tentang pendidikan dasar tertulis :
 - (1) “Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan ketrampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah.
- 5) Pasal 15 ayat (1) tentang pendidikan menengah tertulis :
 - (1) “Pendidikan menengah diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar, serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi”.
- 6) Pasal 16 ayat (1) tentang pendidikan tinggi tertulis sebagai berikut :
 - (1) “Pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian”.

Hanya bertolak dari ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal tentang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang terdapat dalam UU No 20 Th. 2003 seperti yang dikutip pada alinea terdahulu, sukar bagi perencana kurikulum untuk menetapkan struktur dan materi yang akan dipilih untuk mencapai tujuan pendidikan suatu jenjang pendidikan. Model rumusan yang tertulis dalam pasal 17, 18, dan 19 UU No. 20 Th 2003 hakekatnya memandang setiap jenjang pendidikan hanya menyiapkan peserta didik untuk meneruskan ke jenjang berikutnya. Padahal dalam praktek kehidupan masyarakat dimanapun juga, termasuk di negara-negara maju, tidak semua peserta didik,



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

kemampuan, nilai, dan sikap. Dengan demikian empat pilar belajar yang telah diulas akan dapat diterapkan. Tetapi sebaliknya kalau evaluasi hanya dimaknai sebagai bentuk menilai hasil belajar melalui tes yang mengukur kemampuan kognitif apalagi hanya terbatas pada kemampuan menghafal, upaya menjadikan pendidikan sebagai proses pembudayaan berbagai kemampuan, nilai, dan sikap baik sebagai orang moderen, orang yang bermoral dan berakhlak mulia sukar diharapkan. Dalam bahasa praktek, evaluasi yang bermakna kependidikan antara lain menilai pekerjaan rumah dengan teliti, menegur peserta didik yang tidak cermat dalam melakukan kegiatan belajar, memuji peserta didik yang mengerjakan dan melakukan kegiatan belajar dengan penuh disiplin dan bertanggung jawab, menghukum peserta didik yang menjiplak atau menyontek, dan mengamati perilaku peserta didik diukur dari standar tingkah laku yang ditetapkan disamping menilai hasil belajar kognitif dan afektif dalam arti luas baik yang bersifat formatif maupun sumatif. Model evaluasi yang demikianlah yang telah menjadikan pendidikan, di negara yang sekarang termasuk negara maju, berdampak pada peningkatan kualitas manusia baik dalam pengertian kemampuan teknis profesional-vokasional, kemampuan intelektual, sikap moderen, etos kerja, disiplin, bermoral dan bertanggung jawab. Dan untuk itu tidak diperlukan adanya Ujian Nasional (Jerman, Amerika Serikat). Untuk itu pula diperlukan guru yang memiliki kemampuan profesional, berperan sebagai “pendidik”, “*committed*” pada pekerjaan, dan bertanggung jawab.

Melalui proses evaluasi yang demikian peserta didik akan mengenal dirinya, dalam pengertian kekuatan dan kelemahannya, kelebihan dan kekurangannya, dan pendidik akan dapat membantu peserta didik mengarahkan program pendidikan selanjutnya. Berangkat dari model evaluasi yang demikian dapatlah dikembangkan sistem promosi yang sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 1 UU No. 20 tahun 2003 yaitu “bahwa setiap peserta didik berhak mendapat pelayanan sesuai minat, bakat, dan kemampuannya”. Ini berarti bahwa sistem pendidikan nasional harus dapat mengembangkan suatu mekanisme penyelenggaraan pendidikan yang dapat mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Karena secara psikologis kita mengenal perbedaan antara peserta dari sudut kemampuan dasar kognitif, minat dan bakatnya agar peserta didik dengan latar belakang yang berbeda dapat dengan bahagia dapat mengembangkan dirinya sesuai dengan karakteristiknya masing-masing dalam waktu yang terbatas (SD 6 Tahun, SMP 3 Tahun, SMA/SMK 3 Tahun), proses seleksi untuk promosi tidak dapat dihindarkan. Atas dasar pertimbangan tersebut nampaknya kita perlu kembali menggunakan ketentuan pasal 13 ayat (1) UU No. 2 Th. 1989, yang mengisyaratkan perlu adanya seleksi diantara mereka yang telah menyelesaikan pendidikan dasar yang dapat langsung mengikuti pendidikan menengah, dan persyaratan bagi lulusan SMA/SMK dapat meneruskan ke : (1) Politeknik; (2) Akademi; dan (3) ke Universitas. Ini berarti bahwa sejak kelas 1 SMP perlu diadakan kurikulum yang beragam sesuai dengan kemampuan dasar kognitif, minat dan bakatnya, demikian juga dengan kurikulum SMA, perlu meliputi jalur umum, jalur persiapan pendidikan vokasi, dan jalur pendidikan akademik. Dengan sistem kurikulum yang telah diulas terdahulu dan sistem evaluasi yang

terus menerus, komprehensif, dan obyektif sistem seleksi dan promosi yang hakekatnya merupakan penerapan dari ketentuan pasal 12 ayat (1) UU No. 20 Th. 2003 akan dapat secara efisien dan efektif dilaksanakan. Dan akhirnya sasaran penyelenggaraan pendidikan nasional untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional akan dapat terwujud.

Pendidikan dan Pembinaan Tenaga Kependidikan (Guru)

Berbagai strategi yang dirancang dan dikembangkan baik yang terkait dengan sistem kurikulum, sistem evaluasi, dan sistem promosi hanya akan dapat terwujud dalam suatu proses pembelajaran yang dihayati oleh peserta didik, yang bermakna sebagai proses pembudayaan berbagai kemampuan, nilai, dan sikap bila dilaksanakan oleh guru yang profesional. Yaitu guru yang memiliki kemampuan menterjemahkan berbagai keputusan pada tingkat sistem kurikulum suatu lembaga kependidikan menjadi program pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan tingkat kemampuan peserta didik, hakekat dan kedudukan suatu mata pelajaran dalam proses pencapaian tujuan pendidikan secara institusional dan nasional, dan mampu mengelola materi dan proses pembelajaran sehingga proses pembelajaran benar-benar efisien, efektif, dan relevan. Guru dengan tingkat kemampuan profesional semacam ini perlu menguasai pengetahuan : (1) tentang karakteristik peserta didik, terutama kemampuan dasar kognitif, minat dan bakat; (2) tentang hakekat dari semua cabang ilmu pengetahuan sebagai sumber bahan ajar dan makna sebagai obyek belajar; (3) berbagai psikologi dan teori belajar baik umum maupun khusus; (4) filsafat pendidikan khususnya filsafat pendidikan nasional; (5) berbagai model belajar; (6) teknologi pendidikan; dan (7) tentang sistem evaluasi.

Pertanyaannya adalah “Bagaimana suatu sistem pendidikan secara berencana mengembangkan sistem pendidikan dan pembinaan guru ?”

Semua negara di dunia mendudukkan sistem pendidikan dan pembinaan guru sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Kecanggihan penyelenggaraan pendidikan guru dan pembinaannya berkembang secara selaras dengan perkembangan suatu negara. Tetapi yang jelas bagi negara yang mendudukkan sistem pendidikan sebagai bagian yang essensial atau “*crucial*” dalam pembangunan masyarakat suatu bangsa sejak jaman Plato empat abad sebelum Masehi, guru berkedudukan sebagai jabatan yang hanya dapat diduduki oleh orang-orang terpilih. Plato bahkan menetapkan, empat abad sebelum Masehi, bahwa guru adalah jabatan yang memerlukan pendidikan Universitas disamping anggauta parlemen. Karena itu pula nampaknya sejak permulaan abad ke-20, di negara-negara yang sekarang dikategorikan sebagai negara maju untuk menjadi guru dipersyaratkan berpendidikan Sarjana Strata I ditambah pendidikan khusus keguruan. Di Amerika Serikat yang mensyaratkan mereka yang mengikuti pendidikan Universitas adalah mereka yang di Sekolah Menengahnya (*High School*) telah memperoleh pelajaran Kalkulus, Trigonometri, Fisika, dan Bahasa Asing bermakna bahwa hanya mereka yang termasuk dalam kategori anak cerdas, sekurang-kurangnya termasuk dalam kelompok 20 % teratas dari populasi lulusan SMA yang dapat memasuki pendidikan calon guru. Demikian juga

dengan di Jerman, yang pendidikan gurunya lulusan Universitas atau *PAEDAGOGISCHE HOCHSCHULE*, yang berarti bahwa hanya mereka yang telah mengikuti pendidikan Gymnasium sampai kelas XIII yang dapat memasuki profesi guru, sedangkan untuk mengikuti pendidikan Gymnasium, sejak kelas V telah dipilih dengan ukuran utamanya prestasi belajar dalam Matematika dan Bahasa Jerman. Sesungguhnya Indonesia pun sampai dengan akhir tahun 1960-an seleksi untuk menjadi calon guru demikian ketat, yaitu hanya mereka yang lulus ujian negara SMP, dan SMA yang dapat dibina menjadi calon guru untuk mengikuti pendidikan guru. Seleksi ini dapat berlangsung karena mereka diberi insentif dengan pemberian Ikatan Dinas bagi pelajar/mahasiswa calon guru serta penyediaan asrama.

Ironisnya pada saat Indonesia memasuki babak baru dalam pembangunan ekonominya, pada saat jabatan guru harus bersaing dengan jabatan lain baik di dunia usaha (ekonomi, perbankan), industri, dan pemerintahan/pertahanan, yang sampai permulaan tahun 1960-an belum terbuka, Pemerintah meninggalkan kebijaksanaan pemberian ikatan dinas kepada pelajar/mahasiswa calon guru, dan meniadakan asrama kependidikan bagi calon guru. Akibat dari kebijaksanaan ini kita menemukan melalui berbagai studi, rendahnya kemampuan profesional guru terutama penguasaan materi belajar. Dalam pengamatan saya, hal ini disebabkan karena mereka yang memasuki pendidikan pra-jabatan guru bukanlah lulusan SMP atau SMA yang terbaik melainkan kebanyakan adalah mereka yang tidak berhasil memasuki pendidikan prajabatan profesi lain (keahlian lain), baik kedokteran, sarjana ekonomi, sarjana hukum, sarjana teknik, atau AKABRI. Padahal di Amerika Serikat untuk meningkatkan mutu pendidikan yang dipandang tertinggal pada akhir tahun 1950-an dan permulaan tahun 1960-an (akibat ketertinggalan dalam teknologi ruang angkasa dari Uni Soviet) dipersyaratkan untuk menjadi calon guru adalah mereka lulusan SMA 20 % teratas, untuk disiapkan menjadi guru melalui pendidikan di Universitas.

Kini Indonesia telah memasuki abad ke-21 di era globalisasi dengan tekad untuk memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu (pasal 5 ayat (1) UU No. 20 Th. 2003). Ini berarti bahwa setiap warga negara sebagai peserta didik harus dibantu melalui proses pembelajaran agar dapat berkembang secara optimal sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya (pasal 12 ayat (1) b UU No. 20 Th. 2003). Dan adalah keyakinan profesional dan akademik penulis, bahwa hanya guru yang berderajat profesional, sekurang-kurangnya berpendidikan dengan kualifikasi S1, yang secara profesional dapat melaksanakan fungsi sebagai guru/pendidik.

Dan untuk itu harus dirancang suatu sistem rekrutmen calon guru, program pendidikan guru, baik SD, SMP, SMA (SMK) maupun TK yang berderajat S1 (PP tentang Standar Nasional Pendidikan) untuk menghasilkan guru profesional.

Dalam hal rekrutmen calon mahasiswa yang mengikuti pendidikan guru minimal haruslah mereka yang lulus UAN SMA dengan nilai matematika minimum 6 (termasuk calon guru SD)

Pembiayaan Pendidikan Nasional

Dari berbagai analisis implikasi dari mutlak diterapkannya empat pilar belajar agar pendidikan nasional yang diselenggarakan dapat berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia, telah diidentifikasi : (1) kurikulum dan proses pembelajaran yang perlu dirancang, dikembangkan, dan dilaksanakan; (2) evaluasi dan sistem promosi yang perlu dirancang dan dilaksanakan untuk menunjang proses pendidikan sebagai proses pembudayaan; (3) penyiapan dan pembinaan tenaga guru yang perlu dirancang, dikembangkan, dan dilaksanakan. Kesemua unsur-unsur esensial dari suatu proses pendidikan yang efisien, efektif, dan relevan tersebut hanya akan dapat berjalan dalam situasi pendidikan di lembaga pendidikan (sekolah/ perguruan tinggi) yang dilengkapi dengan sumber belajar, sarana dan prasarana pendidikan (ruang belajar yang memadai, perpustakaan dan kepastakaan yang kaya, pusat media belajar, laboratorium, kebun botani dan zoologi, ruang musik dan ruang serta peralatan kesenian lainnya, ruang dan lapangan olah raga, dan kantin yang menyediakan makanan yang sehat dan bergizi). Tanpa dilengkapi dengan berbagai sumber belajar, dan sarana serta prasarana pendidikan yang diperlukan untuk mendukung terlaksananya proses pembelajaran yang bermakna sebagai proses pembudayaan berbagai kemampuan nilai, dan sikap, seperti secara sepintas disinggung, sukar bagi sistem pendidikan nasional, yang keberadaan dan fungsinya digariskan dalam UUD 1945 dapat berfungsi secara efisien, efektif, dan relevan.

Disadari bahwa hanya dengan dukungan dana yang memadai sistem pendidikan nasional Indonesia akan dapat memperoleh tenaga guru bertaraf profesional yang “committed” dan bertanggung jawab, sumber belajar yang kaya, serta sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan. Sesungguhnya dipandang dari segi landasan hukum, baik pada tingkat UUD maupun Undang-undang, Sistem Pendidikan Nasional Indonesia secara potensial akan dapat melaksanakan peranannya secara optimal. Ketentuan pasal 31 ayat (2) UUD 1945 telah menetapkan kewajiban pemerintah membiayai sepenuhnya penyelenggaraan pendidikan dasar yang wajib bagi setiap warga negara; ketentuan pasal 31 ayat (4) UUD 1945 bahkan menetapkan kewajiban pemerintah menyediakan “sekurang-kurangnya” 20 % APBN dan 20 % APBD disediakan untuk mendukung keperluan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Bandingkan dengan Taiwan yang menetapkan pemerintah pusat menyediakan 15 % anggaran belanja negara untuk pendidikan, pemerintah provinsi untuk menyediakan 25 % anggaran belanja untuk pendidikan; dan pemerintah kabupaten menyediakan 35 % anggaran belanjanya untuk pendidikan. Pada tahun 1996 Pemerintah Belanda bahkan menyediakan 37 % anggaran belanjanya untuk pendidikan (sama dengan 7 % PDB)

Ironisnya yang kita hadapi adalah adanya gejala, bahwa Indonesia sebagai negara kesejahteraan yang dalam UUD-nya menetapkan kewajiban Pemerintah menyelenggarakan, mengusahakan dan membiayai penyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional masih memperlakukan penyelenggaraan pendidikan bagi rakyatnya seperti Pemerintah penjajah Belanda melayani pendidikan untuk rakyat desa, yang gaji

guru sekolah dasarnya hanya 10 % dari gaji guru sekolah dasar Belanda untuk pribumi (HIS). Bahkan kita menyaksikan betapa gaji Guru Besar Universitas Negeri di Indonesia hanyalah 8,5 % dari penghasilan anggota DPR RI (Guru Besar ± Rp. 2,8 Juta, anggota DPR 37, [sampai sekarang penghasilannya Rp 27 juta, dan minta ditambah Rp. 10 juta]).

Nampaknya amanat perubahan keempat UUD 1945 berupa ditambahkannya ayat (4) yang lengkapnya tertulis :

“Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”;

kurang dipahami sebagai amanat yang harus segera dilaksanakan. Karena itu agar ketentuan pasal 31 ayat (4) dapat dipahami, nampak masih perlu diperjelas hal-hal berikut : (1) untuk apa anggaran sebanyak itu ?; dan (2) dari mana sumber dana untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional yang dituntut sebanyak sekurang-kurangnya 20 % dari APBN dan 20 % APBD itu ?”.

Studi yang dilakukan oleh Mc.Mahon (2001) menemukan bahwa berbagai unsur yang menentukan terjadinya proses pembelajaran yang bermutu sama sekali tidak didukung dengan dana, seperti penyediaan buku wajib untuk setiap peserta didik, penyediaan buku sumber untuk guru dan ketersediaan perpustakaan sebagai sumber belajar. Dalam studi ini keperluan minimum untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu belum dipenuhi, yaitu dari keperluan minimal, Rp. 1.165.000,- per siswa, yang tersedia hanya Rp 573.000,-. Karena itu bila pendidikan nasional benar-benar diharapkan dapat berfungsi, berbagai unsur esensial bagi terselenggaranya pendidikan yang bermutu, harus disediakan dana pendukungnya. Unsur-unsur itu antara lain adalah :

- (1) tenaga guru yang profesional; yang memerlukan tersedianya dana bagi pendidikan, pembinaan, dan kesejahteraannya;
- (2) sumber belajar yang esensial seperti buku murid, buku sumber untuk guru, dan buku perpustakaan;
- (3) sarana dan prasarana pendidikan, seperti laboratorium IPA dan Bahasa, Kebun Botani dan Zoologi, ruang musik dan kesenian, ruang dan lapangan olah raga, ruang kelas dan ruang guru yang memadai.

Bila berbagai keperluan bagi dapat terlaksananya penyelenggaraan pendidikan nasional diberikan dukungan dana secara memadai, tim bersama BAPPENAS, UNDP, dan PBS pada tahun 2004 memperkirakan untuk keperluan pendidikan dasar diperlukan biaya sekitar Rp 58 Triliun (Kwik Kian Gie, 2004, Halaman 45). Perhitungan ini berangkat dari asumsi bahwa pendidikan dasar yang diwajibkan kepada setiap warga negara sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah seperti dipesankan dalam pasal 31 ayat (2) UUD 1945. Dalam kaitan dengan amanat pasal 31 ayat (4) UUD 1945 tentang perlu disediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % APBN dan APBD, yang

berarti untuk tahun anggaran 2005 sekitar Rp. 90 Triliun. Ini berarti bahwa Pemerintah masih perlu menyediakan dana sekitar Rp. 40 triliun untuk pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Dari dana tersebut berapa persen untuk pendidikan menengah dan berapa persen untuk pendidikan tinggi masih perlu dianalisis lebih lanjut. Yang jelas satuan biaya untuk pendidikan tinggi jauh lebih besar daripada satuan biaya untuk pendidikan menengah. Dengan mengambil contoh University of Illionis yang dalam pengumumannya pada tahun 2004 mencari kandidat Presiden Universitas melalui majalah "*The Economist*" menjelaskan bahwa dengan jumlah mahasiswa 70 000 mahasiswa University of Illionis memiliki anggaran belanjanya US \$ 3 Milyar. Berarti bahwa satuan biaya per-mahasiswa universitas tersebut, yang merupakan Universitas Negeri di Amerika Serikat adalah sekitar US \$ 400 atau dalam rupiah sekitar Rp. 400 juta. Karena Indonesia per kapita income-nya sekitar 1/30 per kapita income Indonesia berarti satuan biaya untuk universitas di Indonesia seharusnya Rp. 12 juta. Dari sini dapat diperkirakan berapa anggaran untuk pendidikan tinggi (Universitas) harus disediakan.

Sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam UUD 1945, khususnya untuk pendidikan dasar, dana untuk pembiayaan pendidikan dasar ditetapkan ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah. Tetapi tiga tahun sejak ditetapkannya ketentuan tersebut dalam UUD 1945 pada tahun 2002, pemerintah belum mampu memenuhi tuntutan UUD tersebut. Bahkan masih mengharapkan partisipasi masyarakat. Padahal dalam studi tentang keuangan pendidikan (Mac Mahon) pada tahun 2001 sumbangan masyarakat melalui pembayaran SPP oleh orang tua tidak lebih dari 7 % dari keperluan dana bagi penyelenggaraan pendidikan yang belum memenuhi syarat tersebut. Akibatnya pendidikan kita, pada umumnya, kondisinya seperti yang disinyalir oleh UNESCO pada tahun 1996 (Jac Delorp), bahwa perluasan pendidikan diberbagai negara berkembang karena tidak didukung dengan dana yang memadai telah melahirkan suatu pendidikan yang tidak bermakna bagi pembangunan masyarakat, bahkan sebaliknya melahirkan berbagai beban baru bagi masyarakat negara yang baru berkembang. Padahal kalau penyelenggara negara menyadari bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah Negara Kesejahteraan dan Negara Kebangsaan, sesuai dengan : (1) amanat Pembukaan UUD 1945 yang intinya menetapkan kewajiban penyelenggaraan pemerintah negara untuk secara aktif memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, disamping melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, serta menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; dan (2) pasal-pasal UUD 1945 terutama pasal 31 dengan lima ayatnya, pasal 32, pasal 33, dan pasal 34 serta pasal 27 ayat (2), sesungguhnya tanggung jawab utama Pemerintah adalah memanfaatkan pendapatan negara, terutama melalui perpajakan untuk membiayai sepenuhnya : (1) penyelenggaraan pendidikan nasional; (2) pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat; (3) penyelenggaraan administrasi pemerintahan negara; (4) penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara; dan (5) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar³⁵). Karena itu kalau ada pertanyaan "dari mana sumber dananya ?", sebagai Negara Kesejahteraan jawabnya adalah "Dari pendapatan negara

yang berasal dari pajak dan kekayaan sumber daya alam Indonesia”. Sesungguhnya cara pandang yang demikian, tidak hanya dianut oleh negara kesejahteraan di Eropa Barat seperti Perancis, Belanda, Jerman dan negara-negara Skandinavia, tetapi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pendidikan yang diwajibkan kepada setiap warga negara, pemerintah negara-negara liberal pun membiayai sepenuhnya. Di Amerika Serikat pembiayaan itu merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Negara Bagian, Pemerintah Lokal, dan Pemerintah Federal. Mereka menyebut dibiayai oleh masyarakat karena dana yang disalurkan dan dikelola adalah uang yang bersumber dari masyarakat melalui perpajakan. Karena itu di negara liberal seperti Amerika Serikat sekolah yang dibiayai pemerintah disebut “Public School” yang berarti “Financed by the public”. Sedangkan di Jerman disebut “State School”, seperti Indonesia, Sekolah Negeri.

Kalau kita mempelajari berbagai studi seperti yang dilakukan oleh Kwik Kian Gie, kalau dana yang diperoleh dari pajak tidak ada yang bocor, yang menurut perkiraan pak Kwik kebocorannya sekitar 50 %, yang pada tahun 2000 berarti sekitar Rp. 180 triliun , memenuhi tuntutan pasal 31 ayat (2) dan pasal 31 ayat (4) UUD 1945 tidaklah sukar.

Dari serangkaian ulasan tentang pembiayaan pendidikan, tulisan ini berpendapat bahwa mewujudkan sistem pendidikan nasional yang efisien, efektif, dan relevan harus meliputi juga tersedianya dana untuk memenuhi keperluan penyelenggaraan pendidikan nasional sesuai dengan tuntutan pasal 31 ayat (2), yang pendidikan dasar yang diwajibkan dibiayai sepenuhnya oleh Pemerintah (Pusat dan Daerah), dan pasal 31 ayat (4) yang menuntut disediakannya anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% APBN dan 20 % APBD.

Manajemen Pendidikan Nasional

Berbagai negara, sesuai dengan sistem politik dan pemerintahan yang dianut, seperti yang telah disinggung pada bagian terdahulu menganut model manajemen pendidikan secara nasional yang berbeda yang satu dari yang lain. Negara-negara Federal seperti Amerika Serikat dan Republik Federal Jerman menganut model/sistem manajemen pendidikan nasional yang bersifat terdesentralisasi. Namun model desentralisasinya berbeda satu dari yang lain. Sedangkan Negara Kesatuan seperti Perancis, Inggris, dan Jepang, mengenal manajemen pendidikan yang lebih sentralistik daripada model yang dianut negara Federal. Diantara sesama negara kesatuan pun ada yang sangat sentralistik seperti Perancis dan ada yang sentralistik dengan pemberian otonomi kepada daerah seperti Inggris dan Jepang.

Sebelum era reformasi, Indonesia sebagai negara kesatuan menganut model manajemen pendidikan yang “sentralistik”, seperti yang sejak tahun 1789 sampai sekarang dianut oleh Perancis. Sejak tahun 1999 dengan adanya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan penyelenggaraan pendidikan dilimpahkan ke pemerintah daerah kabupaten/walikota (pasal 11 UU No. 22 th 1999). Seberapa jauh

model manajemen yang dilaksanakan sejak tahun 1999 ini sesuai dengan amanat UUD 1945 dan tingkat kemajuan peradaban dan sumber daya pendidikan di seluruh wilayah Indonesia ? Dan model manajemen penyelenggaraan pendidikan nasional yang seperti apakah yang sesuai dengan amanat UUD 1945 dan perkembangan kemajuan masyarakat di abad ke-21 ?

Untuk dapat memberikan jawaban terhadap pertanyaan ini secara memadai perlu dianalisis terlebih dahulu hal-hal berikut ini : (1) makna manajemen pendidikan untuk mencapai visi dan misi pendidikan nasional ; (2) makna amanat UUD 1945 terhadap penyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional ; dan (3) masalah, kendala, dan tingkat perkembangan peradaban dan sumber daya pendidikan. Dari analisis terhadap ketiga wilayah kajian tersebut akan diidentifikasi berbagai implikasi bagi pemantapan model manajemen pendidikan nasional.

Makna manajemen pendidikan nasional bagi pencapaian visi dan misi pendidikan nasional

Sesungguhnya visi dan misi pendidikan nasional dapat dibaca dalam rumusan pasal 31 ayat (3) UUD 1945 dan pasal 32 UUD 1945 serta Pembukaan UUD 1945 yang menurut pendapat penulis merupakan landasan dari dirumuskannya pasal 31 dan pasal 32 UUD 1945. Visi dan misi tersebut adalah “

“Terselenggaranya satu sistem pendidikan nasional yang diusahakan oleh Pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional.”

Dengan jelasnya rumusan tentang visi dan misi tersebut pertanyaan “manajerialnya” adalah “bagaimana sistem pendidikan nasional dirancang, dikembangkan, dilaksanakan, dikendalikan, digerakkan, dan dinilai agar dapat melaksanakan visi dan misi pendidikan nasional, yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional”. Wujud dari telah tercapainya misi pendidikan nasional seperti telah diulas terdahulu antara lain adalah kualitas manusia Indonesia yang memiliki kemampuan intelektual, profesional, vokasional, serta memiliki akhlak dan moral yang mulia serta kepribadian yang mantap dan mandiri, sehingga mampu menghadapi masalah dan tantangan jaman dari masyarakat negara bangsanya dengan rasa kebanggaan nasional, kemanusiaan, kemasyarakatan, keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Karakteristik manusia yang demikian dituntut, sesuai dengan visi dan misi pendidikan nasional, menjadi karakteristik setiap insan manusia Indonesia yang berpendidikan dimanapun mereka berada, apapun suku, ras dan agamanya. Dan ini sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) UU No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang tertulis : “Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu”.

Dalam kaitan dengan masalah pengembangan model manajemen pendidikan secara nasional kita dihadapkan kepada kenyataan yang kontradiktori, yaitu di satu pihak

adanya kewajiban nasional untuk memberikan pendidikan yang bermutu secara merata, dipihak lain masih besarnya disparitas antar wilayah dan daerah di Indonesia dalam hal sumber daya pendidikan dan tingkat perkembangan peradaban antar wilayah. Ada daerah yang sudah berada pada tingkatan peradaban industri dan ada yang bahkan belum sepenuhnya memasuki peradaban pertanian moderen. Dua kutub antara cita-cita meratakan mutu pendidikan secara nasional dan kenyataan disparitas yang demikian besar antar daerah dan wilayah, menjadikan ditempuhnya manajemen pendidikan nasional dengan model desentralisasi dan otonomi yang luas, telah berdampak kepada mutu pendidikan yang lebih memperhatikan. Sebagai salah satu gejalanya adalah besarnya perbedaan antara daerah dan wilayah dalam hal hasil Ujian Akhir Nasional baik SMP maupun SLTA. (SMA dan SMK).

Karena itu nampaknya kita perlu belajar dari Negara Kesatuan yang telah berhasil dalam menyelenggarakan Sistem Pendidikan Nasional seperti Perancis, Britania Raya, dan Jepang yaitu manajemen yang terpusat dengan pemberian otonomi bagi yang telah mampu.

Makna amanat UUD 1945 bagi penyelenggaraan sistem pendidikan nasional

Seperti yang telah berulang disinggung UUD 1945 melalui kalimat-kalimat dalam Pembukaan maupun pasal-pasal nya mengamanatkan diwujudkannya suatu Negara Kebangsaan dan Negara Kesejahteraan yang demokratis berdasarkan Pancasila. Tanpa memahami amanat dasar yang tertulis dan terkandung dalam UUD 1945 kita akan sukar memahami pesan yang tertulis dan yang terkandung dalam pasal 31 dan pasal 32 UUD 1945. Karena dengan merangkaikan amanat yang tertulis dan yang terkandung dari UUD 1945 untuk membangun Negara Kebangsaan dan Negara Kesejahteraan yang demokratis dengan pasal 31 dan pasal 32 menjadi jelas, bahwa : (1) diberinya setiap warga negara hak untuk memperoleh pendidikan (pasal 31 ayat (2)); (2) kewajiban pemerintah menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional (pasal 31 ayat (3)); (3) kewajiban pemerintah memajukan kebudayaan nasional (pasal 32); dan (4) kewajiban pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi (pasal 31 ayat (5)), adalah bagian terpadu yang essensial dari upaya membangun Negara Kebangsaan dan Negara Kesejahteraan yang demokratis berdasarkan Pancasila. Karena itu sesuai dengan visi dan misi pendidikan nasional yang telah diulas terdahulu, terselenggaranya pendidikan nasional yang bermutu, relevan, dan efektif sebagai wahana proses pembudayaan bagi lahirnya manusia Indonesia terdidik yang dapat memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan taraf hidup rakyat yang berkeadilan sosial. Suatu kondisi masyarakat yang memungkinkan setiap warga negaranya dapat menggunakan haknya memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan (pasal 27 ayat (2)). Dalam kaitan ini kita sadar bahwa hanya warga negara yang berpendidikan yang memiliki kemampuan intelektual, profesional, vokasional, akhlak serta moralnya, rasa tanggung jawab dan kepribadian, memenuhi tuntutan dunia kerja di era globalisasi ini yang dapat hidup dan bekerja yang sesuai dengan harkat manusia di abad ke-21. Kualitas manusia yang demikian harus dimiliki oleh semua putra

bangsa dimanapun mereka berada. Inilah makna dari amanat UUD 1945 bagi terselenggaranya pendidikan nasional yang merata dan bermutu.

Masalah, kendala, dan tingkat perkembangan peradaban serta sumber daya pendidikan

Setelah menelaah makna manajemen pendidikan yang relevan dengan visi dan misi pendidikan nasional, dan makna amanat UUD 1945 terhadap penyelenggaraan pendidikan nasional marilah kita melihat kenyataan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yang perlu dijadikan sebagai titik berangkat untuk mengarah kepada karakteristik model manajemen pendidikan nasional yang relevan dan efektif.

Masalah dasar kita dalam membangun negara bangsa adalah masalah yang menyebabkan kita perlu membangun negara bangsa; yaitu heterogenitas dan disparitas baik dalam budaya, kondisi geografis, dan tingkat perkembangan peradaban. Kondisi inilah yang melahirkan motto “Bhinneka Tunggal Ika”. Yang inti pesannya adalah bagaimana heterogenitas dan disparitas ini dapat diarahkan menuju homogenitas dalam pengertian ke-eka-an dalam peradaban Indonesia moderen, yaitu budaya Indonesia yang cerdas, yang berilmu pengetahuan dan teknologi, yang demokratis berdasarkan Pancasila.

Sejarah peradaban dunia menunjukkan bahwa menjadinya dunia ini menjadi “One Global Village” tidak lain karena peran lembaga pendidikan sekolah yang melakukan proses pembudayaan berbagai nilai IPTEK yang mendukung kemampuan masyarakat melalui proses industrialisasi.

Dalam konteks Indonesia yang disparitasnya dalam pengertian tingkat perkembangan peradaban demikian besar peranan pendidikan sekolah sebagai unsur paling essensial dari sistem pendidikan nasional diharapkan dapat berperan mempercepat proses transformasi budaya kearah kehidupan masyarakat bangsa Indonesia yang moderen. Mengingat disparitas juga terletak dalam sumber daya pendidikan antar wilayah dan daerah, agar penyelenggaraan pendidikan nasional benar-benar dapat secara efektif berperan sebagai wahana proses transformasi budaya melalui diterapkannya empat pilar belajar yang telah dianalisis pada bagian terdahulu, ditempuhnya manajemen pendidikan nasional yang terkoordinasi secara nasional dengan pemberian otonomi dalam pengelolaan pelaksanaan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan masing-masing wilayah dan daerah perlu dipikirkan untuk dirancang dan diterapkan secara bijaksana.

Dengan kata lain, berangkat dari pemahaman tentang makna visi dan misi pendidikan nasional, makna manajemen pendidikan nasional bagi tercapainya visi dan misi pendidikan nasional, dan kenyataan heterogenitas dan disparitas budaya, perkembangan peradaban dan tingkat kekayaan sumber daya pendidikan antar wilayah maupun daerah, manajemen penyelenggaraan nasional dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ada adalah Negara Kebangsaan dan Negara Kesejahteraan perlu menempuh model terpusat yang lentur dengan pemberian otonomi kepada wilayah dan daerah yang telah mampu.

Penutup

Dari serangkaian analisis sejak bagian Pendahuluan sampai bagian tentang Wujud Pelaksanaan Pendidikan Nasional dapatlah ditarik beberapa catatan dan kesimpulan berikut.

1. Bahwa dirumuskannya dalam Pembukaan UUD 1945 tentang upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara, dan ditetapkannya pasal 31 dan pasal 32 dalam UUD 1945 untuk menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional dan untuk memajukan kebudayaan nasional yang merupakan landasan filosofis dan tujuan diselenggarakannya satu sistem pendidikan nasional hanya dapat dipahami kalau kita memahami latar belakang sejarah dan konteks sejarah dari gerakan nasional untuk memerdekakan bangsa. Dan dengan memahami latar belakang sejarah dan konteks sejarah pada saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelenggaraan pendidikan nasional merupakan bagian terpadu dari upaya membangun Negara Kebangsaan Indonesia, yang adalah Negara Kesejahteraan yang demokratis berdasarkan Pancasila, seperti tradisi yang telah ditempuh oleh Negara-negara Kebangsaan di dunia yang kini menjadi negara maju seperti Perancis, Jerman, Britania Raya, Amerika Serikat, dan Jepang.
2. Bahwa sejak para pendiri Republik meninggalkan panggung penyelenggaraan pemerintahan negara perhatian pemerintah untuk menjadikan penyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional sebagai bagian terpadu dari upaya membangun negara bangsa Indonesia, yang maju, cerdas, berkeadilan sosial, dan demokratis berdasarkan Pancasila tidak lagi nampak. Pemahaman tentang makna pendidikan nasional untuk kepentingan nasionalpun berubah-ubah dari era ke-era berikutnya. Berbagai upaya pembaharuan pendidikan tidak memperoleh dukungan yang diperlukan. Sistem pendidikan nasional dari sebuah negara kebangsaan dan kesejahteraan yang demokratis tidak lagi secara berencana diupayakan untuk dapat mengembangkan potensi peserta didik secara optimal dan mengarahkannya sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Yang berlangsung hanyalah memperluas kesempatan memperoleh pendidikan tanpa didukung dengan dana dan persyaratan minimal bagi terselenggaranya proses pendidikan sebagai transformasi budaya menuju masyarakat bangsa Indonesia yang cerdas, maju, sejahtera, dan demokratis berdasarkan Pancasila. Berbagai prinsip pendidikan yang telah ditetapkan dalam UU Kependidikan bahkan tidak diupayakan untuk dapat dilaksanakan.
3. Bahwa penyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional akan dapat melaksanakan fungsi konstitusionalnya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional bila pendidikan nasional yang berlangsung pada setiap satuan dan jenjang pendidikan dapat merupakan proses pembelajaran yang bermakna proses pembudayaan berbagai kemampuan, nilai, dan sikap dari seorang Indonesia yang cerdas, berkarakter, berkepribadian, beriman, bertaqwa, dan memiliki kemampuan profesional/vokasional sesuai dengan tuntutan masyarakat di era globalisasi. Untuk itu perlu dirancang, dikembangkan, dan dilaksanakan pendidikan yang memungkinkan

terjadinya proses pembelajaran yang bermakna “*learning to know*”, “*learning to do*”, “*learning to live together*” dan “*learning to be*”, yaitu empat pilar belajar yang disarankan oleh Komisi Internasional untuk Pendidikan Abak Ke-21 UNESCO untuk menjadikan proses pendidikan dapat mengembangkan karakter dan kecerdasan menghadapi abad ke – 21. Agar penyelenggaraan pendidikan nasional mampu mewujudkan terjadinya proses pendidikan yang menerapkan empat pilar belajar tersebut perlu dirancang suatu sistem pendidikan yang meliputi : (1) kurikulum; (2) evaluasi dan promosi; (3) pendidikan dan pembinaan guru; (4) pembiayaan pendidikan; dan (5) model pengelolaan pendidikan secara nasional yang dirancang secara sistematis dan dilaksanakan secara sinergik sehingga dapat memungkinkan terjadinya proses pembelajaran sebagai proses pembudayaan seperti yang diuraikan pada bagian keempat dari tulisan ini.

Demikianlah serangkaian analisis tentang pendidikan nasional dalam sistem pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Almufti, In'am, (1999). *Learning : The Teasure Within*. Paris: Unesco
- BPS, Bappenas, UNDP, (2004). *The Economics of democracy: Financing Human Development In Indonesia*. Jakarta.
- Brumbaugh, Ribut S., and Lawrence, Nathaniel M., (1963). *Philosophers on education: Six Essayson the Foundations of Western Thought*. Boston: Houghton Mifflin, Co.
- Cohen, Yehudi, (TT). Schools and Civilazation State. In Fisher (editor). *The Social Science and The Comparative Studyn of The Educational System*.
- Djojonegoro, Wardiman, (1995). *Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Departemen P dan K.
- Delors et al, Jacques, (1999). *Learning : The Teasure Within*. Paris: Unesco
- Dewey, John, (1964). *Democracy in Education*. New York, NY: The Mac Millan.
- Harbison, F., and Myers, Charles A., (1965). *Manpower and Education: Country Studies in Economic Development*. New York, NY: Ms Graw Hill Book Co.
- Kennedy, Paul, (1987). *The Rise and Fall of The Great Powers*. New York, NY: Vintage Books, a Division of Random House.
- Kwuk Kian Gie, dkk, (2004). *The Economics of Democracy: Financing Human Development in Indonesia*. Jakarta: BAPPENAS, BPS, UNDP.
- MacMohan, Walter, dkk, (2001). *Memperbaiki keuangan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Pusat Penilaian Kebijakan, Balitbang Depdiknas, UNICEF, dan UNESCO
- Smith, Anthony D., (1998). *Nations and Nationalism in a Global Era*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Soekarno, (1957). *Satuan tahun Ketentuan. Pidato Presiden pada 17 Agustus 1957. Dalam Dari Proklamasi sampai RESOPIM*. Jakarta: Dep. Penerangan RI.
- Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Departemen Penerangan RI.
- Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Departemen Penerangan RI.

2. PENDIDIKAN MULTIBUDAYA

Dadang Supardan

ABSTRAK

Tulisan ini bertolak dari suatu pemikiran bahwa pendidikan multibudaya memiliki use value secara luas meliputi any set of processes by which schools work with rather than against oppressed groups. Melalui pendidikan multibudaya, dapat dikembangkan suatu pengakuan, penghargaan, dan keadilan terhadap etnik minoritas baik yang menyangkut hak-hak universal yang melekat pada hak-hak individu maupun komunitasnya yang bersifat kolektif. Multibudaya meliputi sebuah pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang, dan sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Ia meliputi penilaian terhadap kebudayaan-kebudayaan orang lain, bukan dalam arti menyetujui seluruh aspek dari kebudayaan-kebudayaan tersebut, melainkan mencoba melihat bagaimana kebudayaan tertentu dapat mengekspresikan nilai bagi anggota-anggotanya sendiri.

Pendidikan multibudaya pada hakikatnya memiliki dua makna; (1) ia merupakan realitas sosial dalam masyarakat yang heterogen, di mana dari segi ini sebanyak 95 % negara-negara di dunia pada dasarnya adalah bersifat multibudaya yang secara etnis dan budaya bersifat plural; (2) pendidikan multibudaya telah diangkat sebagai suatu keyakinan, ideologi, sikap, maupun kebijakan yang menghargai pluralisme etnik dan budayanya sebagai sesuatu yang berharga, potensial, harus dipelihara dan ditumbuhkembangkan.

Pengertian dan Ruang Lingkup Pendidikan Multibudaya

Istilah “multibudaya” (*multiculture*) jika ditelaah asal-usulnya mulai dikenal sejak tahun 1960-an, setelah adanya gerakan hak-hak sipil sebagai koreksi terhadap kebijakan asimilasi kelompok minoritas terhadap *melting pot* yang sudah berjalan lama tentang kultur dominan Amerika khususnya di New York dan California (Banks, 1984: 3, 164; Sobol, 1990: 18). Istilah multibudaya tersebut selalu melekat dengan pendidikan, yang mempunyai arti secara luas meliputi *any set of processes by which schools work with rather than against oppressed groups* (Sleeter, 1992: 141). Pendapat tersebut sejalan dengan pernyataan Will Kymlicka, profesor filsafat pada *Queen University Canada* dalam bukunya *Multicultural Citizenship*, bahwa multibudaya merupakan suatu pengakuan, penghargaan, dan keadilan terhadap etnik minoritas baik yang menyangkut hak-hak universal yang melekat pada hak-hak individu maupun komunitasnya yang bersifat kolektif dalam mengekspresikan kebudayaannya (Kymlicka, 2002: 8, 24). Sedikit berbeda dengan Stavenhagen (1986), yang memandangnya bahwa konsep “multibudaya” mengandung dua pengertian.

Konsep *pertama*; ia merupakan realitas sosial dalam masyarakat yang heterogen. Pernyataan dari segi ini sebanyak 95 % negara-negara di dunia pada dasarnya adalah bersifat multibudaya mengingat secara etnis dan budaya bersifat plural. Konsep *kedua*; multibudaya telah diangkat sebagai suatu keyakinan, ideologi, sikap, maupun kebijakan yang menghargai pluralisme etnik dan budayanya sebagai sesuatu yang berharga, potensial, yang harus dipelihara dan ditumbuhkembangkan.

Yudistira K. Garna (2003: 164), Antropolog Universitas Pajajaran berpendapat bahwa dalam masyarakat majemuk (*plural society*), terdapat dua tradisi dalam sejarah pemikiran sosial. *Pertama*; bahwa kemajemukan itu merupakan suatu keadaan yang memperlihatkan wujud pembagian kekuasaan di antara kelompok-kelompok masyarakat yang bergabung atau bersatu, dan rasa menyatu itu dibangun melalui dasar kesetiaan (*cross-cutting*) kepemilikan nilai-nilai bersama dan perimbangan kekuasaan (Peh, 1985: 77-79). *Kedua*; dalam masyarakat majemuk dikaitkan dengan relasi antar ras/etnik, bahwa masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok ras/etnik yang berada dalam satu sistem pemerintahan, oleh karena itu sering mengalami konflik dan paksaan (Garna, 2003: 164-165).

Implikasi dari adanya masyarakat majemuk tersebut menurut Smith (1965) juga memiliki berbagai kelompok budaya yang beragam. Masyarakat yang memiliki budaya beragam ini maka terminologi multibudaya sering didiskusikan baik sebagai respons menghadapi tantangan realitas sosial itu, maupun sebagai pengakuan atas diversitas budaya majemuk tersebut. Pendidikan multibudaya dalam perkembangannya sebagai suatu sikap, praktik sosial, dan kebijakan pemerintah, yang sekarang ini telah meluas ke arah suatu keyakinan atau kebijakan politik pemerintah semacam 'penanaman dan pemeliharaan ideologi' dalam pengembangan kebudayaan menciptakan masyarakat yang sehat. Berry, Poortinga, dan Segall (1998: 577-580) dalam karyanya *Cross-cultural psychology: Research and applications*, menyebutnya multikulturalisme pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan suatu konteks sosiopolitik yang memungkinkan individu dapat mengembangkan identitas yang sehat dan secara timbal-balik mengembangkan sikap-sikap positif antar kelompok.

Kymlicka (2003: 13-15) maupun Harjanto (2001: 89-90) yang menghubungkan multibudaya dengan integrasi bangsa dalam tulisannya berjudul *Antara Kebangsaan dan Kewarganegaraan*, menyatakan bahwa bukannya pendekatan *ethnocultural nationalism/ethnic nationalism* maupun *civic-nationalism*, melainkan sebaiknya *multicultural nationalism*. Mereka berpendapat, melalui pengembangan *multicultural nationalism* tersebut dapat dipelihara dan dikembangkan integrasi bangsa yang lebih handal. Sebab, menciptakan masyarakat yang berkeadilan sosial yang dipersatukan oleh nilai-nilai bersama; menghargai keragam etnis serta berkomitmen terhadap kesamaan antar kelompok akan memungkinkan terwujudnya suatu *social and political ideal of togetherness in difference* (Young, 1990: 175). Prestasi persatuan bangsa yang menghargai perbedaan ini, pernah dicontohkan oleh Perdana Menteri Trudeau keturunan Prancis Kanada yang sering dijadikan model multikulturalisme yang konsisten dengan

kebijakan “mosaic-nya” (Marger, 1985: 252; Supardan, 2002: 34). Kemudian Marger (1985: 258) lebih lanjut menyatakan bahwa:

The Canadian ideology, in contrast, has historically favored a more pluralistic outcome of the massing of various ethnic groups. There has been and remains a greater awareness and tolerance of ethnic separateness. A simplified view is “unity in diversity”. Canada in this ideal view, is mosaic, the various pieces of which fit together within common political and economic framework.

Pendidikan multibudaya yang sarat dengan penghargaan, penghormatan, dan kebersamaan dalam suatu komunitas yang majemuk inilah yang oleh Blum (2001: 16), , menyatakan bahwa:

Multibudaya meliputi sebuah pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang, dan sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Ia meliputi penilaian terhadap kebudayaan-kebudayaan orang lain, bukan dalam arti menyetujui seluruh aspek dari kebudayaan-kebudayaan tersebut, melainkan mencoba melihat bagaimana kebudayaan tertentu dapat mengekspresikan nilai bagi anggota-anggotanya sendiri.

Kata kunci dalam pendidikan multibudaya tersebut, yakni pengakuan adanya perbedaan dan penghargaan, dua kata yang selama ini sering dikontraskan. Karena itu dalam pendekatan multibudaya tidak sesungguhnya berlandaskan pada pemilikan yang mengisaratkan pada memiliki atau dimiliki budaya tertentu, tetapi berlandaskan pada kesadaran untuk menghargai dan menghormati yang mampu bernegosiasi tentang rumusan-rumusan realitas yang ada. “Ia tak seutuhnya merupakan bagian ataupun sama sekali terpisah dari budayanya, alih-alih ia berada di perbatasan” (Adler, 1982: 389). Keanekaragaman budaya bukan faktor penentu pemecah-belah bangsa, melainkan diharapkan mampu menjadi “bumbu kehidupan” bagi perekat bangsa-bangsa di dunia.

Elemen-elemen pendidikan multibudaya, menurut Blum (2001:19) mencakup tiga sub-nilai sebagai berikut; (a) *menegaskan identitas kultural seseorang, mempelajari dan menilai warisan budaya seseorang*, (b) *menghormati dan berkeinginan untuk memahami serta belajar tentang etnik / kebudayaan-kebudayaan selain kebudayaannya*; (c) *menilai dan merasa senang dengan perbedaan kebudayaan itu sendiri*; yaitu memandang keberadaan dari kelompok-kelompok budaya yang berbeda dalam masyarakat seseorang sebagai kebaikan yang positif untuk dihargai dan dipelihara. Pendapat Blum tersebut lebih jelasnya akan diuraikan di bawah ini.

Pertama, pengertian suatu “pemahaman identitas kultural orang lain” tidak diartikan ataupun menegaskan bahwa semua aspek kebudayaan itu seluruhnya “baik”, seperti yang banyak dikhawatirkan oleh beberapa kritikus multikulturalisme. Suatu pemahaman identitas kultural orang lain dalam hal ini tidak menghalangi kritik berdasarkan

standar-standar dari kebudayaannya yang mungkin dilanggar oleh kebiasaan-kebiasaan khusus dalam kebudayaan tersebut, maupun berdasarkan norma-norma eksternal bagi kebudayaan itu (Schramm, 2001: 7; Spradley, 1997: 13-15). Penggunaan standar eksternal untuk sesuatu kebudayaan adalah sah (misalnya suatu standar khusus tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang diambil dari tradisi Barat yang liberal), walaupun merupakan sebuah isu yang kompleks. Konsep multibudaya selalu memperingatkan untuk menyalahkan kebudayaan itu sebagai suatu yang universal, seperti dengan menyatakannya “tidak layak” atau “mendiskualifikasikannya” sebagai sumber pengetahuan moral bagi mereka yang berada di luar kebudayaan itu. Oleh karena itu dalam multibudaya tidak perlu dan tidak harus mengidentifikasi dirinya dengan pandangan bahwa para anggota suatu kebudayaannya tidak pernah memiliki kedudukan moral untuk membuat kecaman tentang kebiasaan-kebiasaan dari kebudayaan lain (Blum, 2001: 19). Pandangan terpenting dari pengenalan atau pemahaman terhadap budaya orang lain itu adalah bagaimana kebudayaan-kebudayaan tersebut dapat mengekspresikan nilai-nilai bagi para anggotanya sendiri (Harris dan Moran, 2001: 57, Blum, 2001: 16).

Kedua, pendidikan multibudaya itu “menghormati kebudayaan-kebudayaan orang lain”, merupakan kelanjutan yang penting bagi fokus kegiatan pertama. Pemahaman tersebut dimaksudkan tidak sekedar sesuatu yang bisa ditolerir apalagi dibenarkan, melainkan diperlukan suatu tanggapan yang kritis dari pihak-pihak eksternal untuk berperanserta dalam memberikan dukungan, alasan-alasan, pengakuan, penghargaan, penilaian, penguatan, dan empati dalam kebersamaan hidup sebagai bagian bangsa secara integral. Sebab adanya toleransi, pengakuan, dan penghargaan dari etnis dan budaya lain, akan berkontribusi dalam memberikan rasa aman dan tentram, yang pada gilirannya harga diri-pun meningkat karena ada rasa percaya diri (*self-confidence*). Identitas budaya individu merupakan unsur dirinya yang benar-benar berarti, dalam memahami budaya sendiri harus menjadi bagian yang vital dari tugas pendidikan. Pemahaman atas kebudayaan seseorang dari pendukung budaya lain akan menjadi sumbangan yang berarti bagi individu dan masyarakat tertentu tentang kebudayaan mana yang merupakan bagian daripadanya, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari unsur-unsur yang pertama dalam pendidikan multibudaya tersebut.

Pemerintahan yang bijak dalam menghadapi masyarakat yang majemuk tingkat kemajuannya, dapat melakukan berbagai kebijakan baik pemberian kesamaan kesempatan maupun hasil bahkan sekalipun bersifat protektif, terutama kepada kelompok/etnis yang “belum setara”. Penghargaan terhadap etnis dan budaya lain ini di negara lain, contohnya memerlukan bantuan khusus melalui kebijakan *preferensial* (Weiner, 1996: 441). Kebijakan *preferensial*, mengacu kepada hukum/peraturan, ketentuan administratif, pengadilan, dan intervensi publik lainnya untuk memberikan kebaikan publik dari kebaikan privat tertentu (seperti; untuk memasuki sekolah/ perguruan tinggi, pekerjaan, kenaikan pangkat, dan sebagainya). Di Amerika Serikat kebijakan ini disebut *Tindakan Afirmatif* atau *Kebijakan Kompensasi*, suatu sebutan bagi para pendukungnya, sedangkan bagi para penentanganya disebut “*Tindakan Diskriminasi Terselubung*”.

Seymour Martin Lipset, yang merupakan *President of the American Political Science Association and the American Sociological Association* dalam karyanya *The First New Nation: The United States in Historical & Comparative Perspective*, menyebutkan bahwa kontroversi tajam antara nilai-nilai egalitarian dan individualistik di Amerika makin mereda dengan munculnya anggapan persetujuan itu semata-mata untuk menciptakan persaingan yang lebih adil untuk mencapai “kesamaan kesempatan” dan “kesamaan hasil” karena orang kulit hitam pernah mengalami diskriminasi masa lalu, untuk perbaikan nasib masa depan (Lipset, 1994: xlv). Di India politik ini sering disebut kebijakan “diskriminasi protektif” ataupun “reservasi” (Weiner, 1996: 441).

Alasan perlu adanya tindakan *affirmative* bertolak dari prinsip “buta - warna” (tesis yang menganggap bahwa tidak ada hukum atau kebijakan publik yang dirancang untuk memperlakukan orang secara berbeda karena perbedaan warna kulit) dan beranggapan bahwa “kesadaran warna” itu invalid, pandangan demikian adalah salah. Sebab secara empirik, tidak bisa dipungkiri dalam hubungan “hitam-putih”, orang kulit hitam sendiri mengakui bahwa warna kulit hitam itu buruk dan jelek, walaupun ia berusaha mengurangi efek-efek konsesi ini dengan menegaskan bahwa yang hitam itu hanyalah kulitnya. Namun upaya penghiburan yang diberikan kenyataannya tidak berguna atau hanya sementara. Karena, kenyataannya pula orang hitam tidak dapat memilih untuk tidak menjadi hitam. Jadi beberapa orang hitam maupun putih mencurigai kepalsuan slogan “hitam itu indah”, “hitam itu manis” dan serupa lainnya.

Boxil penulis *Black and Social Justice*, mengatakan walaupun Russel dan Brand (1979: 187) dalam bukunya *Second Wind* yang menuliskan slogan cukup liberal *I din't notice* (Saya tidak memaklumkan), walaupun diucapkan “manis tanpa dosa”, namun sesungguhnya karena penulisnya kulit putih sering berekspresi penuh kebanggaan, sama saja dengan memaklumpkannya. Tetapi Boxil juga keberatan jika *affirmative action* tersebut dikaitkan dengan kebijakan Jim Crow yang sekarang telah dihapuskan, karena bertujuan mensubordinasikan kulit hitam yang memiliki label pemalas, irasional, dan sifat-sifat buruk yang melekat lainnya (Boxil, 2001: 104-106).

Perbedaan persepsi seperti itu memang sulit dihindari, atau dalam penggunaan terminologi itu sering mengungkapkan sudut pandang dan kepentingan para penulis, karena itu sangat sulit untuk memperoleh pandangan yang benar-benar netral. Namun dengan adanya pengakuan dan penghargaan identitas budaya individu lain untuk diakui sebagai individu dan kelompok yang memiliki hak serupa, merupakan unsur vital tugas dalam pendidikan. Penghargaan terhadap budaya seseorang sangat berkontribusi besar terhadap pengakuan budaya suatu anggota masyarakat tertentu tentang budaya mana yang merupakan bagian integral dalam suatu masyarakat luas, merupakan bagian yang berarti dari unsur-unsur multikulturalisme tersebut.

Komponen *ketiga* adalah, “memandang keanekaragaman budaya itu sebagai sesuatu kebaikan yang positif untuk dihargai, diterima, dan dipelihara dalam komunitasnya”. Blum (2001: 20-21) berpendapat bahwa manifestasi penerimaan keragaman budaya sebagai sesuatu kebaikan yang diterima dan dipelihara itu untuk mengekspresikan nilai tersebut bisa diwujudkan lebih konkrit dari tindakan nomor dua. Ekspresi nilai budaya tersebut bisa

dilakukan melalui tiga bentuk. *Pertama*; dengan penerimaan etnis dan budayanya yang tegabung dalam kelompok/bangsa itu untuk mempelajari kebudayaan nenek moyang tentang asal usul kelompok etnis, bangsa, atau peradabannya. *Kedua*, dengan mempelajari pengalaman sejarah dari kelompok etnis tersebut. Pengalaman-pengalaman sejarah, cara hidup, kemenangan-kemenangan dan kemunduran, kesenian, sastra, serta kontribusi-kontribusi perjuangan kepada bangsa yang didiaminya perlu dibahas secara rinci (Blum, 2001: 21). Dapat dianalogikan, jika di Indonesia bisa dikaji bagaimana sejarah kontribusi perjuangan etnik; Jawa, Sunda, Batak, Cina, Maluku, Minahasa, dan seterusnya terhadap perjuangan bangsa khususnya zaman kolonial Belanda. Para pendukung multibudaya (Barat) dalam menanggapi terhadap contoh pernyataan serupa itu, pada umumnya sangat setuju atas pelajaran semacam itu diajarkan di sekolah-sekolah (Saunders, 1982: 121-122). Manusia dan pendukung kebudayaan inilah yang dapat disebut “manusia interkultural”, yang dipengaruhi oleh lebih dari satu kebudayaan tertentu, walaupun ada persamaan seperti kebudayaan nenek moyangnya, namun dengan memiliki kebenarannya sendiri ia dapat beradaptasi (Gudykunst dan Kim, 1984: 229-235).

Gudykunst dan Kim (1984: 237) lebih jauh menjelaskan bahwa manusia interkultural atau antar budaya itu adalah orang yang telah mencapai tingkat tinggi dalam proses antar budaya yang kognisi, afeksi, dan perilakunya tidak terbatas, tetapi terus berkembang melewati parameter-parameter psikologis suatu budaya. Mereka memiliki kepekaan budaya yang berkaitan erat dengan kemampuan berempati terhadap budaya tersebut. Mereka juga memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi terhadap budaya orang lain tanpa harus mengorbankan budaya sendiri.

Ketiga; kebudayaan-kebudayaan etnis masa kini dalam kelompok-kelompok yang telah dibahas itu. Hal ini merupakan dimensi yang langsung terwujud pada diri generasi mudanya sebagai anggota kebudayaan tersebut. Kebudayaan etnis masa kini, mencakup; ritual-ritual etnis keluarga, makanan, kebiasaan-kebiasaan tentang peran-peran dan interaksi dalam keluarga, nilai-nilai, pilihan musik, falsafah hidup, dan lainnya (Blum, 2001: 20). Departemen Pendidikan Nasional, khususnya di lingkungan Pendidikan Dasar dan Menengah, dalam pengembanaan budaya seperti itu belakangan ini telah menerima perempuan pemeluk agama Islam untuk memakai seragam jilbab di sekolah-sekolah sebagai bagian hak asasi individu. Hak asasi ini ironisnya untuk pakaian-pakaian etnis/adat seperti; pakaian adat Sunda, Jawa, Minang, Minahasa, dan seterusnya hampir tidak pernah ada upaya enkulturasi yang konsisten diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari. Satuan-satuan pendidikan yang mengenalkan identitas tersebut terbatas di TK dan SD, itu-pun hanya berlaku pada perayaan/hari besar bersejarah saja seperti Hari Kartini dan di luar itu tidak pernah.

Alasan pemerintah tidak melaksanakan kebebasan seperti itu jika dirunut lebih jauh bisa berdalih untuk kepatutan, keseragaman, dan kesederhanaan (Dikdasmen, 1984). Persoalan yang muncul: *Pertama*, apakah kepatutan dan kesederhanaan tidak ada tempat dalam ketidakseragaman? *Kedua*; apakah dibenarkan hanya untuk legitimasi keseragaman, maka dibolehkan meniadakan identitas budaya yang dimilikinya? Jadi, untuk menumbuhkan penghargaan dan penerimaan dalam budaya etnis yang beragam seringkali dituntut

menunjukkan keberanian langsung untuk menjadi satu bagian dari kebudayaan tersebut dengan membiarkan untuk mengekspresikan budayanya secara lugas dan penuh “tanggung jawab” (Blum, 2001: 21-22).

Larry May (2001: 156) profesor filsafat pada *Washington University* di St. Louis, menambahkan dengan menyatakan bahwa “tanggung jawab” moral atas kejahatan-kejahatan rasial-pun dipikul oleh semua anggota komunitas, termasuk oleh mereka yang secara tidak langsung melakukan kejahatan itu. Artinya bahwa betapa perbedaan-perbedaan bawaan itu dapat menjadi suatu khasanah dalam menuju kebersamaan. Karena itu sangat relevan sebagai kata kunci dari pernyataan di atas adalah adanya “keragaman” dan “penghargaan”. Jika dalam Islam mengajarkan “*rachmatan li al-‘alamin*” menjadi mediator bagi perbedaan-perbedaan budaya tersebut (Jandra, 2003: 71-72), mestinya kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki motto *Bhinneka Tunggal Ika*, betul-betul menghargai keragaman sosio-budaya bangsa, sebab ia hakiki dan mengungkapkan sebuah kebenaran historis, antropologis, sosiologis, dan teologis.

Tradisi dalam pemikiran kita yang kuat walaupun sering menyesatkan adalah bahwa manusia hanya merasakan perasaan sebagai komunitas ketika mereka menganggap diri mereka sama dengan anggota-anggota lainnya dalam suatu masyarakat (Blum, 2001: 25). Bellah dan rekan-rekannya dalam *Habits of the Heart: Individualism and Commitment in American Life*, menyatakan bahwa jenis komunitas yang diperlukan di Amerika Serikat adalah komunitas yang pluralistik, komunitas yang meliputi rasa keterikatan dan hubungan yang berasal dari aktivitas, keadaan, tugas, lokasi bersama dan sebagainya, terutama didasarkan pada pengalaman kemanusiaan bersama, namun dengan mengakui dan menilai perbedaan-perbedaan budaya dan perbedaan-perbedaan lainnya juga (Bellah, 1985 : 51). Perlunya penghargaan keragaman etnis dan budaya dalam masyarakat majemuk ini juga dikemukakan oleh sejarawan Amerika Serikat yang sedikit angkuh dan bangga, Michael Kammen dalam karyanya *People of Paradox*. Kammen (1977: 133) menyatakan bahwa :”Saya tidak percaya bahwa keragaman merupakan sifat khas Amerika. Tetapi saya sungguh meyakini bahwa keragaman yang demikian meluas adalah khas Amerika”.

Pendidikan Multibudaya Sebagai Keniscayaan dalam Kebijakan Sosial-Politik

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang pluralis, bahkan mungkin yang paling pluralis dunia. Bangsa ini terdiri ratusan etnis, agama, budaya, dan adat istiadat, yang tersebar di sekitar 13.000 pulau besar dan kecil, serta berbicara dalam ratusan bahasa daerah (Koentjaraningrat, 1970, 21-33; Thohari, 2000: 129). Pluralisme multidimensional ini telah membentuk mozaik ke-Indonesia-an yang sangat indah dan mempesona, tetapi sekaligus rawan terhadap konflik. Ketidakmampuan mengelola pluralisme inilah bisa mendorong terjadinya gejolak sosial politik yang bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras, Antar golongan) yang terjadi separatis di akhir-akhir ini.

Indonesia bukan satu-satunya bangsa dan negara yang memiliki pluralisme etnis. Bangsa Amerika contohnya, juga dikenal sebagai bangsa sangat pluralistik secara etnik.

Karena pluralistiknya Amerika menjadikan "*E Pluribus Unum*" sebagai jargonnya. Kemudian bangsa Kanada, memiliki kebijakan multikulturalisme dengan "*mozaic-nya*", dengan jargon "*unity in diversity*" (Marger, 1985: 258, Supardan, 2002: 34), sebuah semboyan yang mirip "*Bhinneka Tunggal Ika*" yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Bangsa Singapura juga menyebut dirinya sebagai bangsa pluralis, meski etnik Cina memiliki jumlah yang lebih dominan. Demikian juga dengan bangsa-bangsa lain. Sedikit sekali negara yang dihuni oleh satu etnis saja. Singkatnya, pluralisme bukanlah eksklusif milik kita saja, melainkan merupakan fenomena umum yang bisa ditemukan di mana saja.

Pendidikan multibudaya sebenarnya merupakan suatu keharusan kebijakan sosial-politik. Karena fakta pluralitas etnik dan budayanya tersebut tidak saja dibenarkan secara historis, sosiologis, antropologis, tetapi juga teologis. Selain itu pluralisme juga merupakan akibat logis dari gelombang urbanisasi dan globalisasi yang terjadi di dunia. Catatan yang perlu dihindarkan dalam pendidikan multibudaya ini adalah kecenderungan eksklusifisme dan fanatisme etnis yang sempit. Pasalnya fanatisme etnis akan menyulut konflik secara potensial memang selalu ada dan inheren dalam masyarakat yang multietnis baik yang disebabkan oleh stereotipe maupun prasangka-prasang sosial lainnya. Secara sederhana masalahnya adalah bagaimana agar sesuatu yang potensial dalam arti negatif, tidak menjadi aktual. Artinya bahwa diperlukan untuk mengatur agar kebutuhan dan kebenaran pendidikan multibudaya itu menjadi penetapan ideologis sebagai bangsa Indonesia dari semua etnis, golongan agama, budaya, bahasa yang beraneka ragam itu merasakan satu bangsa yang benar-benar dihayati, dan diamalkan, tanpa menghilangkan identitas "*primordial*" yang kaya dengan perbedaan itu.

Jawaban yang diajukan untuk menjawab permasalahan tersebut juga tidak mungkin dengan menghilangkan identitas "*primordial*" itu dengan menindas identitas yang kaya dengan keragaman sekalipun dengan maksud memperkuat persatuan nasional. Hal ini sama halnya dengan "*mati secara sosial dan budaya*" (Magnis-Soeseno, 2000, 30). Dari atropi (penyusutan) sebuah identitas asli, tidak mungkin muncul identitas baru. Jadi tidak mungkin tercapai kesatuan bangsa yang terdiri atas banyak komponen, dengan meniadakan kemajemukan itu. Bangsa Indonesia tidak mungkin dilarutkan identitasnya sebagai orang Jawa, Sunda, Batak, Minang, Dayak, Bugis, Ambon, Islam, Hindu, Kristen, Budha, dan seterusnya. Sebab tindakan itu tidak akan dapat menciptakan identitas Indonesia yang sesungguhnya, melainkan hanya akan menghancurkan identitas yang sebenarnya. Bangsa Indonesia tidak mungkin dapat dibangun oleh selain orang Indonesia sendiri. Walaupun ironisnya banyak pemimpin dan penguasa kita mengambil jalan pintas seperti itu. Persatuan bangsa yang dicapainya pun hanyalah sebuah persatuan semu yang dibangun oleh identitas atas ritus-ritus kenegaraan yang kosong (Piliang, 2001: 227; Magnis-Suseno, 2000: 31).

Individu maupun kelompok dalam perannya sebagai manusia memiliki identitas keunikannya yang tak pernah tergantikan dalam personalitasnya, walaupun selalu berusaha menserasikan seluruh pengetahuan, persepsi tentang realitas dalam sosialitasnya. Sebagai bangsa yang pluralis, mestinya dapat memahami hakikat apa itu primordialisme. Kalau saja seseorang memiliki akar dalam lingkungan sosialnya yang termasuk primordial, lalu ia bekerja sesuai dengan bobot dan tanggung jawabnya masing-masing, itu bukan

berarti primordialisme. Karena ketertanaman sosio-kultural, justru merupakan syarat keutuhan personal dan psikis seseorang. Berbeda dengan suatu keterikatan primordial (yang wajar) kemudian menjadi primordialistik (tidak wajar) yang melampaui lingkaran primordial dengan kata lain menjadi “eksklusif”, seseorang dengan mengidentifikasikan diri hanya dengan salah satu unsur primordial saja. Hal itu jelas pada orang tersebut terjadi *desosialisasi*, suatu pemiskinan sosial karena tidak mampu lagi merasakan solidaritas dengan orang lain sebagai manusia dalam kesatuan bangsa. Sikap semacam ini bahkan dapat menjadi primordialistik fanatik yang sempit apabila salah satu keterikatan primordial, misalnya pada salah satu suku, maupun agama menjadi sedemikian dominan. Keluarga dan nilai-nilai dominan umum akhirnya menjadi tidak lagi dirasakannya. Primordialisme semacam itu dapat dikategorikan “patologi psikis” jika menyangkut individu, dan patologi sosial jika menyangkut kelompok (Horton & Hunt, 1999: 195-197). Primordialisme yang seperti itu pula yang merupakan suatu regresi, suatu penolakan terhadap keterbukaan.

Pendidikan multibudaya memang sepintas dalam banyak hal dapat menimbulkan rasa khawatir terhadap hubungan antara agama dan kebudayaan. Kekhawatiran ini sesungguhnya dapat dijawab secara sederhana; bahwa agama adalah ciptaan Tuhan yang permanen dan universal, sedangkan kebudayaan adalah buatan manusia yang temporal dan spatial. Bila dirunut ke belakang, kekhawatiran itu bersumber dari ketakutan teologis mengenai relasi antara yang *sakral* dan *profan* (Eliade, 2001: 274-275; 2002: 211). Secara ekstensial, bila ke-Tuhanan (agama) dipahami dan dihayati sebagai tujuan akhir yang kemudian melahirkan apa yang disebut “aktualisasi”, maka aktualisasi kesadaran akan Tuhan dalam perilaku menjadi tidak mengenal dualisme antara yang suci dan duniawi. Dengan demikian agama sebagai yang sakral menjadi substansi atau inti kebudayaan (Abdullah, 2003: xii). Ironisnya, tidak semua pemeluk agama memahami masalah ini dengan benar. Mereka agak phobia memahami budaya lokal. Kekuatan hegemoni agama formal yang didukung oleh otoritas ortodoksi menundukkan budaya lokal termasuk seni tradisi *vis a vis* otoritas keagamaan. Kuntowijoyo (2003: 16) sejarawan dan budayawan Universitas Gajah Mada yang merasa prihatin terhadap fenomena tersebut, menyebutnya tidak sedikit orang yang memandang agama telah menjadi “buldoser” kultural atas pluralitas ekspresi kebudayaan. Tradisi budaya lokal padahal sarat akan pesan-pesan filosofis, baik dalam aspek spiritual, moral, mentalitas, maupun pesan dan kritik sosial (Abdullah, 2003: xiii). Para pengamat seni bahkan berpendapat bahwa, seni-lah satu-satunya wilayah yang sulit dikooptasi oleh institusi kenegaraan (Mack, 2001: 7-11; Dickie, 1971: 27; Peransi, 1985: 8-9). Seni merupakan ekspresi hidup dan kehidupan serta sumber inspirasi gerakan spiritual, moral, dan sosial dalam mencairkan ketegangan sosial. Di balik keterbatasannya pranata lokalnya, seni juga mengandung makna universal yang dapat paralel dengan agama bagi keluhuran budi manusia

Kemajemukan etnis dan budaya sebetulnya baik secara historis maupun antropologis yang ada di Indonesia itu sudah sangat kondusif bagi penerapan pendekatan pendidikan multibudaya. Indonesia yang memiliki motto kenegaraan *Bhinneka Tunggal Ika*, adalah hakiki dan mengungkapkan kebenaran historis yang tidak dapat disangkal lagi

sejak zaman kerajaan dahulu. Kerajaan Majapahit memiliki politik hubungan antar kerajaan yang terungkap dalam semboyan “mitreka satata” yang berarti “persahabatan dengan dasar saling menghormati” dengan kerajaan-kerajaan Asia Tenggara lainnya seperti Champa, Syam, Burma. Pujangga Empu Tantular pernah melukiskan kehidupan beragama dengan baik sekali dalam karangannya *Sutasoma* dengan kalimat “*bhinneka tunggal ika tan hana darma mangrua*” yang berarti ‘walaupun berbeda, satu adanya, tidak ada agama yang tujuannya berbeda’ (Darmodihardjo, 1985: 17). Empu Tantular sudah mendudukan motto tersebut sebagai falsafah kerajaan/pemerintahan pada zamannya.

Secara antropologis, bangsa Indonesia yang kaya akan keragaman etnis, budaya, agama, bahasa, adat-istiadat yang hidup di tengah masyarakat plural, semuanya tergantung dari *local genius* yang bersifat primordial (Sumardjo, 2002: 23). *Lokal genius* yang primordial itu ditentukan oleh genesis infra struktur penghidupan masyarakatnya. Kalau saja menurut Kluckhohn (1953) terdapat tujuh unsur kebudayaan itu, baik yang kecil, terisolasi-sederhana, maupun yang besar kompleks-maju. Ketujuh unsur itu adalah bahasa, sistem teknologi, sistem ekonomi, organisasi sosial, sistem pengetahuan, religi, dan kesenian (Koentjaraningrat, 1986: 83). Melalui evolusi dan transformasi yang beratus-ratus bahkan beribu-ribu tahun, jika saja kita mau belajar, maka organisasi sosial politik kita dalam berbangsa dan bernegara, segala kekurangan-kekurangannya akan tampak di hadapan kita. Kalau ini memang yang sedang terjadi, dapat dibayangkan bahwa kemandekan dalam kesadaran sejarah tidak bisa dihindarkan, sebab kesadaran *relevance*, merupakan awal mutu kehidupan. Dalam profesi dan peran sosial apapun, jika sedang mengalami “*sense of relevance*”, kehadirannya bisa menjadi teralienasi dari keharusan zaman dan tuntutan masyarakat (Abdullah, 2001: 218, 260).

Seorangpun tidak ada yang berharap, konflik etnis ini akan terus menjadi awan kelam bagi masa depan politik Indonesia. Semua orang tidak mengendaki seperti api dalam sekam, di mana unsur etnik sewaktu-waktu siap membakar setiap bangunan politik Indonesia. Sekalipun konflik etnis ini sempat terpusat di Kalimantan dan Maluku, tetapi secara sporadis tetap khawatir mencuat di daerah lain, khususnya kawasan perkotaan yang padat penduduk. Harapan kita, pluralisme etnis itu menjadi pengikat kaum urban, terutama di kawasan yang premanismenya begitu kuat sebagai basis ekonomi kelompok pendatang (Suparlan, 2001: 2-3; Piliang, 2002: 232). Taufik Abdullah (2001: 93-94) bahkan berpendapat, bahwa huru-hara sosial ataupun anarki sosial yang kita alami akhir-akhir ini, merupakan pantulan yang keras dari masyarakat majemuk yang berada dalam “kesunyian” tanpa perlindungan sistem kepemimpinan lokal dan masyarakat madani yang sehat dan fungsional.

Setelah kita memahami beberapa kendala/kemandekan dalam upaya mewujudkan masyarakat multibudaya yang harmoni, maka ada baiknya kita perlu memahami juga peluang dan perkembangannya di dunia pada umumnya dan Indonesia khususnya. Pembahasan sebelumnya telah menyebutkan bahwa, “*More than 95 % of the world's countries are ethnically heterogeneous... According to some estimates, there are close to 5.000, diverse ethnic group in the world*” (Jandt, 1998: 419). Fakta heterogenitas

ini dalam realitasnya, ternyata tidak sepenuhnya menerima ataupun menolak kebijakan multikulturalisme tersebut. Menurut Supriadi (2001: 37) terdapat *empat* kemungkinan kombinasi tentang multikulturalisme itu:

Pertama, negara yang realitas etnik dan budayanya heterogen serta menerima ide dan menerapkan kebijakan multibudaya. Contohnya; Kanada, Amerika Serikat, Australia, Brazilia, Mexico, Malaysia. *Kedua*; negara dengan realitas etnik dan budayanya heterogen, tetapi kebijakan pemerintahannya cenderung mengarah ke monokulturalisme, contohnya RRC dan Prancis. *Ketiga*; negara dengan realitas etnik dan budayanya relatif homogen, dan kebijakannya cenderung mengarah ke monokulturalisme, contohnya Israel. *Keempat*; negara dengan realitas etnik dan budayanya homogen, tetapi kebijakan pemerintahannya menerapkan kebijakan multibudaya, contohnya Jepang.

Indonesia yang secara konsepsional memiliki motto “Bhinneka Tunggal Ika” sebagai falsafah kehidupan bernegara, secara teoretik dapat dikategorikan ke yang pertama. Akan tetapi jika dilihat dalam implementasinya terutama zaman Orde Lama dan Orde Baru, dapat dikategorikan dalam kelompok *kedua*, karena walaupun bersemboyan “Bhinneka Tunggal Ika”, namun dalam realitasnya lebih cenderung pada uniformitas (keseragaman) budaya. Wiriaatmadja (2002: 221) menyebutnya bahwa keragaman dalam kesatuan ini pada paruh lima dekade dalam perjalanan kemerdekaan negara-bangsa, lebih ditekankan pada aspek kesamaan dan kesatuannya yang mengakibatkan pengikisan secara kuantitas dan kualitas budaya lokal khususnya Bahasa Daerah yang makin mundur dan kehilangan daya gunanya secara pragmatik. Sedangkan Abdullah (1999: 19; 2001: 72) menyebutnya bahwa nasionalisme pada era Orde Baru telah diambil alih oleh negara dan kurang menghargai pengembangan identitas budaya lokal yang menuntut kewajaran serta kesamaan dalam keluarga-bangsa.

Pendidikan multibudaya sebetulnya sekarang ini sangat memungkinkan untuk berkembang terutama dengan berlakunya Undang-undang Otonomi Daerah. Sebab dalam multibudaya, menuntut pengembangan budaya lokal secara wajar serta tumbuhnya pemikiran yang sangat kaya dengan keunikan masing-masing budaya. Semua elemen itu tidak mungkin dapat diapresiasi dengan pendekatan terpusat (*top down*), melainkan hanya dengan mengembangkan pendekatan *bottom up* yang desentralistik. Melalui pengembangan potensi daerah yang desentralistik tersebut, diharapkan pemikiran pluralistik etnis, budaya, agama, seni, bahasa, dapat melakukan respons kreatif yang signifikan dengan tuntutan transformasi masyarakat yang terjadi (Asy'ari, 2003: 234-235).

Landasan Teoretik Peranan Pendidikan Multibudaya dalam Integrasi Bangsa

Terminologi “integrasi bangsa” merupakan penyatuan secara terencana dari berbagai golongan, etnik, agama, bahasa, budaya yang berbeda-beda menjadi suatu kesatuan yang serasi atau satuan dalam satu kesatuan kehidupan berbangsa/bernegara (Bachtiar, 2001: 45; Shadily, 1980: 1461). Integrasi bangsa Indonesia sampai sekarang masih merupakan masalah yang dianggap kompleks, rumit, dan menuntut kesungguhan penuntasannya. Kompleksitas permasalahan yang muncul dalam integrasi bangsa tersebut

juga bisa terjadi karena upaya pemerintah sendiri yang kurang serius untuk menangani masalah itu. Menurut Bachtiar (2001: 51), seorang sosiolog Universitas Indonesia, menyatakan , bahwa

Dalam upaya memperkuat integrasi bangsa ini kiranya belum *ada rencana* ataupun *program yang besar*, seperti halnya rencana pembangunan ekonomi yang dibuat Bappenas. Program integrasi bangsa yang hendak mengusahakan persatuan dan kesatuan bangsa ini, pada dasarnya bukan tugas perseorangan atau golongan-golongan tertentu saja, melainkan adalah tugas semua pihak yang menyatukan diri dalam ikatan nasional Indonesia, atau bangsa Indonesia. Paling sedikit masing-masing orang atau golongan dengan cara masing-masing diharapkan ikut memperjuangkan integrasi nasional yang merupakan kepentingan kita bersama.

Pernyataan di atas jelas menunjukkan bahwa pemerintah tidak memprogramkan secara eksplisit, sebagaimana program-program pembangunan yang biasanya direncanakan secara rinci. Kemungkinan lain mungkin maksudnya pemerintah juga begitu percaya dengan pendekatan yang persuasif terutama kepada individu-individu anggota keluarga, maupun anggota bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkenaan dengan integrasi bangsa, terutama bila kita hendak berusaha memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Integrasi bangsa, bukan merupakan sesuatu peristiwa yang berdiri sendiri dan muncul tanpa sebab. Terjadinya suatu proses integrasi bangsa didahului oleh sebab-sebab yang mendukungnya. Tidak mungkin suatu bangsa mencapai suatu bentuk integrasi bangsa yang sempurna manakala tanpa sesuatu yang menjadikannya sebagai prasyarat. Beberapa pengamat sosial berpendapat bahwa suatu bangsa, dapat bertahan, diterima dan didukung oleh semua warganya, apabila ia menyediakan beberapa kondisi minimal bagi warganya.

Pendapat Hertzler (1965: 231), Profesor Sosiologi dalam karyanya *A Sociology of Language* bahwa kondisi seperti itu meliputi:

... such economic condition as wide markets and non-discrimination in employment; wide and ready physical mobility in the pursuit of desirable regional, economic and other life conditions; opportunity for political participation; freedom from rigid social stratification and social distance and, conversely, freedom of social opportunity and social mobility; acces to all levels of educational opportunity. As in the case of group unity and unification, language is also of the facilitator of all these conditions.

Kondisi ekonomi, politik, sosial, memberikan arti penting untuk menciptakan suasana kondusif bagi persatuan bangsa. Hertzler bahkan selanjutnya berkeyakinan bahwa faktor bahasa juga memegang peranan penting dalam “kesadaran bersatu” (*consciousness of unity*). Oleh karena itu hakekat persamaan bahasa (Bahasa Indonesia) merupakan contoh potensi sentripetal bahasa yang disadari atau tidak oleh para pemuda pada tahun 1928 itu

telah digunakan sebagai salah satu alat dalam melahirkan bangsa Indonesia. Kesatuan dan persatuan untuk kasus Indonesia, menurut Hertzler bisa dicapai lebih mudah karena melalui penguasaan dan pemahaman satu bahasa (Bahasa Indonesia) yang merupakan bahasa resmi dan persatuan, akan menjadi katalisator yang memberikan kontribusi dalam integrasi bangsa, seperti yang dinyatakan Hertzler (1965: 229).

What is more, with the acquisition of the common language (its lexicon, syntac, idioms, the conception of reality and Weltanschauung evidenced by its peculiar structure), there comes the learning of subler aspects of the surrounding cultural and social world: the underlying values and attitudes, the elements of the "spirit" and "style" behind the ways of larger social life... Assimilation becomes easier and more rapid, the greater the similarity of mental and social equipment of persons in both the dominant and foreign groups. Linguistic similarity and compatibility— a common Sprachgefühl—is the key expediting agency. In general, the enculturation of person is only possible as they learn to speak and understand the language of the cultural community.

Kutipan di atas bermakna dan dapat kita terapkan di Indonesia dalam usaha memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan menghilangkan pengertian *dominant groups* bangsa Indonesia sebagai kesatuan yang lebih besar, maupun *foreign groups* dengan satuan-satuan atau kelompok-kelompok yang lebih kecil yang menjadi unsur pembentuk bangsa Indonesia itu. Kondisi objektif di Indonesia yang menggambarkan paradoksal itu sebenarnya tidak selalu menampilkan sisi positif ataupun negatif. Namun yang jelas ada faktor-faktor kondusif yang bisa bekerja dalam mencapai integrasi bangsa yang diharapkan.

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Sosiolog Universitas Indonesia Sujatmiko (1999: 3), dalam karyanya *Integrasi dan Disintegrasi Nasional*, sebetulnya Indonesia mempunyai modal dasar integrasi bangsa yang kuat, yakni dengan adanya kesepakatan bersama yang tertuang dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, maupun Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, hal itu dapat menjadi perekat integrasi bangsa. Tetapi Sujatmiko menambahkan bahwa sisi lain yang negatif bahwa Indonesia kini memasuki "masa kritis" (tahap 51-100 tahun) karena semakin hilangnya generasi pertama yang telah melakukan kesepakatan momentum historis tersebut. Generasi pasca 1945 (terutama kalangan intelektual / mahasiswa, maupun pemuda kelas menengah) lebih bersifat rasional, asertif, dan mereka tidak menerima "integrasi buta" atau "integrasi tanpa reserve". Pemecahan masalah terpenting dalam integrasi bangsa tersebut, maka perlu diimbangi dengan unsur keadilan dan memerlukan "renegosiasi" antara pusat dan daerah dalam bidang politik-hukum, ekonomi, dan sosial-budaya. Pola *once and for all social contract* yang selama ini digunakan, tidak dapat dipertahankan lagi dengan ketergantungan ekonomi pada pemerintah pusat..

Sujatmiko (1999: 3) menambahkan bahwa pengembangan nasionalisme "dari bawah" oleh masyarakat (*popular nationalism*) perlu ditingkatkan, bukan nasionalisme "dari atas" oleh negara yang formal atau *official nationalism* yang dapat mengarah

kepada *statism-militerism* yang justru akan berfungsi sebagai disintegrator. Nasionalisme dari bawah ini diperlukan dalam pengembangan paradigma integrasi bangsa yang dilandasi keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Pendapat di atas sesuai dengan pandangan Buchanan dalam bukunya *Secession: The Morality of Political Divorce from For Sumter to Lithuania and Quebec*. Buchanan (1991: 115) mengemukakan bahwa alasan-alasan yang sah, suatu daerah yang meminta memisahkan diri antara lain terancam kebebasan dan keragamannya. Mengalami redistribusi yang diskriminatif dan inefisiensi, mempertahankan budaya; bela diri, dan pemaksaan integrasi masa lalu. Di situlah pentingnya aspek kebebasan, penghargaan dalam kebersamaan bangsa.

Pentingnya penghargaan dan rasa kebersamaan tersebut selaras pula pandangan Hirschman (1970: 133) dalam bukunya *Exit, Voice, and Loyalty*, dapat membantu memahami masalah integrasi bangsa. Hirschman berpendapat bahwa disintegrasi bangsa (*exit*) terjadi karena merasa tidak ada lagi rasa kebersamaan sebagai suatu bangsa (*loyalty*). Namun protes daerah (*voice*) janganlah selalu dilihat dari sebagai tanda “tidak loyal”, melainkan sinyal bahwa integrasi bangsa yang berlangsung dianggap tidak adil. *Voice* yang ditanggapi dengan baik dapat mempertahankan integrasi bangsa bahkan meningkatkan *loyalty*. Namun *voice* yang diabaikan dapat mengarah kepada *exit* (Hirschman, 1970: 337).

Faktor lain yang perlu diperhatikan dalam integrasi bangsa adalah faktor interaksi antar etnis. Peranan interaksi antar etnis juga merupakan faktor penting dalam proses integrasi bangsa. Beberapa sosiolog ternama maupun ahli sosiologi-politik, telah mengingatkan kita bahwa untuk terjadinya suatu bentuk integrasi bangsa yang optimal, maka faktor “interaksi budaya maupun antar etnis yang bermakna” merupakan prasyarat dalam membentuk integrasi tersebut (Svalastoga, 1989: 98; Knapp, 1985: 99; Duverger, 1985: 354). Adanya aktivitas interaksi yang efektif dapat mendorong antar anggota untuk bekerjasama lebih akrab. Kaare Svalastoga, Sosiolog Denmark dalam bukunya *Social Differentiation*, menyatakan bahwa integrasi lebih besar kemungkinannya ditemukan dalam masyarakat yang perubahannya lambat, ketimbang di dalam masyarakat yang berubah cepat (Svalastoga, 1989: 99). Perubahan masyarakat yang lambat dapat dipahami karena memungkinkan dengan cukup waktu tersedia, seseorang maupun kelompok berkesempatan untuk menempati posisi yang setara dengan yang lainnya.

Pendapat yang lebih jelas dikemukakan oleh Sosiolog Knapp (1985: 17-28) dalam bukunya “*Social Intercourse: From Greeting to Goodbye*”. Ia menjelaskan tahapan-tahapan interaksi antar etnis secara rinci dari tahapan memulai (*initiating*), menjajaki (*experimenting*), meningkatkan (*intensifying*), menyatupadukan (*integrating*), dan terakhir mempertalikan (*bonding*). Semua dari tahapan itu akan berkontribusi menuju pengembangan integrasi bangsa yang menjadi bagian kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia dalam berintegrasi satu sama lainnya jelas merupakan suatu naluri sebagai makhluk sosial. Duverger (1985: 354) seorang ahli sosiologi-politik Prancis dalam bukunya *The*

Study of Politics, berkaitan dengan pentingnya interaksi sesama manusia, lebih jauh menyatakan bahwa “interaksi” pada hakekatnya merupakan suatu naluri yang paling dalam yang mendorong para anggotanya untuk hidup bersama.

Tinggi rendahnya integrasi suatu bangsa, tingkatannya dapat diamati dari berbagai indikator seperti; berkembangnya stereotipe dan faktor-faktor penghambat persatuan bangsa lainnya. Lippman (1922: 1-16), yang merupakan orang pertama merumuskan konsep stereotipe dalam bukunya *Public Opinion*, menyatakan bahwa stereotipe adalah gambaran di kepala yang merupakan rekonstruksi dari keadaan lingkungan yang disederhanakan secara negatif. Hayakawa (1950: 209) juga mengemukakan pendapat serupa, bahwa stereotipe merupakan informasi yang salah yang dianut secara luas lawan dari sosiotip yang ilmiah dan teliti.

Di Indonesia tentang tingginya stereotipe yang menghambat rendahnya tingkat interaksi antar etnis dalam integrasi bangsa, dapat dikemukakan adanya beberapa indikator di bawah ini. Peristiwa Ambon sejak 19 Januari 1999, kerusuhan etnis di Sambas dan Sampit di Kalimantan Barat dan Tengah, Peristiwa Poso, dan beberapa masalah SARA lainnya menunjukkan betapa saratnya peristiwa itu sebagai akumulasi stereotipe antar etnis, budaya, maupun agama. Papilaya (2000: 38-39), yang merupakan pembicara perwakilan Protestan dalam seminar “*Pertahanan dan Konsolidasi Perdamaian Bagi Masyarakat Indonesia Timur*” mengatakan bahwa salah satu sebab terjadinya kerusuhan SARA di Ambon sejak 19 Januari 1999, adalah hancurnya budaya lokal terutama rendahnya hubungan (*interaksi*) antar etnik “pribumi” dengan “pendatang”, yang didasari kecurigaan akibat rendahnya hubungan sosial-ekonomi termasuk antar pemeluk agama. Adat istiadat seperti *Pella-Gandong* yang telah lama mereka junjung, sebagai tali persaudaran telah begitu rapuh dan kehilangan makna. Pendapat senada dalam kajian yang berbeda disampaikan Ohoitmur (2001: 129-130), yang mengatakan;

... dialogue of discourse terasa sebagai kebutuhan mendesak karena di sana-sini ada terdengar suara sumbang bahwa ada agama yang membenarkan umatnya memerangi golongan agama lain. Dialogue of discourse merupakan perjumpaan interaktif para ahli agama-agama dalam rangka saling membagikan informasi mengenai ajaran dan keyakinan keyakinan religius masing-masing agama.

Munculnya anggapan-anggapan yang “membenarkan memerangi agama lain” tanpa sebab yang meyakinkan, merupakan akibat ketidaktahuan, ataupun minimnya informasi tentang agama lain yang dia tidak ketahui. Minimnya pengetahuan agama lain bisa terjadi karena tidak ada interaksi yang memadai dengan pemeluk agama lain maupun tidak mau tahu dengan agama lain itu.

Faktor *kedua* yang mempengaruhi keberhasilan integrasi bangsa adalah adanya rasa memiliki yang merupakan bagian dari rasa solidaritas bangsa (Svalastoga, 1989: 101). Teori Marx jika dibandingkan dengan teori Durkheim, akan nampak hubungan dan perbedaannya. Rasa memiliki dan solidaritas ini mirip dengan teori “kesadaran kelas”

Karl Marx, sedangkan dalam teori Emile Durkheim adalah terdapat “kesadaran kolektif”. Teori Marx tentang “kesadaran kelas” berasumsi adanya suatu ideologi bersama cenderung memperkuat solidaritas kelas tertentu (proletar), dan antagonisme terhadap kelas lain atau borjuis (Mills, 2003: 82; Giddens, 1986: 51-54; Zeitlin, 1995: 192). Pandangan yang berbeda dengan Durkheim tentang teori “kesadaran kolektif”, bahwa kesadaran kolektif berada pada level solidaritas mekanik yang menuju solidaritas organik. Kesadaran kolektif itu timbul sebagai totalitas kepercayaan dan sentimen-sentimen bersama karena memiliki sifat-sifat sama, kepercayaan sama, profesi sama, sehingga tidak berkembang individualitas yang normal (Johnson, 1986: 183; Giddens, 1986: 95).

Rasa memiliki (*sense of belonging*) yang merupakan bagian rasa solidaritas (*sense of solidarity*), dengan demikian sangat berbeda dengan “kesadaran kelas” dari Karl Marx maupun “kesadaran kolektif” dari Emile Durkheim. Karena “solidaritas bangsa” tidak terpaut dan antagonisme pada kelas tertentu, serta tidak selalu mendeskripsikan keterikatannya pada level *solidaritas mekanik* yang tradisional, karena bisa juga terhadap masyarakat yang memiliki *solidaritas organik* yang lebih modern.

Harjanto (2001:86-87), Staf Analis Departemen Politik dan Perubahan Sosial, yang menyoroti hubungan kebangsaan dan kewarganegaraan, menilai bahwa rapuhnya spirit integrasi bangsa Indonesia yang telah dibangun sejak abad 20, tampaknya karena lemahnya visi kebangsaan dan kekaburan mendasar dalam memandang ke-Indonesiaan ini. Pemahaman kebangsaan selama ini masih merujuk pada terminologi klasik *Renansian*, yaitu suatu bangsa adalah *a daily plebiscite* yang tergantung pada kehendak warganya untuk hidup secara bersama dalam identitas kolektif baru yang melampaui garis-garis primordial – sektarian. Secara normatif, kebangsaan dalam komunalistik seperti itu memang mungkin dibangun. Kebangsaan Indonesia, masalahnya sekarang ini telah tereduksi menjadi suatu konsepsi yang semakin kehilangan makna filosofisnya, yang sering dipertentangkan dengan konsepsi politik keagamaan. Secara inheren padahal konsep tersebut sudah bermuatan konflik kepentingan antar anggotanya, karena perbedaan preferensi politik dalam menyikapi perkembangan. Kesadaran kewarganegaraan akibatnya seolah-olah kurang mendapat tempat untuk tumbuh. Kalaupun ada untuk itu, pemahamannya lebih terfokus pada kesadaran kewarganegaraan sebagai konsepsi hukum, bukan kekuatan untuk mentransformasikan masyarakat menjadi entitas politik modern yang demokratis. Kesadaran integrasi bangsa implikasinya lebih memiliki konotasi terbatas “eksternal” yang dikonstruksikan sebagai pembeda warganegara sendiri. Contohnya adanya label “warganegara keturunan”, bukan dalam pengertian yang lebih holistik-integratif termasuk “internal”.

Konsep kebangsaan (*nationality*) perlu dilakukan telaah lebih dahulu untuk klarifikasi menyelesaikan persoalan ini. Kebangsaan setidaknya akan didasarkan pada dua prinsip utama, yaitu; berdasarkan keturunan (*ius sanguinis*) seperti di negara kita, atau tempat kelahiran (*ius soli*) seperti yang dianut Amerika Serikat. Varian lain dari dua hal di atas, seperti melalui naturalisasi, pemberian suaka politik, dan sebagainya. Fieschi dan Varouakis (2001:22) berpendapat bahwa prinsip keturunan (*ius sanguinis*) akan mengarahkan pada terbentuknya *ethnic nationalism* atau *ethnocultural nationalism*,

sedangkan prinsip tempat kelahiran (*ius soli*) akan menuju ke penguatan *civic-nationalism*. *Civic-nationalism* sendiri dibangun atas “suatu kontrak sosial” individu dalam komitmen, loyalitas, dan kemauannya sebagai *way of life* untuk kepentingan bersama (Brown, 2000:127-128). Singkatnya, *civic nationalism* menawarkan visi tentang *community of equal citizens*.

Konsep *civic-nationalism* tersebut berbeda dengan *ethnocultural nationalism*, yang lebih didasarkan pada mitos-mitos mengenai kesamaan leluhur dan kepemilikan tanah air yang diwariskannya. Konsep ini mengutamakan adanya bukti konkrit sebagaimana tampak dalam atribut-atribut sosial seperti; bahasa, keyakinan/agama, ras, dan lainnya. Karakteristik tersebut akan membawa konsekwensi serius bagi struktur sosial. Sebab kebangsaan yang berdasarkan keturunan selain sering dipandang akan menciptakan masyarakat yang kurang demokratis dan kurang menghargai kebebasan individual, juga belum teruji secara kualitas (Kymlicka, 1999:132-133). Namun begitu, konsep *civic-nationalism*-pun tidak dengan serta merta akan menjamin terciptanya masyarakat demokratis, dan oleh karenanya bila perlu ditinggalkan. Apa sebabnya? Apabila konsep ini merujuk pada ke sukarelaan, bagi individu yang netral secara etnik apalagi ia tidak ada preseden historisnya di masa lampau, maka masyarakat seperti itu akan susah untuk dipertahankan karena ketidakmampuannya untuk memberikan secara terus menerus rasa memiliki dan *rootedness* yang merupakan sumber kekuatan dari nasionalisme (Kymlicka, 2000: 51). Kenyataannya konsep ini sering dijadikan mitos yang dikreasi oleh suku mayoritas untuk menyamarkan (*camouflage*) bahwa segenap lembaga politik merefleksikan dan memajukan kepentingan kulturalnya sambil melakukan sub-ordinasi terhadap minoritas (Brown, 2000: 51).

Dua model hubungan kebangsaan dengan kewarganegaraan tersebut, ternyata perlu dipertimbangkan keunggulan dan kelemahannya dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia ini. Pilihan ideal nampaknya di mana pilihan kebangsaan menjadi semakin relatif, artinya untuk ke depan lebih cocok “*multicultural nationalism*” (Kymlicka: 2002; Young: 1990; Harjanto, 2001; Rawls: 1971). Para penganjur teori ini berkeyakinan bahwa menciptakan masyarakat yang berkeadilan sosial yang dipersatukan oleh nilai-nilai bersama, yang menghargai keberagaman etnis serta berkomitmen terhadap kesamaan antara kelompok dapat dilakukan sehingga terwujud suatu *social and political ideal of togetherness in difference*. Visi ini menggabungkan tujuan *civic-nationalism* untuk menciptakan keadilan bagi setiap warganegara dengan *ethnocultural nationalism* yang menekankan pada pentingnya aspek komunitas masyarakat berdasarkan kesamaan keturunan dan sosiokulturalnya. Melalui sistem ini dengan demikian dapat tercipta suatu *democratic pluralism* yang mensyaratkan dua sistem tentang hak-hak azasi manusia: satu sisi mengenai hak-hak individu yang sama bagi semuanya, di sisi lain adalah sistem yang lebih spesifik yang berkaitan dengan kebijakan dan hak-hak komunal yang *group-conscious*.

Konsep “demokrasi” selama ini lebih menekankan pada kajian demokrasi liberal, yakni kebebasan individual serta menyampingkan demokrasi sosial, terutama hak-hak komunitas yang menekankan resiprositas dan kegiatan bersama tentang identitas dan

simbol-simbol lain (Gould, 1993: 69, 77-78; Howard, 2000: 8). Padahal orde persaingan yang berasal dari kemerdekaan individual secara empirikal ternyata membonceng polarisasi sosial. Hasil penelitian Herrnstein dan Murray (Simanjuntak, 2001: 61), yang menimbulkan kontroversi besar lewat *Bell Curve*, mengungkapkan adanya hubungan statistik positif antara inteligensia dan sukses prestasi manusia Amerika dalam hidup. Kehidupan manusia jika hanya dipercayakan semata-mata pada persaingan yang melibatkan perangai genetik, kesejahteraan bersama umat manusia akan semakin menjauh dari harapan dan keadilan. Penelitian tersebut membuktikan bahwa ketimpangan sosial justru makin memburuk dalam peradaban yang semakin padat pengetahuan. Suatu kenyataan yang sangat mengganggu karena ketimpangan sosial seperti itu akan muncul yang mendorong “pembalasan dendam” suatu ketika, seraya menyudutkan kebebasan itu sendiri (Howard, 2000: 323).

Persoalan di atas menuntut jawaban terhadap ekses demokrasi liberal yang menimbulkan ketimpangan sosial dan menjauhkan integrasi bangsa dapat dilacak dari pendapat para ahli. Etzioni (1992: vi; 54-55) yang membuka diri dengan pertanyaan-pertanyaan otokritik secara ekonomi, mempertanyakan: Apakah manusia itu pada dasarnya individualis, bersaing satu sama lain untuk memaksimumkan kesejahteraan masing-masing yang menyulitkan berintegrasi satu sama lain? Ataukah memang manusia itu pada dasarnya memiliki moral integratif sebagai makhluk sosial yang selalu hidup dalam komunal? Perbedaan antara dua paradigma ini, yakni paradigma neoklasik yang individualis dan paradigma sosial-konservatif yang komunalistik, menyajikan paradigma alternatif yaitu paradigma “Aku dan Kita” yang didasarkan atas etika deontologis. “Aku”, yang bertindak rasional yang memajukan kepentingan sendiri, tetapi kemampuannya untuk bertindak demikian sangat dipengaruhi oleh kepentingan “Kita”, komunitas di mana ia menjadi anggotanya.

Sebagai pelengkap teoritik integrasi bangsa, sebenarnya banyak model integrasi bangsa yang ditawarkan oleh para sosiolog yang mungkin pula dapat diadaptasi oleh bangsa Indonesia. Model di bawah ini merupakan perpaduan dua pendekatan, yakni; pendekatan fungsionalisme-struktural (yang dikembangkan sejak Comte, Durkheim, serta Parsons) dan pendekatan konflik non-Marxis (Dahrendorf). Alasan peneliti menggunakan dua pendekatan tersebut, di samping sesuai dengan pendapat van den Berghe (1967: 294-295), juga kebutuhan untuk mensintesis kedua pendekatan tersebut bahwa keduanya sangat melengkapi satu sama lain.

Pendekatan fungsionalisme struktural, seperti yang dikemukakan oleh Parsons terdapat beberapa asumsi, sebagai berikut:

- (1) Masyarakat dilihat sebagai suatu sistem daripada elemen-elemen yang tidak terintegrasi.
- (2) Dengan demikian hubungan pengaruh mempengaruhi dari elemen tersebut bersifat ganda.
- (3) Walaupun integrasi bangsa tidak dapat dicapai dengan sempurna, namun secara fundamental sistem sosial selalu cenderung bergerak ke arah equilibrium yang bersifat dinamis.

- (4) Sekalipun disfungsi, ketegangan-ketegangan, dan penyimpangan-penyimpangan senantiasa terjadi juga, akan tetapi di dalam jangka panjang keadaan tersebut pada akhirnya akan teratasi dengan sendirinya melalui penyesuaian-penyesuaian dan proses institusionalisasi. Dengan perkataan lain, sekalipun integrasi sosial pada tingkatnya yang sempurna tidak akan tercapai, akan tetapi setiap sistem sosial akan mengarah ke proses itu.
- (5) Perubahan dalam sistem sosial pada umumnya terjadi secara gradual, melalui penyesuaian yang tidak revolusioner.
- (6) Pada dasarnya perubahan sosial itu terjadi melalui tiga hal: penyesuaian dalam sistem sosial terhadap perubahan dari luar, pertumbuhan proses diferensiasi struktural fungsional, penemuan baru anggota masyarakat.
- (7) Dalam setiap masyarakat selalu terdapat tujuan-tujuan dan prinsip dasar yang bersifat mutlak benar. Sistem nilai tersebut disamping merupakan sumber berkembangnya integrasi sosial, juga sekaligus merupakan unsur yang menstabilisir sistem sosial budaya itu sendiri (Nasikun, 2003: 11-12).

Parsons dan para pengikutnya telah berhasil membawa pendekatan fungsionalisme-struktural tersebut ke tingkat perkembangan yang sangat berpengaruh dalam teori sosiologi. Nisbet (1969: 262-266) menyatakan bahwa jelas teori fungsionalisme struktural adalah suatu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial di abad 20. Teori tersebut, sebaliknya telah menimbulkan perdebatan berkepanjangan. Lockwood (1973: 284), menganggap pendekatan Parsons tersebut terlalu bersifat normatif. Sedangkan perilaku-perilaku yang non-normatif hampir tidak mendapat tempat yang wajar, padahal dalam sistem sosial terdapat tata tertib yang normatif dan sub-stratum yang melahirkan konflik-konflik. Keduanya saling berpadu maupun bergantian dalam suatu stabilitas dan instabilitas. Setiap struktur sosial apapun akan memiliki kontradiksi-kontradiksi dan konflik-konflik internal yang menjadi sumber perubahan sosial maupun *visious circle* atau “lingkaran yang merekat”. Selain itu, perubahan-perubahan sosial tidaklah selalu berjalan secara gradual, tetapi bisa revolusioner (van den Berghe, 1967: 297).

Pengabaian kenyataan-kenyataan di atas pendekatan fungsionalisme struktural dapat dipandang sebagai pendekatan reaksioner, dan mengabaikan realita sosial (Nasikun, 2003: 15). Faktor itulah yang mendorong penulis memerlukan pendekatan konflik, terutama non-Marxist, dengan mengikuti pola Dahrendorf dalam *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Dahrendorf (1959: 162) mengemukakan bahwa asumsi-asumsi yang dikembangkan sebagai berikut:

1. Setiap masyarakat senantiasa berada di dalam proses perubahan yang tidak pernah berakhir, atau dengan perkataan lain, perubahan sosial merupakan gejala yang melekat dalam setiap masyarakat.
2. Setiap masyarakat mengandung konflik-konflik di dalam dirinya, atau dengan perkataan lain konflik adalah gejala melekat setiap masyarakat.

3. Setiap unsur suatu masyarakat memberikan sumbangan terjadinya disintegrasi dan perubahan-perubahan sosial.
4. Setiap masyarakat terintegrasi di atas penguasaan atau dominasi sejumlah orang atas sejumlah orang-orang yang lain.

Kedua paradigma ini berpadu saling melengkapi, karena dalam struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh dua ciri yang bersifat unik (Nasikun, 2003: 28). Pertama, secara horizontal ia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan etnis, agama, adat-istiadat, dan kedaerahan. Kedua, secara vertikal struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh perbedaan-perbedaan lapisan bawah dan atas secara vertikal yang cukup tajam.

Perbedaan-perbedaan tersebut seperti yang dikemukakan oleh Furnival (1967: 446-469), tokoh yang pertama kalinya menyebut "masyarakat majemuk" (*plural societies*), yakni suatu masyarakat yang terdiri beberapa elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain. Masyarakat Indonesia mulanya dalam bidang politik tidak ada kehendak bersama (*common will*), terpisah satu sama lain, dan lebih merupakan kumpulan individu-individu daripada suatu kesatuan organis. Di bidang ekonomi, tidak ada kehendak bersama untuk menemukan bentuk permintaan sosial yang dihayati bersama oleh seluruh elemen masyarakat atau *common social demand* (Furnival, 1967: 309-312). Akibatnya hubungan sosial diantara elemen-elemen masyarakat majemuk tersebut semata-mata dibimbing oleh oleh proses ekonomi dengan produksi barang-barang. Contohnya orang-orang Belanda memiliki keahlian perkebunan, penduduk keturunan Cina dalam bidang perdagangan, dan orang-orang pribumi di bidang pertanian, yang semuanya itu sebenarnya memiliki potensi konflik. Potensi konflik ini menemukan sifatnya yang lebih tajam karena perbedaan kepentingan ekonomi yang bersamaan dengan perbedaan ras (Furnival, 1967: 448). Implikasinya pada masa dahulu tersebut tidak ada kekuatan untuk berintegrasi.

Timbul pertanyaan, bagaimana dengan kondisi sekarang ? van den Berghe telah melukiskan ciri-ciri masyarakat majemuk sebagai berikut: *Pertama*, terjadi segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang memiliki sub-kebudayaan berbeda-beda. *Kedua*, memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi dalam lembaga-lembaga non-komplementer. *Ketiga*, kurang mengembangkan konsensus terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar. *Keempat*, secara relatif sering konflik antar kelompok. *Kelima*, secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan (*coercion*) dan saling ketergantungan di bidang ekonomi. *Keenam*, adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok lain (van den Berghe, 1969: 67-68).

Karakteristik seperti itu juga serupa dengan kondisi di Indonesia, karena hampir semuanya terwakili. Mengikuti pandangan demikian, suatu sistem sosial senantiasa terintegrasi di atas landasan berikut. Pertama, masyarakat akan terintegrasi di atas tumbuhnya konsensus yang dianggap fundamental. Kedua, setiap konflik yang terjadi diantara suatu kesatuan sosial dengan kesatuan sosial lainnya, segera akan dinetralisir oleh adanya loyalitas ganda (*cross-cutting loyalties*) dari para anggotanya terhadap

berbagai kesatuan sosial baik yang sifatnya ideologis maupun politis (Nasikun, 2003: 63). Fakta inilah yang membenarkan relevannya teori konflik di mana Indonesia dari zaman penjajahan, mempertahankan kemerdekaan, sampai pembangunan, tidak lepas dari gejolak sosial yang terjadi dan menimbulkan berbagai perubahan. Sedangkan relevannya teori fungsionalisme struktural adalah bagaimanapun unsur “pemaksaan” tersebut akan tetap berada di dalam batas konsensus tentang nilai-nilai kemasyarakatan yang fundamental. Penulis berkeyakinan jika dilakukan di luar itu hubungan-hubungan kekuasaan akan melahirkan perpecahan bahkan kehancuran.

Landasan Empiris Peranan Pendidikan Multibudaya dalam Integrasi Bangsa: Lintasan Sejarah

Mungkin agak asing kedengarannya jika seseorang berjuang mencapai kemerdekaan melalui perjuangan kebudayaan bangsanya. Cabral (1973: 41), seorang pahlawan kemerdekaan di Guine-Bissau Afrika yang menulis buku *Return to the Source*, ia menegaskan bahwa kebudayaan menjadi unsur perlawanan terhadap dominasi asing: “manifestasi yang kuat di bidang ideologi atau idealis dari realitas fisik dan historis masyarakat yang didominasi”. Selanjutnya pernyataan Cabral (1979: 143) dalam buku yang lain, yakni *Unity and Struggle*, menegaskan bahwa kebudayaan adalah unsur vital dalam proses pembebasan. Pembebasan nasional diekspresikan sebagai tindakan kebudayaan, ekspresi politik dari rakyat yang sedang melakukan perjuangan. Kebudayaan dengan demikian bisa berpengaruh positif terhadap rakyat dan kondisi mereka.

Lebih militan lagi Franz Fanon (1979: 143), seorang pejuang Aljazair berprofesi sebagai psikiater yang sangat disegani dan berjaya karena berhasil merintis revolusi kemerdekaan, dalam bukunya berjudul *The Wretched of the Earth*, mengatakan bahwa

... klaim kebudayaan nasional di masa lalu tidak hanya mampu merehabilitasi bangsa itu dan berfungsi sebagai pembenaran bagi harapan akan kebudayaan nasional masa depan. Dalam tataran keseimbangan jiwa-afektif, kolonialisme mestinya bertanggung jawab atas perubahan penting pada pribumi.... Keteguhan dalam mengikuti bentuk-bentuk kebudayaan yang sudah punah itu merupakan demonstrasi nasionalitas; namun demonstrasi itu kini merupakan kemunduran ke hukum kelembaban. Tidak ada ofensif dan tidak ada redefinisi tentang hubungan-hubungan itu. Yang ada hanyalah konsentrasi pada inti kebudayaan kita yang makin layu, diam, dan kosong.

Pendapat serupa di atas, dikemukakan juga oleh Edward Said (1996: 13), seorang intelektual humanis, perintis *Teori Postkolonial*, dan kritikus budaya terkemuka dunia dari Timur Tengah dalam karyanya *Culture and Imperialism*. Ia mengajukan sanggahan terhadap argumen-argumen yang mengatakan bahwa kebudayaan bangsa-bangsa terjajah dan identitas nasionalnya adalah masih merupakan entitas-entitas yang tunggal dan murni, melainkan telah dirusak oleh Barat. Said (1996: 14) selanjutnya mengatakan:

... kebudayaan adalah semacam panggung sandiwara di mana berbagai kuasa politik dan ideologi saling terkait. Bukannya menjadi suatu lingkup kesantunan Apollonia yang tenang, kebudayaan bahkan dapat menjadi sebuah medan pertempuran di mana penyebab-penyebab itu menampakkan diri secara gamblang dan saling bertikai.... melainkan juga anggapan Barat bahwa kebudayaan itu dianggap lebih penting, membiarkan terpisah dari dunia keseharian. Akibatnya kebanyakan humanis profesional tidak mampu menetapkan kaitan antara kekejaman yang berlarut-larut dan kotor dari praktek-praktek seperti perbudakan, penindasan kolonial dan rasial, serta penaklukan imperial disatu pihak, dengan puisi, fiksi, dan filosofi masyarakat dilain pihak.

Pertanyaan yang muncul berkaitan dengan penjelasan di atas; dapatkah kebudayaan yang heterogen (majemuk) dalam suatu bangsa menjadi suatu kekuatan positif khususnya dalam meningkatkan integrasi bangsa ? Sebab selama ini kita lebih terbiasa membenarkan pendapat sosiolog Durkheim (1964: 79) yang dituangkan dalam karya besarnya *The Division of Labor in Society*, bahwa kesamaan merupakan sumber terciptanya solidaritas sosial yang didorong oleh kesadaran kolektif (terutama oleh solidaritas mekanik, yang berbeda dengan solidaritas organik). Solidaritas mekanik didasarkan pada suatu “kesadaran kolektif” (*collective consciousness*) yang menunjuk pada totalitas kepercayaan-kepercayaan dan sentimen-sentimen bersama yang rata-rata ada pada warga masyarakat yang sama itu. Jadi tergantung dari individu-individu yang memiliki persamaan karakteristik, kepercayaan, dan pola normatif yang sama pula.

Berbeda dengan solidaritas organik, solidaritas itu muncul karena pembagian kerja yang bertambah besar, sehingga tercipta suatu struktur masyarakat yang saling memiliki ketergantungan yang tinggi. Saling ketergantungan itu bertambah sebagai hasil dari bertambahnya spesialisasi dalam pembagian kerja, yang memungkinkan dan juga semakin menggairahkan perbedaan di kalangan individu (Johnson, 1986; 184-185). Solidaritas dengan demikian muncul karena perbedaan-perbedaan di tingkat individu ini yang merombak kesadaran kolektif tersebut. Solidaritas organik, pada dasarnya sangat memungkinkan tercapainya solidaritas dan integrasi bangsa karena adanya tingkat ketergantungan antar individu maupun etnis itu menjadi semakin tinggi. Pernyataan tersebut sejalan pula dengan contoh kesadaran masyarakat yang dibutuhkan di Amerika Serikat yang ditulis oleh Bellah (1985: 117), dalam buku *Habits of the Heart: Individualism and Commitment in American Life*, bahwa konsep kita tentang komunitas antar etnis atau ras itu sendiri harus memungkinkan bagi adanya pengakuan tentang perbedaan. Tradisi dalam pemikiran kita yang kuat namun menyesatkan mengenai komunitas adalah bahwa manusia hanya merasakan perasaan sebagai komunitas ketika mereka menganggap diri mereka “sama” dengan anggota-anggota lain dari masyarakatnya. Namun di sini-lah Bellah (1985: 118) menegaskan bahwa jenis komunitas yang diperlukan di Amerika Serikat adalah komunitas yang pluralistik, komunitas yang meliputi rasa keterikatan dan hubungan yang berasal dari aktivitas, keadaan, tugas, lokasi bersama dan sebagainya dan terutama didasarkan pada

pengalaman kemanusiaan bersama namun dengan mengakui dan menilai perbedaan-perbedaan budaya dan jenis-jenis perbedaan lainnya juga.

Penelitian Wiriaatmadja (1993: 87) dalam disertasinya yang mengkaji *Peranan Pengajaran Sejarah Nasional dalam Upaya Peraihan Nilai-nilai Integralistik*, bahwa pengajaran sejarah nasional Indonesia yang multietnis dapat berhasil apabila diperteguh oleh dukungan masyarakat yang berbentuk upaya dalam tindakan dan sikap yang suportif, menerima, dan memberikan kesempatan secara konsisten. Sebaliknya prasangka sosial ataupun *stereotype* yang ada dalam masyarakat dapat meniadakan hasil-hasil pendidikan yang di sekolah yang diharapkan.

Tim Litbang Harian Terkemuka Ibukota, menyajikan hasil jajak pendapat pada tanggal 6-8 Agustus 1998 dengan topik Indonesia dalam Krisis Kebangsaan, melaporkan bahwa sebanyak 60 % responden merasa tidak bangga sebagai bangsa Indonesia, 24, 3 % merasa bangga, 3,1 % tidak tahu, dan 12,6 % biasa saja (Kompas, 6-8 1998).

Sujatmiko (1999: 3), sosiolog Universitas Indonesia, dalam penelitiannya yang berjudul *Integrasi dan Disintegrasi Nasional*, melaporkan bahwa Indonesia akan memasuki masa kritis (tahap 51-100 tahun) karena semakin hilangnya generasi pertama yang telah melakukan kesepakatan-kesepakatan (Sumpah Pemuda dan Proklamasi Kemerdekaan). Sujatmiko berpendapat, generasi pasca 1945 (utamanya kaum intelektual/mahasiswa dan para pemuda golongan menengah lainnya) akan berbeda dengan sebelumnya karena lebih bersifat rasional, asertif dan mereka tidak menerima "Integrasi Buta" atau "Integrasi Tanpa Reserve".

Triardianto dan Suwardiman (2002: 321) yang secara rinci mengidentifikasi berbagai konflik disintegratif di Indonesia menyebutkan bahwa fenomena semakin banyaknya konflik telah membentuk suatu kurva yang menghubungkan variabel-variabel itu dengan bentuk khusus. Kurva itu kemudian disebut sebagai 'atraktor aneh' yang menjadi biang keladi kekacauan. "Atraktor aneh" ini bisa berupa "masalah-masalah yang dianggap kecil", seperti di Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan, maupun Ambon yang penyulutnya peristiwa pencurian maupun perkelahian pribadi, supir angkot dalam tragedi Ambon. Selain itu atraktor aneh tersebut juga berupa keterlibatan para aparat keamanan dalam konflik tersebut.

Simbolon (2000: 2-6) mengemukakan bahwa krisis multidimensi Indonesia, telah membuka seluruh "topeng" sampai ke bagian-bagian yang tersembunyi. Ia dengan putus asa dan emosional penuh sinis serta sindiran terhadap Indonesia sebagai negeri yang serba seolah-olah, *a heap of delusions*, tidak ada lagi sebenarnya apa yang disebut nasionalisme, heroisme, keadilan, persatuan, kejujuran, maupun kebanggaan.

Pendeknya, lembaga-lembaga lama bertahan kendati tanpa wibawa. Indonesia membangun dengan fundamental ekonomi yang seolah-olah kuat, dengan politik yang seolah-olah stabil, dengan kesadaran seolah-olah bersatu, dengan pemerintah yang seolah-olah bersih dan kompeten, dengan TNI yang seolah-olah satria, dengan ahli hukum seolah-olah adil, dengan pengusaha yang seolah-olah captains of industry,... Semua tampak salah, ibarat gigi palsu yang memang lebih kemilau daripada gigi asli,... mirip kebohongan di atas kebohongan.

Pendapat Simbolon tersebut seperti dikemukakan sebelumnya bersifat emosional, oleh karena itu tidak sepenuhnya benar, tetapi gambaran itu juga tidak sepenuhnya salah, bahwa integrasi bangsa khususnya sedang mengalami krisis yang berbahaya.

Siswomihardjo (1998: 14) dalam hasil telaahannya yang dipaparkan pada Seminar Nasional, mengemukakan bahwa dewasa ini tampak bahwa dunia dan negara-negara bangsa menghadapi permasalahan semakin kompleks. Modernisasi yang membawa implikasi transformasi yang sangat cepat dan mendasar, menjadi sumber utama permasalahan ini. Ia dengan mengamati kondisi aktual yang makin kompleks, fragmentaris, dan disintegratif itu ia menyimpulkan bahwa “kesemuanya menjadi tidak pasti, dan yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri”. Nasionalisme Indonesia-pun menjadi “mandeg”, kehilangan aktualitas, terbelenggu oleh kebakuan dogmatis dan penyempitan ideologis. Ironisnya dalam menyiasati kemungkinan seperti ini justru dianjurkan untuk tetap memperjuangkan nasionalisme dan integrasi bangsa Indonesia. Penulis menginterpretasikan bahwa semestinya terlebih dahulu diadakan semacam redefinisi maupun revitalisasi konsep-konsep nasionalisme itu sendiri termasuk integrasi bangsa yang lebih aktual sesuai dengan tantangan zaman.

Tim Litbang Harian Ibukota Kompas 28 Oktober 2002 menyajikan hasil jajak pendapat tentang Ikatan Kebangsaan Mulai Renggang melaporkan bahwa justru di saat bangsa Indonesia tengah mengalami berbagai gempuran persoalan, ikatan kebangsaan di dalam kehidupan masyarakat saat ini dinilai semakin melemah. Masyarakat luas sampai sejauh ini tidak terlihat upaya produktif yang membuat bangsa ini menjadi solid. Data ini bisa ditunjukkan dengan sebanyak 71 % responden yang dihubungi menganggap ikatan sosial yang terbentuk di masyarakat sekarang ini *melemah*. Tidak lebih dari 20 % responden lainnya menganggap masih kuat, 9 % tidak tahu atau tidak menjawab. Kemudian dalam hal “keutuhan negara” sebagai satu kesatuan. Sebanyak 55 % khawatir bahwa keutuhan wilayah negara Indonesia akan buyar, terutama setelah lepas dan merdekanya Timor Timur. Aspek Kerukunan Antar Pemeluk-Agama, ternyata sebanyak 41 % responden mengatakan situasi kerukunan antar pemeluk agama saat ini bertambah buruk, apalagi Indonesia saat ini mulai diusik dengan tuduhan internasional sebagai sarang terorisme.. Hanya 29 % responden yang masih bersikap optimis, terutama adanya gerakan-gerakan lintas agama yang mengedepankan kepentingan bersama. Kemudian dalam aspek integrasi bangsa bahwa kaum muda menunjukkan ketidak-berperanannya sebanyak 54 %. (Kompas, 28/10/2002)

Jajak pendapat Tim Litbang Harian Ibukota tentang “Generasi Muda Patutkah Kita Banggakan ?” Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 69 % responden menyatakan pengakuannya terhadap kekritisan para pemuda dalam mencermati kebijakan pemerintah dan lembaga tertinggi serta lembaga tinngi lainnya. Sisanya responden menyatakan mereka tidak kritis. Di bidang politik para responden sebagian besar (67 %) menyatakan peran pemuda masih kurang memuaskan, alasannya masih banyak pemuda yang terjebak yang tidak produktif bahkan kadang-kadang mereka meresahkan masyarakat. Kemudian dalam persoalan sosial, sebanyak 61 % responden menyatakan pemuda identik dengan *persoalan sosial* seperti terlibat berbagai kasus narkoba dan tawuran, sisanya masih memiliki kiprah



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Pendidikan multibudaya pada bagian lain dapat berperan untuk menghargai perbedaan budaya. Padersen (1995), seorang konselor telah melakukan penelitian ini yang mengadakan penelitiannya di Sekolah Dasar. Hasil temuan penelitiannya bahwa; *"a base for understanding cultural bias, and provides practical strategies to promote child development in a multicultural society"*. Pedersen berpendapat bahwa pembelajaran multikultural tersebut sangat berguna dalam memahami berbagai bias budaya yang ada di masyarakat. Sebab, tidak menutup kemungkinan apa yang siswa dengar dari masyarakat tentang budaya suatu etnis tertentu, ternyata berbeda sekali setelah ia pelajari dari budaya etnis tersebut yang secara langsung ia pelajari sesungguhnya. Melalui pembelajaran multikultural, bias budaya dapat dihindari jika secara dini dipelajari di sekolah.

Pembelajaran multibudaya juga dapat berpengaruh terhadap upaya untuk menghargai perbedaan budaya serta dapat berpengaruh sebagai wahana pemicu dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Ploumis-Devick (1996) seorang peneliti yang mengadakan penelitiannya di Sekolah Dasar Amerika, kesimpulan temuan penelitiannya menunjukkan bahwa *Provides general backround on cultural diversity and its impact; descriptions of successful programs; and strategies, activities, and resources for classroom use*. Hasil penelitian di atas sebenarnya tidak begitu mengejutkan, sebab dengan memperkenalkan dan membelajarkan siswa melalui berbagai ragam budaya yang ada di sekitar komunitasnya, siswa akan mengenal dan mempelajari budaya tersebut, yang pada gilirannya akan menghargai keragaman budaya yang ada. Pembelajaran multikultural selain itu juga akan berusaha untuk memperlihatkan eksistensi budayanya yang memerlukan pengakuan dalam lingkungan pergaulannya. Jika pernyataan tersebut dikaitkan dengan pendapat Maslow (1954: 72) yang dikenal dengan teori "Hirarki Kebutuhan" (*Hierarchy of Needs*) dapat dikategorikan sebagai kebutuhan "penghargaan" sosial.

Pendidikan multibudaya juga di sisi lain dapat mengurangi sifat prasangka dan apriori terhadap budaya etnis lain. Ponterotto (1995), mengadakan penelitiannya yang menghasilkan kesimpulan bahwa pembelajaran multibudaya berperan untuk: *"Describes theoris to explain the increase of insidents of intergroup conflict and the role of the teacher in multicultural awareness and prejudice prevention programs"*. Pembelajaran multibudaya itu dapat berperan sebagai pencegahan meningkatnya prasangka dan konflik antar kelompok, karena melalui pembelajaran multikultural siswa belajar menghargai setiap budaya etnis yang berbeda, menilai setiap keunggulan dan kelemahannya, yang pada akhirnya siswa akan menerimanya bahwa sesungguhnya tidak ada budaya yang sempurna maupun sama sekali tidak memiliki kebaikan atau manfaatnya. Bahkan menurut aliran kelompok "fungsionalis kebudayaan" atau *a functional theory of culture* Malinowski yang ditulis dalam karya akhir yang monumental *A scientific Theory of Culture and Other Essay*, bahwa segala aktivitas kebudayaan itu sebenarnya bermaksud memuaskan suatu rangkaian dari sejumlah kebutuhan manusia (Kaberry, 1957: 82).

Pendidikan multibudaya juga berperan untuk mempersatukan budaya bangsa. Penelitian ini dilakukan oleh Ravitch (1996) yang meneliti perspektif multikultural dalam



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

multibudaya berarti keyakinan atau kebijakan yang menghargai pluralisme budaya sebagai khasanah kebudayaan yang diakui dan dihormati keberadaannya (Suparlan, 2003: 31; Bennet, 1995: 115). Jadi, kata kunci dalam pendidikan multibudaya ini adalah “perbedaan” dan “penghargaan”, dua kata yang selama ini sering dikonfrontasikan.

Pendidikan multibudaya sebagai praktik sosial dan kebijakan pemerintah, dewasa ini telah diterima di banyak negara sebagai sesuatu yang penting. Berry dkk (1998: 576) menyebutkan multibudaya bahkan menjadi semacam ideologi dalam pengembangan kebudayaan serta upaya menciptakan masyarakat yang sehat. Multibudaya pada hakekatnya dimaksudkan untuk menciptakan suatu konteks sosiopolitis yang memungkinkan individu dapat mengembangkan kesehatan jati diri dan secara timbal-balik mengembangkan sikap-sikap antar kelompok yang positif demi tegaknya demokrasi, HAM, dan kesejahteraan masyarakat (Suparlan, 2002: 99; 2003: 35). Proses untuk menapaki jalan menuju pengakuan tersebut, adalah sebuah pendakian yang terjal, dan sikap terhadap realitas multibudaya masyarakat atau bangsa mengalami fluktuasi perkembangan sepanjang sejarah.

Padahal, multibudaya pada masa lampau dipandang sebagai suatu yang tidak berguna, dan pandangan yang anti pluralisme ini justru bekembang di negara-negara Barat. Dewey (Westbrook, 1991), bahkan menganggap multibudaya hanya menciptakan garis pemisah yang kuat antar kelompok dalam masyarakat, karena itu apa yang seharusnya terjadi adalah asimilasi. Dworkin (2001: 68) dan Kymlicka (2002: 50-51) berpendapat, bahwa jika ditinjau dari aspek hak-hak azasi manusia (HAM) maka pendidikan multibudaya di samping melindungi hak-hak individu, mencakup hak-hak kolektif ataupun budaya komunitas. Jadi, tidak beralasan jika kaum liberal merasa ketakutan bahwa hak kolektif yang dituntut oleh kelompok etnis tertentu dianggap berlawanan dengan hak perorangan. *Kedua* jenis tuntutan dan hak azasi itu dapat dipandang sebagai upaya melindungi stabilitas komunitas bangsa. Howard (2000: 315) dan Gould (1993: 69-70) berkeyakinan bahwa dalam gerakan multibudaya mencakup apa yang disebut demokrasi sosial, yaitu suatu jenis liberalisme tersendiri yang menjembatani jurang anantara hak-hak individu dengan komunitas.

Demokrasi sosial secara politis berkomitmen memberikan dan melindungi seluruh hak azasi manusia. Pandangan demikian ini agak berbeda dengan definisi yang sering dijadikan standar tentang demokrasi sosial sebagai “suatu etos dan cara hidup yang dicirikan oleh penghapusan perbedaan-perbedaan status secara umum” (Sartori, 1968: 113). Howard (2000: 316), lebih jauh menjelaskan bahwa dalam demokrasi sosial tidak mensyaratkan adanya penghapusan perbedaan ekonomi secara radikal. Sebab penghapusan itu menghalangi inisiatif yang diperlukan untuk kemajuan ekonomi pada tingkat kolektif dan individu, bahkan bisa mengakibatkan standar kehidupan masyarakat merosot secara umum, seperti yang banyak terjadi pada masyarakat bekas komunis Eropa Timur. Demokrasi sosial dengan demikian bukan menghapuskan kapitalisme, melainkan memperbaiki kapitalisme radikal.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

pada cerita etnik-etnik mayoritas atau dominan tertentu. Sebaliknya, tentang multibudaya yang melibatkan perkembangan etnik-etnik minoritas lainnya tidak banyak diberikan dalam pembelajaran dalam sejarah di sekolah. Komentar Deutch (1984: 18) mengemukakan bahwa *Tribes have merged to form peoples; and peoples have grown into nation*, adalah suatu pernyataan yang perlu dihargai, terutama peranan suku bangsa.

Motto Bhineka Tunggal Ika mestinya mengakomodasi atas keragaman dalam masyarakat bangsa Indonesia dalam suku, ras, bahasa, adat istiadat, dan agama. Ironisnya keragaman dalam kesatuan budaya bangsa dalam perjalanan kemerdekaan negara/bangsa lebih ditekankan pada aspek kesamaan untuk membentuk solidaritas bangsa. Implikasinya, budaya lokal yang kaya dengan perbedaan banyak mengalami erosi atau pengikisan baik secara kuantitas maupun kualitas terutama penggunaan bahasa daerah mengalami kemunduran maupun kehilangan daya gunanya secara pragmatik (Wiriaatmadja, 2002: 221).

Pengembangan nilai-nilai budaya lokal dan primordial seperti stereotip, etnosentrisme dan sebagainya, memang dapat menimbulkan perpecahan yang berbahaya. Tetapi konsep primordialisme itu sendiri memerlukan kajian yang lebih proporsional. Adanya ikatan "lokal-tradisional", sering dirasakan sebagai suatu realitas sosial-kultural itu diperlukan sebagai pengisi identitas diri dan kelompoknya yang terasa hampa, memerlukan keakraban karena lebih bersifat naturalistik dan bukan rekayasa. Apalagi akibat proses globalisasi, kita sering terasa "sepi" dan memerlukan ikatan komunitas lama yang akrab (Abdullah, 1999: 19). Itulah sebabnya pada batas tertentu yang relevan, bisa dipahami kemunculan gerakan-gerakan *indigenous people* yang telah marak terjadi di banyak negara. Gerakan *indigenous people* ini, seperti gerakan Quebec di Kanada maupun etnis Kurdi di Timur Tengah.

Featherstone (2001: 269), mengemukakan bahwa *essentially memoryless* yang kurang terakomodasi oleh pemerintah, juga tergilas gerakan homogenisasi *pop culture* ataupun *common culture* akibat globalisasi. Terdapat beberapa kecemasan para sosiolog mencermati perkembangan sosio-budaya sekarang ini. Featherstone (2001: 270) dalam bukunya *Consumer Culture and Postmodernism*, mengatakan fenomena kehidupan yang berkembang sekarang ini sangat destruktif bagi agama dan kebudayaan dalam kaitannya dengan penekanannya pada hedonisme, pengejaran kesenangan di sini dan saat ini (*here and now*) penanaman gaya hidup ekspresif, pengembangan narsistik dan tipe kepribadian egoistik. Gerakan mengenai kapitalisme multinasional, Amerikanisasi, imperialisme media serta budaya konsumen, seolah-olah telah mengasumsikan bahwa perbedaan lokal-tradisional terhapus oleh beberapa kekuatan universal tersebut.

Menurut Harsja Bachtiar, bukankah sebenarnya cita-cita kita bersama sebagai bangsa Indonesia adalah sederhana tetapi mulia, yaitu untuk membentuk suatu masyarakat di mana semua golongan atau etnis dapat hidup rukun, mengembangkan diri tanpa merugikan golongan lain, bahkan dapat membantu atau mendukung golongan lain, sehingga terwujud suatu masyarakat yang adil dan makmur (Bachtiar, 2002: 45). Bangsa Indonesia dalam memperjuangkan tercapainya cita-cita yang demikian itu tidaklah mudah. Ia memerlukan banyak pengorbanan, waktu, energi, dan kesabaran. Mengingat untuk



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Teori *Perang-Ruang* dari Bauman (1998: 9), dalam bukunya *Globalization: The Human Consequences*, melihat bahwa globalisasi diwarnai oleh faktor kemampuan “mobilitas” yang menjadi faktor terbentuknya stratifikasi yang paling dominan. Ia beranggapan, hanya mereka yang “mobile” yang mampu menguasai dunia dalam proses memaknai dirinya sendiri. Sebaliknya kaum “pecundang” tidak hanya berada dalam kekurangmampuan mobilitas, tetapi terkurung dan tidak mampu memberi makna kehidupannya sendiri. Bauman (1998: 97) berasumsi bahwa pemenang adalah “hidup dalam waktu” karena baginya ruang bukan masalah. Tidak berarti semua orang mampu untuk *mobile*, bahkan sebagian besar orang hidup di antara dua titik ekstrim, mereka merasa tidak pasti, sebagian mereka tidak bisa melihat cahaya *esok hari*.

Teori *Globalization of Nothing* dari Ritzer (2004) yang disajikan dalam buku *Globalization of Nothing: Why So Many Make So Much Out of So Little*. Suatu meta teori yang menganalogikan “nothing” sebagai bentuk yang dibayangkan dan dikontrol secara sentral yang sebagian “kosong” dari isi yang distingtif dan menggloabal. Terdapat empat sub tipe *nothing*; (1) *non-places*, seperti pusat perbelanjaan mall, (2) *non-things* seperti kartu kredit, (3) *non-people*, seperti karyawan yang diasosiasikan telemarker, (4) *non-servis* seperti ATM.

Teori *Landscape* Appadurai, yang menurut Ritzer dan Goodman (2004: 597) merupakan teori globalisasi paling populer dan banyak dikutip oleh banyak para ahli. Teori ini dimuat dalam buku *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*. Appadurai mengemukakan bahwa terdapat arus global dan keterputusan di antara arus-arus tersebut yang mencakup; pertama, *ethnoscapes* (kelompok turis dan pekerja tamu), kedua, *technoscapes* (teknologi tinggi mekanistik dan informasional yang menggloabal), ketiga, *financescapes* (pasar bursa saham dan pasar modal), keempat, *mediascapes* (koran, majalah, televisi, internet), dan kelima, *ideoscapes* atau serangkaian imaji yang bersifat politis pro dan kontra (Appadurai, 1996: 33-36).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, H.M. Amin, (2003) *Agama dan Pluralitas Budaya Lokal*, Surakarta: Mahammadyah University Press.
- Abdullah, Taufik (1984) “Kesadaran Sejarah Masa Kini: Perdebatan Tentang Hari Sumpah Pemuda” dalam William H. Frederick dan Soeri Soeroto, *Pemahaman Sejarah Indonesia*, Jakarta: LP3ES.
- Abdullah, Taufik (1999) “Nasionalisme Indonesia: Dari asal-usul ke prospek masa depan” dalam *Sejarah* , 8, Jakarta: MSI dan Arsip Nasional RI.
- Abdullah, Taufik (2001) *Nasionalisme & Sejarah*, Bandung: Satya Historika.
- Adam, Asvi, W. (2001) “Ancaman Disintegrasi di Depan Mata”, dalam *Kompas*, 16 Agustus 2001.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

- Kammen, Michael, (1977) *Bangsa yang Penuh Paradox*, Penerjemah Mochtar Pabotinggi, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Kellner, Douglass (2002) "Theorizing Globalization" dalam *Sociology Theory* 20: hlm. 285-305.
- Kennedy, P. (1995) *Menyiapkan Diri Menghadapi Abad ke 21*, Diterjemahkan Oleh Yayasan Obor Indonesia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Kluckhohn, F. dan Strodtbeck, F.L. (1961) *Variations in Value Orientation*, Evanston: Row, Peterson & Company.
- Knapp, Mark, L. (1978) *Social Intercourse: From Greeting to Goodbye*, Boston: Allyn and Bacon.
- Knapp, M.L. (1985) "Tahap-Tahap Interaksi" dalam *Pengantar Sosiologi, Sebuah Bunga Rampai*, Penerjemah Kamanto Sunarto, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Koentjaraningrat, (1970) *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Koentjaraningrat, (1986) "Peranan Local Genius dalam Akulturasi", dalam Ayatrohaedi Ed. , *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*, Jakarta: Pustaka Jaya.
- Koentjaraningrat, (1987) *Sejarah Teori Antropologi, Jilid I dan II*, Jakarta, Universitas Indonesia Press.
- Koentjaraningrat, (1995) "Penggunaan Metode-metode Antropologi dalam Historiografi Indonesia" dalam Soedjatmoko et al *Historiografi Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Kuntowijoyo (2003) "Malin Kundang, Jangan Jadi Lebai Malang: Muhammadiyah dan Budaya Lokal", dalam Amin Abdullah, *Agama dan Pluralitas Budaya Lokal*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Press.
- Kymlicka, Will (1999) "Misunderstanding Nationalism" dalam *Theorizing Nationalism*, diedit oleh R. Beiner, Albany: State University of New York.
- Kymlicka, Will (2002) *Kewargaan Multikultural*, Terjemahan Edlina Hafmini Eddin, Jakarta: LP3ES.
- Lippman, Walter, (1998) *Public Opinion*, Penerjemah S.Maimoen, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Lipset, Seymour M. (1994) *Amerika Serikat Bangsa Baru yang Pertama: Dalam Perspektif Sejarah dan Komparatif*, Terjemahan Hermawan Soelistyo, Jakarta: Sinar Harapan.
- Lockwood, David (1973) *Some Remarks on The Social System*, dalam N.J. Demarth III, New York: Harper and Row Publisher.
- Lowenthal, David (2000) "Dilemmas and Delights of Learning History" dalam Peter N. Stearns, Peter Seixas, dan Sam Wineburg, *Knowing, Teaching, and Learning History National and International Perspectives*, New York: New York University Press.
- Mac, Dieter (2001) *Musik Kontemporer dan Persoalan Interkultural*, Yogyakarta: Artline
- Magnis-Suseno, F. (1992) "Filsafat Sebagai Ilmu Kritis", *Pustaka Filsafat*, Jakarta: Kanisius.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

- Tye, K.A. and Tye, B.B. (1992) *Global Education: A Study of School Change*, New York: State University of New York Press.
- van den Berghe, Pierre, L. (1967) "Dialectic and Functionalism: Toward a Synthesis", dalam N.J. Demerath III et. Al., eds, *System, Change, and Conflict*, New York: The Free Press.
- van den Berge Pierre, L. (1969) "Pluralism and the Polity: A Theoretical Exploration", dalam Leo Kuper dan M.G.Smith eds. *Pluralism in Africa*, Berkeley and Los Angeles: University of California Press
- Wallerstein, Immanuel (1996) "Ekonomi Dunia Kapitalis" dalam Roy C. Macridis & Bernard E. Brown, *Perbandingan Politik: Catatan dan Bacaan*, Alih Bahasa Henry Sitanggang, Jakarta: Erlangga.
- Weiner, Myron (1996) "Kebijakan Preferensial" dalam Roy C. Macridis dan Benard E. Brown, *Perbandingan Politik*, Alih Bahasa A.R. Henry Sitanggang, Jakarta: Erlangga.
- Westbrook, R.B. (1991) *John Dewey and American Democracy*, Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Wineburg, Sam (2000) "Making Historical Sense" dalam Peter N. Stearn, Peter Seixas, dan Sam Wineburg, *Knowing Teaching, and Learning History: National and International Perspectives*, New York: New York University Press.
- Wineburg, Sam (2001) *Historical Thinking and Other Unnatural Acts: Charting the Future of Teaching the Past*, Philadelphia: Temple University Press.
- Wineburg, S. dan, Wilson, Suzanne, M (2001) "Peering at History Through Different Lenses: The Role of Disciplinary Perspectives in Teaching History", dalam Wineburg *Historical Thinking and Other Unnatural Acts: Charting the Future of Teaching the Past*, Philadelphia: Temple University Press.
- Wiriaatmadja, Rochiati (1992) *Peranan Pengajaran Sejarah Nasional Indonesia dalam Pembentukan Identitas Bangsa (Upaya Peraihan Nilai-nilai Integralistik dalam Proses Sosialisasi dan Enkulturas Berbangsa di Kalangan Siswa SMK I BPK Penabur di Bandung)*, Disertasi Untuk Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Pendidikan dalam Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Pascasarjana IKIP Bandung.
- Wiriaatmadja, Rochiati (2002) *Pendidikan Sejarah di Indonesia: Perspektif Lokal, Nasional, dan Global*, Bandung: Historia Utama Press.
- Young, Iris Marion (1990) *Justice and the Politics of Difference*, New Jersey: Princeton University Press.
- Zeitlin, Irving M. (1995) *Memahami Kembali Sosiologi: Kritik Terhadap Teori Sosiologi Kontemporer*, Penerjemah: Anshori dan Juhanda, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Zuhdi, Susanto (1999) "Beberapa Pokok Pikiran Tentang Penyempurnaan Kurikulum Mata Pelajaran Sejarah", *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Tahun Ke 5 No.019, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Depdikbud.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

cara melaksanakan pendidikan dalam keluarga dengan sebaik-baiknya". Perubahan dan pergeseran nilai yang paling hakiki dan esensial di dalam kehidupan keluarga yang dapat dan tetap berusaha meningkatkan budi pekerti dan martabat manusia.

Dengan adanya gejala melemahnya fungsi keluarga, maka segera perlu dilakukan komunikasi pengertian dan wawasan tentang kehidupan keluarga yang dapat diharapkan dalam masa reformasi pembangunan dewasa ini, untuk lebih bisa menyesuaikan diri pada tuntutan era globalisasi. Kemerdekaan, kemajuan dan reformasi dalam masyarakat di era globalisasi tidak perlu menghancurkan lembaga masyarakat yang paling inti, yaitu keluarga. Kesadaran akan pentingnya keluarga sebagai lingkungan hidup pertama akan membawa kita dan para pendidik (orang tua, guru, pemuka masyarakat, dan pemimpin negara) pada keadaan lebih memperhatikan fungsi masing-masing dalam liputan tugasnya sendiri-sendiri dalam kehidupan keluarga. Perubahan sosial dalam kehidupan manusia tidak akan bisa dibendung, tetapi hak dan tanggung jawab manusia untuk bisa mengendalikan perubahan itu. Kemampuan pengendalian akan lahir, apabila memiliki wawasan yang esensial dalam pendidikan, umumnya pemahaman akan kehidupan keluarga sebagai tatanan hidup dan tatanan pendidikan khususnya tatanan pendidikan dalam keluarga untuk "Pendidikan Keluarga".

Kehidupan Keluarga

Keluarga sebagai intitusi sosial paling kecil kehidupannya merupakan basis dari kehidupan suatu bangsa. Kehidupan keluarga dapat dijadikan indikator untuk melakukan pengujian kemajuan dan kesejahteraan atau kesengsaraan dan kemunduran suatu bangsa. Kehidupan keluarga memiliki peranan penting di dalam pembangunan sosial ekonomi, sosial psikologis, sosial budaya dan pembangunan kehidupan spiritual suatu bangsa. Perubahan sosial ekonomi pada suatu bangsa atau negara, maju atau mundur, dapat diukur atau terposisikan pada kehidupan sosial ekonomi yang sedang berlangsung dalam kehidupan keluarga. Secara sosial ekonomi keluarga "mestinya" dapat menjalankan tugas penghematan, efektif dan efisien di dalam menggunakan sumber kehidupan material atau non material.

Secara sosial psikologis, kehidupan keluarga merupakan basis kehidupan yang mestinya mempunyai kemampuan menghadirkan lingkungan sosio-psiko-fisik yang memadai bagi kehidupan suatu bangsa dan negara. Pencapaian kekuatan dan kesejahteraan suatu bangsa perlu diawali dan dikonsentrasikan pada kekuatan dan kesejahteraan keluarga.

Kehidupan keluarga secara sosial budaya mestinya menjadi lembaga ketahanan budaya dan identitas suatu bangsa. Kultur suatu bangsa tidak mungkin dipertahankan atau dilestarikan oleh bangsa itu, apabila institusi terkecilnya yaitu keluarga dalam kehidupan sehari-harinya tidak mengacu dan tidak menapak pada budaya bangsanya. Kehidupan keluarga secara sosial psikologis mestinya tampil sebagai lembaga yang memberi kesempatan pada setiap anggotanya mengembangkan seluruh kemampuan yang bersifat potensial positif menjadi kemampuan aktual yang menguntungkan dirinya dan orang lain. Orang lain itu, yaitu orang-orang yang ada dalam keluarganya, masyarakatnya, bangsanya bahkan dunia. Di dalam pembangunan kehidupan spiritual, kehidupan keluarga



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

menurut hukum manapun. Upaya pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga sebagai lembaga pendidikan yang pertama.

Disiplin dasar dalam mengembangkan nilai budaya ilmu dan agama pada anak-anak adalah tugas pendidikan dalam keluarga. Sekalipun keluarga dapat meminta bantuan lembaga-lembaga pendidikan lainnya seperti sekolah, mesjid, dan kegiatan sosial pendidikan lainnya. Pemilihan lembaga pendidikan ini merupakan tanggung jawab keluarga dengan adanya resiko biaya pendidikan.

Pelaksanaan fungsi pendidikan dalam kehidupan keluarga bertautan erat dengan pelaksanaan *fungsi perlindungan*. Pendidikan dalam keluarga merupakan bagian dari fungsi perlindungan terhadap anak dan anggota keluarga lainnya; supaya anggota keluarga terhindar dari kebodohan, kemiskinan dan hidup amoral, di samping perlindungan fisik terhadap anggota keluarga untuk tidak kelaparan, kehausan, kedinginan, kepanasan, kesakitan karena menderita berbagai penyakit atau karena gangguan yang bersifat mental. Perlindungan terhadap mental setiap anggota keluarga perlu dilaksanakan supaya mereka mampu mengatasi frustrasi dan konflik di dalam kehidupannya. Mereka dihindarkan dari kebiasaan menyalahkan orang lain yang menyebabkan timbulnya frustrasi atau konflik itu. Di samping itu setiap anggota keluarga perlu dihindarkan dari perbuatan amoral.

Perlindungan moral perlu dilakukan, supaya anggota keluarga itu dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral yaitu perbuatan jahat, buruk dan perbuatan yang tidak berprikemanusiaan lainnya. Orang tua harus mempunyai kemampuan melarang anak-anaknya untuk perbuatan-perbuatan buruk dan mendorong anak-anaknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, sesuai dengan tuntutan keluarga, masyarakat dan negara di mana mereka hidup dan tuntutan agama yang mereka anut. Fungsi perlindungan ini, sebenarnya mempersiapkan anggota keluarganya, khususnya anak-anak untuk terjun ke dalam kehidupan di dalam masyarakat.

Fungsi sosialisasi mempunyai pertautan yang erat dengan fungsi pendidikan dan perlindungan. Keluarga mempunyai tugas mengantarkan anggota keluarga khususnya anak ke dalam kehidupan sosial (masyarakat) yang lebih luas. Anak harus diantarkan pada kehidupan berteman, bergaul dengan famili (baraya (sd)), bertetangga, menjadi warga masyarakat di jalan, di tempat-tempat umum dan anggota di dalam lembaga sosial lainnya seperti sekolah, puskesmas, rumah sakit, kantor Pos, Bank dan lain-lain. Keberhasilan hidup dalam masyarakat tergantung pada bantuan orang tua di dalam memilih dan dapat menafsirkan norma-norma yang hidup dalam masyarakat itu. Anak dapat melatih diri dalam arena percaturan kehidupan sosial atas bantuan orang tua. Dia harus bisa menjadi orang yang patuh, tetapi juga harus dapat mempertahankan diri, dan *kalaupun memang sangat dirasakan perlu*, maka ia harus bisa menyerang. Semua ini hanya dapat ditafsirkan berdasarkan suatu sistem norma yang dianut dan berlaku dalam masyarakat di mana anak itu hidup.

Dalam rangka sosialisasi ini, masalah menafsirkan kehidupan dalam kaitan norma dalam nilai kehidupan ini, bukan suatu pekerjaan yang mudah. Sosialisasi membutuhkan waktu dan ketekunan orang tua dalam mengantarkan anak menjadi warga masyarakat yang baik. Salah satu usaha yang dapat membantu dan memudahkan untuk kehidupan

dalam masyarakat itu ialah , hidup beragama. Kehidupan beragama memimpin seseorang untuk lebih mudah bergaul di antara sesama umat manusia.

Keluarga sebagai lembaga sosial mempunyai tanggung jawab supaya setiap anggota keluarga khususnya anak-anak untuk menjadi penganut agama, meyakini dengan baik dan melakukan seluruh ajaran agama dengan khusyu dan ikhlas. Dengan perkataan lain keluarga adalah lembaga pendidikan beragama dan lembaga perlindungan untuk hidup beragama serta tempat melaksanakan ritual keagamaan.

Kebesaran suatu agama didukung oleh besarnya jumlah keluarga yang menjalankan syariat agamanya, bukan oleh jumlah penganutnya saja. Keluarga yang menjalankan fungsi ini akan mengisi suatu pandangan bahwa kedewasaan seseorang di antaranya ditandai oleh pengakuan akan suatu sistem dan ketentuan nilai agama yang direalisasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Satuan dan ketentuan norma tersebut terkandung dalam agama yang dianutnya yang mendasari serta memberikan arah pada kehidupan manusia secara pribadi dalam keluarga, masyarakat dan bernegara.

Fungsi keagamaan harus dijalankan melalui pendidikan yang bernafaskan kehidupan “beragama”. Kehidupan beragama sangat penting, karena kehidupan ini dapat memberikan keseimbangan hidup pada manusia. Kehidupan beragama dalam kehidupan keluarga tetap menganjurkan bahwa kehidupan keluarga harus dikelola sedemikian rupa, sehingga keluarga menjadi tempat yang menyenangkan bagi setiap anggotanya, yaitu “Baiti Jannati”.

Di dalam pembangunan keluarga sebagai *mahligai* bagi kehidupan anggotanya perlu dihadirkan melalui pelaksanaan *fungsi rekreasi*. Rekreasi merupakan upaya di dalam mempertahankan ikatan batin di antara anggota keluarga. Pembangunan rekreasi dalam kehidupan keluarga berarti menghindarkan dari kejenuhan, ketakutan, kekesalan, kecemasan, ketidakpuasan di dalam bekerja dan melaksanakan kehidupan sehari-hari. Kehadiran fungsi rekreasi dalam kehidupan keluarga menjadikan suasana dalam kehidupan keluarga itu nyaman, menyenangkan, membetahkan, penuh rasa cerah ceria, hangat dan penuh semangat. Kondisi dan situasi suasana rekreasi ini dapat terlahir dengan ajeg apabila adanya “kerja sama” di antara anggota keluarga. Kerja sama ini adalah kerja sama yang diwarnai oleh hubungan antar insani yang saling mempercayai karena masing-masing bisa dipercaya, saling menghormati, karena masing-masing telah berusaha untuk mempertahankan kehormatan diri, saling mengagumi, karena ada bagian-bagian kepribadian yang patut dikagumi, saling mengerti karena masing-masing telah berusaha memahami dan mengerti hak dan kewajiban orang lain di antara hak dan kewajiban sebagai dirinya.

Di dalam menghadapi masalah hidup selalu ada suasana *give and take*, karena adanya hubungan inter personal di dalam konteks *you are okey, I am okey, and I am okey, you are okey*.

Fungsi status keluarga merupakan fungsi yang perlu dijadikan acuan dan kriteria pengamatan dan penilaian keberhasilan atau ketidak berhasilan pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga yang lain di dalam menyelenggarakan kehidupan keluarga sehari-hari. Dari perjalanan kehidupan keluarga ini, kita bisa dinyatakan sebagai keluarga yang memiliki status :

(+)		(-)
Baik	atau	Tidak Baik
Ekonomi kuat	atau	Ekonomi lemah
Sejahtera	atau	Tidak sejahtera
Bahagia	atau	Tidak bahagia
Penuh kasih sayang	atau	Kurang kasih sayang
Beragama	atau	Kurang beragama
Terdidik	atau	Kurang terdidik
Intelektual	atau	Kurang intelektual
Dll,	dll,	dll

Dari contoh gambaran kondisi status keluarga ini, sudah dapat dipastikan, bahwa keinginan setiap keluarga dalam konteks yang positif (+). Seandainya keluarga masih berada pada status keluarga dalam konteks negatif (-), maka keluarga masih memiliki kesempatan untuk berusaha mencapai status keluarga yang positif.

Pelaksanaan fungsi keluarga tersebut di atas, merupakan upaya menghadirkan keluarga sebagai lingkungan hidup seseorang yang lebih berorientasi kepada *keniscayaan* hadirnya dinamika kehidupan keluarga sebagai institusi sosial terkecil yang diharapkan memberikan *pengaruh baik*, pada kehidupan institusi sosial yang lebih luas seperti lingkungan kerja, masyarakat sekitar tempat tinggal, masyarakat luas, bangsa, negara bahkan dunia.

Kehidupan Keluarga sebagai Lingkungan Hidup

Pada umumnya keluarga merupakan lingkungan hidup yang pertama bagi setiap orang. Kehidupan di dalam keluarga merupakan lingkungan hidup yang pertama kali memberikan pengaruh pada cara individu itu memenuhi kebutuhan dasar di dalam mendapatkan pengetahuan, memiliki sikap dan mengembangkan keterampilan di dalam dan untuk kehidupan. Keluarga sebagai lingkungan hidup pada kenyataannya bisa memberikan pengaruh pada kehidupan seseorang secara positif apabila keluarga itu dibangun, dibina dan dikelola oleh orang yang mengerti tentang kehidupan keluarga. Di dalam keluarga seperti ini pelaksanaan fungsi keluarga relatif dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya. Namun di pihak lain tidak semua keluarga dibina dan dikelola oleh orang-orang yang mengerti dan sungguh-sungguh melaksanakan fungsi keluarga tersebut di atas. Kehidupan keluarga diselenggarakan berdasarkan selera pribadi di dalam ketidaktahuan, ketidakmengertian dan ketidaksempurnaan melaksanakan fungsi dan tugas berkeluarga. Hidup perkawinan dan berkeluarga tidak jelas arah dan tujuannya. Kehidupan perkawinan dan berkeluarga dilaksanakan tak tentu arah, hidup berkeluarga dalam ikatan batin yang longgar dan didasarkan pada kesenangan dan kebahagiaan yang bersifat insidental.

Dengan kata lain kehidupan keluarga bagi kehidupan seseorang bisa menjadi lingkungan yang menguntungkan atau keluarga menguntungkan bahkan tidak



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Arti pendidikan keluarga

Yang dimaksud dengan Pendidikan Keluarga adalah pendidikan yang harus dilaksanakan dalam keluarga oleh orang tua kepada dirinya sendiri, anggota keluarga yang lain dan kepada anak-anaknya. Pendidikan keluarga dapat diartikan sebagai tindakan dan upaya yang dilakukan oleh orang tua sebagai pendidik utama dalam bentuk bantuan, bimbingan, penyuluhan dan pengajaran kepada dirinya sendiri, anggota keluarga lain dan kepada anak-anaknya, sesuai dengan potensi mereka masing-masing, dengan jalan memberikan pengaruh baik melalui pergaulan antar mereka. Sehingga anggota keluarga dan anak yang bersangkutan kelak dapat hidup mandiri yang bertanggung jawab dan ia dapat dipertanggung jawabkan dalam lingkungan masyarakatnya sesuai dengan nilai-nilai budaya yang berlaku dan agama yang dianutnya.

Tujuan pendidikan keluarga

Usaha pendidikan selalu bertujuan dalam lingkup kehidupan yang bernilai dan bermakna dalam kerangka sesuatu yang “ideal” atau “maksimal” sesuai dengan kemampuan anggota keluarga termasuk anak dalam keluarga itu. Dalam tujuan pendidikan biasanya terkandung tiga aspek kehidupan manusia dalam kaitannya dengan kehidupan di dalam lingkungan masyarakatnya, yaitu aspek kehidupan pribadi, sosial dan moral.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa yang menjadi tujuan pendidikan dalam keluarga, ialah “Anak dan anggota keluarga dapat tumbuh dan berkembang semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya untuk menjadi seseorang yang mandiri dalam masyarakatnya dan dapat menjadi insan produktif bagi dirinya sendiri dan lingkungannya itu. Kemudian setiap anggota keluarga berkembang menjadi orang dewasa yang mengerti nilai budaya bangsanya dan menjadi seorang yang bertaqwa sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya.

Proses Pendidikan dalam Lingkungan Keluarga

Secara imperatif proses pendidikan di dalam keluarga harus bisa berjalan dengan sendirinya dalam pergaulan antar anggota keluarga termasuk pergaulan antara orang tua anak yang diwarnai oleh adanya kewibawaan orang tua dan rasa persahabatan antara orang tua anak. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan kemanusiaan yang diwarnai rasa tanggung jawab dan kasih sayang. Situasi ini akan membawa pada kehidupan dengan suasana hangat dan menyenangkan. Keadaan ini dapat diciptakan dalam kehidupan keluarga, apabila orang tua benar-benar memahami arti perkawinan dan berkeluarga, dengan segala tugas, peranan, serta risiko yang harus ia hadapi dalam kehidupan dengan penuh tantangan dengan rasa tanggung jawab. Suasana hidup berkeluarga dan pemahaman akan tugas sebagai orang tua akan memudahkan orang tua memahami kebutuhan dan harapan-harapan sosial (*social expectation*) dan tuntutan-tuntutan sosial budaya (*cultural social demand*). Harapan dan tuntutan sosial budaya banyak berkaitan dengan tujuan pendidikan dan filsafat hidup yang mendasarinya. Selanjutnya dari arti, tujuan dan proses pendidikan keluarga itu dapat disimak pula gambaran tentang lingkup kegiatan dan materi dalam Pendidikan Keluarga itu.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

mengembangkan, terpadu, dan menyeluruh sehingga anak dapat bertumbuh-kembang secara sehat dan optimal sesuai dengan nilai dan norma kehidupan yang dianut.

Dalam pengertian PAUD tersebut terdapat beberapa gagasan pokok yang perlu dijelaskan lebih lanjut. *Pertama*, aktivitas pendidikan tidak dibatasi secara sempit pada kegiatan belajar-mengajar di kelas, melainkan mencakup segenap aktivitas yang diarahkan untuk mendukung proses perkembangan dan belajar anak secara menyeluruh. *Kedua*, yang berperan sebagai pendidik tidak terbatas pada orang tua dan guru, melainkan bisa pula melibatkan orang dewasa lainnya yang ikut terlibat dalam proses pendidikan anak. *Ketiga*, sesuai dengan istilah yang digunakan—usia dini, masa pendidikan dibatasi pada jenjang usia sejak lahir sampai dengan 6 tahun. *Terakhir*, sasaran akhir dari PAUD adalah tercapainya perkembangan anak yang optimal sesuai dengan nilai dan norma yang dianut melalui penyediaan berbagai rangsangan serta lingkungan dan pengalaman belajar yang relevan dan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak.

Dalam konteks perkembangan anak, PAUD memiliki lima fungsi dasar, yakni : (1) pengembangan potensi, (2) penanaman dasar-dasar aqidah keimanan, (3) pembentukan dan pembiasaan perilaku yang diharapkan, (4) pengembangan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan, serta (5) pengembangan motivasi dan sikap belajar yang positif (Solehudin, 2000).

Pada dasarnya setiap bayi yang lahir ke dunia dilengkapi sejumlah potensi yang diperlukan untuk kehidupannya. Ia memiliki potensi untuk beragama, berpikir, berkreasi, merasa, berkomunikasi dengan orang lain, dan potensi-potensi lainnya. Upaya pengembangan potensi anak perlu dilakukan sejak usia dini sebab pada masa itulah terjadinya masa-masa emas dari perkembangan berbagai potensi tersebut. Dijelaskan oleh para ahli (Bloom, 1984; Bredekamp dan Copple, 1997; Kostenik et al, 1999; Newberger, 1997) bahwa pada usia dini terdapat periode-periode optimal dalam perkembangan anak. Maksudnya, pada masa ini terdapat kesempatan-kesempatan yang lebih memungkinkan terjadinya perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek perkembangan anak. Misalnya, masa tiga tahun pertama kehidupan merupakan periode optimal bagi perkembangan bahasa; usia TK merupakan masa yang sensitif bagi perkembangan gerak-gerak motorik yang fundamental; dan bahkan, menurut Bloom (1984), separuh dari perkembangan potensi intelektual terjadi pada usia 4 tahun pertama.

Namun, dengan periode-periode optimal di atas tidak berarti bahwa anak harus dijejali berbagai pengetahuan serta dipaksa untuk menguasai berbagai keterampilan tanpa mempedulikan taraf perkembangan individual anak yang bersangkutan. Yang penting di sini adalah bahwa anak mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh rangsangan dan pengalaman belajar yang mendorong terjadinya proses-proses aktivitas mental dan fisik melalui cara-cara yang relevan dengan tingkat perkembangan dan kemampuan yang bersangkutan.

Sebagai umat beragama, para pendidik berkewajiban untuk menanamkan dasar-dasar aqidah yang benar kepada anak sejak usia dini sesuai dengan agama yang dianut, sebab ajaran agama merupakan sumber rujukan nilai yang sangat fundamental bagi kepentingan hidup manusia beragama. Apabila nilai-nilai aqidah tersebut sudah dibangun



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

lebih dimungkinkan terlahirnya manusia-manusia pembelajar sepanjang hayat (*lifelong learners*).

Globalisasi dan perubahan yang sangat cepat dalam dunia informasi menyebabkan timbulnya perubahan-perubahan sosial dan budaya masyarakat. Dewasa ini, banyak ibu bekerja di luar rumah, penduduk berpindah tempat tinggal, dan keluarga mengalami perubahan struktur. Perubahan budaya, pola dan sikap hidup, serta struktur keluarga tersebut membuat masyarakat semakin memerlukan program-program PAUD selain yang diselenggarakan di rumah.

Mendukung pemikiran di atas, suatu kajian komprehensif tentang pentingnya PAUD dalam Seminar dan Lokakarya (Semiloka) Nasional yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional (Ditjen Diklusepa Depdiknas) dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) di Bandung (2003) menyimpulkan sebagai berikut.

Berdasarkan sudut pandang medis-neurologis, psikososiokultural, dan edukatif, dapat disimpulkan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan hal yang sangat esensial. Secara medis-neurologis, PAUD sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan struktur dan fungsi otak anak sehingga dapat memberikan pengaruh yang menetap terhadap perkembangan perilaku dan kepribadian anak selanjutnya. ... secara psiko-edukatif masa usia dini juga dipandang sebagai masa kritis bagi perkembangan intelektual, kepribadian, dan perilaku sosial sehingga rangsangan-rangsangan pada saat itu mempunyai dampak yang lama terhadap diri seseorang. Pengalaman pendidikan dipandang sebagai suatu yang berkesinambungan sehingga pengalaman pendidikan pada masa dini akan melandasi proses dan hasil pendidikan selanjutnya.

Secara lebih luas dari aspek sosiokultural dan ekonomik, seminar tersebut juga menyimpulkan bahwa PAUD dapat merupakan suatu: (1) realisasi dari hak anak untuk hidup dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki; (2) pewarisan nilai-nilai masyarakat untuk menyiapkan anak sebagai generasi penerus; dan (3) investasi bagi masa depan karena anak yang terdidik dan berkembang baik secara ekonomis akan menguntungkan pada masa yang akan datang.

Karakteristik Anak Usia Dini serta Cara Berkembang dan Belajarnya

Karakteristik anak usia dini

Pandangan para ahli tentang anak cenderung berbeda satu sama lain dan cenderung berubah dari waktu ke waktu. Namun, kajian terhadap berbagai sumber yang relevan dan relatif mutakhir menyimpulkan adanya beberapa karakteristik anak usia dini yang menonjol dalam kaitannya dengan aktivitas belajar. Karakteristik anak yang dimaksud adalah unik, egosentris, aktif dan energik, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, eksploratif dan berjiwa petualang, mengekspresikan perilaku secara relatif spontan, kaya dengan



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

baik dalam merancang isi maupun proses pendidikan bagi anak. Namun selain itu, kondisi dan kebutuhan nyata setiap individu anak tentu juga harus dipertimbangkan dalam merancang program pendidikan tersebut.

Cara anak berkembang dan belajar

Meskipun adanya perbedaan pandangan dalam memahami cara anak berkembang dan belajar merupakan sesuatu yang tak dapat dihindari, suatu hasil review yang sangat komprehensif tentang prinsip-prinsip perkembangan dan belajar anak oleh NAEYC (Bredekamp and Copple, 1997) tampaknya cukup membantu untuk menjelaskan cara anak berkembang dan belajar secara umum. Dengan dilengkapi rujukan-rujukan lainnya (Getswicki, 1995; Brenner, 1990; Bateman, 1990; Bredekamp & Rosergrant, 1991/92), cara anak berkembang dan belajar tersebut dapat dijelaskan melalui prinsip-prinsip berikut.

Perkembangan berlangsung sebagai suatu keseluruhan ranah-fisik, sosial, emosional, dan kognitif-yang saling terjalin; perkembangan dalam satu ranah berpengaruh terhadap dan dipengaruhi oleh perkembangan dalam ranah-ranah yang lain. Prinsip ini menjelaskan bahwa perkembangan itu terjadi secara menyeluruh dalam semua aspek perkembangan dan sekaligus ada keterjalinan erat antara perkembangan suatu ranah dengan perkembangan ranah-ranah lainnya. Perkembangan dalam suatu ranah dapat membatasi atau memfasilitasi perkembangan ranah-ranah yang lain.

Perkembangan terjadi dalam suatu urutan yang relatif dapat diprediksi; abilitas, keterampilan, dan pengetahuan selanjutnya dibangun berdasarkan apa yang sudah diperoleh terdahulu. Prinsip ini menjelaskan bahwa ada pola dan urutan tertentu dalam perkembangan anak yang cenderung dapat diperkirakan. Perubahan yang dapat diprediksi terjadi dalam seluruh ranah perkembangan walaupun manifestasi dari cara perubahan tersebut serta makna yang melekat pada perubahan tersebut bisa bervariasi dalam konteks kultur yang berbeda. Selain itu, perkembangan juga merupakan suatu proses yang berkesinambungan sehingga pengalaman belajar dan tarap ketercapaian tugas perkembangan pada suatu periode akan mendasari proses perkembangan berikutnya.

Perkembangan berlangsung dengan rentang yang bervariasi antar anak dan juga antar bidang perkembangan dari masing-masing fungsi. Variasi individual sekurang-kurangnya memiliki dua dimensi, yakni variabilitas dari rata-rata perkembangan dan keunikan masing-masing individu sebagai individu. Masing-masing anak merupakan pribadi yang unik dengan pola dan waktu pertumbuhan individualnya; dan juga bersifat individual dalam hal kepribadian, temperamen, gaya belajar, serta latar belakang pengalaman dan keluarganya.

Pengalaman awal memiliki pengaruh kumulatif dan tertunda terhadap perkembangan anak. Periode-periode optimal terjadi untuk tipe perkembangan dan belajar tertentu. Pengalaman awal anak bersifat kumulatif dalam arti bahwa jika suatu pengalaman terjadi secara jarang, maka pengalaman itu bisa memiliki pengaruh yang sedikit. Sebaliknya, jika pengalaman tersebut terjadi dengan sering, maka pengaruhnya



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

dilakukan secara terintegrasi dengan sistem sosial yang ada di masyarakat dan menyertakan segenap komponen masyarakat sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya.

Berbasis keilmuan yang bersifat multi-disipliner. Prinsip PAUD pertama di atas mengimplikasikan perlunya prinsip kedua, yakni bahwa PAUD hendaknya didasarkan pada temuan-temuan mutakhir dalam berbagai bidang keilmuan yang relevan. Oleh karena sifatnya yang holistik, PAUD perlu didasarkan pada berbagai bidang keilmuan yang relevan; alih-alih hanya didasarkan pada satu bidang keilmuan tertentu. Begitu pula, praktek-praktek PAUD hendaknya selalu di perbarui sesuai dengan temuan-temuan terkini dalam bidang-bidang keilmuan yang relevan tersebut. Dalam hal ini, para ahli dan praktisi PAUD hendaknya selalu menyebarluaskan temuan-temuan ilmiahnya di bidang pendidikan anak usia dini sehingga dapat diaplikasikan oleh para praktisi PAUD, baik oleh tenaga profesional di lembaga-lembaga pendidikan anak usia dini maupun oleh tenaga-tenaga non-profesional di masyarakat dan keluarga.

Berorientasi pada kebutuhan perkembangan dan keunikan anak. Pendidikan anak usia dini seyogianya dirancang dan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan perkembangan anak. Program PAUD harus mulai dari kondisi semula anak dan terarah ke pemenuhan kebutuhan perkembangan dan belajar anak. Oleh karena itu, program PAUD yang baik adalah yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan perkembangan anak; bukan sebaliknya, anak yang dipaksa untuk memenuhi standar-standar program yang dirancang dan ditetapkan oleh orang dewasa. Dalam PAUD seperti ini, anak diposisikan sebagai subyek didik yang hak-hak dan harapan-harapannya perlu “didengar” dan diakomodasi dalam program PAUD.

Berorientasi masyarakat. Anak adalah bagian dari masyarakat dan sekaligus sebagai generasi penerus dari masyarakat yang bersangkutan. Pendidikan anak usia dini hendaknya berlandaskan dan sekaligus turut mengembangkan nilai-nilai sosio-kultural yang berkembang pada masyarakat yang bersangkutan. Prinsip ini mempersyaratkan perlunya PAUD untuk memanfaatkan potensi lokal baik itu berupa keragaman sosial budaya maupun berupa sumber-sumber daya potensial yang ada di masyarakat setempat.

Menjamin keamanan anak. Seperti telah dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa kesadaran anak usia dini akan hal-hal yang bisa membahayakan belum tumbuh sepenuhnya. Oleh karena itu, berbeda dengan penyelenggaraan pendidikan untuk anak-anak yang lebih tua, aspek jaminan keamanan ini mendapat penekanan tersendiri. Dalam hal ini para pendidik PAUD harus mampu menyediakan lingkungan belajar dan perkembangan yang aman bagi anak baik yang bisa membahayakan secara fisik maupun kesehatan. Dengan demikian, kemungkinan terjadinya kecelakaan ini dapat dihindari seminimal mungkin.

Keselarasan antara rumah, sekolah, dan masyarakat. Prinsip ini memberikan pelajaran tentang perlunya jalinan kerja sama yang harmonis antara rumah, sekolah, dan masyarakat. Untuk bisa menyediakan layanan PAUD yang bermutu dan efektif diperlukan adanya keselarasan program pendidikan antara apa yang berlangsung di rumah, sekolah, dan bahkan di masyarakat. Tiga unsur lembaga pendidikan ini perlu mensinergikan program-



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

- Marcon, R.A. (1993). At-risk Preschoolers: Early predictors of future grade retention. *ERIC Document* (ED357880).
- Munandar, U. (1999). *Mengembangkan Bakat dan Kreativitas Anak Sekolah, Petunjuk Bagi Para Guru dan Orang Tua*. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Newberger, J.J. (1997). New Brain Development Research—A Wonderful Window of Opportunity to Build Public Support for Early Childhood Education. *Young Children*. 52 (4): 4-9.
- Roopnaire, J.L. & John, J.E. (1993). *Approaches to Early Childhood Education*. 2nd Ed. New York: Merrill.
- Santrock, J.W. & Yussen, S.R. (1992). *Child Development*. 5th Ed. Dubuque, IA: Wm C Brown.
- Solehuddin, M. (2000). *Konsep Dasar Pendidikan Prasekolah*. Bandung : FIP UPI
- Solehuddin, M. (2004). *Memfasilitasi Perkembangan Berpikir dan Kreativitas Anak Usia Dini*. *Pedagogia Jurnal Ilmu Pendidikan*, Volume 2, halaman 78.
- Witdarmono, H. (1996). Pendidikan Dini: Manfaatkan kesempatan sebelum terlambat. *Kompas*. 5 Mei. Hal. 13.
- Yusuf, S. (2000). *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung : Remaja Rosdakarya.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Agar pendidikan dasar dapat terhindar dari pemisahan “kualitas pendidikan” yang dewasa ini membagi dunia menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu: a) kelompok negara industri dengan tingkat pendidikan yang tinggi serta pengetahuan dan keterampilan yang tersedia, dan b) kelompok negara sedang berkembang dengan tingkat pendidikan yang sangat rendah, maka pendidikan dasar perlu untuk memperbaiki defisit pengetahuan di negara berkembang atau terbelakang. Dengan mendefinisikan keterampilan kognitif dan efektif yang perlu dikembangkan, serta sosok pengetahuan yang harus dimiliki peserta didik melalui pendidikan dasar, maka mungkin para ahli pendidikan dapat memberikan jaminan bahwa semua anak usia pendidikan dasar, baik yang ada di negara industri maupun di negara berkembang dapat mencapai tingkat kemampuan minimal dalam bidang-bidang keterampilan kognitif yang diperlukan dalam kehidupan mereka. Dalam hubungan ini, Komisi Pendidikan untuk Abad 21 mengutip Deklarasi Dunia tentang Pendidikan Untuk Semua (*Education for All*, Pasal 1 Ayat (1)), sebagai berikut:

Setiap orang – anak, remaja, orang dewasa – akan dapat memperoleh keuntungan dari kesempatan pendidikan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar yang pokok. Keuntungan ini terdiri atas alat belajar yang pokok (seperti: melek huruf, ekspresi lisan, berhitung, dan pemecahan masalah) dan isi belajar yang pokok (seperti: pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan sikap) yang diperlukan oleh manusia untuk dapat bertahan hidup, mengembangkan kemampuan mereka secara penuh, hidup dan bekerja dengan bermartabat, berpartisipasi secara penuh dalam pembangunan, meningkatkan mutu kehidupan mereka, membuat keputusan yang terinformasi, dan terus menerus belajar.

Dewasa ini, ada kecenderungan bahwa program pendidikan dasar yang bermutu hanya diorientasikan untuk orang dan kelompok tertentu, terutama pada institusi pendidikan yang diklaim oleh masyarakat sebagai lembaga pendidikan dasar “favorit”. Pada lembaga persekolahan ini tidak cukup ruang bagi kelompok lain untuk mengakses pendidikan tersebut. Apabila dibiarkan, maka kondisi ini dapat berdampak pada perlakuan yang diskriminatif terhadap anak bangsa. Di samping itu masih banyak anak usia sekolah dasar yang belum terjangkau oleh program pendidikan dasar. Atau walaupun sekolah tersedia dalam jarak yang terjangkau, kendala-kendala psikologis dan budaya masih menghalangi mereka untuk memasuki sekolah. Untuk memecahkan masalah ini, perlu diakomodasi ide-ide “pendidikan untuk semua” yang antara lain membuat kesempatan bagi semua siswa untuk mengakses pendidikan dasar di manapun dan kapanpun. Disamping itu, perlu diciptakan suasana belajar yang dapat mengakomodasi kebutuhan anak dari berbagai strata dan latar belakang sosial dan budaya.

Untuk mencapai sasaran pendidikan dasar yang bermutu selama ini masih banyak tergantung pada lembaga pendidikan formal yang konvensional atau sejumlah lembaga pendidikan non formal, baik yang langsung di bawah tanggung jawab pemerintah maupun swasta. Padahal untuk menjangkau semua peserta didik, kemampuan lembaga tersebut



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Belajar Paket A dan B (Kejar Paket A untuk setingkat SD dan Kejar Paket B untuk setingkat SMP), serta Kursus Persamaan SD dan SMP; (4) Rumpun Sekolah Keagamaan yang terdiri atas Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Pondok Pesantren.

Bentuk satuan pendidikan dasar formal yang menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) SD/SMP Biasa, yaitu SD/SMP yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat dalam situasi yang normal;
- (2) SD/SMP Kecil, yaitu SD/SMP negeri yang diselenggarakan di daerah yang berpenduduk sedikit dan memenuhi persyaratan yang berlaku;
- (3) SD/SMP Pamong, yaitu SD negeri yang didirikan untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi anak putus SD/SMP dan/atau anak lain yang tidak dapat datang secara teratur untuk belajar di sekolah;
- (4) SD/SMP Terpadu, yaitu SD/SMP negeri yang menyelenggarakan pendidikan untuk anak yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental bersama anak normal dengan mempergunakan kurikulum yang berlaku di sekolah.
- (5) Madrasah Ibtidaiyah/Madrasah Tsanawiyah, yaitu SD/SMP yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat, di bawah bimbingan Departemen Agama.

Upaya perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan dasar di Indonesia telah dilaksanakan secara formal sejak tahun 1984 untuk tingkat SD, dilanjutkan pada tahun 1994 untuk pendidikan dasar 9 tahun. Hasil yang telah dicapai cukup memuaskan dengan ditunjukkan dengan meningkatnya APK (Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni) SD/MI dan SMP/MTs. Namun akibat krisis ekonomi dan terjadinya konflik sosial di berbagai daerah yang mengganggu program-program pendidikan dasar, maka angka partisipasi menjadi terganggu. Untuk menyelamatkan generasi mendatang dari ancaman kebodohan dan kemunduran, peningkatan partisipasi pendidikan dasar merupakan agenda yang tidak dapat diabaikan dalam pembangunan nasional.

Untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pendidikan dasar yang bermutu di masa depan, pemerintah telah dan sedang melaksanakan berbagai strategi penuntasan wajib belajar pendidikan dasar, antara lain: 1) pemantapan prioritas pendidikan dasar 9 tahun, 2) pemberian beasiswa dengan sasaran yang strategis, 3) pemberian insentif kepada guru yang bertugas di wilayah terpencil, 4) pemantapan peran SD kecil dan SMP terbuka, 5) penggalakkan Kejar Paket A dan B, 6) pemantapan sistem pendidikan terpadu untuk anak berkelainan, dan 7) peningkatan keterlibatan masyarakat untuk menunjang “pendidikan untuk semua” (*education for all*).

Upaya pemerataan dan perluasan kesempatan pendidikan dasar di Indonesia tidak hanya bernuansa kuantitatif melainkan juga kualitatif. Strategi perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan dasar yang bermutu, termasuk pengembangan

pendidikan alternatif, dijadikan sebagai wahana untuk aktualisasi asas pendidikan sepanjang hayat. Misalnya, pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam diposisikan kembali sebagai lembaga pendidikan alternatif, sehingga tidak kehilangan karakternya sebagai wahana pendidikan yang populis yang berperan besar dalam memperkaya sistem pendidikan nasional.

Sejak berlakunya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, maka pengelolaan teknis operasional penyelenggaraan pendidikan dasar di Indonesia menjadi tanggung jawab dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota, kecuali pengelolaan RA/MI/MTs. Tanggung jawab pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pendidikan adalah menetapkan standar-standar penyelenggaraan pendidikan dasar, antara lain mencakup: standar isi kurikulum, standar lulusan, standar pengelolaan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan fasilitas belajar, standar pembiayaan, dan standar penilaian proses dan hasil belajar peserta didik. Pembagian tugas dan kewenangan pengelolaan pendidikan dasar ini secara rinci ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan Daerah Otonom.

Pada tingkat pusat, pengelolaan dan pembinaan pendidikan dasar dilakukan oleh Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, dalam hal ini Direktorat Pembinaan TK/SD untuk satuan pendidikan TK dan SD, dan Direktorat Pembinaan SMP untuk satuan pendidikan SMP. Sedangkan pembinaan program Pendidikan Anak Usia Dini, Paket A, dan Paket B dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah. Selain itu, pembinaan satuan pendidikan RA, MI, dan MTs dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Madrasah, Direktorat Jendral Pendidikan Agama Islam, Departemen Agama.

Pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pembinaan pendidikan dasar dilaksanakan oleh Sub Dinas Pendidikan Dasar, dan Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi dan kabupaten/kota masing-masing. Selain itu, Kantor Departemen Agama tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui Bidang Pembinaan Madrasah melaksanakan pembinaan satuan pendidikan Roudlatul Atfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan Madrasah Tsanawiyah (MTs).

Pendidikan dasar di masa depan

Konsep dasar dan esensi pendidikan dasar yang dimiliki para pengambil kebijakan pendidikan dasar pada tingkat nasional, regional maupun kabupaten/kota, dan pengelola pendidikan dasar pada tingkat satuan pendidikan akan berpengaruh terhadap formula pengembangan pendidikan dasar di masa depan. Program belajar atau kurikulum pada setiap jenis satuan pendidikan dasar di masa depan harus dirancang dengan mempertimbangkan esensi dan fungsi pokok pendidikan dasar seperti yang dijelaskan pada bagian B tulisan ini. Pengembangan program belajar pendidikan dasar harus dikaitkan dengan karakteristik kualitas sumber daya manusia yang diperlukan untuk kehidupan

mereka di masyarakat, dan sekaligus mempertimbangkan karakteristik perbedaan kelompok peserta didik di masing-masing jenis dan jenjang satuan pendidikan dasar.

Konsep dasar yang komprehensif dan luas tentang fungsi pokok pendidikan dasar tidak hanya dipergunakan untuk masyarakat, tetapi hendaknya tertuju pada suatu kajian tentang praktek dan kebijakan pendidikan dasar pada tingkat awal dari semua negara yang memberikan suatu landasan yang mantap bagi praktek belajar peserta didik di masa depan, dan sekaligus mengembangkan keterampilan hidup (*life skills*) yang esensial untuk menghidupi sebuah kehidupan yang konstruktif dalam masyarakat.

Dalam menghadapi harapan dan tantangan masa depan yang lebih baik, pendidikan dipandang sebagai esensi kehidupan, baik bagi perkembangan pribadi maupun perkembangan masyarakat. Misi pendidikan, termasuk pendidikan dasar, adalah memungkinkan setiap orang, tanpa kecuali, mengembangkan sepenuhnya semua bakat individu, dan mewujudkan potensi kreatifnya, termasuk tanggung jawab terhadap hidup sendiri, dan pencapaian tujuan pribadi. Misi ini akan dapat tercapai dengan melalui strategi yang disebut belajar sepanjang hidup (*learning throughout life*), yang dipandang sebagai detak jantung dari masyarakat.

Dengan mengikuti gagasan konsep belajar sepanjang hidup, maka pengembangan program pendidikan dasar harus memberikan tekanan yang lebih besar pada salah satu dari empat pilar yang diusulkan dan digambarkan sebagai dasar pendidikan, yaitu: belajar hidup bersama (*learning to live together*). Dalam pola ini, pendidikan dilakukan dengan mengembangkan suatu pemahaman tentang orang lain, sejarah, tradisi, dan nilai-nilai spiritual mereka. Dengan bertopang pada landasan tersebut, pendidikan dasar dapat menciptakan suatu semangat baru yang dibimbing oleh kesadaran tentang resiko atau tantangan masa depan, sehingga mendorong orang melaksanakan proyek bersama atau mengelola konflik yang pasti terjadi, dengan suatu cara yang bijaksana dan damai.

Untuk mendukung terwujudnya gagasan tersebut di atas, maka strategi awal pengembangan program pendidikan dasar adalah penekanan kepada pilar pertama dari 4 (empat) pilar pendidikan yang ditetapkan UNESCO, yaitu belajar mengetahui (*learning to know*). Adanya perubahan yang cepat yang dibawa oleh kemajuan ilmiah dan norma-norma baru tentang kegiatan ekonomi dan sosial, tekanan pada belajar untuk hidup bersama dipadukan dengan suatu pendidikan umum yang cukup luas dengan melalui belajar memperoleh pengetahuan sebagai alat untuk memahami hidup.

Belajar bekerja (*learning to do*) adalah pilar pendidikan yang selanjutnya harus dipelajari oleh peserta didik pendidikan dasar. Disamping belajar bekerja melakukan sesuatu pekerjaan, secara lebih umum perlu pula menguasai kemampuan yang memungkinkan orang mampu menghadapi berbagai situasi yang sering tidak dapat diduga sebelumnya, dan bekerja dalam berbagai tim. Akhirnya, pilar pendidikan keempat yang harus dipelajari peserta didik pendidikan dasar adalah belajar menjadi dirinya sendiri (*learning to be*). Hal ini berarti bahwa program belajar pendidikan dasar harus memfasilitasi peserta didik untuk belajar lebih bebas dan mempunyai pandangan sendiri yang disertai dengan rasa



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

DAFTAR PUSTAKA

- Armstrong, David G. and tom V. Savage. (1983). *Secondary Education*. Macmillan Publishing Co., Inc. New York.
- Argyris, Chris. (1999). *On Learning Organization*, UK: Blackwell Published.
- Badan Standar Nasional Pendidikan. 2006. Jakarta.
- Bredekamp, Sue dan Rosegrant, Teresa (eds). (1992). *Reaching Potentials: Appropriate Curriculum and Assessment for Young Children*, Vol. 1. Washington DC: National Association for the Education of Young Children.
- Cohen, Dorothy. (1994). *Designing Groupwork: Strategies for the Heterogeneous Classroom*. New York: Teachers College Press.
- Delors, Jacques. (1996). *"Learning": The Treasure Within, Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-First Century*. Paris: UNESCO Publishing.
- Depdiknas. (2006). *Rencana Strategis Pendidikan Nasional: Konferensi Nasional Revitalisasi Pendidikan*. Jakarta: Depdiknas.
- Duke, Nell, K. (2003). Information Books in Early Childhood. NAEYC.
- Dunn, Loraine & Kantos, Susan. (1997). Developmentally Appropriate Practice: What Does Research Tell Us? ERIC Digest. ED413106.
- Dockett, Sue & Perry, Bob. (2002). Starting School: Effective Transitions. ECRP.
- Freeman, Nancy., Feeney, Stephanie., Moravick, Eva. (2003). Ethics and the Childhood Teacher Educator. NAEYC, May.
- Fogarty, Robin. (1991). *The Mindful School: How to Integrated the Curricula*. Palatine, IL: Skylight Publishing.
- Isjoni. (2006). *Pendidikan sebagai Investasi Masa Depan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Katz, Lilian. G. (1993). Multiple Perspectives on the Quality of Early Childhood Programs. ERIC Digest. ED355041.
- Langford, David P. dan Cleary, Barbara A. (1996). *Orchestrating Learning with Quality*. Kualalumpur: Synergy Books International.
- Marquardt, Michael dan Angus Reynolds. (1994). *Global Learning Organization: Gaining Competitive Advantage Through Continuous Learning*, New York: Irwin Professional Publishing.
- NAEYC. (2003). Early Childhood Curriculum, Assessment, and Program Evaluation. NAEYC. November.
- National Association of Elementary School Principals. (1994). *Standards for Quality Elementary and Middle Schools: Kindergarten through Eightd Grade*. Alexandria, VA NAESP, 1-800-38 NAESP.
- Newsweek. "Liberation of Learning" Page 72 November 21, 2005.
- Porter, Michael E. (2004). *Competitive Strategy*. New York: Free Press.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22, 23, 24 Tahun 2006.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

- 3) kondisi fisiologis
- b. Faktor Psikologis meliputi:
 - 1) kecerdasan/bakat,
 - 2) motivasi,
 - 3) perhatian,
 - 4) berpikir,
 - 5) ingatan/lupa,
 - 6) belajar lanjut (Over Learning), dan
 - 7) review/resitasi

c. Faktor Lingkungan Belajar

Faktor lingkungan belajar yang dapat mempengaruhi orang dewasa dalam belajar, adalah: 1) faktor lingkungan belajar di mana orang dewasa itu belajar, dalam arti faktor tempat dimana orang dewasa itu belajar, dan 2) faktor lingkungan belajar di luar tempat belajar, dalam arti faktor lingkungan di mana tempat belajar orang dewasa itu berada.

d. Faktor Sistem Penyajian

Sistem penyajian dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu: 1) Kurikulum, 2) Bahan belajar, dan 3) Metode penyajian.

1) Kurikulum

Kurikulum sangat berpengaruh dan sangat menentukan dalam pemilihan strategi belajar dan membelajarkan orang dewasa. Oleh sebab itu struktur kurikulum harus diketahui kedudukan dan peranan tiap mata pelajaran dalam pembentukan kompetensi, pribadi, pengetahuan, keterampilan dan sosial

2) Bahan belajar

Bahan belajar yang akan disajikan sangat berpengaruh terhadap jenis strategi belajar dan membelajarkan. Oleh sebab itu, aspek-aspek bahan belajar perlu dipertimbangkan dan diperhatikan dalam memilih strategi belajar dan membelajarkan orang dewasa. Aspek-aspek bahan belajar yang perlu dipertimbangkan harus mencakup: a) aspek kemampuan yang akan dikembangkan, b) derajat kesukaran, c) jenis bahan, d) luas dan jumlah bahan, dan e) letak bagian dalam keseluruhan pelajaran.

3) Metode penyajian

Metode penyajian yang digunakan sangat berkaitan dengan strategi belajar dan membelajarkan yang dipilih serta kegiatan belajar membelajarkan yang akan dilaksanakan. Beberapa kriteria pemilihan metode penyajian, diantaranya: a) metode penyajian dipilih sesuai dengan hakikat tujuan pembelajaran, b) metode penyajian dipilih sesuai dengan sifat dan hakikat bahan belajar yang disajikan, dan c) metode penyajian yang dipilih sesuai dengan tingkat perkembangan belajar.

Konsep pembelajaran bagi usia lanjut

Berikut ini akan dibahas mengenai konsep pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik warga belajar usia lanjut.

a. Teori dan konsep belajar

Belajar adalah perubahan-perubahan dalam sistem syaraf, atau pembentukan stimulus response (S-R) bonds. Bisa disebut Juga mengurangi resistensi pada *synaptic*



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Pendidik hendaknya membantu peserta didik dalam merancang model pengalaman belajar. Model ini dimaksudkan sebagai rencana kegiatan pembelajaran yang akan dialami peserta didik untuk mencapai tujuan belajar. Rencana kegiatan terdiri atas langkah-langkah yang akan ditempuh oleh peserta didik dan pendidik dalam kegiatan pembelajaran. Penggolongan kegiatan pembelajaran yang dikembangkan dan model ini antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Kegiatan pembelajaran dalam kelompok besar. Kegiatan pembelajaran ini diikuti oleh peserta didik. Cara-cara yang digunakan pendidik dalam membantu peserta didik akan beragam. Teknik-teknik penyajian bahan belajar antara lain adalah ceramah, pengajian, seininar, diskusi, drama dan demonstrasi.
- 2) Kegiatan pembelajaran dalam kelompok terbatas, dengan variasi sebagai berikut:
 - a) Kelompok untuk mendiskusikan suatu topik. Pengelompokan peserta didik dilakukan dengan maksud untuk membahas suatu topik yang disampaikan oleh pendidik atau yang diambil dari bahan bacaan, serta untuk mengetahui makna dan bertukar pikiran tentang informasi yang sedang dibicarakan.
 - b) Kelompok berdasarkan minat. Kelompok ini diorganisasikan berdasarkan kesamaan minat para peserta didik. Kegiatan pembelajaran bertujuan untuk saling bertukar informasi dan pengalaman, serta untuk mencari persamaan pandangan terhadap gagasan, tindakan, dan sikap para peserta didik.
 - c) Kelompok untuk memecahkan masalah. Kelompok peserta didik dibentuk dengan maksud untuk mencari alternatif tindakan dalam pemecahan masalah yang dihadapi peserta didik.
 - d) Kelompok untuk perencanaan. Kelompok peserta didik dibentuk dengan maksud untuk merencanakan program-program yang dapat dilakukan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran.
 - e) Kegiatan pembelajaran perorangan. Kegiatan ini dilakukan melalui konsultasi, magang, bimbingan, tutorial dan penyuluhan yang dilakukan pendidik bagi peserta didik yang memerlukan bantuan perorangan.
 - f) Kegiatan pembelajaran melalui aktivitas rekreasi, karyawisata, kerja lapangan dan lain sebagainya.

Landasan belajar bagi usia lanjut

Berkenaan dengan landasan belajar bagi usia lanjut, maka konsep pendidikan sepanjang hayat (*lifeong education*) dapat dijadikan sebagai landasan. Seperti dikemukakan oleh D. Sudjana (1991: 177) berikut ini:

“Pendidikan sepanjang hayat dapat dijabarkan ke dalam program-program pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah. Dalam prakteknya, program-program dalam jalur pendidikan luar sekolah dipandang oleh sebagian pakar pendidikan lebih mampu mengembangkan kehadirannya untuk mengkondisikan tumbuhnya kesadaran, minat dan semangat masyarakat untuk melaksanakan kegiatan belajar yang berkesinambungan”.

Memperhatikan pendapat ahli diatas, pendidikan sepanjang hayat merupakan suatu proses pendidikan khususnya dalam hal ini warga belajar usia lanjut, agar mereka dapat



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

dalam pendidikan usia lanjut meliputi penggunaan pendekatan, metode dan teknik, bentuk demonstrasi, sumber belajar yang berkualifikasi, pengelolaan peserta didik, guna untuk mewujudkan interaksi edukasi antara pendidik dengan peserta didik, antar sesama peserta didik, dan antara peserta didik dengan lingkungannya serta upaya evaluasi terhadap proses, hasil dan atau dampak kegiatan pembelajaran.

Kurikulum Pembelajaran Bagi Usia Lanjut

Pengertian kurikulum secara umum

Kurikulum didefinisikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan oleh siswa dalam periode waktu tertentu, untuk mencapai gelar/ijazah tertentu. Pengertian ini sering disebut pengertian tradisional atau konservatif, sebab menunjukkan kepada rumusan yang pertama kali lahir dan memiliki sifat-sifat untuk cenderung dipergunakan orang pada masanya.

Kalau ditelaah lebih lanjut rumusan tersebut pada dasarnya sangat mengutamakan mata pelajaran (*subject matter*) sebagai isi daripada kurikulum. Oleh karena itu kurikulum dalam pandangan yang tradisional, sering diidentifikasikan dengan “rencana pelajaran”.

Apabila ditinjau dari sudut organisasi kurikulum pandangan tradisional, maka disebut *subject matter curriculum*, artinya kurikulum yang terdiri dari mata-mata pelajaran yang terpisah-pisah satu sama lain. Terlepas dari pandangan tradisional ataupun dari pandangan modern, hakekat kurikulum pada dasarnya adalah sama yakni program belajar yang diberikan oleh lembaga pendidikan kepada siswa/murid. Program belajar ini memuat tujuan-tujuan yang akan dicapai, bahan-bahan yang harus dipelajari, berapa lama program itu diberikan, bagaimana program itu harus disusun dan disajikan, serta dengan cara bagaimana mengukur keberhasilan dan pada program tersebut.

Dalam pandangan modern kurikulum mencakup segala sesuatu yang mempengaruhi pribadi anak/siswa dibawah tanggung jawab lembaga pendidikan. Para ahli kurikulum seperti Harold Albert, Arden, Frandsen, Roinine, Killpatreck, Sarimuda Nasution, dan lain-lain, antara lain dapat disarikan pendapatnya sebagai berikut yakni kurikulum jauh lebih luas isinya dan pada sejumlah mata pelajaran belaka, dan sebenarnya kurikulum itu seluas segala aspek kehidupan manusia dalam masyarakat modern ini, yang dapat dimasukkan ke dalam tanggung jawab lembaga pendidikan yang dapat dipergunakan untuk memperbaiki mengembangkan pribadi siswa serta memberi sumbangan untuk kehidupan masyarakat

Menurut pandangan modern ini dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah:

- 1) Program pendidikan suatu lembaga pendidikan tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh lembaga tersebut.
- 2) Program pendidikan untuk suatu bidang studi tertentu yang memuat tujuan, materi, untuk suatu lembaga pendidikan tertentu.
- 3) Semua pengalaman belajar yang disusun dan diorganisir menurut pola dan struktur tertentu dan disajikan oleh lembaga pendidikan tertentu untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

- ____ (2001). *Learning in Later Life: an Introduction for Educator and Carers*, London: Kogan Page Limited
- ____ (2002). *The Age of Learning: Education and the knowledge society*, London: Kogan Page Limited
- Kimmel, D. C. (1990). *Adulthood and Aging: an Interdisciplinary, Developmental view*, New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore: John Willey & Sons, Inc
- Knowles, M. S. (1977). *The Modern Practice of Adult Education: Andragogy Versus Paedagogy*, New York: Association Press
- ____ (1990). *The Adult Learner: A Neglected Species*, Houston, London, Paris, Zurich, Tokyo: Gulf Publishing Company.
- Lalenoh, T. (1993). *Gerontologi dan Pelayanan Lanjut Usia*, Bandung: An-Naba Press & Jakarta: Socialia
- ____ (1996). *Lanjut Usia dan Usia Lanjut*, Bandung: STKS
- Lovell, R. B. (1980). *Adult Learning*, New York: John Wiley & Sons.
- Lo, L (1979). *Social Work with the Aging: The Challenge and Promise of the Later Years*, New York Hagerstown, Philadelphia, San Fransisco, London: Harper & Row Publishers
- Lunandi, AG. (1989). *Pendidikan Orang Dewasa* Jakarta: Gramedia
- Mappa, S & Basleman, A. (1994). *Teori Belajar Orang Dewasa*. Jakarta: Proyek Pembinaan dan Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan, Dirjen Dikti, Depdikbud.
- Mappiare, A. (1983). *Psikologi Orang Dewasa*, Surabaya: Usaha Nasional
- Oswari, E. (1997). *Menyongsong Usia Lanjut Dengan Bugar dan Bahagia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Perlmutter, M. (1985). *Adult Development and Aging*, United State of America: John Wiley & Sons, Inc.
- Peterson, D. A.; Thornton, J. E. dan Birren, J. E. (1986). *Education and Aging*, New Jersey: Prentice Hall, mc, Englewood Cliffs
- Ramphale, M. (2002). *Constructing Knowledge Societies: Zew Challenges for Tertiary Education*, Washington DC: The World Bank.
- Robert, S. Z. (1976). *Curriculum Principle and Fondation* New York Hargestown, San Fransisco, London: Harper & Row Publishers
- Sastroainidjojo, S. (1966). *Masalah Masa Tua dan Ilmu Penyakit di Masa Tua : Gerontologi dan Geriatri*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Sawitri, S. (Tth). *Persiapan Mental Psikologis dan Masalah Psikologis Pada Lansia dan Upaya Penanggulangannya*, Bandung: UNPAD
- Saylor, J. G., Alexander, W.M. & Lewis, A.J. (1976). *Curriculum Planning for Better Teaching*, New York Hargestown, San Fransisco, London : Harper & Row Publishers
- Sinith, R M. (1982). *Learning How to Learn: Applied Theorv for Adult*, Chicago Illinois: Follet Publishing Co
- Srinivasan, L. (1977). *Perspectives on Non-Formal Adult Learning*, Coiniecticut: North Haven The Van Dyck Printing Company.

tratemeyer, F. B., Forkner, H. L. and Passow, A. H. (1957). *Developing A Curriculum for Modern Living*, New York, Bureau of Publications Teachers College, Columbia University.

Sudjana, D. (2000). *Pendidikan Luar Sekolah*, Bandung: Fallah Production ____ (2000). *Strategi Pembelajaran*, Bandung: Fallah Production

____ (2000). *Metode & Teknik Pembelajaran Partisipatif*, Bandung: Fallah Production.

Taba, H. (1962). *Curriculum Development: Theory and Practice*, San Francisco: Harcourt, Brace & World, Inc

Yayasan Idayu (Ed) (1984). *Manula (Manusia Usia Lanjut)*, Jakarta: Inti Idayu Press.

Sumber dari Jurnal

Bureau of National Affair. (1980). *Retirement Policies and Program*, ASPA BNA Survey No.39 Bulletin 1559: 4

Ciptoprawiro, A. (1994). *Pvfenikmati Kehidupan Lanjut Usia*. Bulletin Gerontologi dan Geriatri No. 29. Jakarta: Perhimpunan Gerontologi Indonesia (PERGERI).

Kinsella, K. and Velkoff, V. A. (2001). "An Aging World: 2001 ". Journal of US Cencus Bureau. (95). 1-168

Sumber di Luar Jurnal dan Buku

Darmojo, B. (2002). "Perkembangan Usia lanjut di indonesia". Kompas [29 Mei 2002]

Departemen Kesehatan RI (1992). *Pedoman Pembinaan Kesehatan Usia Lanjut bagi Petugas kesehatan*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kesehatan Masyarakat Direktorat Bina Kesehatan Keluarga.

Departemen Sosial RI. (1996). *Pelebagaan Lanjut Usia Dalam Kehidupan Bangsa*, Jakarta

Giriwijoyo, S. (2001). *Pembinaan Kesehatan Pada lanjut (Isia Melalui Olahraga Kesehatan*, Bandung: Makalah, Tidak diterbitkan.

Hanafiah, R. (1991). *Koinitmen Pendidikan Luar Sekolah Terhadap Membelajarkan Masyarakat Sepanjang Hayat*, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada IKIP Bandung tidak diterbitkan

Hermawan, H. S. (2000, Oktober). *Kesejahteraan Lanjut (Isia*. Suara Daerah [Majalah Pendidikan], No.354. 44-47. Tidak tersedia alamat di internet.

Sutiaputri, L. F., *Kebutuhan Lanjut Usia di J)KI Jakarta (Studi Deskriptij*, Thesis Magister pada PPS Universitas Indonesia, Jakarta: tidak diterbitkan

Suprayogi, U. (2005). *Pengembangan Model Program Pendidikanj Luar Sekolah Dalam Memberdayakan Kelompok Masyarakat Lanjut Usia Mencapai Kemandirian*. Disertasi Doktor pada PPS UPI Bandung: tidak diterbitkan

Undang-Undang Nomor 20. (2003). *Tentang Sistem Pendidikan A/sional*, Jakarta: Balitbang Depdiknas

Sumber dari Internet

PAN/Pasific Friend. (2000).

Universitas Khusus Untuk Kakek dan Nenek. [Online]. Tersedia.<http://www.PikiranRakyat.com> [23 Agustus 2000]

7. PENDIDIKAN ANAK BERBAKAT

Syamsu Yusuf LN

ABSTRAK

Secara alamiah, setiap anak bersifat unik, memiliki keragaman individual, berbeda satu sama lain dalam berbagai hal, seperti dalam hal kecerdasan (intelegensi), bakat, kepribadian, dan kondisi jasmani. Berdasarkan keragaman karakteristik tersebut, perlu dipikirkan model pendidikan yang dapat memfasilitasi perkembangan anak sesuai dengan keunikan karakteristiknya. Dalam hal ini termasuk pendidikan bagi anak yang memiliki kemampuan unggul, atau anak berbakat.

Pendidikan anak berbakat merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Melalui kekhususan dalam pelayanan pendidikan, anak memperoleh kesempatan yang maksimal untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Apabila setiap anak telah dapat mengaktualisasikan potensinya masing-masing, pada saatnya mereka akan menjadi seorang manusia yang mandiri, produktif, dan kontributif, yaitu mampu memberi kontribusi yang sangat berarti bagi peningkatan kualitas kehidupan bersama.

Dalam undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 5 ayat (4) dikemukakan bahwa "Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus". Pada pasal 12 ayat (1) b dikemukakan bahwa "Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya". Kemudian pada pasal 33 ayat (1) dikemukakan bahwa "Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosi, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Komitmen pemerintah terhadap pendidikan anak berbakat perlu didukung oleh semua pihak, dan pemerintah pun dituntut untuk mewujudkannya secara sungguh-sungguh. Dukungan masyarakat dan kesungguh-sungguhan pemerintah dalam mewujudkan pendidikan bagi anak berbakat sangatlah penting, mengingat anak-anak berbakat merupakan asset bangsa yang amat berharga untuk meraih masa depan bangsa yang berkualitas.

Jika diasumsikan jumlah anak berbakat di Indonesia sebesar 2% saja dari seluruh populasi penduduk yang berjumlah 210 juta lebih, maka jumlah mereka akan mencapai sekitar dua juta lebih. Andaikan dalam kurun waktu tertentu (sejak siswa SD s.d. mahasiswa mulai tahun 2000-an) mereka berhasil dididik dengan baik, maka sekitar tahun 2020, Indonesia akan memiliki tambahan sumber daya manusia yang memiliki keunggulan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti sains, teknologi, bisnis, seni-budaya, dan pemerintah. Suatu hal yang tidak mustahil, pada tahun itu Indonesia akan menjadi salah satu negara maju di dunia, menjadi bangsa yang bermartabat, dan disegani oleh Negara-negara lain.

Pendahuluan

Secara alamiah, setiap anak bersifat unik, memiliki keragaman individual, berbeda satu sama lain dalam berbagai hal, seperti dalam hal kecerdasan (inteligensi), bakat, kepribadian, dan kondisi jasmani. Berdasarkan keragaman karakteristik tersebut, perlu dipikirkan model pendidikan yang dapat memfasilitasi perkembangan anak sesuai dengan keunikan karakteristiknya. Dalam hal ini termasuk pendidikan bagi anak yang memiliki kemampuan unggul, atau anak berbakat.

Pendidikan anak berbakat merupakan bagian integral dari sistem pendidikan pada umumnya. Melalui kekhususan dalam pelayanan pendidikan, anak memperoleh kesempatan yang maksimal untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Apabila setiap anak telah dapat mengaktualisasikan potensinya masing-masing, pada saatnya mereka akan menjadi seorang manusia yang mandiri, produktif, dan kontributif, yaitu mampu memberi kontribusi yang sangat berarti bagi peningkatan kualitas kehidupan bersama.

Pemerintah Indonesia telah lama menaruh perhatian tentang pentingnya pendidikan bagi anak berbakat. Kepedulian pemerintah ini terlihat dari beberapa upaya atau kebijakan yang diluncurkan dalam bentuk program langsung maupun perundang-undangan. Beberapa program atau kebijakan pemerintah itu diantaranya sebagai berikut.

1. Pada tahun 1974 diluncurkan program pemberian beasiswa bagi para siswa SD, SMP, SMA, dan SMK yang berprestasi tinggi tetapi lemah keadaan ekonominya.
2. Pada tahun 1984 dibuka program ujicoba sekolah perintisan anak berbakat tingkat SD, SMP, dan SMA di daerah perkotaan (Jakarta) dan daerah pedesaan (Cianjur). Program uji coba ini memberikan pelayanan berupa pengayaan (*enrichment*) pada materi bidang studi tertentu, seperti bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam (IPA), ilmu pengetahuan sosial (IPS), dan matematika. Program ini diberikan di kelas khusus, di luar kelas reguler pada waktu-waktu tertentu.
3. Dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 8 ayat (2) dikemukakan bahwa "Warga Negara yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa berhak memperoleh perhatian khusus". Pasal ini ditunjang pasal 24 yang menyatakan bahwa "Setiap peserta didik pada suatu satuan pendidikan mempunyai hak-hak sebagai berikut, ayat (1) mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya; ayat (2) mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri, maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan; ayat (6) menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang telah ditetapkan.
4. Pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tahun 1990 pasal 15 dikemukakan, bahwa (1) pelayanan pendidikan bagi siswa yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa dapat diberikan melalui jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah; dan (2) pelayanan pendidikan bagi siswa yang memiliki bakat istimewa dan kecerdasan luar biasa melalui jalur pendidikan sekolah dapat diberikan dengan menyelenggarakan program percepatan, program khusus, program kelas khusus, dan program pendidikan khusus.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

- 3) Pengembangan kurikulum harus menerapkan pengetahuan pada tingkat ganda dan pengertian dalam berbagai situasi dan kejadian secara beragam. Memperluas cara berpikir, mencari jawaban terhadap berbagai kejadian harus diselenggarakan dalam pengalaman belajar.
- 4) Pengembangan kurikulum harus memberikan kesempatan untuk memperoleh dan menarapkan belajar secara mendasar.
- 5) Kondisi lingkungan harus menumbuhkan inspirasi turunan orisinal terhadap berbagai masalah. Kepada anak harus diberi kesempatan untuk menyatakan dirinya secara polos dan jujur.
- 6) Kesempatan untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang dijabarkan dari disiplin yang satu ke bidang lain (yang baru) harus diadakan dalam berbagai situasi belajar dengan berbagai kemungkinan yang terbuka.

Penerapan berpikir produktif

- 1) Memberi kesempatan kepada anak untuk merekonseptualisasikan pengetahuan dan pengembangan keterampilan dalam bentuk inovatif dengan perspektif bermakna dalam berbagai mata pelajaran. Guru harus mempersiapkan bahan pemer kaya peserta didik.
- 2) Pengembangan keterampilan berbagai bentuk komunikasi.

Pengembangan sikap

- 1) Kesempatan menjelajahi rintisan ilmu pengetahuan dengan kemungkinan menyatakan pendapatnya melalui berbagai media.
- 2) Kesempatan pengembangan metode dan keterampilan musyawarah dan konsensus terhadap perbedaan serta penjabaran masalah melalui berbagai kemungkinan.
- 3) Memahami peranan persepsi dalam penafsiran isu dan cara pengembangan pendapat pribadi serta pernyataannya adalah hal-hal yang dalam program khusus harus diberikan peluang untuk ditumbuhkan.

Penciptaan lingkungan belajar yang kondusif

Penyelenggaraan pendidikan anak berbakat perlu didukung oleh penciptaan lingkungan belajar yang kondusif, yang memfasilitasi dan memberikan peluang-peluang bagi anak dalam mengembangkan potensinya.

Gallagher (1985) mengemukakan beberapa hal yang terkait dengan upaya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi anak berbakat, yaitu sebagai berikut.

- a. Memberikan program pengayaan, dalam hal ini guru memberikan materi atau pelajaran khusus dalam rangka membantu perkembangan anak.
- b. Menugaskan “guru konsultan”, yaitu guru yang memiliki keterampilan khusus untuk memberikan materi atau pelajaran yang tepat kepada anak.
- c. Menyediakan ruang sumber (laboratorium), di mana anak dapat mengembangkan keterampilan atau kemampuan tertentu.
- d. Menggunakan mentor (*resource person*), warga masyarakat yang memiliki keterampilan atau kompetensi dalam hal tertentu yang sangat dibutuhkan untuk membantu perkembangan anak, seperti ilmuwan, dan seniman.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

instruksional serta variasi kurikuler yang harus disesuaikan dengan perbedaan individual itu.

Penelitian yang dilakukan dalam 50 tahun terakhir memberikan sumbangan yang besar dalam memperluas pengertian tentang perbedaan manusia dan dalam menentukan perlakuan pendidikan yang paling sesuai bagi individu yang berbeda itu. Komitmen kita akan perbedaan individual dalam pendidikan menimbulkan konsekuensi, yaitu bervariasinya praktek-praktek kurikulum dan pengajaran sebagai upaya yang relevan dengan perbedaan-perbedaan siswa, baik pria maupun wanita.

Pada saat anak masuk sekolah, telah menunjukkan gaya belajar yang berbeda. Sebagian anak telah siap mempelajari simbol-simbol yang berupa huruf dan angka, sedangkan yang lain lebih tertarik kepada benda-benda yang ada di sekitarnya. Karena itu dapat dikatakan bahwa sebagian orang lebih *hand-oriented* daripada *head-oriented* dalam belajar dan dalam melakukan sesuatu. Dalam hal ini dilemparkan kritik terhadap sekolah yang dalam pembelajaran terlalu *head-oriented*. Hal ini merugikan sebagian peserta didik yang mungkin berhasil secara akademis bila kepadanya diberi kesempatan belajar yang lebih besar dengan penekanan akan kegiatan yang manual dan kinestetis.

Dalam kaitan dengan masalah tersebut di atas Mortimer J. Adler (1982) mengemukakan bahwa siswa pada dasarnya dapat dididik dengan istilah yang dipakainya "*educable*" dan mengatakan bahwa "*Children are educable in varying degrees, but variation in degree must be of the same kind and quality of education*". Jika terjadi kegagalan, berarti kegagalan masyarakat, yaitu kegagalan orang tua, guru-guru dan para administrator, bukan kegagalan pihak anak. Tidak ada anak yang "*unteachable*". Sekolah, guru dan orang tua lah yang gagal mendidiknya.

Bila semua anak dapat dididik, maka dapat diperkirakan bahwa semuanya akan menjadi manusia terdidik. Tetapi sebenarnya kalau kita amati tidak ada seorangpun yang dapat terdidik secara penuh di sekolah, berapa lama pun ia bersekolah, dan betapa baiknya pun sekolah itu. Karena itu pendidikan harus juga ditempuh di luar sekolah.

Pendidikan merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, dan sekolah hanya merupakan sebagian kecil daripadanya. Berbagai tingkat persekolahan mencapai titik terminal, yang dapat dicapai selama beberapa tahun tertentu, tetapi belajar tidak pernah mencapai titik terminal. Selama orang hidup dan sehat, belajar berlangsung terus, dan harus. Badan tidak terus tumbuh setelah mencapai usia delapan belas atau dua puluh tahun, bahkan mungkin menurun beberapa tahun setelah itu. Tetapi pertumbuhan mental, moral dan spiritual akan terus berlangsung, dan harus terus berlangsung seumur hidup.

Tujuan akhir proses pendidikan adalah membantu manusia menjadi manusia terdidik. Sekolah merupakan tahap persiapan. Sekolah membentuk kebiasaan belajar yang merupakan alat untuk kelanjutan belajar setelah masa sekolah selesai.

Dari uraian di atas dan dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dirancang program untuk pendidikan wanita.

Fakta-fakta dari kehidupan mempunyai implikasi yang besar terhadap pengembangan kurikulum. Jika kurikulum diharapkan sesuai dan memadai bagi semua



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

4. Merumuskan unit-unit dan merencanakan pembelajaran

Materi yang sudah dirancang pada langkah kedua dapat dijabarkan dalam unit-unit untuk dilaksanakan dalam suatu periode pembelajaran; satu triwulan, satu semester atau satu tahun, sesuai dengan rencana pembelajaran dan waktu yang tersedia serta tujuan yang akan dicapai.

5. Memotivasi siswa dan mengimplementasikan program

Untuk keberhasilan proses pembelajaran guru memotivasi siswa untuk membangkitkan minat siswa terhadap pembelajaran untuk dapat memahami materi dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam aktivitas guru mengambil keputusan yang sangat penting yaitu menetapkan kesinambungan antara satu bagian dengan bagian lainnya dalam keseluruhan proses pembelajaran.

6. Melakukan pengukuran dan evaluasi prestasi siswa serta keseluruhan program

Belajar dilakukan bertahap dan diharapkan pada akhir program siswa memahami materi yang disampaikan. Dengan melakukan pengukuran dan evaluasi, dapat diketahui tingkat kompetensi yang telah dimiliki siswa.

Penutup

Pendidikan wanita merupakan suatu keharusan dan kebutuhan demi keberhasilan pembangunan secara menyeluruh. Wanita sebagai tiang negara memerlukan pendidikan yang memadai agar dapat berkiprah dalam masyarakat, dapat melaksanakan tugasnya dalam mengelola keluarga dan rumah tangganya; dapat mengenal kemampuan dirinya; memahami permasalahan yang dihadapi dan dapat mencari solusi pemecahannya. Dalam tulisan ini, diajukan kurikulum pendidikan bagi wanita yang terbuka sifatnya untuk menerima saran dan perbaikan dari pembaca.

Adapun isi kurikulum itu mencakup:

1. Pendidikan

Mendidik wanita sama dengan mendidik bangsa, karena setiap anak mendapatkan pendidikan yang pertama dan utama dari ibunya. Wanita adalah tiang negara, semakin kuat pendidikan wanita akan semakin kuat juga suatu negaranya.

2. Kesehatan

Dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Pendidikan kesehatan harus diberikan sedini mungkin, antara lain dengan cara pembiasaan hidup bersih, karena bersih pangkal sehat. Di samping itu kesehatan diperoleh juga dengan asupan makanan yang bergizi serta olahraga.

3. Pangan dan gizi

Jenis makanan sebagai asupan bagi tubuh sangat mempengaruhi pertumbuhan bagi anak, dan mempengaruhi daya tahan tubuh baik bagi anak maupun orang dewasa. Di samping jumlahnya harus cukup, gizi yang terkandung dalam makanan sangat penting. Makanan sehari-hari yang dimakan harus memenuhi syarat 4 sehat 5 sempurna yaitu mengandung: karbohidrat, protein, sayuran, buah-buahan dan susu. Pengetahuan tentang gizi pangan akan mempengaruhi penatalaksanaan makanan keluarga.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

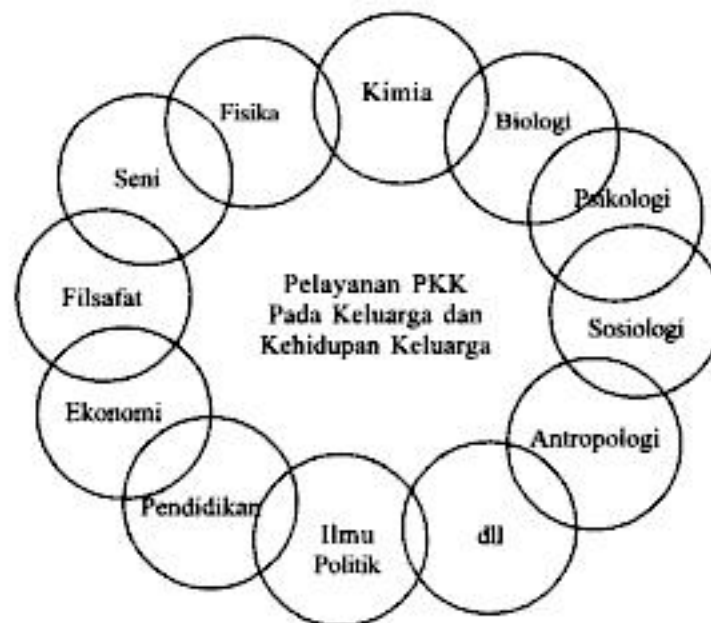
keluarga; yang berarti pula ia mempunyai keyakinan kuat tentang perlunya pendidikan individu (anggota keluarga atau calon pembina keluarga) untuk mendapat pendidikan kehidupan keluarga khususnya dan PKK pada umumnya.

5. Ia mempunyai keyakinan bahwa daya kerja atau usaha seseorang akan mendapatkan hasil yang diharapkannya. Ia memiliki keyakinan bahwa kemauan dan daya kreasi seseorang adalah dasar untuk usaha mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup berkeluarga.
6. Ia tertarik pada bidang PKK sebagai ilmu yang berdiri sendiri di antara ilmu-ilmu lainnya dengan syarat-syarat atau ciri-ciri disiplin ilmu lainnya, yaitu adanya obyek keilmuannya sendiri atau ada yang dimasalahkannya; ada metoda ilmiah yang dipergunakan dalam memperkembangkan ilmu itu dan ada batas ilmu serta ruang lingkup keilmuannya.

PKK sebagai cabang ilmu

PKK merupakan disiplin ilmu yang berdiri sendiri di antara ilmu pengetahuan lainnya dalam kelompok ilmu eksakta dan ilmu sosial.

PKK atau *Home Economics* ini merupakan ilmu di antara (*in between*) dua kelompok ilmu yaitu ilmu alam dan ilmu sosial. Dalam PKK atau *Home Economics* pendekatan antar disiplin atau "*interdisciplinary approach*" merupakan pendekatan yang tepat dalam memahami berbagai masalah yang berkaitan dan penerapan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Pandangan ini dapat digambarkan melalui bagan di bawah ini.



Disadur dari : Maria FE G. Atienza, *Effective teaching of Home Economics*, R.P. Garcia, Publishing Company, Quezon Boulevard Ext. O.C. 1972

Di dalam bagan itu dijelaskan bahwa yang menjadi obyek PKK ialah :

1. Individu sebagai anggota keluarga dengan segala kebutuhannya yang biasa disebut *the human needs*.
2. Kelompok individu manusia yang merupakan suatu lembaga sosial yang disebut keluarga dengan segala kebutuhan dan aktivitasnya.
3. Kelompok kehidupan manusia yang disebut masyarakat yang terbentuk dari kehidupan keluarga dan sekaligus menjadi wadah tempat keluarga itu hidup.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Kesejahteraan lebih menggambarkan kemajuan atau kesuksesan di dalam hidup baik secara material, mental, spiritual dan sosial secara seimbang, sehingga menimbulkan ketentraman dan ketenangan hidup, sehingga dapat menyongsong kehidupan mendatang dengan optimal.

Masalah yang mungkin timbul

1. Apakah yang bahagia itu berarti pula sejahtera atau sebaliknya ?
2. Apakah sejahtera dan bahagia itu suatu situasi yang tidak mungkin diperoleh secara bersamaan dalam kehidupan ?
3. Bagaimanakah kalau pengertian itu kita hubungkan dengan kehidupan keluarga (*family life*) ?

Beberapa pokok pikiran sebagai bahan diskusi

Dalam hubungan dengan kehidupan keluarga, maka perlu kita simak :

1. Di dalam kehidupan keluarga akan terjadi interaksi sosial antara suami istri dan anak. Tugas utama keluarga yaitu memenuhi semua kebutuhan psiko sosio fisik anggota keluarga secara seimbang. Jika pengertian bahagia kita tafsirkan dalam kehidupan keluarga, maka keluarga yang bahagia itu ialah keluarga yang memiliki iklim kehidupan psikologis yang memberikan nilai-nilai kepuasan yang mendalam kepada para anggotanya, sehingga kepuasan itu dirasakan sebagai kepuasan yang diperolehnya dalam situasi yang nyaman, penuh kegembiraan dan penuh rasa aman karena mereka merasa terlindungi.
2. Keluarga sejahtera dapat digambarkan sebagai keluarga yang memiliki kesuksesan atau kemajuan-kemajuan di dalam memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan kehidupan keluarganya. Secara implisit kesuksesan di sini dapat diartikan bahwa keluarga itu memiliki kehidupan material, fisik, sosial, psikis dan spiritual.
3. Kebahagiaan suatu keluarga sangat bersifat relatif subyektif. Dalam keluarga bahagia, masing-masing anggota keluarga akan dapat merasakan kebahagiaan itu. Keadaan bahagia belum dapat memberikan jaminan keluarga itu sejahtera, karena kebahagiaan sebagai suatu iklim psikologis dan merupakan salah satu ciri saja dari kesejahteraan itu sendiri.
4. Keluarga dikatakan sejahtera apabila keluarga itu bahagia. Pendapat ini memberikan jawaban bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan itu pada saat yang sama bisa dimiliki oleh keluarga secara bersamaan. Masalahnya apakah kebahagiaan itu diperoleh sebelum mencapai "sejahtera" atau terjadi secara bersamaan.

Ruang Gerak Pendidikan Kesejahteraan Keluarga

Penjelasan home economics vs PKK

Istilah *Home Economics* mulai populer dalam dunia pendidikan di Indonesia khususnya dan di dalam perkembangan sosial masyarakat Indonesia pada umumnya, karena kepopulerannya ini timbul berbagai tafsiran yang kadang-kadang satu sama lain mempunyai dasar pemikiran dan pandangan yang berbeda. Dasar pandangan yang pertama

memandang *Home Economics* secara harfiah semata-mata hanya berkaitan dengan aspek kehidupan ekonomi keluarga; yang berkaitan dengan masalah pengelolaan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, menjahit, membersihkan dan menata rumah dan sekitarnya. Dasar pandangan yang kedua memandang *Home Economics* lebih komprehensif. Namun yang penting bagi kita bukan mempersoalkan perbedaan pandangan tentang *Home Economics* sebagai salah satu cabang ilmu dapat membantu di dalam usaha kita untuk meningkatkan taraf hidup bangsa melalui kehidupan keluarga.

Home Economics sebagai cabang ilmu sangat penting dipahami dan pelajari di dalam pembangunan masyarakat kita secara material maupun spiritual. Pembangunan masyarakat tidak mungkin dilakukan tanpa melalui pembangun lembaga sosial terkecil yaitu : “home” atau “keluarga” itu sendiri. Oleh karena itu kalau tujuan kita di dalam rangka pembangunan ini mau melahirkan suatu masyarakat yang sejahtera, maka untuk mencapai tujuan itu kita harus menjadikan keluarga sebagai lembaga sosial terkecil yang sejahtera dulu. Secara analogis dapat dikemukakan bagaimana kita dapat menyatakan bahwa kondisi badan kita dalam keadaan baik bila salah satu anggota badan dalam keadaan luka parah.

Home Economics tidak diartikan sebagai ekonomi keluarga atau pengelolaan pekerjaan rumah tangga semata, tetapi *Home Economics* diartikan sebagai aspek dan upaya untuk pencapaian kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga. Di dalam *Home Economics* atau PKK meliputi aspek kehidupan yang bersifat fisik, sosial, mental dan spiritual di dalam kehidupan keluarga.

Pencapaian keluarga sejahtera atau keluarga yang lebih tinggi tingkat kesejahteraannya di dalam rangka sejahtera, maka kita membutuhkan berbagai pengetahuan. Di dalam keperluan ini kita membutuhkan pengetahuan yang terkandung dalam ilmu yang populer disebut “*Home Economics*”. *Home Economics* di negara kita lebih tepat diarahkan dan mendapat muatan pendidikan. Oleh karena itu *Pendidikan Kesejahteraan Keluarga* (PKK) merupakan istilah yang lebih tepat.

Pendidikan Kesejahteraan Keluarga mempunyai ruang lingkup yang sangat luas. Ruang lingkup itu meliputi berbagai aspek kehidupan manusia dalam bidang material, mental, sosial dan spiritual.

Dalam tulisan ini selanjutnya akan dijelaskan tentang :

- Pengertian yang terkandung dalam Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (*Home Economics Education*)
- Ruang lingkup Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
- Metodologi dan Evaluasi yang dapat dipergunakan dalam Pendidikan Kesejahteraan

“*Mempelajari*” Pendidikan Kesejahteraan Keluarga mestinya itu tidak sukar, karena kita sudah ikut hanyut di dalamnya, karena kita semua telah hidup menjadi anggota keluarga. Setiap hari kita selalu berupaya mencari kebahagiaan dan ketentraman dalam hidup sebagai anggota keluarga. Namun ada persoalan yang patut kita renungi, apakah dalam kehanyutan kita sebagai anggota keluarga. Apakah kita menyadari atau tidak

menyadari tugas kita sebagai anggota keluarga ? Apakah yang kita lakukan sebagai anggota keluarga sudah wajar atau tidak wajar terutama di dalam memenuhi kebutuhan hidup yakni dalam rangka adanya keinginan untuk hidup tentram untuk suatu kebahagiaan dan kesejahteraan di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing.

Di dalam kenyataan kita selama ini, menjadi anggota keluarga, selama itu pula berbagai persoalan dapat kita gali dan harus kita jawab. Pada kesempatan ini perlu kita mengenal berbagai masalah dan berusaha mencari jawabannya demi ketentraman hidup kita sebagai ciri lahirnya kesejahteraan dan kebahagiaan hidup.

Pengenalan problema penting dalam mempelajari home economics vs pendidikan kesejahteraan keluarga (PKK)

1. Apakah arti istilah *Home Economics* ?
2. a. Dapatkah istilah *Home Economics* dihubungkan dengan istilah ilmu ekonomi ?
b. Bagaimana hubungan itu terjadi ?
3. Bagaimanakah hubungan istilah *Home Economics* dengan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga ?
4. Dapatkah keluarga (*home*) itu mencapai hidup yang sejahtera ?
5. Mengapa pendidikan kesejahteraan perlu diajarkan di semua lingkungan pendidikan ?
6. Filsafat manakah yang mendasari Pendidikan Kesejahteraan Keluarga ?
7. Tujuan-tujuan manakah yang hendak dicapai melalui Pendidikan Kesejahteraan Keluarga ?
8. Sejauh manakah *scope* (ruang lingkup) Pendidikan Kesejahteraan Keluarga sebagai salah satu cabang ilmu ?
9. Apakah harus kita perhatikan keadaan sosial ekonomis individu di dalam menerima Pendidikan Kesejahteraan Keluarga ?
10. Metoda dan bentuk evaluasi manakah yang dapat kita pergunakan dalam Pendidikan Kesejahteraan Keluarga ?

Jawaban terhadap beberapa pertanyaan tentang home economics vs kesejahteraan keluarga (KK)

1. Apakah arti "*Home Economics*" ?

Home Economics dapat kita pecah menjadi dua istilah, yakni : *Home* dan *Economics*. *Home* dapat kita artikan sebagai family dan dapat diterjemahkan dengan istilah keluarga. Keluarga dalam pengertian *Home* terliput atau Kesejahteraan Keluarga mengandung arti sebagai berikut :

Lebih dari pengertian rumah dengan segala perabotnya, tetapi ada suatu pengertian lebih dari itu, yakni adanya suasana yang mengikat anggota-anggota keluarga dengan ikatan bathin yang halus lagi kuat.

Kata *Economics* lahir dari kata *economy* dan kata *economy* lahir dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yakni *Ecos* dan *nomos* : *Ecos* = rumah tangga dan

nomos : undang-undang (aturan). Secara harfiah *Economics* dapat kita artikan sebagai undang-undang atau peraturan-peraturan tentang hidup berumah tangga atau berkeluarga. Lebih jauh dari itu *Home Economics* dapat dipandang sebagai suatu ilmu yang mempelajari bagaimana keluarga sebaiknya atau seharusnya memenuhi berbagai kebutuhannya (*needs*).

Kebutuhan keluarga itu bukan saja kebutuhan material tetapi juga kebutuhan sosial dan kebutuhan mental spiritual. Semua kebutuhan-kebutuhan itu harus terpenuhi secara seimbang untuk mencapai suatu *Home* (keluarga) yang sejahtera dan bahagia.

Secara definitif di dalam Webster's Encyclopedia dinyatakan, bahwa :

Home economics is a science and art dealing with home making and relation of home to the community, theory and practice concerning to the selection and preparation of food and clothing, conditions of living, the use of income, the care and training children etc, also the study or teaching at Home Economics department concerned with this.

Definisi di atas, tidak mengartikan *Home Economics*, yang hanya mempersoalkan bagaimana keluarga memenuhi kebutuhannya yang bersifat biologis saja. *Home Economics* berkaitan dengan kehidupan keluarga yang menjadi bagian dari masyarakat yang berkaitan pula dengan hubungan antar insani dan pendidikan anak. Secepat itu pula keluarga memiliki tugas dan harus memenuhi kebutuhan keluarga lainnya, yakni kebutuhan psikologis, kebutuhan sosial dan spiritual.

2. Dapatkah *Home Economics* dihubungkan dengan ilmu Ekonomi dan bagaimana hubungan antara keduanya itu terjadi ?

Perlu kita persoalkan kajian tentang istilah *Economics* dalam *Home Economics* dan kata Ekonomi dalam Ilmu Ekonomi. Untuk dapat mempersoalkannya kedua istilah ekonomi ini terlebih dahulu kita perlu mengetahui pengertian Ilmu Ekonomi itu sendiri. Secara definitif Ilmu Ekonomi diartikan sebagai : "*Ilmu yang mempelajari tindak tanduk manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas jumlahnya, sementara alat pemuasan kebutuhan "tersedia" dalam jumlah yang sangat terbatas*".

Hubungan antara istilah *Economics* di dalam *Home Economics* dan Ekonomi dalam Ilmu Ekonomi ada hubungan pengertian, karena keduanya mempersoalkan tentang kebutuhan dan cara memenuhi kebutuhan manusia dan keluarga. Secara khusus *Home Economics* merupakan Ilmu dan Seni yang mempelajari bagaimana cara keluarga memenuhi kebutuhannya, di mana kebutuhan-kebutuhan itu sangat banyak, sedangkan alat untuk memenuhi kebutuhan keluarga itu sangat terbatas jumlahnya.

Kebutuhan yang penting dalam *Home Economics* atau dalam Pendidikan Kesejahteraan Keluarga di mana pengertian *needs* atau kebutuhan ini tidak terbatas pada kebutuhan material, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu meliputi adanya kebutuhan psikologis, kebutuhan sosial dan kebutuhan spiritual.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Segi 2 : *Membimbing Anak*

Dalam segi ini terkandung pemahaman tentang :

- a. Pentingnya kelahiran anak dalam keluarga
- b. Tanggung jawab orang tua sebagai pendidik pertama
- c. Masalah pertumbuhan dan perkembangan anak yang sesuai dengan tugas-tugas perkembangan anak
- d. Perawatan dan pendidikan anak dengan segala ragam, jenis dan kegiatannya

Segi 3 : *Makanan*

Di dalam segi makanan ini perlu dijelaskan tentang :

- a. Hubungan makanan dan kesehatan
- b. Bahan makanan dan nilai makanan atau gizi makanan untuk setiap anggota keluarga
- c. Masalah menyusun menu sehat bagi setiap anggota keluarga
- d. Masalah belanja bahan makanan dan makanan sehat
- e. Masalah mengolah makanan yang efektif dan efisien ditinjau dari sudut keuangan, waktu dan energi.
- f. Masalah menghidangkan makanan yang menimbulkan selera makan
- g. Masalah cara memakan makanan termasuk di dalamnya masalah "*table manner*", yaitu sopan santun dalam menata, menghidangkan makanan dan cara makan.

Segi 4 : *Pakaian*

Dalam segi pakaian ini dibahas pengetahuan dan keterampilan berbusana dan bidang busana termasuk di dalamnya tentang :

- a. Guna berpakaian yaitu :
 - 1) Melindungi badan/kesehatan
 - 2) Memenuhi syarat peradaban dan kesusilaan
 - 3) Membuat penampilan tampan dan menarik
- b. Masalah pemilihan model pakaian yang disesuaikan dengan umur, jenis kelamin, kesempatan, bentuk tubuh, warna kulit, keadaan keuangan dan keyakinan
- d. Merancang bahan, perbelanjaan, desain dan model busana
- e. Pembuatan pakaian dari memilih model sampai penyelesaian pembuatan pakaian yang nyaman dipakai
- f. Cara pemakaian pakaian termasuk masalah grooming yaitu *hair do and make up*
- f. Pemeliharaan dan perbaikan pakaian
- g. Cara mengubah model busana
- h. Masalah kain-kain atau lenan rumah tangga
- i. Benda-benda pelengkap pakaian
- j. Kerajinan dalam bidang pakaian dan tekstil



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Pendidikan Karakter dalam Pendidikan Umum

Menurut Foerster ada empat ciri dasar dalam pendidikan karakter. Pertama, keteraturan interior di mana setiap tindakan diukur berdasar hirarki nilai. Nilai menjadi pedoman normatif setiap tindakan.

Kedua, koherensi yang memberi keberanian, membuat seseorang teguh pada prinsip, tidak mudah terombang-ambing pada situasi baru atau takut risiko. Koherensi merupakan dasar yang membangun rasa percaya satu sama lain. Tidak adanya koherensi meruntuhkan kredibilitas seseorang.

Ketiga, otonomi. Di situ seseorang menginternalisasikan aturan dari luar sampai menjadi nilai-nilai bagi pribadi. Ini dapat dilihat lewat penilaian atas keputusan pribadi tanpa terpengaruh atau desakan pihak lain.

Keempat, keteguhan dan kesetiaan. Keteguhan merupakan daya tahan seseorang guna mengingini apa yang dipandang baik. Dan kesetiaan merupakan dasar bagi penghormatan atas komitmen yang dipilih.

Kematangan keempat karakter ini, lanjut Foerster, memungkinkan manusia melewati tahap individualitas menuju personalitas. "Orang-orang modern sering mencampuradukkan antara individualitas dan personalitas, antara aku alami dan aku rohani, antara independensi eksterior dan interior." Karakter inilah yang menentukan forma seorang pribadi dalam segala tindakannya.

Pendidikan karakter mempunyai makna lebih tinggi dari pendidikan moral, karena bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, lebih dari itu pendidikan karakter menanamkan kebiasaan (*habituation*) tentang hal yang baik sehingga siswa didik menjadi faham (*domein kognitif*) tentang mana yang baik dan salah, mampu merasakan (*domein afektif*) nilai yang baik dan mau melakukannya (*domein psikomotor*). Seperti kata Aristotle, karakter itu erat kaitannya dengan "habit" atau kebiasaan yang terus menerus dipraktekkan dan dilakukan.

Berkowitz (1998) menyatakan bahwa kebiasaan berbuat baik tidak selalu menjamin bahwa manusia yang telah terbiasa tersebut secara sadar (*cognition*) menghargai pentingnya nilai karakter (*valuing*). Karena mungkin saja perbuatannya tersebut dilandasi oleh rasa takut untuk berbuat salah, bukan karena tingginya penghargaan akan nilai itu. Misalnya saja ketika seseorang berbuat jujur hal itu dilakukannya karena ia takut dinilai oleh orang lain, bukan karena keinginannya yang tulus untuk menghargai nilai kejujuran itu sendiri. Oleh sebab itu dalam pendidikan karakter diperlukan juga aspek perasaan (*domein affection* atau emosi). Memakai istilah Lickona (1992) komponen ini dalam pendidikan karakter disebut "desiring the good" atau keinginan untuk berbuat kebaikan. Menurut Lickona pendidikan karakter yang baik dengan demikian harus melibatkan bukan saja aspek "knowing the good" (*moral knowing*), tetapi juga "desiring the good" atau "loving the good" (*moral feeling*) dan "acting the good" (*moral action*). Tanpa itu semua manusia akan sama seperti robot yang terindoktrinasi oleh sesuatu paham.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Berdasarkan tabel analisis tersebut di atas terlihat bahwa dari sudut Taxonomy Bloom bobot dari fungsi dan tujuan pendidikan nasional lebih mengutamakan aspek afektif yang ditunjang oleh aspek kognitif dan psikomotor. Sedangkan dari sudut pendidikan umum bahwa fungsi dan tujuan pendidikan nasional bermuara pada lima profil bangsa Indonesia yang akan dibentuk atau dari sudut pendidikan nilai dirumuskan sebagai manusia yang kaffah (utuh-paripurna) , yaitu

- manusia yang imtak,
- manusia berakhlak mulia,
- manusia yang berilmu-cakap kreatif,
- manusia yang demokratis dan
- manusia yang bertanggungjawab sebagai anggota keluarga, anggota masyarakat, dan warga negara.

Menurut Rohmat (2004: 167-168) terdapat empat pesan nilai yang terdapat dalam UUSPN tahun 2003, yaitu *pertama*, Ciri umum UUSPN tahun 2003 yang desentralistik menunjukkan bahwa pengembangan nilai-nilai kemanusiaan terutama yang dikembangkan melalui demokratisasi pendidikan menjadi hal yang utama.

Kedua, Tujuan pendidikan nasional yang semakin diberikan tekanan utama pada aspek keimanan dan ketakwaan mengisyaratkan bahwa nilai inti (core value) pembangunan karakter moral bangsa bersumber dari keyakinan beragama. Ini mengandung arti bahwa semua proses pendidikan di Indonesia harus bermuara pada penguatan kesadaran nilai-nilai ketuhanan sesuai dengan keyakinan agama yang dianut.

Ketiga, dengan disebutkannya KBK pada bagian penjelasan UUSPN, ini menandakan bahwa nilai-nilai kehidupan peserta didik perlu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan belajar mereka. *Keempat*, perhatian terhadap PAUD memiliki misi nilai yang sangat penting bagi perkembangan anak. Walaupun persepsi nilai dalam pemahaman anak tidak sedalam pemahaman orang dewasa, benih-benih untuk mempersepsi dan mengapresiasi sesuatu dapat ditumbuhkan pada usia sedini mungkin.

Fungsi dan tujuan pendidikan nasional bobotnya ada pada ranah afektif yang didukung oleh ranah kognitif dan psikomotor atau dari sudut pendidikan umum bobotnya ada pada pembentukan watak atau pembentukan karakter, namun dalam prakteknya hal tersebut masih jauh dari harapan. Contoh kongkrit yang mewakili masalah ini adalah bahwa yang terjadi disekolah hanyalah pengajaran bukan pendidikan. Dalam pengajaran yang menjadi perhatian utama adalah aspek kognitif hal ini terlihat dari isi dan struktur kurikulum mata pelajaran berbobot kognitif. Akibatnya tugas guru hanya menyampaikan materi pelajaran dengan target tersampainya semua materi kurikulum (target pencapaian kurikulum), konsekuensinya mengukur dan menilai keberhasilan proses pengajarannya hanya dengan tes. Siswa yang dianggap berhasil dalam pendidikan adalah siswa yang memiliki ranking dengan rata-rata nilai yang tinggi. Sedangkan aspek akhlak dan kepribadian siswa sedikit disentuh dan tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam kelulusan siswa. Walaupun akhlak siswa baik, namun apabila nilai-nilai ulangnya



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

harapan manusia adalah interaksi yang adil karena keadilan satu-satunya tujuan kehidupan bermasyarakat. Keadilan dapat terwujud dengan memenangkan kepentingan masyarakat. Individu harus tunduk dibawa kepentingan masyarakat. Kecenderungan hidup bermasyarakat adalah sesuatu yang fitri dalam diri manusia dan secara alamiah manusia cenderung untuk hidup bersama.

Dalam kehidupan bermasyarakat, ada empat konsep kehidupan sosial dimana manusia tidak dapat lepas dari padanya. (1) kerjasama. Ini berarti bahwa individu sudah menjalin kerjasama untuk memenuhi apa yang mereka butuhkan. Kerjasama tidak akan membuahkan hasil nyata kecuali dari dorongan akhlak mulia. (2) solidaritas. Solidaritas adalah hubungan timbal balik antar unit-unit masyarakat dan waktu dan kesempatan. Solidaritas sosial merupakan cerminan dari kematangan manusia. Al Qur'anul Karim menyatakan bahwa solidaritas artinya saling ketergantungan yang merupakan prinsip pada semua ciptaan Allah swt seperti matahari, bulan dan bumi, manusia, hewan, tumbuhan dan benda mati sekalipun berada dalam saling membutuhkan. (3) tolong menolong. Islam mewajibkan pemeluknya tolong menolong dalam hal kebaikan, sebaliknya menghalangi dalam hal kebatilan. Rasulullah saw bersabda "tolonglah saudaramu yang zalim maupun yang dizalimi" Seorang sahabat bertanya wahai Rasulullah, saya tentu akan menolongnya jika ia dizalimi. Akan tetapi bagaimana kalau ia berbuat zalim? Rasulullah menjawab "Engkau cegah atau engkau larang dia dari berbuat zalim, maka itulah cara menolongnya. (4) loyalitas. Loyalitas terhadap sesama muslim adalah menjadikan mereka sebagai teman dekat dan saling mencintai karena Allah swt.

Dalam menjalani kehidupan sosial, orang sering merasa kecele karena sikap baik seseorang yang ditujukan kepadanya ternyata dibalik kebaikan itu tiba-tiba ketahuan bahwa apa yang ada padanya didapati hati yang busuk. Ia sangat bertentangan dengan apa yang selama ini ditampakkannya. Ternyata kebaikan itu adalah bukan kebaikan sesungguhnya.

Di kehidupan sehari-hari, manusia banyak menjumpai senyum yang ternyata hanya basi-basi, bantuan hanya sekedar untuk mendapatkan simpati orang lain. Seringkali juga ada orang yang berperilaku terpuji ternyata hanya 'musang berbulu domba', bahkan ada diantara mereka berperilaku seperti bunglon sekedar mengikuti arus tanpa pendirian yang tegas. Dan lebih berbahaya lagi adalah orang yang mengatakan sesuatu bertentangan dengan hatinya yang disebut dengan orang munafik. Orang seperti ini tidak mempunyai sikap yang jelas tentang tauhid, menjalankan ibadah karena ria, menyuruh pada kemungkaran dan melarang perbuatan baik, suka ingkar janji, pendusta, penakut, dan oportunis. Ini digambarkan dalam Al Qur'an bahwa hati mereka terkunci, cenderung membela diri dengan menjustifikasi tindakan-tindakan mereka.

Inilah yang membuat kehidupan sosial penuh dengan rasa curiga, emosi mudah tersulut, sikap individualistis merajalela, acuh tak acuh dengan penderitaan orang lain, bahkan antar tetangga pun sudah tidak saling kenal. Watak semacam ini membuat kehidupan tidak terwarnai semangat persaudaraan dan kebersamaan. Akibatnya muncullah konflik ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang sebelumnya hidup secara rukun dan damai.

Akan tetapi jika suatu masyarakat yang diisi dengan senyum ramah dan tulus, sapa hangat tetangga, membantu yang menderita, membesuk kepada yang sakit, minta maaf jika bersalah, saling memberi hadiah, berbaik sangka, dan menebarkan salam, maka kehidupan sosial bermasyarakat akan menjadi damai, aman, dan menuai berkah dalam kehidupan bersama. Kondisi ini akan melahirkan terjalin-baiknya hubungan antar sesama. Allah swt berfirman:

Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang dzalim (Q.S. Al Hujuraat: 11)

Ada dua sifat terpuji yang apabila manusia mengamalkannya dalam kehidupan sosial akan mendapat keuntungan istimewa:

1. Mengetahui cara yang benar dalam berinteraksi dengan orang-orang disekitarnya, seperti tetangga, orang tua, saudara, kerabat, ataupun teman.
2. Mendapatkan bentuk interaksi yang istimewa sehingga orang menjadi peka dan peduli terhadap kegelisahan-kegelisahan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan sifat kepekaan sehingga ia segera mencari solusi terbaik agar supaya orang-orang hidup secara aman, tentram, kasih sayang, solidaritas, saling menolong dalam kebaikan, dan ketaqwaan.

Suatu masyarakat yang mau menghias diri mereka dengan akhlak mulia dan menjaga diri dari sifat-sifat tercela akan melahirkan suasana masyarakat yang berbudi luhur. Suatu masyarakat yang sarat dengan akhlak mulia, maka anak-anak pun akan berbaur dengan mereka yang pada akhirnya anak akan menyerap dan meniru perbuatan orang-orang yang berakhlak mulia yang ada disekitarnya. Dengan begitu masyarakat tersebut akan melahirkan kader-kader pemimpin berakhlak mulia. Dari mereka lahir anak-anak shaleh dan shalehah. Islam telah mengatur tatanan akhlak dengan sempurna untuk membawa manusia mencapai kejayaan di dunia dan diakhirat. Islam telah mengajarkan manusia akhlak berinteraksi bukan hanya dengan sesama muslim akan tetapi juga terhadap manusia secara keseluruhan.

Begitu pula untuk mencapai kehidupan sosial yang seimbang, maka manusia harus menciptakan keseimbangan antara individu dengan masyarakat. Keseimbangan tersebut menjadi jaminan bagi setiap individu untuk dapat hidup layak, damai, dan tentram. Oleh karena itu ada dasar-dasar yang harus dipenuhi oleh manusia dalam berkehidupan sosial.

Pertama manusia harus memuliakan dan saling menghormati. Kedua manusia harus menyeimbangkan antara hak individu dan masyarakat. Ketiga manusia sadar bahwa ia adalah bagian dari masyarakat.

Ketiga dasar kehidupan sosial tersebut dapat terlaksana apabila didukung oleh adanya hubungan baik antar sesama anggota masyarakat, terjalinnya hubungan yang benar antara pemimpin dan rakyat, dan adanya kepatuhan dalam menjalankan aturan Islam dalam kehidupan. Islam memberikan perhatian besar terhadap pemeluknya dalam menjaga hubungan baik antar manusia, apakah ia islam atau bukan. Hubungan harmonis tersebut dimulai dalam kehidupan keluarga. Dalam keluarga, anak akan mendapatkan tarbiyah iman, penjagaan, perhatian, dan kasih sayang. Anak juga mendapatkan sifat ketaatan, penghormatan, dan solidaritas.

Kehidupan sosial yang sempurna telah lahir bersamaan lahirnya Islam. Kehidupan tersebut ada dalam masyarakat Madinah ketika Rasulullah saw membangun Madinah melalui kaum Anshar dan Muhajirin. Beliau telah memberikan tuntunan berinteraksi dalam kehidupan sosial baik dari sisi individu, keluarga, kelompok maupun sebagai sebuah negara. Beliau juga mengajarkan bagaimana merekatkan hubungan antar mereka, bekerjasama dalam kebaikan dan ketaqwaan, dan menunaikan kewajiban dakwah kepada Allah swt.

Ada empat akhlak Rasulullah saw yang harus dipedomani dalam membina kehidupan sosial, yaitu (1) tuntunan Rasulullah saw dalam kehidupan keluarga, (2) tuntunan Rasulullah saw dalam berinteraksi dengan kerabat, (3) tuntunan Rasulullah saw dalam memilih dan interaksi dengan sahabat, dan (4) tuntunan Rasulullah saw dengan tamu dan tetangga. Keempat tuntunan akhlak mulia tersebut telah terwujud dalam diri Rasulullah saw dan merupakan teladan bagi umat manusia kapan dan dimana saja mereka berada.

Pertama, tuntunan Rasulullah saw dalam kehidupan keluarga. Suatu hari Amrah bertanya kepada Aisyah r.a. “Bagaimana Rasulullah saw ketika berada di rumah?” Aisyah menjawab “Beliau adalah orang yang paling lembut dan paling dermawan, beliau juga sama dengan suami-suami kalian hanya saja beliau banyak tersenyum”. Beliau juga bersabda “Maukah kalian aku beritahu bagi siapa api neraka diharamkan?” Sahabat menjawab “tentu”. Beliau bersabda “api neraka diharamkan bagi orang yang lembut, halus, mudah, dan akrab.” “sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap isteri-isterinya”.

Kedua, tuntunan Rasulullah saw dalam berinteraksi dengan kerabat. Ikatan kerabat lahir melalui ikatan darah, nasab, dan perkawinan. Inti dari perekat interaksi adalah silaturahmi. Jika hubungan silaturahmi terjalin dengan baik maka kebaikan akan melebar dan mencakup seluruh masyarakat secara umum sehingga solidaritas dan keharmonisan dalam masyarakat dapat tercapai. Rasulullah saw bersabda “barangsiapa ingin dimudahkan rezekinya atau dipanjangkan umurnya maka hendaknya ia menjalin silaturahmi dengan kerabat”. Beliau juga bersabda “sedekah kepada orang miskin adalah sekadar sedekah, sedangkan sedekah kepada kerabatmu membuahkan dua hasil: sedekah dan perekatan tali kerabat.”



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Tujuan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat dan derajat kesehatan peserta didik maupun warga belajar serta menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Sedangkan sasaran UKS adalah peserta didik di Sekolah/Satuan Pendidikan Luar Sekolah, Guru, Pamong Praja, Pengelola Pendidikan lainnya, Pengelola Kesehatan, dan Masyarakat.

Pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Sekolah/Satuan Pendidikan Luar Sekolah dilaksanakan melalui tiga program pokok yang meliputi: Pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan Lingkungan Kehidupan Sekolah Sehat. Pembinaan dan pengembangan kesehatan siswa melalui Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) merupakan salah satu mata rantai dalam rangka meningkatkan kesehatan derajat kesehatan masyarakat khususnya generasi penerus dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk membina kader kesehatan utamanya anak didik yang memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk melaksanakan usaha peningkatan kesehatan disekolah, rumah tangga maupun di lingkungan masyarakat. kegiatan ini diberikan dalam bentuk pemberian informasi dan praktek langsung.

Materi meliputi program UKS dan dokter kecil, Kebersihan Lingkungan Sekolah dan Kesehatan Pribadi, Gizi Anak Sekolah, Kesehatan Gigi dan Mulut, P3K dan prakteknya, dan P2M dan P3P. pelaksanaan UKS juga harus memperhatikan perkembangan fisik dan psikologis murid sesuai usia dan tingkat pendidikan. Setiap tingkatan pendidikan memiliki kemampuan penyerapan, jenis masalah kesehatan, dan jenis perilaku yang harus dibentuk. Untuk anak usia TK/RA dan SD/MI, PHBS dimulai dengan membentuk kebiasaan menggosok gigi dengan benar, mencuci tangan, serta membersihkan kuku dan rambut. Pada tingkat SMP/MT dan SMA/MA murid remaja antara lain berisiko terhadap penyalahgunaan Napza, kehamilan yang tidak diinginkan, abortus yang tidak aman, penyakit menular seksual, stress, dan trauma, Murid usia remaja perlu dibina agar menjalankan hidup sehat lewat pendidikan ketrampilan kehidupan sehari-hari (life-skill education). UKS dapat didukung atau dibina oleh Puskesmas.

Untuk mendukung program Puskesmas, Departemen Kesehatan telah mengembangkan konsep Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) yang proaktif mendorong ketertiban dan kemandirian remaja dalam memelihara dan meningkatkan status kesehatannya. PKPR telah dilaksanakan sedikitnya di 20 propinsi dan akan terus dikembangkan secara bertahap hingga mencakup seluruh Indonesia.

UKS yang titik berat kegiatannya pada upaya promotif dan preventif yang didukung oleh upaya kuratif dan rehabilitatif yang berkualitas, menjadi sangat penting dan strategis untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. pelaksanaan program kesehatan di sekolah melalui UKS dapat memberikan daya ungkit yang nyata karena jumlahnya yang besar, sasarannya mudah dicapai dan sangat cepat dalam menerima informasi dalam pembentukan perilaku hidup bersih dan sehat.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

- Menentukan faktor yang mempengaruhi proses belajar.
 - Mengidentifikasi faktor yang menunjang dan menghambat proses pendidikan kesehatan.
 - Menyimpulkan kebutuhan untuk pendidikan kesehatan dari data yang terkumpul.
2. Tanggung-jawab II : Merencanakan strategi, intervensi, dan program pendidikan kesehatan , dengan enam kompetensi yaitu :
 - Melibatkan masyarakat dan organisasi massa dalam perencanaan program.
 - Menyatukan analisa data dan prinsip organisasi masyarakat.
 - Menyusun tujuan tujuan program yang memungkinkan (appropriate) dan terukur.
 - Membangun suatu rencana cakupan atau lingkup dan sekuens atau urutan untuk pelaksanaan pendidikan kesehatan.
 - Merancang suatu strategi, intervensi, dan program yang konsisten dengan tujuan yang telah ditetapkan.
 - Memilih strategi yang tepat untuk mencapai tujuan.
 3. Tanggung-jawab III : Implementasi strategi, intervensi, dan program pendidikan kesehatan dengan empat kompetensi yaitu :
 - Memulai suatu rencana kerja (Plan of Action)
 - Memperlihatkan sejumlah keterampilan dalam menyampaikan strategi, intervensi, dan program pendidikan kesehatan.
 - Memanfaatkan berbagai metode untuk implementasi strategi, intervensi, dan program.
 - Melaksanakan program pelaksanaan.
 4. Tanggung-jawab IV : Melaksanakan evaluasi dan penelitian yang berhubungan dengan pendidikan kesehatan, dengan enam kompetensi yaitu :
 - Membuat perencanaan untuk evaluasi dan penelitian.
 - Melakukan penilaian (Review) terhadap prosedur penelitian dan evaluasi.
 - Merancang instrumen pengumpulan data.
 - Melaksanakan rancangan evaluasi dan penelitian
 - Menginterpretasikan hasil evaluasi dan penelitian
 - Menganalisa implikasi dari penemuan penelitian pada derajat kesehatan di masa depan dan hal lain yang terkait kesehatan.
 5. Tanggung-jawab V : Mengelola strategi, intervensi, dan program pendidikan kesehatan, dengan empat kompetensi, yaitu :
 - Pelatihan kepemimpinan organisasi.
 - Merencanakan sumber sumber pembiayaan (*Fiscal resources*).
 - Mengelola sumber daya manusia.
 - Mengupayakan penerimaan (*Acceptance*) dan dukungan bagi program.
 6. Tanggung-jawab VI : Berlaku dan bertindak sebagai Narasumber bagi pendidikan kesehatan, dengan empat kompetensi yaitu :
 - Memanfaatkan sumber sumber informasi terkait kesehatan.
 - Tanggap terhadap permintaan informasi kesehatan.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

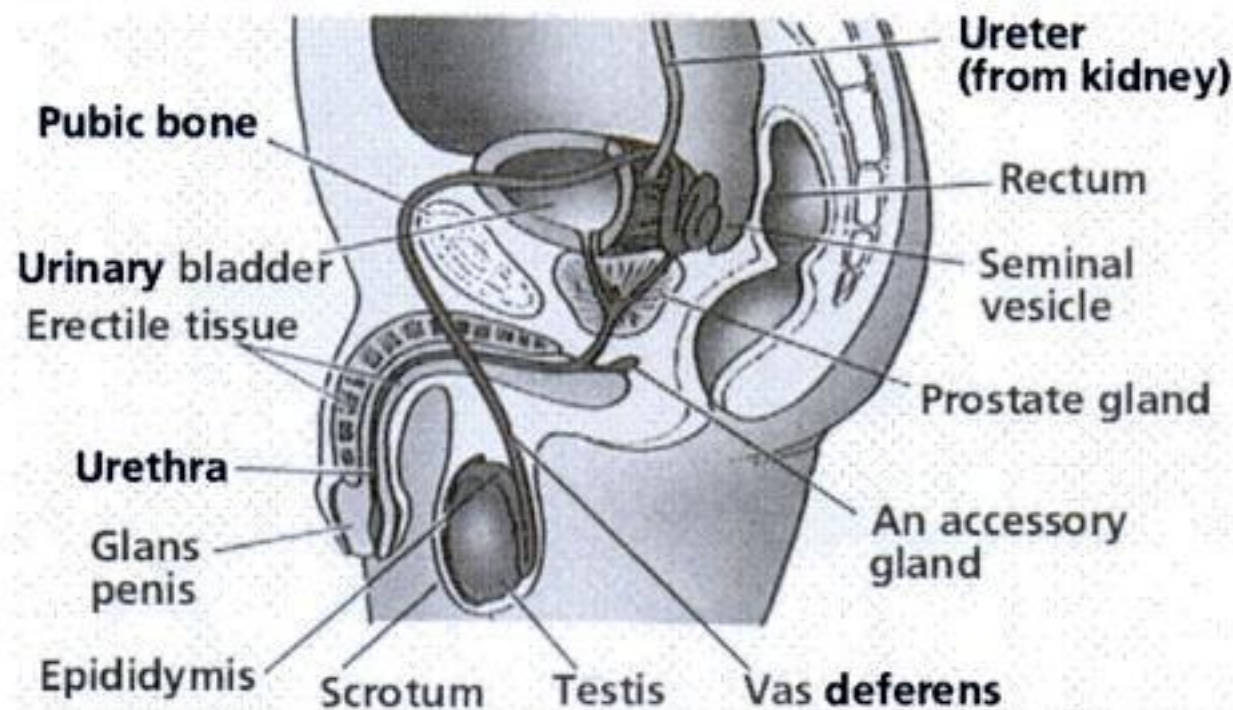


You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

hasil produksi alat kelamin jantan yang terdiri atas sperma bersama-sama dengan cairan hasil sekresi kelenjar-kelenjarnya.



Gambar 1. Alat Reproduksi Pria (penampang membujur)

Spermatogenesis

Proses pembentukan spermatozoa atau spermatogenesis berlangsung di dalam tubulus seminiferus yang terdapat dalam kompartemen di dalam testes. Spermatogenesis diatur oleh hormon gonadotropin, yaitu FSH (*Folicle Stimulating Hormon*) dan ICSH (*Intertitial Cell Stimulating Hormone*), dan testosterone.

Testosteron dihasilkan oleh sel-sel somatis (sel Leydig) yang terdapat di luar lumen tubulus seminiferus. ICSH akan merangsang sel-sel Leydig untuk menghasilkan testosteron, sedangkan FSH merangsang sel-sel somatis lainnya yang terdapat di dalam lumen tubulus yaitu sel Sertoli untuk memproduksi ABP (*Androgen Binding Protein*). ABP berfungsi untuk mengikat dan mengatur masuknya testosterone ke dalam lumen tubulus. Selain itu, sel Sertoli berperan dalam proteksi, pengaturan nutrisi, dan spermatogenesis.

Spermatogenesis pada manusia berlangsung selama 64 hari, dan dimulai setelah pubertas. Spermatogenesis dibagi menjadi tiga tahap utama, yaitu tahap perbanyakan secara mitosis, meiosis, dan tahap spermiogenesis.

Mitosis sel-sel pembentuk sperma (spermatogonia) berlangsung selama hidup di dalam tubulus seminiferus. Letak spermatogonia terkumpul pada tepi luar tubulus seminiferus. Setelah duplikasi DNA, spermatogonia akan berkembang menjadi spermatosit primer dan siap melakukan pembelahan (meiosis I) menjadi dua sel anak yang disebut spermatosit sekunder. Masing-masing spermatosit akan membelah (meiosis II) sehingga menghasilkan empat sel anak yang disebut spermatid. Spermatid merupakan sel yang haploid.

Spermatid mengalami perubahan menjadi spermatozoa, ini disebut spermiogenesis. Pada akhir spermiogenesis akan terbentuk spermatozoa lengkap yang terdiri atas bagian



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



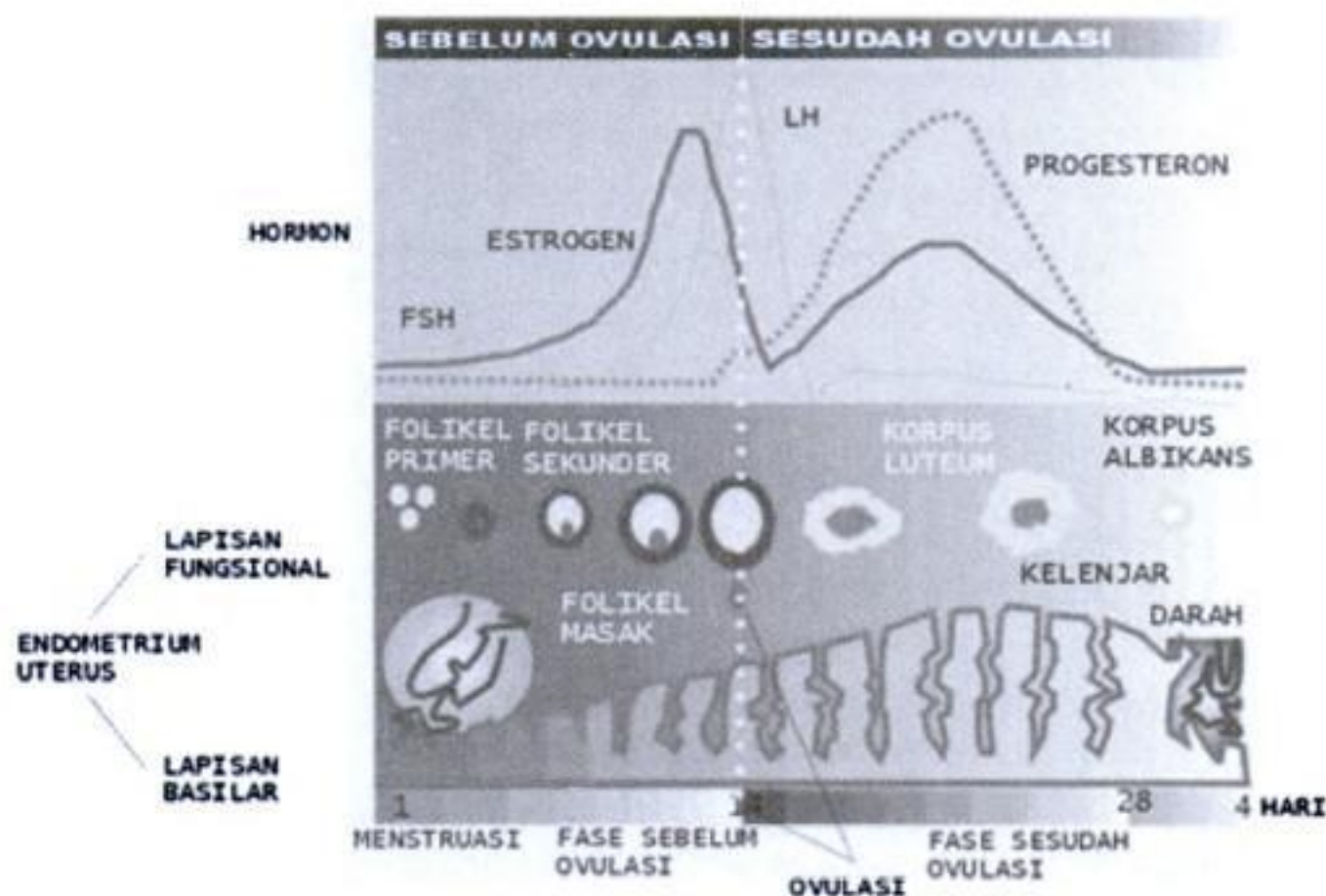
You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Umumnya siklus menstruasi terjadi secara periodik setiap 28 hari (ada pula setiap 21 hari dan 30 hari). Siklus menstruasi dapat diterangkan sebagai berikut. Pada hari 1 sampai hari ke-14 terjadi pertumbuhan dan perkembangan folikel primer yang dirangsang oleh hormon FSH. Pada saat tersebut sel oosit primer akan membelah dan menghasilkan ovum yang haploid. Saat folikel berkembang menjadi folikel de Graaf yang masak, folikel ini juga menghasilkan hormon estrogen yang merangsang keluarnya LH dari hipofisis. Estrogen yang keluar berfungsi untuk merangsang perbaikan dinding uterus yaitu endometrium yang habis terkelupas waktu menstruasi. Selain itu estrogen menghambat pembentukan FSH dan memerintahkan hipofisis menghasilkan LH yang berfungsi merangsang folikel de Graaf yang masak untuk mengadakan ovulasi yang terjadi pada hari ke-14, waktu di sekitar terjadinya ovulasi disebut fase estrus.

Selain itu, LH merangsang folikel yang telah kosong untuk berubah menjadi badan kuning (*Corpus Luteum*). Badan kuning menghasilkan hormon progesteron yang berfungsi mempertebal lapisan endometrium yang kaya dengan pembuluh darah untuk mempersiapkan datangnya embrio. Periode ini disebut *fase luteal*. Selain itu progesteron juga berfungsi menghambat pembentukan FSH dan LH, akibatnya corpus luteum menyusut dan pembentukan progesteron berhenti sehingga pemberian nutrisi pada endometrium terhenti. Endometrium menjadi mengering dan selanjutnya akan terkelupas dan terjadilah perdarahan (menstruasi) pada hari ke-28. Fase ini disebut fase perdarahan atau fase menstruasi. Oleh karena tidak ada progesteron, maka FSH mulai terbentuk lagi dan berlangsung proses oogenesis kembali.



Gambar 5. Siklus Menstruasi



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Pertama, pendidikan dilihat sebagai proses yang berlangsung sepanjang hayat seseorang (sejak lahir sampai mendekati liang lahat). Teori ini sering dipertentangkan dengan teori lain yang mengatakan bahwa pendidikan itu hanya berlangsung sampai seseorang menjadi dewasa, dalam arti bahwa selama seseorang (anak) belum dewasa maka pengaruh dan pengarahan perkembangannya secara etis adalah menjadi tanggung jawab pendidik sampai peserta didik itu sendiri mampu bertanggung jawab sendiri atas perkembangan dirinya. Ia menjadi dewasa pada saat ia secara etis mampu memikul sendiri tanggung jawab atas dirinya. Pada dasarnya, kedua teori itu sebenarnya tidak bertentangan satu dengan yang lain, apabila kita periksa lebih lanjut bahwa keduanya mengakui terjadinya proses belajar yang terus menerus selama hidup. Penganut teori kedewasaan juga mengakui prinsip belajar sepanjang hayat yang meraka namakan pembentukan diri sendiri (*self-vorming*) (Langeveld, 1955).

Kedua, pendidikan dilandasi pandangan yang menganggap manusia sebagai satu keseluruhan yang utuh, yaitu manusia Indonesia seutuhnya, yang keseluruhan segi-segi kemanusiaannya harus dikembangkan secara utuh dan terpadu. Teori pendidikan yang dapat kita namakan holistik seperti ini sering dipertentangkan dengan teori pendidikan yang memandang manusia sebagai sumber daya atau tenaga kerja, dan oleh karena itu sangat menekankan pada fungsi pendidikan untuk menyiapkan tenaga kerja, jadi pendidikan spesialisasi, lebih-lebih dalam dunia yang dikuasai ilmu dan teknologi modern sekarang ini. Sebenarnya, kedua teori itu tidak perlu dipertentangkan apabila kita dapat menerapkan kedua konsep itu secara wajar. Untuk dapat mencapai integritas pribadi yang utuh seorang manusia Indonesia secara pribadi dan sekaligus warga masyarakat dan warga negara, keseluruhan segi kepribadiannya (etis, intelektual, estetis, spiritual, emosional) harus berkembang secara seimbang dan terpadu, dan di samping itu ia harus memiliki keterampilan atau keahlian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan masyarakat. Jadi manusia utuh itu memerlukan juga spesialisasi, yang berarti keduanya saling melengkapi.

Ketiga, pendidikan dilihat sebagai satu sistem di antara sistem-sistem sosial yang lain, dan di atas sistem-sistem itu terdapat supra sistem yaitu kebudayaan, masyarakat dan bangsa Indonesia. Pendidikan tidak bersifat otonom, tetapi tunduk kepada kebutuhan dan tuntutan supra sistem. Pendidikan, dengan demikian, menjadi alat yang secara sengaja dan berencana digunakan untuk mengubah dan memodernisasi masyarakat (*agent of change and modernization*). Kebijakan ini bukanlah hal yang baru tetapi sudah diletakkan sejak Proklamasi Kemerdekaan oleh para pendiri Republik. Konsekuensi dari teori dan kebijakan tersebut ialah setiap terjadi kebijakan umum pemerintah, khususnya perubahan-perubahan politik, akan menyebabkan perubahan kebijakan pendidikan baik secara makro maupun secara mikro.

Keempat, kecenderungan dasar dalam perkembangan ilmu pendidikan Indonesia itu perlu dikembangkan dan dipadukan menjadi ilmu pendidikan yang kukuh dan mantap. Dengan cara itu, ketiga kecenderungan itu tidak hanya menjadi gagasan tambal sulam. Hal ini sangat penting untuk dikembangkan, karena ilmu pendidikan yang dibutuhkan pada dewasa ini bukan saja membahas tuntas pembimbingan individu ke arah perkembangan optimal. Lebih dari itu, ilmu pendidikan harus mampu menjadi landasan bagi pemecahan



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



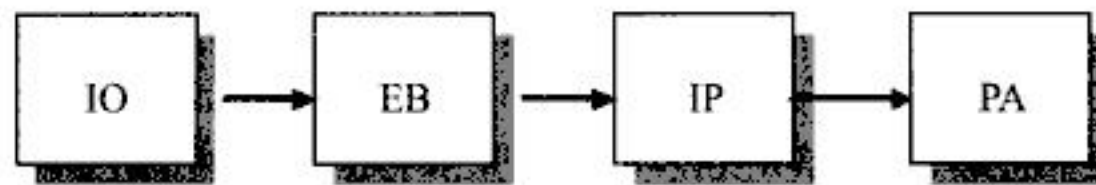
You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



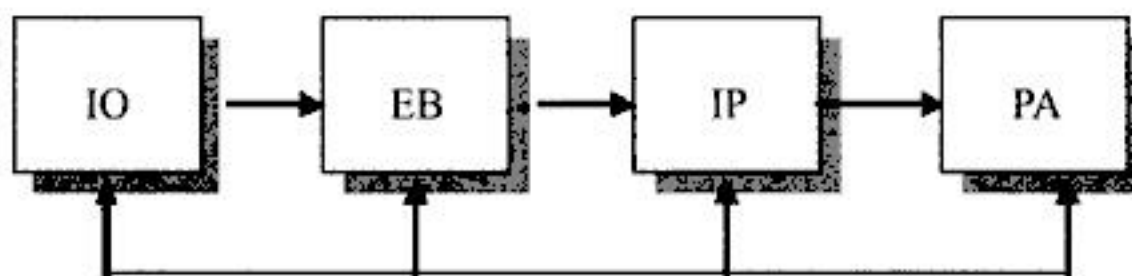
You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Pola dasar mengajar tradisional (Pola Dasar Pokok)

Pola atau model ini merupakan sistem pengajaran yang sangat dasar. Disebut pola dasar mengajar tradisional atau pola dasar pokok (lihat gambar).



Pola dasar tertera di atas terdiri atas 4 (empat) komponen utama yaitu IO (*Instruksional Objectives*), EB (*Entering Behavior*), IP (*Instructional Procedures*) dan PA (*Performance Assessment*). Keempat komponen utama itu dalam urutan menurut anak panah, sehingga apabila seseorang akan mengajar hendaknya menggunakan urutan itu. Lebih lanjut pola dasar mengajar itu mengalami pengembangan yang secara singkat sebagai berikut.



Gambar di atas tampak adanya garis feedbak (umpan balik) dalam komponen penilaian. Sekedar penjelasan singkat terdapat gambar itu di bawah ini diuraikan sebagai berikut.

Kotak pertama, IO atau *instructional objectives* atau tujuan instruksional atau tujuan pengajaran yaitu suatu tujuan yang ingin dicapai dalam suatu pertemuan atau interaksi mengajar belajar. Katanlah tujuan yang ingin dicapai setelah interaksi mengajar belajar selama 2 x 40 menit atau mungkin 20 menit untuk siswa-siswa tertentu dengan topik tertentu, prosedur dan penilaian tertentu. Misalnya setelah terjadi interaksi mengajar belajar tertentu, para siswa kelas II SMP dapat menghitung jarak antara Jakarta – Bandung dalam skala 10.000. Tujuan instruksional ini sudah barang tentu banyak, dari yang sangat sederhana sampai kepada hal-hal yang sangat sukar dan dalam satu pertemuan dapat lebih dari satu tujuan instruksional yang ingin dicapai. Ini mempunyai implikasi bahwa dalam setiap pertemuan atau interaksi mengajar-belajar guru hendaknya mempunyai rumusan instruksional sebelum ia melaksanakan tugasnya mengajar.

Langkah kedua setelah rumusan tujuan instruksional, ialah EB atau *entering behavior* atau pengenalan tingkat perilaku yang telah dimiliki siswa-siswa sebelum pelajaran dimulai. Hal ini berkenaan dengan hal-hal yang telah dipelajari sebelumnya, kesanggupan intelektual, motivasi dan beberapa faktor kebudayaan yang melatarbelakangi kemampuan dan hasil belajar mereka. Secara lebih khusus, dalam tahap kedua ini atau *entering behavior* berkisar antara kemampuan dasar siswa, perbedaan individual dan kesiapan siswa mengikuti pelajaran. Sudah barang tentu semua itu dalam hubungan dengan tujuan instruksional yang telah dirumuskan terlebih dahulu.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Komponen-Komponen beberapa Pola Dasar Mengajar

Pola dasar tradisional	Komputer	Belajar Sekolah	Interaksi
Tujuan instruksional	a. Bidang studi b. Minimal tingkat akhir yang dicapai	Menunjukkan tugas- tugas	Ketentuan hasil interaksi guru, siswa mula-mula
Keadaan siswa sebelum proses pengajaran	a. Tingkat kemampuan b. Pengalaman lalu	a. Intelegensi umum b. Kemampuan c. Ketahanan	Perasaan, harapan, keterangan siswa
Prosedur pengajaran	Fungsi guru	a. Kualitas pengajaran b. Kesempatan waktu belajar	Interaksi guru siswa baik langsung maupun tak langsung
Penilaian perilaku	Kesan guru	Penanganan tugas-tugas	Hasil test prestasi belajar dan pertanyaan sebagai kesimpulan belajar

Pola dasar historis

Pola dasar mengajar secara historis terdiri atas 3 (tiga) bentuk, masing-masing model Socratic, Jesuit dan Cremin.

Pola Socratic

Pola ini dikemukakan oleh James Jordan (1963) untuk menggambarkan teknik Socrates. Ia mulai dengan tuntutan langsung untuk suatu perumusan yang mungkin terdiri dari beberapa konsep untuk kemudian dapat merumuskan salah satu yang paling dirasakan siswa lebih tepat atau sesuai dengan pendirinya. Langkah pertama ini untuk merumuskan tujuan instruksional. Langkah kedua, metode Socrates ini berbentuk dialektis atau tanya jawab. Ketiga, selain dari dialektis juga induktif, yang dimulai dengan perumusan untuk kemudian dianalisa.

Menurut H. Broudy dan J. Palmer (1965) cara Socrates ini merupakan psikologi analisa semacam "love therapy". Inilah yang ia maksud dengan pendidikan yaitu mengadakan pembinaan dengan kesayangan, penuh hormat kepada anak didik.

Sehubungan metode mengajar menurut Jordan, sebenarnya metode Socrates ini semacam pendekatan meneliti (*a method of inquiry*). Metodenya tidak secara eksplisit

merumuskan tujuan instruksional secara spesifik tetapi ia menginginkan menjadikan siswa yang baik sebagai peneliti. Namun demikian tampak pada pola Socrates sangat memperhatikan perilaku siswa sebelum dialog diadakan, prosedur mengajar mendekati pola Flanders atau secara interaksi dan penilaian dalam bentuk rumusan yang cermat dan keberanian mengemukakan suatu pendapat secara konsepsional dengan penggunaan contoh-contoh. Pola ini disebut juga belajar secara menemukan dan belajar konsepsional.

Secara garis besar, pola Socrates ini tidak berapa berbeda dengan Pola Dasar tradisional yang diselenggarakan dalam bentuk dialog yang pada akhirnya diharapkan supaya siswa dapat menemukan sendiri atau memecahkan persoalan sendiri.

Pola Jesuit atau model humanis klasik

Pola ini merupakan sesuatu yang sangat formal. Broudy (1963) menggambarkan pola ini sebagai “master method” yang menekankan kepada penguasaan mengorganisasi bahan pelajaran, metode dan lain-lainnya sebagai suatu sistem yang diragam. Pendekatan ini sebagai hasil masa Renaissance yang memusatkan perhatian kepada bacaan Yunani dulu dan cita-citanya beserta *style* hidup. Manusia terdidik menurut pola ini adalah manusia berbudaya sebagai manusia yang bahagia dalam berbagai dunia kehidupan, misalnya, dagang, suka musik, melukis dan membaca. Tujuan instruksional dalam pola ini ialah penguasaan kecakapan yang tinggi seperti lancar berbicara, menulis, menganalisa dan mengkritik. Siswa memperoleh kecakapan ini dengan menguasai bahasa Latin, logika, filsafat moral, metafisika dan theologi.

Sehubungan dengan pola ini, kurikulum merupakan standar. Seleksi bakat sangat dipentingkan terlepas apakah anak-anak itu berasal dari golongan kaya, miskin, berkedudukan atau orang biasa. Pola ini sangat menekankan pula prosedur mengajar yang baik dengan menggunakan penilaian yang cermat sehingga para siswa benar-benar memiliki kualitas tinggi.

Pola cremin dan penyesuaian hidup

Pola ini dicetuskan tahun 1944 di Amerika Serikat dengan maksud membantu mengembangkan kecakapan para pemuda dalam penyesuaian dengan kehidupan mereka terutama melatih keterampilan untuk memperoleh pekerjaan dalam kehidupan sosial.

Menurut Coombs dan Snygg menyarankan tujuan instruksional secara umum. Sekolah harus memberikan kesempatan yang cukup banyak supaya anak-anak berfikir sendiri, warganegara bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Para siswa atau anak-anak diharapkan dapat menemukan kekuatan dan kelemahannya sendiri untuk sampai kepada kepribadiannya sendiri yang dapat menilai dirinya dan yang lain. Pola ini sejauh mungkin menghindari tujuan instruksional yang sangat khusus. Hal ini berkenaan dengan pendirian bahwa masyarakat selalu berubah dan dalam perubahan-perubahan itulah individu harus dapat menyesuaikan diri secara efektif dan efisien sampai kepada self-esteem (perwujudan pribadi). Ini berarti guru harus kenal betul keadaan siswa sehingga ia dapat



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Paket program VS-A adalah program vokasional untuk lulusan SMU yang tidak melanjutkan dan akan memasuki lapangan kerja. Program VS-B untuk lulusan SLTP yang tidak melanjutkan ke SLTA dan akan memasuki lapangan kerja. Program tersebut diatas sebaiknya berupa modular-modular yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja (*marketable skills*), sehingga lulusannya dapat langsung menerapkannya di lapangan kerja, baik sebagai karyawan maupun usaha mandiri.

Program VS-C adalah untuk siswa yang masih/sedang belajar di SMU/MA, tetapi secara potensial tidak akan melanjutkan studi, sehingga sejak di sekolah sudah mendapat paket program vokasional. Program VS-D berupa pre-vokasional bagi siswa SLTP/MTs yang potensial tidak akan melanjutkan ke SLTA dan memasuki lapangan kerja. Program-program ini idealnya dapat diatur sebagai bentuk mata pelajaran/mata diktat pilihan, sehingga tidak harus menambah beban jam pada kurikulum.

Paket-paket program vokasional tersebut diatas, baik VS-A, VS-B, VS-C dan VS-D, harus dikembangkan melalui suatu *need assesment* secara cermat, sesuai dengan potensi daerah dan pengembangannya. Harus dihindari program yang sekedar melatih keterampilan, tetapi tidak terdapat lapangan kerjanya atau tidak dapat diterapkan sebagai bentuk usaha mandiri. Model yang ditunjukkan pada *Gambar 4* adalah salah satu alternatif. Artinya model tersebut untuk disesuaikan dengan kondisi daerah dan bahkan sangat mungkin dikembangkan model lain yang diyakini cocok dengan situasi daerah tertentu.

Keterpaduan menyelenggarakan PKH

Tidak semua dari anak kita belajar kecakapan hidup dari keluarganya. Kemiskinan, keluarga buruh, lingkungan perumahan yang tidak menunjang dan lingkungan pekerjaan orang tua tidak memungkinkan mereka memberikan pendidikan mengenai kecakapan hidup kepada anak-anaknya. Dalam hal lain perubahan tuntutan dan orientasi dalam kehidupan yang tidak hanya sebatas menjalankan fungsi lama memberikan tugas tambahan kepada sekolah untuk memberikan kecakapan kepada anak-anak.

Pengembangan kurikulum PKH hendaknya dipahami merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pelayanan sosial yang seharusnya diberikan oleh pekerja sosial, pendidikan khusus, bimbingan dan penyuluhan pekerjaan dan umum dan pelayanan psikologis. Kurikulum PKH karenanya harus sejalan dengan pelayanan sosial yang mencakup tugas perkembangan seseorang. Dengan demikian PKH tidak semata menjadi tugas seorang guru akan tetapi merupakan kewajiban dari sistem pelayanan pendidikan pada umumnya. Tugas ini lebih dikenal dengan tim pendidikan berbasis keluaran (*outcome-based education*).

Petugas bimbingan sosial umumnya telah mendapatkan pelatihan, pengetahuan dan pengalaman dalam bekerja dengan perorangan, kelompok dan masyarakat, sehingga pada tempatnya memberikan arahan dalam mewujudkan PKH di sekolah. Sebagai petugas pelayanan, seorang petugas sosial seyogyanya mampu menjalin hubungan antara peserta belajar, sekolah, keluarga dan masyarakat. Sesuai dengan strateginya dalam memberikan masukan, pencegahan dan pengembangan, petugas sosial dapat memberikan masukan



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

2. keterampilan komunikasi dan komunikasi interpersonal. Termasuk dalam keterampilan ini yaitu melakukan komunikasi lisan dan tulisan, aktif untuk menyimak dan kecakapan untuk mengekspresikan dan memberikan umpan balik dari perasaan yang dimilikinya. Dalam kelompok ini termasuk pula kemampuan untuk melakukan negosiasi dan assertiveness yang sangat berpengaruh pada kemampuan untuk melakukan manajemen konflik. Empati yaitu kecakapan untuk mendengarkan dan memahami pihak lain. Keterampilan untuk bekerja dalam kelompok termasuk kecakapan untuk memberikan penghargaan pada pihak lain. Dengan kemampuan ini dimungkinkan seseorang untuk diterima dalam lingkungannya. Melalui keterampilan ini diterima semua aturan yang ada dalam masyarakat yang merupakan dasar untuk pengembangan tahapan berikutnya.
3. Kecakapan dalam melakukan manajemen kehidupan. Termasuk dalam kategori ini yaitu kemampuan untuk melakukan kontrol diri, yang mutlak harus dimiliki individu yang akan membentuk lingkungan dan mempengaruhi perubahan di lingkungannya. Penghargaan diri, kesadaran diri dan kemampuan evaluasi diri dalam menetapkan tujuan kehidupan merupakan bagian utama dari kemampuan mengelola diri. Dalam kemampuan manajemen diri ini dimasukkan pula kebesaran diri dalam menghadapi kehilangan dan adanya trauma. Ada dua hal yang demikian kuat yaitu gangguan stres dan pengelolaan waktu ditambah dengan kemampuan untuk berpikir positif dan teknik untuk rileks.

Dengan menguasai kecakapan hidup seseorang dapat mewujudkan pengembangan kapasitas. Sedangkan pengembangan kapasitas merupakan inti dari pertumbuhan dan pengembangan umat manusia. Pengembangan kapasitas suatu proses yang mendorong dalam pemberdayaan manusia untuk secara aktif membangun masyarakat. Dengan demikian pengembangan kapasitas merupakan aspek yang sangat penting dan merupakan dasar dari pendidikan kecakapan hidup.

Pendidikan kecakapan hidup bertujuan untuk membantu manusia untuk memenuhi kebutuhan agar manusia yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan yang dihadapi dalam kehidupan. Dengan memberikan peluang pada peserta belajar untuk mengembangkan keterampilan mereka bisa mengarahkan diri untuk lebih berhasil dalam menghadapi kehidupan dan permasalahan. Pendidikan kecakapan hidup pada akhirnya bertujuan membantu peserta belajar untuk lebih berdaya serta pada saat yang sama mampu mengembangkan kapasitasnya.

Pendidikan kecakapan hidup pada sisi lain bertujuan untuk merangsang peserta belajar dan mengembangkan keterampilan yang diperlukann kehidupan dan belajar. Kegiatan belajar berikutnya yang sangat dibutuhkan yaitu kemampuan untuk menghadapi peluang dan meningkatkan kualitas hidup dan serta dapat memfungsikan diri secara lebih baik.

Model pengembangan kecakapan hidup

Terdapat taksonomi kecakapan hidup yang umum sebagai pendekatan dan menyederhanakan demikian banyaknya kecakapan hidup. Satu diantaranya pendekatan analitik. Pendekatan ini merupakan perbaikan dari model kecakapan hidup yang dikembangkan pada tahun 1980. Dalam model yang dikembangkan oleh Hopson dan Scally, terdapat empat kategori yaitu: belajar, melakukan hubungan relasional, bekerja dan bermain dan pengembangan diri dan orang lain. Gambaran selengkapnya dari model ini yaitu:

Keterampilan Belajar	Keterampilan menjalin hubungan relasional	Keterampilan bekerja dan bermain	Keterampilan mengembangkan diri dan orang lain
<ul style="list-style-type: none"> • Melek huruf • Kemampuan menghitung • Memperoleh informasi • Belajar dari pengalaman • Menggunakan pendekatan seluruh pikiran • Kemampuan memanfaatkan komputer • Keterampilan belajar 	<ul style="list-style-type: none"> • Memulai dan memelihara hubungan • Berkomunikasi • Kemampuan untuk menjadi sumber • Menjadi anggota yang efektif dalam kelompok • Manajemen konflik • Memberi dan menerima umpan balik • Berkeluarga • Mempengaruhi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan karir, • Pengelolaan waktu, • Pengelolaan keuangan • Kewirausahaan, • Memilih dan menggunakan waktu luang • Persiapan untuk pensiun • Mencari dan mempertahankan pekerjaan • Mengatasi kehilangan pekerjaan, • Mengelola rumah • Menetapkan tujuan dan perencanaan kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki pemikiran positif pada diri sendiri, • Kreatif dalam memecahkan permasalahan • Membuat keputusan • Mengelola stres • Mengelola hubungan sek • Memelihara kesehatan tubuh • Memelihara keutakhiran • Proaktif • Mengelola emosi negatif • Mengungkap minat, nilai dan keterampilan, • Mengungkap rahasia pekerjaan, • Mengembangkan keyakinan diri • Membantu orang lain • Mengembangkan politik diri

Pengelompokan ini hanya salah satu bagian dari model kecakapan hidup. Peneliti lain mengembangkan cara berbeda sampai pada jumlah 300 unsur. Sehubungan dengan demikian beragamnya kecakapan hidup sesuai dengan lingkungan budaya dan sosial, maka inti dari kecakapan hidup yaitu memulai dan meningkatkan fungsi sosial, kesehatan dan kehidupan yang lebih baik. Cakupan selengkapnya Model WHO 1983 adalah sebagai berikut:

- a. pembuatan keputusan,
- b. pemecahan masalah,
- c. berpikir kreatif,
- d. berpikir kritis,
- e. berkomunikasi secara efektif,
- f. hubungan interpersonal,
- g. kesadaran diri,
- h. kecakapan untuk berempati,
- i. menjaga emosi dan
- j. mengelola stres



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

- d. pengembangan identitas, kecakapan diperlukan:
 - 1) pengembangan berkelanjutan dari identitas diri dan kematangan emosional, termasuk mengontrol diri dan memelihara kepercayaan diri,
 - 2) memelihara dan memanfaatkan lingkungan
 - 3) pengembangan peran seks
 - 4) pengembangan makna hidup dan
 - 5) memilih dan menerapkan moral dan nilai

Dasar Pengembangan Kurikulum dan Pengembangan Program

Pengembangan kurikulum dan pengembangan program didasarkan pada prinsip:

- a. tidak mengenal diskriminasi dan komitmen pada tidak membedakan ras dan seks dalam masyarakat, serta tidak pula membedakan mereka yang membutuhkan perhatian khusus,
- b. kesadaran dan penghargaan pada perbedaan, yang lebih menjelaskan bahwa tidak ada diskriminasi berarti juga tidak memberikan perhatian khusus dan konteks lokal. Kurikulum hendaknya dijalin dalam jaringan kerja untuk lebih memahami kehidupan dan pengembangan kecakapan hidup,
- c. menjunjung nilai dan praktek demokrasi, termasuk didalamnya yang berhubungan dengan bagian yang ada dalam sistem (peserta belajar, guru, orang tua dan pemimpin masyarakat) dalam pengembangan dan implementasi kecakapan hidup
- d. kesadaran akan hak dasar manusia dan tanggung jawab dalam masyarakat yang demokratis,
- e. pendekatan multidisiplin, termasuk dalam penggunaan sumber dan dukungan pada pendidikan (termasuk dukungan dari pekerja sosial, dunia kerja, bimbingan dan penyuluhan, pendidikan khusus, dinas kesehatan, pelayanan psikologis) dalam pengembangan kurikulum dan pelayanan,
- f. kebutuhan pengembangan dari anak dan remaja dan dan penilaian semua kebutuhan dimaksud yang berhubungan dengan ranah emosional, sosial, pengetahuan dan fisik dalam pengertian keseluruhan pemahaman.
- g. Kesadaran akan trend dan kebutuhan kontekstual, termasuk memperhatikan isu lingkungan dan global,
- h. Pengembangan identitas nasional dan upaya melakukan rekonsiliasi antar golongan yang semula memiliki kecenderungan tidak memiliki kesetaraan dan sumber kurikulum dan pelaksanaannya,
- i. Pemilahan dan dan termasuk pengintegrasian untuk tujuan khusus dalam cakupan kurikulum umum, untuk menjamin terjadinya keseimbangan dari pendidikan kecakapan hidup dengan menekankan pada kurikulum khusus atau diintegrasikan pada kurikulum yang lebih umum.
- j. Bersifat fasilitatif dalam proses pembelajaran, dimana pendekatan utama menekankan pada penguasaan kompetensi yang telah ditetapkan dan sumber yang memiliki kedekatan dengan peserta belajar maupun masyarakat pada umumnya.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

15. PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN

As'ari Djohar

ABSTRAK

Keragaman pengertian dan segala implikasinya mengenai pendidikan teknologi dan kejuruan di Indonesia, muncul sebagai produk sejarah perkembangan. Pada awal tahun 1950 an sampai dengan tahun 1984 an, yang dimaksud dengan pendidikan teknologi dan kejuruan berkaitan dengan sekolah-sekolah yang menghasilkan lulusan untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja setengah terlatih (semi skilled) tingkat SLTP, dan SMTA yang menghasilkan lulusan yang dibutuhkan untuk tenaga teknisi (technician) menengah/juru. Jenis-jenis sekolah teknologi dan kejuruan sangat beraneka ragam, seperti kelompok program Pertanian, Teknologi dan Industri, Pariwisata dan Kesejahteraan Masyarakat, Bisnis Manajemen, Seni dan Kerajinan, Kelautan dan Teknologi Informasi. Untuk dapat lebih memahami pendidikan kejuruan, perlu dikaji konsep-konsep yang melandasinya dan karakteristiknya. Konsep-konsep yang melandasinya, meliputi : (1) dasar filsafat pendidikan kejuruan, (2) asumsi anak didik, (3) konteks sosial pendidikan kejuruan, (4) dimensi ekonomi pendidikan kejuruan dan (5) pendidikan kejuruan dan ketenaga kerjaan. Karakteristik pendidikan kejuruan, yaitu: aspek orientasi pendidikannya, justifikasi untuk eksistensinya, fokus kurikulumnya, kriteria keberhasilannya, kepekaannya terhadap perkembangan masyarakat, perbekalan logistiknya, dan hubungannya dengan masyarakat dunia usaha.

Pengertian Pendidikan Kejuruan

Dalam pembicaraan sehari-hari terdapat perbedaan yang cukup beragam tentang apa yang dimaksud dengan pendidikan teknologi dan kejuruan. Keragaman pengertian dan segala implikasinya di kalangan masyarakat mengenai pendidikan teknologi dan kejuruan di Indonesia, muncul sebagai produk sejarah perkembangan. Pada awal tahun 1950 an sampai dengan tahun 1984 an, ada semacam pengertian operasional bahwa yang dimaksud dengan Pendidikan Teknologi dan Kejuruan berkaitan dengan sekolah-sekolah yang menghasilkan lulusan untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja setengah terlatih (*semi skilled*) tingkat SLTP yang diharapkan mampu mencapai kualifikasi juru (*craftsman*), dan SMTA Teknologi dan Kejuruan lainnya diharapkan menghasilkan lulusan yang dibutuhkan untuk tenaga teknisi (*technician*) menengah. Jenis-jenis sekolah teknologi dan kejuruan sangat beraneka ragam seperti kelompok program Pertanian, Teknologi dan Industri, Pariwisata dan Kesejahteraan Masyarakat, Bisnis Manajemen, Seni dan Kerajinan, Kelautan dan Teknologi Informasi, namun bila dilihat dari pembinaanya dilakukan oleh suatu direktorat pendidikan kejuruan. Ditinjau dari proses pembinaannya istilah Pendidikan



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

D-4 atau program pendidikan Diploma 4, merupakan suatu pendidikan vokasi atau kejuruan jenjang perguruan tinggi (tingkat tinggi), sedang S-1 merupakan pendidikan akademik.

Demikian halnya dengan program pendidikan S-2 dan S-3, keduanya merupakan pendidikan akademik, walaupun program studi tertentu muatan profesionalnya cukup kuat. Dengan demikian penafsiran bahwa lulusan S-2 atau S-3 sesuatu program studi telah memiliki sertifikat dan kewenangan profesional dalam program studi tersebut, adalah tidak tepat. Seorang pemegang ijazah S-2 atau S-3 dalam sesuatu bidang ilmu tertentu dapat saja dinilai atau mengikuti ujian sertifikat profesi dalam bidang profesi yang terkait, tetapi tidak otomatis memiliki sertifikat profesi. Pendidikan di atas D-4 dan S-1, dibedakan antara pendidikan akademik (S-2 dan S-3) dan pendidikan profesi, profesi guru/dosen, dokter, notaris, akuntan, pengacara, dll. Pada bidang kedokteran, setelah pendidikan profesi dokter ini masih ada pendidikan spesialis-1 dan spesialis-2.

Pendidikan akademik berbeda dengan pendidikan profesi. Pendidikan akademik memusatkan kajiannya pada penguasaan bidang ilmu, teori atau konsep, sedang pendidikan profesi pada penguasaan pengetahuan dan kecakapan atau kompetensi untuk praktik. Pendidikan akademik lebih diarahkan pada menghasilkan ilmuwan, pengkaji dan pengembangan ilmu, sedang pendidikan profesi lebih diarahkan pada menghasilkan tenaga profesional yang memiliki kemampuan, kecakapan atau kompetensi dan kinerja secara standar. Pada akhir pendidikan baik pendidikan akademik maupun pendidikan para mahasiswa dituntut untuk mengerjakan karya akhir. Pada pendidikan akademik karya akhir ini disebut skripsi, tesis atau disertasi yang penulisannya didasarkan atas hasil penelitian (*research based*). Pada pendidikan profesi karya akhir tersebut tidak biasa disebut skripsi, tesis atau disertasi, tetapi sebagai karya akhir, tugas akhir, laporan praktik akhir, dll., yang penulisannya didasarkan atas penanganan atau pemecahan masalah dalam praktik (*problem based*).

Di Amerika Serikat program doktor di bidang pendidikan dipandang sebagai pendidikan profesional, tetapi sifatnya agak berbeda dengan bidang profesi lain. Dalam bidang-bidang lain seperti kedokteran dan hukum pendidikan profesional ini hanya memiliki satu jenis gelar, tetapi dalam bidang pendidikan ada dua gelar, yaitu Ph.D dan Ed.D.

Schools of law offer the J.D. as their terminal professional degree, schools of medicine the M.D., but schools of education have not settled on the single degree. They continue to offer both the Ph.D. and the Ed.D. One might conclude that education holds on to both degrees because there are fundamental differences between the purposes for each degree- the Ed.D. for those preparing to serve as educational practitioners and the Ph.D. for those who plan to emphasize research and join university faculties (Osguthorpe, R.T and Wong, M.J. 1993).



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

tahun 2007. Dimensi kompetensi dan rumusan kompetensi inti guru pada jenjang PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA.MAK sama, tetapi rincian kompetensi untuk masing-masing jenjang tersebut berbeda disesuaikan dengan karakteristik dan tuntutan pada masing-masing jenjang.

Kompetensi Inti Guru

Kompetensi Pedagogik

1. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional dan intelektual.
2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
3. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.
4. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.
5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran.
6. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.
7. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.
8. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
9. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.
10. Melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

Kompetensi kepribadian

1. Bertindak sesuai dengan norma, agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia.
2. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat.
3. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa.
4. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri.
5. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

Kompetensi sosial

1. Bersikap inklusif, bertindak obyektif serta tidak diskriminatif, karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi.
2. Berkomunikasi secara efektif, simpatik dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat.
3. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya.
4. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan, dan tulisan atau bentuk lain.

Kompetensi profesional

1. Menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang ditempuh.
2. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang ditempuh.
3. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.
4. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

Sebelum lahirnya rumusan kompetensi guru dalam Permen tersebut, telah ada beberapa usulan dari berbagai pihak. Salah satu usulan yang diajukan kepada Mendiknas melalui Dirjen Dikti Depdiknas adalah usulan dari Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (ALPTK).

ALPTK adalah asosiasi dari 12 LPTK eks IKIP yang telah berubah menjadi universitas dan merupakan lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tenaga kependidikan. ALPTK dalam kongresnya di Bandung tanggal 19 – 21 Januari 2006 dan ditindaklanjuti dalam Rapat Kerja di Surabaya tanggal 26-28 Januari 2007 telah merumuskan keempat kompetensi (dimensi kompetensi) guru, dalam rumusan sebagai berikut:

1. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan dalam mengelola pembelajaran peserta didik, yang meliputi: (a) pemahaman peserta didik, (b) perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, (c) evaluasi pembelajaran dan (d) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
2. Kompetensi kepribadian merupakan penguasaan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia.
3. Kompetensi sosial merupakan kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik/tenaga kependidikan lain, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.
4. Kompetensi profesional merupakan kemampuan dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi.

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dalam beberapa rapat kerjanya menjabarkan lebih lanjut hasil kongres dan rapat kerja ALPTK tersebut, sebagai sosok utuh kompetensi guru dengan rumusan sebagai berikut.

1. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan dalam:
 - a. Penguasaan ilmu pendidikan, yang meliputi: penguasaan landasan pendidikan, perkembangan peserta didik, dan cara-cara membimbing peserta didik.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

departemen saja, selain didukung oleh departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen juga oleh masyarakat. Untuk itu perlu adanya kemitraan antar departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen dengan masyarakat. Sejalan dengan ini Jalal Fasli dan Supriadi Dedi (2001: 193) mengemukakan: “Kemitraan antara pemerintah dan masyarakat yang telah dilakukan oleh pendidikan luar sekolah baik dengan organisasi penyelenggara kursus, lembaga swadaya masyarakat, maupun tokoh-tokoh masyarakat bisa berjalan dengan baik karena didasari oleh semangat T = Together, yaitu kebersamaan, E = Empathy, yaitu saling bisa merasakan, A = Assist, yaitu membantu, M = Maturity, yaitu bersikap dewasa, W = Willingness, yaitu kemauan untuk saling memberi dan mengerti, O = Organization, yaitu tertata dan terkelola dengan baik, R = Respect, yaitu saling menaruh rasa hormat, K = Kindness, yaitu suatu niat atau itikad yang baik, dilakukan dengan baik untuk hal-hal baik, bermakna bagi masing-masing pihak. Dengan semangat itu pulalah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan nasional guna dapat menunjang tujuan nasional pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional senantiasa bekerja sama dengan Departemen lain dan Lembaga Pemerintah Nondepartemen.

Jalur, jenjang dan jenis Pendidikan Kedinasan

Jalur pendidikan kedinasan

Jalur pendidikan kedinasan terdiri dari pendidikan formal dan non formal yang diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka.

- a. Dalam dunia pendidikan di Indonesia memang ada alternatif yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kompetensi sumber daya manusia, yakni melalui pendidikan tinggi umum. Namun harus digaris bawahi bahwa fungsi, tujuan dan keberadaan dari institusi pendidikan ini amat sangat berbeda dengan fungsi, tujuan dan keberadaan Pendidikan Tinggi Kedinasan. Fungsi, tujuan dan keberadaan pendidikan tinggi umum diperuntukkan bagi masyarakat umum yang belum bekerja, sehingga kurikulum dan proses pembelajarannya pun amat sangat berbeda, yaitu lebih menekankan pada aspek kognitif dan afektif ketimbang aspek psikomotorik yang mengarah pada tuntutan pasar. Sedangkan untuk Pendidikan Tinggi Kedinasan, keberadaannya diperuntukkan bagi para pegawai dan calon pegawai negeri yang telah bekerja di lingkungan departemen dan LPND dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur sehingga mampu melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di instansinya masing-masing. Dalam kondisi seperti itu maka kurikulum dan proses pembelajarannya pun berbeda dengan sistem pendidikan tinggi umum, dimana penekanannya terfokus pada aspek psikomotorik dan kognitif ketimbang aspek afektif.

Esensi perbedaan tersebut mengisyaratkan bahwa pendidikan kedinasan tetap menjadi alternatif utama bagi aparatur negara jika mereka hendak mengembangkan atau meningkatkan kompetensinya.

Yang menjadi persoalannya adalah bahwa sistem pendidikan nasional dalam UU No.20/2003, seakan menyempitkan fungsi dan peran pendidikan kedinasan yang



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

- (g) Diklat Bendahara Pengeluaran;
- (h) Diklat Bendahara Penerimaan;
- (i) Diklat Pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja;
- (j) TOT Out Bound;
- (k) TOT Kewidyaiswaraan;
- (l) Diklat Tata Naskah;
- (m) Diklat Prajabatan CPNS Golongan I, II dan Golongan III
- (n) Diklat Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- (o) Diklat Analisis Kebutuhan Pegawai;
- (p) Diklat Analisis Jabatan;
- (q) Diklat Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- (r) Diklat Pembentukan Auditor Terampil;
- (s) Diklat Penilaian Angka Kredit Medis dan Paramedis;
- (t) Diklat Penilaian Angka Kredit Guru; dan lain-lain..

Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan

1. Badan Pendidikan dan Pelatihan di tingkat pusat
2. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan di Tingkat Regional dengan wilayah kerja meliputi beberapa provinsi. Contoh di Departemen Dalam Negeri ada Unit Pelaksana Teknis ini disebut dengan istilah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri Regional atau Pusdiklat Depdagri Regional. Sehingga memungkinkan ada beberapa Pusdiklat Depdagri Regional. Seperti dilingkungan Departemen dalam Negeri ada empat Pusdiklat Regional yaitu Pusdiklat Regional Bukittinggi, Bandung, Yogyakarta dan Pusdiklat Regional Makasar. Pembagian wilayah kerja tersebut misalnya untuk Regional Bandung meliputi Provinsi Lampung, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Pusdiklat Regional berada dan bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri. Sesuai dengan Kepmendagri No. 29 Tahun 2001 tanggal 20 Juli 2001 Pusdiklat Depdagri Regional mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan aparatur pusat dan daerah serta anggota dewan perwakilan rakyat daerah, provinsi, kabupaten dan kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Pusdiklat Depdagri Regional mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan Program Pendidikan Dan Pelatihan;
- b. Pelaksanaan Pembelajaran dan Pelatihan serta Bimbingan Teknis Pendidikan, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional;
- c. Pelaksanaan Pembelajaran dan Pelatihan serta Bimbingan Teknis Pendidikan dan Pelatihan Bidang Diklat Struktural.
- d. Pelaksanaan urusan Tata Usaha Kepegawaian, Keuangan, Administrasi Umum, Perpustakaan, Perlengkapan Sarana Pendidikan dan Pelatihan serta Rumah Tangga.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

- a. Peserta diklat ditugaskan oleh pembina kepegawaian instansi/pejabat yang secara fungsional mempunyai otoritas pengembangan dan promosi jabatan (Kepala Biro Kepegawaian Instansi).
- b. Memenuhi persyaratan golongan/pangkat tertentu.
- c. Usia sesuai dengan ketentuan/ peraturan perundang-undangan kepegawaian yang berlaku.
- d. Menguasai Bahasa Inggris minimal pasif dan memiliki skor TOEFL tertentu.
- e. Lain-lain persyaratan yang ditentukan oleh instansi yang bersangkutan.

Jumlah dan Komposisi Peserta

Jumlah dan peserta Diklatpim untuk setiap kelas diupayakan maksimal 40 orang. Peserta berasal dari Instansi Lembaga Penyelenggara Diklat yang bersangkutan dan dari instansi Pusat dan Daerah lainnya, yang dikoordinasikan oleh Instansi pembina.

Prosedur seleksi

- a. Seleksi bagi peserta diklat jabatan didasarkan pada tersedianya formasi jabatan struktural sesuai dengan eselon tertentu. Berdasarkan formasi jabatan struktural tersebut Pembina Kepegawaian instansi membuat edaran yang ditujukan kepada unit kerja lainnya yang memuat rencana seleksi peserta diklat. Selanjutnya, setiap unit secara selektif mengirimkan calon peserta kepada Pembina Kepegawaian Instansi.
- b. Untuk melaksanakan seleksi calon peserta diklat, masing-masing instansi membentuk Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi (TSPDI) sesuai ketentuan dalam pedoman Umum Penyelenggaraan Diklat Jabatan Pegawai Negeri Sipil pasal 13 ayat (3), Keputusan Ketua LAN Nomor 304A/IX/6/4/1995.
- c. Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi (TSPDI) bersama-sama Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Instansi menyampaikan rekomendasi tentang calon peserta Diklat berdasarkan seleksi administrasi dan seleksi akademis kepada Pejabat Pembina Pegawai Instansi.
- d. Peserta diklat diprioritaskan bagi yang telah menduduki jabatan struktural sesuai Diklatpim yang akan diselenggarakan.
- e. Bagi yang diproyeksikan menduduki jabatan pada eselon sesuai peruntukan Diklatpim yang akan diselenggarakan harus memperhatikan formasi jabatan struktural tersebut yang tersedia.
- f. Pembina Kepegawaian Instansi menetapkan peserta diklat dalam bentuk surat keputusan penetapan peserta diklat.
- g. Selanjutnya penyelenggaraan diklat memanggil peserta untuk mengikuti diklat berdasarkan surat keputusan Pembina Kepegawaian Instansi.

Mata Pelajaran atau mata Pendidikan dan Pelatihan

Mata pelajaran pada pendidikan dan pelatihan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari beberapa mata pelajaran. Kelompok-kelompok tersebut adalah:



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

- a) Sejauh mana penataan diklat telah dilaksanakan dengan baik
- b) Tersusunnya seluruh dokumen dan bahan diklat dalam satu file.

Penilaian terhadap penyelenggara dilakukan oleh widyaiswara dan peserta diklat. Hasilnya diolah dan disimpulkan oleh penyelenggara sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan penyelenggaraan program diklat yang akan datang dan van akreditasi Lembaga Diklat.

d. Evaluasi Pasca Diklat

- 1) Setelah penyelenggaraan diklat berakhir dilakukan evaluasi pasca diklat terhadap kemampuan dan pendayagunaan alumni, yaitu :
 - a) Kemampuan dan pendayagunaan alumni;
 - b) Sejauhmana para alumni mampu menerapkan pengetahuan dan kemampuan dalam pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan dalam jabatan yang dipangkunya.
 - c) Sejauhmana para alumni didayagunakan potensinya baik dalam jabatan fungsional maupun jabatan struktural.
- 2) Evaluasi tersebut dilakukan oleh penyelenggara diklat bekerjasama dengan unit yang bertanggungjawab dibidang kepegawaian instansi.
 - a) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada a, b, c, dan d diatas disampaikan oleh penyelenggara kepada Pimpinan Instansi selain disampaikan kepada Instansi Pembina dan instansi pengendali yang berisi.
- 3) Data singkat penyelenggaraan diklat yang dianggap penting yang disampaikan pada setiap akhir tahun.
- 4) Masalah-masalah pokok yang mendasar (apabila ada) dalam setiap penyelenggaraan diklat untuk segera mendapatkan pembinaan oleh Instansi Pembina

e. Sertifikasi dan penghargaan antara lain:

- 1) Kepada peserta pendidikan dan pelatihan yang telah menyelesaikan seluruh program dengan baik dan dinyatakan lulus, diberikan Izasah untuk pendidikan profesional dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) untuk peserta diklat.
- 2) Bagi peserta diklat yang mendapat predikat “Pujian” diberikan penghargaan dalam bentuk piagam oleh Lembaga Administrasi Negara melalui prosedur sebagai berikut:
 - (a) Kepala Unit Penyelenggara Diklat melaporkan tentang identitas diri dan bukti-bukti yang terdiri dari :
 - Identitas diri peserta yang diajukan
 - Program diklat yang diikuti
 - Angkatan dan waktu penyelenggaraan
 - Nilai akhir yang dicapai sehingga lulus dengan predikat “Pujian”
 - Berita Acara Penilaian



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

kompetensi pegawai pada tingkatan yang sama pada setiap instansi sehingga memudahkan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dilapangan.

Penutup

Pemerintah telah membagi habis tugas dan fungsinya kepada Departemen-departemen, Kantor Menteri Negara, dan Lembaga Pemerintah Nondepartemen. Fungsi dan tugas dari setiap departemen dan LPND adalah sebagai operasionalisasi tugas dan fungsi dari Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Dalam perjalanannya, tugas dan fungsi Departemen/LPND semakin kompleks. Kompleksitas tugas dan fungsi itu menuntut dilakukannya *recruitment* dan pengembangan serta peningkatan kualitas sumber daya aparturnya. Konsekuensinya diperlukan lembaga-lembaga pendidikan yang memberikan bidang keilmuan dan keterampilan secara khusus sesuai kebutuhan Departemen / LPND tersebut. Ada beberapa hal lain yang menyebabkan kondisi tersebut terjadi:

- a. Setiap Departemen / LPND mempunyai kekhususan fungsi dan tugasnya, yang pada akhirnya menyebabkan pada perbedaan kompetensi sumber daya aparatur yang dibutuhkan.
- b. Kebutuhan tersebut akan dapat diatasi apabila setiap Departemen/LPND diberi kebebasan dalam menentukan kriteria kompetensi SDM yang diperlukan dan ditambah dengan pembekalan sejumlah keahlian, kemampuan dan keterampilan sesuai dengan kompetensi Departemen/ LPND tersebut.
- c. Keilmuan dan keterampilan yang dihasilkan oleh pendidikan formal tidak secara langsung mendukung kebutuhan, tugas dan fungsi dari departemen / LPND tersebut.
- d. Terdapatnya tanggung jawab atau kewajiban dari setiap Departemen/LPND untuk mengembangkan kemampuan/kompetensi setiap sumber daya aparturnya, yang biasa dikenal sebagai fungsi kepegawaian.
- e. Peluang tersebut telah dibuka dengan hadirnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Beranjak dari pemikiran tersebut bahwa saat ini hampir setiap Departemen / LPND menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sendiri, baik jenis pendidikan formal maupun nonformal. Pendidikan formal ditandai dengan berdirinya sejumlah pendidikan tinggi yang disebut dengan Pendidikan Tinggi Kedinasan. Sedangkan pendidikan nonformal ditandai dengan berdirinya sejumlah Badan dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Bandiklat/ Pusdiklat), baik yang jenisnya kepemimpinan, fungsional maupun teknis. Sehingga patut diakui bahwa secara kuantitas kelembagaan dan urgensinya jenis pendidikan kedinasan tersebut sampai saat ini tetap berdiri dan beroperasi.

Melihat kenyataan tersebut maka dapatlah disimpulkan bahwa keberadaan dan fungsi dari lembaga pendidikan kedinasan tersebut cukup penting untuk mendukung penguatan kualitas sumber daya manusia aparatur.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

sering dipandang sebagai lebih otoritatif dibandingkan dengan transmissi secara tertulis. Hal ini adalah karena, tradisi hapalan melibatkan transmisi secara langsung; melalui seaman, untuk selanjutnya direkam, dan siap direproduksi. Dengan begitu, ilmu yang diterima betul-betul *fi al-shudur*, yang pada gilirannya dapat mencegah santri dari terkena “buta huruf fungsional” (*functional illiterate*) yang umum menghinggapi anak-anak sekolah yang bertumpu pada penguasaan kognitif belaka. (Steenbrink, 1974)

Semua faktor inilah yang mendorong santri melakukan perjalanan keilmuan (*rihlah ilmiah*) ke pesantren lain, untuk belajar dengan kiai-kiai lainnya. Dengan melakukan rihlah ilmiah, santri bukan hanya dapat memperkaya ilmunya sendiri dan sekaligus pengalaman hidupnya, tetapi bahkan memungkinkan terjadinya proses pertukaran keilmuan (*scholarly exchanges*), yang pada gilirannya mendorong terjadinya pengayaan dunia keilmuan di lingkungan pesantren secara keseluruhan. Di sini para santri sekaligus menjadi “pialang” ilmu (*scholarly brokers*) yang menerima, melakukan *scholarly exchanges*, untuk kemudian menyebarkannya kepada khalayak ramai. Karena itu, fenomena (cenderung) santri sangat instrumental bagi pembentukan tradisi dan transmisi keilmuan Islam di Indonesia. (Azra, Ibid.; Dawam Rahardjo, 1982: 20)

Sebelum munculnya kelembagaan pendidikan modern Islam di Indonesia tradisi rihlah ilmiah ini merupakan salah satu karakter penting dalam dinamika keilmuan Islam di Indonesia. Dengan introduksi dan penyebaran sekolah dan madrasah modern, maka tradisi rihlah ilmiah juga memudar, yang pada gilirannya mengakibatkan terputusnya “pertukaran-pertukaran keilmuan” (*scholarly exchanges*) yang intens di kalangan masyarakat Muslim secara keseluruhan. (Steenbrink, 1984: 149-162)

Tenaga Pendidik Pesantren: Kiai

Sebutan untuk tokoh kharismatik masyarakat Islam tradisional Jawa, bertindak sebagai pemimpin keagamaan masyarakat tradisional. Kiai merupakan sentral kepatuhan, panutan masyarakat dalam mekanisme kehidupan sosial budayanya dan menjadi tokoh universal yang terpadu dalam dirinya kepemimpinan spiritual dan duniawi. Kiai sebagai pemimpin pesantren mempunyai keahlian masing-masing yang menjadi pemikat santri untuk datang belajar kepadanya. Kekuatan dan kharisma keilmuan kiai setara dengan wibawa dan kepakaran seorang guru besar di universitas yang menjadi pemikat mahasiswa untuk datang belajar kepadanya.

Bagi pesantren salaf pada umumnya mengajarkan ilmu agama Islam. Ilmu yang dikaji bersumber dari berbagai kitab klasik berbahasa Arab karya para ulama, dikenal dengan sebutan kitab kuning, tujuan pendidikan pesantren diarahkan membentuk sosok pribadi yang tahu aturan, tahu hukum-hukum (*alim*) dan mampu mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan kesehariannya (*amil*) atau juga manusia (yang ber-akhlak karimah, *shaleh* serta menguasai ilmu pengetahuan agama *Tafaquh fi ad-din*). Profil pribadi yang hendak diwujudkan adalah juga profil kiai.

Berangkat dari pola dasar pendidikan pesantren, selain semangat belajar yang mewujudkan dinamika internal dalam kehidupan pesantren, faktor figur kiai sangat dominan.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

menemukenali fungsi-fungsi dan cara bekerja alam semesta serta menemukan kegunaan dan manfaat seluruh ciptaan Allah, sehingga semua yang mereka lihat, pikirkan, dan renungkan itu diciptakan Allah tidak sia-sia, melainkan mempunyai nilai guna dan manfaat bagi kehidupan manusia.

Juga ulul albab mencakup ulama dan cendekiawan. Istilah ulu al-albab sangat populer di lingkungan cendekiawan muslim sebagai simbol dari manusia yang utuh dan unggul, di satu pihak menguasai iptek dan di lain pihak juga memiliki imtaq.

Di Indonesia, titel kiai diberikan oleh masyarakat. Mungkin saja seorang yang bukan lulusan pesantren, jika mampu memperlihatkan pengetahuan keagamaannya dan mampu pula memimpin berbagai ritus keagamaan atau melakukan khutbah, dipanggil kiai atau ulama. Tetapi di Iran, ulama melalui proses pendidikan formal pada lembaga-lembaga pendidikan yang diakui, seperti seminari di lingkungan Katolik atau Kristen.

Seorang yang telah lulus dari madrasah tingkat dasar (*moqaddamat*), menengah (*sat'h*), dan tinggi (*kharej*) berhak atau akan mendapatkan titel *Saqat-u 'l-Islam*. Setelah diakui kemahirannya sebagai ahli fiqh, dalam arti bisa melakukan analisa dan keputusan hukum, disebut *Hujjat-u 'l-Islam*. Lebih tinggi dari itu, jika telah mampu berpikir filosofis (*'irfan*), berhak mendapat titel *Ayat-u 'l-Lah*. Mereka yang berhak memberi titel adalah otoritas keagamaan yang disebut *Marja al-Taqlid*. Mereka itu dapat dipanggil sebagai *Ayat-u 'l-lah Uzma*, seperti misalnya Syari'at Madari, Muthahhari, atau Ayat-u 'l-lah Khumaini.

Ulama adalah pewaris Nabi. Tetapi yang diwariskan itu adalah misinya, yakni misi Islam, termasuk di dalamnya segala visi-visi al-Qur'an. Dalam sejarah, ulama memang telah menjalankan amanah Nabi tersebut, yakni menyebarkan dan melestarikan ajaran Islam kepada umat manusia. Ulama adalah penafsir al-Qur'an dan Sunnah Rasul, yang menghasilkan rumusan dan bahasan sistematis tentang agama. Ulama telah menciptakan *body of knowledge* keagamaan melalui karya-karya tulis. Berkat karya-karya tulis itulah dilangsungkan pendidikan dari generasi. Ulama berperan sangat penting dalam menyelenggarakan pendidikan yang mewariskan ilmu keislaman dari generasi ke generasi.

Pola Pembelajaran Pesantren

Fungsi utama pesantren, secara mendasar, adalah sebagai lembaga yang bertujuan mencetak muslim agar memiliki dan menguasai ilmu-ilmu agama (*tafaqquh fi al-din*) secara mendalam serta menghayati dan mengamalkannya secara ikhlas semata-mata ditujukan untuk pengabdian kepada Allah Swt. Dengan kata lain, tujuan pesantren adalah mencetak ulama (ahli agama) yang mengamalkan ilmunya serta menyebarkan dan mengajarkan ilmunya itu pada orang lain.

Pesantren yang dapat dikategorikan sebagai pendidikan informal, umumnya menggunakan kitab-kitab yang secara langsung membahas *aqidah* atau keimanan, *syariah* (ketentuan-ketentuan agama) dan *bahasa Arab*; antara lain *al-Qur'an* dengan *tajwid* dengan tafsirnya (interpretasi), *aqaid* dan *ilmu kalam*, *fiqh* (hukum Islam), *ushul fiqh* (sistem hukum Islam), *hadits* (tradisi Rosulullah Muhammad Saw.), dan *bahasa Arab*

memberikan kepercayaan diri, kemampuan berpikir, kedewasaan berpikir dan membantu menemukan jati diri, yang kemudian melahirkan sikap atau jiwa mandiri (kemandirian) yang dilengkapi pula oleh nilai-nilai mental yang baik. Hal ini sesuai dengan jiwa pesantren yang telah menumbuhkan kemandirian santri dengan menciptakan suasana yang menunjang perkembangan rasa percaya diri serta harga dirinya dengan leluasa. Dengan demikian kemandirian santri sebagai peserta didik dapat tumbuh dan berkembang dengan suasana dan kondisi lingkungan seperti digambarkan di atas.

Dalam pola pembelajaran di pesantren, yang menjadi penanggung jawab utama sekaligus pelaksana pembelajaran dan pengajaran adalah para kiai dan ustadz. Kegiatan pembelajaran yang berlangsung bukan hanya berupa perpindahan ilmu pengetahuan dan pelatihan keterampilan tertentu, tetapi yang utama adalah juga penanaman dan pembentukan nilai-nilai tertentu yang secara simultan dan seimbang diberikan kepada para santrinya. Oleh karena itu, para santri selain hidup dalam situasi sosial dan kekeluargaan selama dua puluh empat jam, siang dan malam, mereka juga senantiasa berada dalam suasana pendidikan di bawah bimbingan langsung kiai dan para ustadz.

Secara lahiriah, pola pembelajaran di pesantren seperti ini merupakan kegiatan pengajian kitab-kitab, namun secara batiniah mengandung muatan nilai-nilai pendidikan yang sangat penting bagi pembentukan karakter santri di kemudian hari. Hubungan kiai-santri juga membentuk hirarki jalinan kekerabatan murid-guru yang berlangsung bukan hanya selama mereka ada di pesantren, tetapi juga kelak setelah keluar dan hidup di masyarakat.

Kurikulum Pesantren

Dalam bahasa Arab, kata kurikulum dapat diterjemahkan dengan istilah *manhaj* yang berarti jalan yang terang, atau jalan yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupan (Toumy al-Syaibany, t.t.:478).

Istilah “kurikulum” dalam pendidikan pesantren dapat mengalami perluasan atau pengembangan makna, sejalan dengan dinamika pesantren di tengah-tengah proses transformasi masyarakat yang bergerak dari pola kehidupan tradisional menuju masyarakat maju (modern). Proses perkembangan ini menurut Djamar (1992) telah membawa corak pendidikan pesantren yang semakin beragam dewasa ini. Dari sudut ini pemaknaan terhadap arti dan fungsi kurikulumnya pun menjadi turut beragam.

Fenomena seperti di atas jelas menunjukkan bahwa arti dan fungsi kurikulum di pesantren sekaligus menunjukkan adanya proses belajar mengajar. Proses belajar di pesantren mengikuti pola pendidikan yang dapat diidentifikasi dari teori-teori pendidikan behavioristik. Dari sudut kurikulum, teori pendidikan ini cenderung memperlakukan bentuk atau model kurikulum transmisi seperti yang dikenal dengan istilah “*competency based*” (Schmider, 1973); (Hall, 1976: 1), atau pun “*mastery learning*” (Carrol, 1963); (Bloom, 1968) (Novak dalam *Science Education*, 1979: 201). Tampaknya, pola-pola pengajaran seperti itu tidak sejalan dengan sistem pemahaman agama di pesantren yang oleh Mastuhu (1991) disebut berhaluan *fiqh-sufistik*. Pemahaman agama yang bercorak *fiqh-sufistik* ini bernaung di bawah aliran *Ahlussunnah wal Jama'ah* di pesantren.

Dari kedua faktor di atas terlihat bahwa pesantren dan masyarakat lingkungannya selalu dapat memelihara hubungan-hubungan yang harmonis, menyatu antara satu dengan lainnya. Dari kacamata pemikiran kurikulum ini dapat ditafsirkan sebagai upaya pesantren untuk menempatkan kurikulumnya dalam konteks budaya dan proses perkembangan masyarakatnya. Untuk itu, dari kedua sisi (masyarakat dan pesantren) dapat ditunjukkan adanya tudingan dari sementara orang yang mengatakan pesantren lambang keterbelakangan, itu juga berarti tudingan terhadap masyarakatnya sendiri yaitu refleksi dari lambang keterbelakangan. Alasannya adalah pesantren pada umumnya berlokasi di pedesaan, dan santri-santrinya pun hampir semuanya dari orang-orang pedesaan (Dawam Rahardjo, 1985). Bertolak dari kenyataan yang demikian jika ada kalangan yang ingin mengangkat pesantren bertindak sebagai “agen perubahan” bagi masyarakat, itu adalah hal yang sangat wajar. Akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa pesantren tidak akan dapat bertindak lebih jauh sebagai “agen perubahan” jika masyarakatnya sendiri belum siap untuk menerimanya.

Transformasi masyarakat pedesaan ini menjadi “aset” baru bagi dunia pesantren, terutama untuk mendapatkan calon santri yang sudah sedikit mengenal kemajuan, modernisasi, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Kiai Saifuddin Zuhri melihat bahwa proses kemajuan dan modernisasi tersebut secara gradual memasuki pesantren. Untuk nilai-nilai positif yang berkembang di luar pesantren dapat berkembang di pesantren; dari nilai semangat kebangkitan nasional sampai ke nilai-nilai yang bersifat politis. Nilai-nilai ini semua diperoleh melalui adopsi media cetak sampai media elektronik. Namun, terhadap nilai-nilai ini, pesantren tidak larut menerimanya. Pesantren memiliki daya tahan untuk menyaring nilai-nilai positif yang turut berkembang di dalam arus modernisasi tersebut (Zuhri, 1974: 58). Jadi, kedudukan pesantren yang juga disebut sebagai “subkultur” dari kultur masyarakat (Abdurrahman Wahid dalam Dawam Rahardjo, 1985; Greg Barton, 1999: 359), tetap mampu menempatkan dirinya di tengah-tengah arus perubahan, tanpa mengorbankan identitas diri yang sudah dimilikinya.

Pemikiran kurikulum di pesantren dapat dikaitkan dengan hubungan-hubungan harmonis dan terpadu antara pesantren di satu pihak dan kehidupan lingkungan masyarakat di lain pihak. Sama halnya seperti yang dilakukan pada Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah 1994, menurut Hasan (1995) telah diupayakan untuk menempatkannya pada konteks yang berkesesuaian dengan kehidupan budaya dan masyarakat Indonesia.

Dari pandangan di atas dapat diketahui bahwa pemikiran kurikulum pesantren ini antara lain dicirikan melalui pemaduan antara kutub kiai dan santri. Kurikulum ini tidak hanya ditujukan untuk kepentingan kiai dalam mengembangkan aktivitas pengajaran, tetapi juga menekankan untuk kepentingan santri dalam aktivitas belajarnya. Dari segi lain, pemikiran kurikulum pesantren dalam kehidupan lingkungannya seperti “ikan dengan air” dalam arti; menyatu, harmonis, dan konsisten. Kurikulum tidak dimaknai sebagai sesuatu yang asing dalam konteks kehidupan lingkungannya seperti “air dengan minyak” dalam arti; tidak dapat menyatu, harmonis dan konsisten didalamnya.

Melihat kepada makna kurikulum pesantren yang demikian, maka pada awalnya setiap kurikulum selalu terpadu dengan budaya dan kehidupan lingkungannya. Dimaksudkan

dengan pengertian kurikulum di sini tidak hanya terbatas pada “written curriculum”, tetapi juga yang bersifat “hidden curriculum”. Sebagai konsekuensinya, pihak pengembang dan pelaksana kurikulum harus bekerja secara ekstra untuk memadukan kembali kurikulum itu sesuai dengan konteks budaya dan kehidupan lingkungannya.

Dalam pasca modern ini tuntutan terhadap perluasan makna pendidikan pesantren semakin mendesak, sehingga ketidaksinambungan di dalam kurikulumnya pun semakin besar pula terjadi. Akan tetapi masalah ini dapat diantisipasi atas bantuan perubahan pemikiran terhadap kurikulum, ide-ide serta praktek-praktek baru kurikulum yang dikembangkan sebagai sebuah sistem pendidikan pesantren hingga dapat beradaptasi untuk memperkuat tradisi dan nilai spiritual pesantren.

Materi Pembelajaran Pesantren

Pola pembelajaran yang berlangsung dalam sebuah pesantren adalah cukup beragam antar satu pesantren dengan pesantren lainnya. Walaupun demikian, semuanya mempunyai fungsi yang sama yakni untuk mendidik dan mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam sebagai upaya mewujudkan manusia yang *tafaquh fi al-din*. Selain itu, kesamaan lainnya adalah penggunaan mata aji yang diajarkan di pesantren. Hampir seluruh, untuk tidak mengatakan semua, pesantren yang ada di Indonesia mengajarkan mata aji yang sama yang dikenal dengan ilmu-ilmu keislaman yang meliputi al-Qur'an (Tajwid, Tafsir dan Ilmu Tafsir), al-Hadits, Aqidah/Tauhid, Akhlak/Tasawuf, Fiqh dan Ushul Fiqh, Bahasa Arab (Nahwu, Sharaf, Mantiq dan Balaghah) serta Tarikh (Sejarah Islam).

Mata aji ilmu-ilmu ini diajarkan di pesantren melalui kitab-kitab standar yang disebut *al-kutub al-qadimah*, karena kitab-kitab tersebut dikarang lebih dari seratus tahun yang lalu. Ada juga yang menyebutkannya sebagai *al-kutub al-shafra'* atau ‘kitab kuning’ karena biasanya kitab-kitab itu dicetak di atas kertas berwarna kuning, sebagaimana yang lazim tersedia pada waktu itu. Ciri lain dari kitab yang diajarkan di pesantren adalah berhuruf Arab *gundul* (huruf Arab tanpa *harakat* atau *syakal*). Diyakni bahwa *al-kutub al-qadimah* itu jumlahnya sangat banyak, namun yang dimiliki oleh para kiai dan diajarkan di pesantren di Indonesia adalah kitab-kitab yang umumnya merupakan karya ulama-ulama madzhab Syafi'i.

Penjenjangan materi pengajian

Tidak seluruh kitab keislaman yang beredar di kalangan pesantren diajarkan kepada santri. Kebanyakan, bahkan hanya merupakan bacaan ustadz dan kiai sebagai pengkayaan bahan aji. Terkadang, sebagian diantaranya didiskusikan secara terbatas diantara mereka. Untuk para santri, kitab yang diajarkan disampaikan secara bertingkat, yakni untuk tingkat pemula (*awaliyyah*), tingkat menengah (*wustha*) dan untuk tingkat tinggi (*'aly*). Terkadang, tingkatan ini juga ditentukan berdasarkan pola penyajian kitab itu sendiri yaitu pola *matan*, *syarah*, dan *khaisiyah*. *Matan* adalah kitab yang menyajikan materi pokok awal baik dengan cara esai (*natsr*) maupun dengan sair (*syi'r*). Sedangkan *syarah* merupakan kitab ‘komentar’ dari kitab *matan*, dan *khaisiyah* merupakan komentar dari komentar. Pola lain dalam penyajian kitab yang tampaknya memperkuat kecenderungan pembagian tingkatan itu adalah adanya kitab-kitab jenis *muhtashar* yang merupakan

ini terbagi pada tingkat permulaan, menengah dan tinggi. *Ibadah* biasanya diberikan pada tingkat permulaan, sedangkan *Mu'amalat* diberikan pada tingkat menengah. Tingkat tinggi mempelajari masalah *Munakahat* dan *Jinayat*. Selain itu, pada tingkat tinggi biasanya dilakukan perluasan wawasan dengan menjangkau pula fiqh-fiqh dari berbagai madzhab.

Ushul Fiqh

Selain Fiqh, pesantren juga memberikan mata aji Ushul Fiqh. Ilmu ini berkaitan dengan dasar-dasar dan metode untuk menarik sebuah hukum (*istinbath*). Fiqh pada tataran tertentu adalah produk, prosesnya dicakup dalam Ushul Fiqh.

Al-Qur'an (Tafsir)

Secara garis besar, *Tafsir* terbagi menjadi dua: *Tafsir bi al-ra'yi* (tafsir dengan rasio) dan *Tafsir bi al-ma'tsur* (tafsir yang menitikberatkan pada penggunaan ayat-ayat lain, hadits Nabi dan pendapat sahabat). Dalam pengajaran tafsir, penekanan utama diberikan pada: Pertama kemampuan mengetahui kedudukan suatu kata dalam struktur kalimat (*i'rab*) serta mengetahui dan membedakan makna *mufradat* (pengertian kata-kata) ayat-ayat al-Qur'an baik ditinjau dari segi morfem (*sharaf*) maupun persamaan makna katanya (*muradif*). Kedua, *asbabun nuzul*, *makkiyah-madaniyah* serta *nasikh* dan *mansukh* suatu ayat. Ketiga, kandungan utama ayat itu secara tekstual maupun kontekstual sehingga santri menemukan relevansi ayat itu dalam realitas kehidupan. Keempat, perbandingan penjelasan makna ayat-ayat al-Qur'an dengan kitab tafsir lain. Kelima, pada beberapa pesantren tertentu, kitab tafsir yang dibaca ditekankan pada kitab tafsir yang bercorak hukum (*tafsir ahkam*).

Ilmu Tafsir

Tidak banyak pesantren yang mengajarkan Ilmu Tafsir, kecuali pada pesantren-pesantren yang memiliki kekhususan al-Qur'an. Ilmu ini bermanfaat untuk mengetahui tentang al-Qur'an dan sangat berguna sebagai alat Bantu dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an.

Hadits

Pengajian Hadits pada tingkat awal biasanya bertujuan untuk memperkenalkan Hadits secara tidak langsung. Yang lebih ditonjolkan adalah kandungan materinya. Oleh karenanya yang diajarkan adalah Hadits-hadits pendek. Konsentrasi pengajiannya terpusat pada matan dan dengan pembahasan yang sederhana saja, sesuai dengan kemampuan santri pada tingkat ini. Pada tingkat *wustha* perhatian kepada sanad hadits mulai ditekankan, begitu juga terhadap *rijal al-haditsnya* dengan tetap memberikan perhatian pada kandungan matan. Pada tingkat *'Aly*, pengajian hadits benar-benar telah memasuki tahap lengkap, yang meliputi pengetahuan tentang sanad dan variasi sanadnya, sosok dan karakter perawinya, cara periwayatannya serta matan dan variasinya, berikut *asbab al-wurudnya* dan materi kandungannya.

Ilmu Hadits

Beberapa pesantren baru mengajarkan Ilmu Hadits pada tingkat menengah. Tujuan pengajian Ilmu Hadits di pesantren pada tingkat menengah dan tingkat tinggi adalah agar para santri mengetahui seluk beluk Hadits, dari mulai posisinya sebagai sumber hukum, sejarah penulisannya, kualitas dan jenis-jenisnya yang baik dilihat dari segi matan, sanad atau keduanya, kitab-kitabnya, perawi-perawinya dan seterusnya. Pada tingkat tinggi, biasanya juga ditambah dengan keterampilan *takhrij al-Hadits*, yaitu keterampilan untuk menetapkan metode-metode yang ada. Dengan kemampuan *takhrij* ini diharapkan santri dapat melakukan kajian mandiri mengenai status dan kualitas hadits.

Tarikh (Sejarah Islam)

Tujuan dari pembelajaran *Tarikh* ialah untuk mengenal secara kronologis pertumbuhan dan perkembangan umat Islam semenjak masa Rasulullah hingga masa kehidupan Turki Utsmani. Pada tingkat awal, materi yang diberikan biasanya dibatasi hingga hanya pada masa Rasulullah. Sejarah masa masa Khulafa al-Rasyidin baru diberikan pada tingkat menengah. Pada tingkat tinggi, materi biasanya dimulai dari sejak awal hingga masa temporer, namun tekanannya tidak terbatas pada fakta sejarah, namun menjangkau makna di balik fakta itu.

Metode Pembelajaran Pesantren

Secara etimologis, metode berasal dari kata 'met' dan 'hodes' yang berarti melalui. Sedangkan kata istilah metode adalah jalan atau cara yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan pembelajaran berarti kegiatan belajar-mengajar yang interaktif yang terjadi antara santri sebagai peserta didik (*mu'allim*) dan kiai atau ustadz di pesantren sebagai pendidik (*mu'allim*) yang diatur berdasarkan kurikulum yang disusun dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, yang dimaksud dengan metode pembelajaran adalah cara-cara yang mesti ditempuh untuk kegiatan belajar mengajar antara santri-kiai untuk mencapai tujuan tertentu.

Metode pembelajaran di pesantren ada yang bersifat tradisional, yaitu metode pembelajaran yang diselenggarakan menurut kebiasaan-kebiasaan yang telah lama dipergunakan pada institusi pesantren atau merupakan metode pembelajaran asli pesantren. Ada pula metode pembelajaran yang bersifat baru (*tajdid*). Metode pembelajaran yang bersifat baru merupakan metode pembelajaran hasil pembaharuan kalangan pesantren dengan mengintrodusir metode-metode yang berkembang di masyarakat modern. Walaupun tidak mesti, penerapan metode baru juga diikuti dengan pengambilan sistem baru, yaitu sistem sekolah klasikal. Pesantren, pada mulanya sebenarnya telah mengenal sistem klasikal, tetapi tidak dengan batas-batas fisik yang lebih tegas seperti pada sistem klasikal yang diterapkan di sekolah atau madrasah modern. Berikut adalah metode-metode pembelajaran yang bersifat tradisional dan menjadi *trade mark* pesantren.

Metode sorogan

Metode Sorogan merupakan kegiatan pembelajaran bagi para santri yang lebih menitikberatkan pada pengembangan kemampuan perseorangan (individu) di bawah bimbingan seorang ustadz atau kiai. Pembelajaran dengan sistem sorogan ini biasanya

dianggap penting dan dapat membantu memahami teks. Posisi para santri pada pembelajaran dengan menggunakan metode ini adalah melingkari dan mengelilingi kiai atau ustadz sehingga membentuk *halaqah* (lingkaran). Dalam penterjemahannya kiai atau ustadz dapat menggunakan berbagai bahasa yang menjadi bahasa utama para santrinya, misalnya: kedalam bahasa Jawa, Sunda atau bahasa Indonesianya.

Sebelum dilakukan pembelajaran dengan menggunakan metode bandongan, seorang kiai atau ustadz biasanya mempertimbangkan jumlah jamaah pengajian, penentuan jenis dan tingkatan kitab yang dipergunakan, metode pembelajaran serta media pengajaran yang paling efektif.

Metode musyawarah

Metode musyawarah atau dalam bahasa lain *bahtsul masa'il* merupakan metode pembelajaran yang lebih mirip dengan metode diskusi atau seminar. Beberapa orang santri dengan jumlah tertentu membentuk *halaqah* yang dipimpin langsung oleh seorang kiai atau ustadz atau mungkin juga santri senior untuk membahas atau mengkaji suatu persoalan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, para santri dengan bebas mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau pendapatnya. Dengan demikian, metode ini lebih menitikberatkan pada kemampuan perseorangan dalam menganalisis dan memecahkan suatu persoalan dengan argumen logika yang mengacu pada kitab-kitab tertentu. Musyawarah juga dilakukan untuk membahas materi-materi tertentu dari sebuah kitab yang dianggap rumit untuk memahaminya. Musyawarah pada bentuk kedua ini bisa digunakan oleh santri tingkat menengah untuk membedah topik materi tertentu.

Untuk melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode musyawarah, kiai atau ustadz biasanya mempertimbangkan kondisi peserta, apakah awal, menengah atau tinggi selain juga topik atau persoalan (materi) yang dimusyawarahkan.

Metode pengajian pasaran

Metode pengajian pasaran adalah kegiatan belajar para santri melalui pengkajian materi (kitab) tertentu pada seorang ustadz yang dilakukan oleh sekelompok santri dalam kegiatan yang terus menerus (maraton) selama tenggang waktu tertentu. Tetapi umumnya pada bulan Ramadhan selama setengah bulan, dua puluh hari, atau terkadang satu bulan penuh tergantung pada besarnya kitab yang diaji. Pada kenyataannya, metode ini lebih mirip dengan metode bandongan, tetapi pada metode ini target utamanya adalah 'selesai'.

Pengkajian pasaran banyak dahulu dilakukan di pesantren-pesantren tua di Jawa dan dilakukan oleh kiai-kiai senior di bidangnya. Titik beratnya pada pembacaan, bukan pada pemahaman sebagaimana metode bandongan. Sekalipun dimungkinkan bagi para pemula untuk mengikuti pengajian ini, namun pada umumnya pesertanya terdiri dari mereka-mereka yang telah belajar atau membaca kitab tersebut sebelumnya. Kebanyakan pesertanya justru para kiai dan ustadz yang datang dari tempat-tempat lain yang sengaja datang untuk itu. Dengan kata lain, pengajian ini lebih banyak mengambil *berkah* atau *ijazah* dari kiai-kiai yang dianggap senior.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

mengembangkan konten materi ajar menggunakan lebih dari satu teknologi. Oleh karena itu diperlukan adanya sertifikat yang menggambarkan kemampuan yang mereka miliki setelah melalui pendidikan khusus untuk itu.

Dalam pengembangan desain ADEC (2007:1-2) yang berkenaan dengan konten bahan ajar mengemukakan prinsip-prinsip berikut ini:

- The learning experience must have a clear purpose with tightly focused outcomes and objectives
- The learner is actively engaged
- The learning environment makes appropriate use of a variety media
- Learning environments must include problem-based as well as knowledge-based learning
- Learning experiences should support interaction and the development of communities of interest
- The practice of distance learning contributes to the larger social mission of education and training in a democratic society

Persyaratan-persyaratan tersebut memperlihatkan bahwa kualitas belajar yang dikehendaki sangat ditentukan oleh kualitas konten bahan ajar, aktivitas peserta didik, dan kebermaknaan konten bahan ajar dengan lingkungan. Konten bahan belajar yang bersifat pengetahuan bukan ditinggalkan sama sekali tetapi yang harus dipilih adalah yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Konten bahan belajar yang berisikan problem solving dan berkenaan dengan masyarakat lebih diutamakan.

Implementasi adalah kegiatan sama rumitnya dengan kedua kegiatan terdahulu. Dalam implementasi PJJ berkaitan dengan kesiapan lembaga yang mengembangkan dan mengendalikan program, melaksanakan proses pembelajaran tetapi juga berkenaan dengan kesiapan peserta didik, dan ketersediaan teknologi dan kemampuan menggunakan teknologi tersebut. Jika modul yang digunakan dalam pengembangan konten materi ajar maka ketersediaan teknologi lain dan kemampuan menggunakan modul di pihak peserta didik tidaklah menjadi masalah besar. Karakteristik modul sebagai "printed material" tidak jauh berbeda dari buku dan sumber-sumber tertulis lainnya. Akan tetapi hal tersebut berbeda jika teknologi yang digunakan adalah komputer dan "computer-based technology" seperti internet, tele-conference dan lainnya. Peserta didik harus memiliki perangkat teknologi dan mampu menggunakannya. Dalam penelitian yang dilakukan Enochsson (2005) untuk mampu menggunakannya peserta didik harus memiliki pengetahuan tentang teknologi yang digunakan, berbagai cara mencari sumber informasi, dan cara kerja perangkat yang digunakan.

Tentu saja bukan kepemilikan perangkat yang penting tetapi aksesibilitas peserta didik terhadap penggunaan perangkat yang lebih utama, peserta didik yang memiliki perangkat teknologi memiliki kesempatan yang lebih luas dalam belajar. Analogi antara mereka yang memiliki buku dibandingkan mereka yang tidak memiliki buku dalam pengajaran tradisional merupakan sesuatu yang cukup "fair" dimana peserta didik yang



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

pada tahun 1965; gelar Magister Pendidikan dari IKIP Bandung pada tahun 1984; dan gelar Doktor dari IKIP Bandung pada tahun 1996.

Mohammad Ali

Prof. Dr. Mohammad Ali, M.Pd, MA adalah Guru Besar pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Memperoleh gelar Sarjana Pendidikan dari IKIP Bandung pada tahun 1979, gelar Magister Pendidikan dari Fakultas Pascasarjana IKIP Bandung pada tahun 1988, gelar Master of Arts dari University of Pittsburgh, USA pada tahun 1990, serta pernah mengikuti Training of Trainers di Ohio State University, Columbus, USA pada tahun 1993; dan memperoleh gelar Doktor dari Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor pada tahun 1999.

Mohammad Djawad Dahlan

Prof. Dr. Mohammad Djawad Dahlan adalah Guru Besar pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Memperoleh gelar Sarjana Pendidikan dari FKIP Universitas Padjadjaran pada tahun 1963 dan gelar Doktor dari IKIP Bandung pada tahun 1982.

Muchammad Imam Faisal Baihaqi

Drs. M.I.F. Baihaqi, M.Si adalah Staf Pengajar pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Memperoleh gelar Sarjana Pendidikan dari IKIP Bandung pada tahun 1986; gelar Magister Sains dalam bidang Psikologi dari Universitas Padjadjaran, Bandung pada tahun 2001.

Mulyani Sumantri

Prof. Dr. Mulyani Sumantri, M.Sc.Ed adalah Guru Besar pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Memperoleh gelar Sarjana Pendidikan dari IKIP Bandung pada tahun 1968. gelar Master of Science in Education dari Indiana University, Bloomington, USA pada tahun 1981; memperoleh Education Specialist dari universitas yang sama pada tahun 1982 dan gelar Doktor juga dari Indiana University, Bloomington USA pada tahun 1983.

Munir

Dr. Munir, M.IT., adalah Staf Pengajar pada Jurusan Pendidikan Ilmu Komputer Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia. Memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Ekonomi dari IKIP Bandung pada tahun 1992, gelar Master of Information Technology dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Malaysia pada tahun 1997. dan Gelar Doktor (Doctor of Philosophy) dalam bidang Information Technology dari universitas yang sama pada tahun 2001.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Suryadi

Suryadi, S.Pd, M.Pd adalah Staf Pengajar pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Memperoleh gelar Sarjana Pendidikan dari IKIP Bandung pada tahun 1995 dan gelar Magister Pendidikan dalam bidang Administrasi Pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2007.

Suwarma Al Muchtar

Prof. Dr. Suwarma Al Muchtar, SH., M.Pd., adalah Guru Besar pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Memperoleh gelar Sarjana Pendidikan dari IKIP Bandung pada tahun 1977, gelar Sarjana Hukum dari Universitas Islam Nusantara Bandung pada tahun 1977, gelar Magister Pendidikan dari IKIP Bandung pada tahun 1987; dan gelar Doktor dalam bidang Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dari IKIP Bandung pada tahun 1990.

Syamsulhadi Senen

Drs. Syamsulhadi Senen, MM., adalah Staf Pengajar pada Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Ekonomi dari IKIP Bandung pada tahun 1980 dan gelar Magister Manajemen dari Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2003. Saat ini sedang menyelesaikan pendidikan S3 dalam bidang Ekonomi/Manajemen Bisnis di UNPAD.

Syamsu Yusuf LN

Prof. Dr. Syamsu Yusuf LN, M.Pd adalah Guru Besar pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan dari IKIP Bandung pada tahun 1982; gelar Magister Pendidikan dari IKIP Bandung pada tahun 1989; dan gelar Doktor dalam bidang Bimbingan dan Konseling dari IKIP Bandung pada tahun 1998.

Udin Syaefudin Sa'ud

Drs. Udin Syaefudin Sa'ud, M.Ed., Ph.D adalah Staf Pengajar pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Memperoleh gelar Sarjana Pendidikan dari IKIP Bandung pada tahun 1980, gelar Master of Education dalam bidang Administrasi Pendidikan dengan konsentrasi Principalship dari The University of British Columbia, Vancouver, Canada pada tahun 1988, dan gelar Doktor (Doctor of Philosophy) dari Ohio State University dalam bidang Manajemen Pengembangan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Guru pada tahun 1998.

Ugi Suprayogi

Dr. Ugi Suprayogi, M.Pd adalah Staf Pengajar pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Memperoleh gelar Sarjana dari Sekolah Tinggi Kesejahteraan



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

ILMU & **APLIKASI** **PENDIDIKAN**

Klarifikasi tentang hakekat ilmu dan aplikasi pendidikan sangat dibutuhkan oleh berbagai pihak, terutama para praktisi dan pengambil kebijakan yang terkait dengan pendidikan. Hal ini disebabkan di satu sisi bidang pendidikan secara formal sudah menjadi salah satu bidang profesi yang memerlukan landasan keilmuan yang kokoh, sedangkan di sisi lain telah terjadi kecenderungan distorsi konsep dan penyederhanaan aplikasi pendidikan di lapangan.

Buku *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan* mengkaji secara komprehensif dan integral tentang pendidikan sebagai suatu disiplin ilmu. Kajian tentang teori dan konsep yang terkait dengan pendidikan, berbagai disiplin ilmu lain yang melandasinya, serta aplikasinya dalam berbagai aspek, bidang, dan konteks termuat dalam buku ini. Pemahaman tentang hal ini semua merupakan prasyarat yang harus dimiliki oleh siapa pun yang menjalani profesi dalam bidang pendidikan dan siapa pun yang ingin memajukan pendidikan.

Buku ini juga diharapkan mampu menjembatani keberlanjutan pewarisan ilmu pendidikan kepada generasi penerus melalui upaya: 1) rekonstruksi ilmu pendidikan sebagai bentuk otonomi ilmu dasar dari teori-teori terpadu tentang pendidikan, 2) penafsiran arah baru perkembangan ilmu pendidikan praktis di era otonomi daerah dan era globalisasi, 3) pemilah-milahan misi dan tugas pendidikan untuk meningkatkan kualitas manusia dan karakter bangsa, 4) reformulasi fungsi pengajaran dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pemasaran oleh:



PT Gramedia Widiasarana Indonesia
Korpas Gramedia Building
Jl. Palmerah Barat No. 33-37, Jakarta 10270
Telp. (021) 536 50110 - 536 50111
Fax: ext. 3315/3327/3303
www.grasindo.co.id

Photo by Olivanders

Buku ini telah Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan Sebagai Sumber Belajar di Sekolah Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 1581 K/A8.2/LL/2008



Penerbit
PT IMPERIAL BHAKTI UTAMA
Jl. Titian Kencana C. 1 No. 15 Perum Kopo Kencana
Lingkar Selatan - Bandung 40234
Telp. 022-6074612 Fax. 022-6031455

ISBN 9789790258815



GW1 209 0309 0378

Bahan dengan hak cipta